



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Buku XVII
RPIW Provinsi Jawa Barat



Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025-2034 **Jawa Barat**





**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

- 37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
- 38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN



DODY HANGGODO

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PU. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PU terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PU. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PU. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PU dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PU berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PU bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, Juli 2025
Menteri Pekerjaan Umum

Dody Hanggodo

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



BOB ARTHUR LOMBOGIA
Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PU yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PU, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PU dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PU. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PU periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PU yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PU diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PU terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, Juli 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Bob Arthur Lombogia



Tim Pengarah:

Bob Arthur Lombogia
Airlangga Mardjono
Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Tim Penyusun:

Bernadi Haryawan
Entatarina Simanjuntak
Raymond Tirtoadi
Zulhilmi Bangkit H.
Dewangga Megaloka
Vera Azizah Adryawning
Cyrilus Aghista Cecarian Roby
Safira Az Zahra Pramaishma M.
Aghnia Khairani Nurhadi
Budi Prasetyo Nugroho

Tim Peninjau:

Citra Fadhilah Utami



Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum
Gedung G BPIW – Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12110
www.bpiw.pu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR PETA	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan dalam Kebijakan	2
1.3. Urgensi Penyusunan	3
1.4. Muatan RPIW	3
1.5. Manfaat RPIW	4
1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	5
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN	7
2.1. Kebijakan Penataan Ruang.....	7
2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	7
2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa–Bali	8
2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	10
2.1.4. RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	10
2.2. Kebijakan Sektor	11
2.2.1. Visi Indonesia 2045	11
2.2.2. Asta Cita.....	12
2.2.3. RPJMN 2025 – 2029	13
2.2.4. PSN.....	14
2.2.5. RIPIN Tahun 2015 - 2035	15
2.2.6. RIPPARNAS Tahun 2010 – 2025.....	16
2.2.7. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021.....	17
2.2.8. RPJMD Provinsi Jawa Barat.....	18
2.2.9. Visium PUPR 2030	19
2.2.10. Rencana Strategis Kementerian PUPR (2020–2024)	20
2.3. Agenda Global.....	21
2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur	22
2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	22
2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PU Prioritas.....	27
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH.....	31
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan.....	31
3.1.1. Profil Administrasi.....	31
3.1.2. Profil Topografi.....	34
3.1.3. Profil Geologi.....	34
3.1.4. Profil Klimatologi.....	35
3.1.5. Profil Hidrologi	35
3.1.6. Jasa Ekosistem.....	35
3.1.7. Tutupan Lahan	37
3.1.8. Kerawanan Bencana	43
3.2. Profil Demografi	47
3.2.1. Kependudukan	47

3.2.2.	Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	48
3.2.3.	Pengangguran	50
3.2.4.	Kemiskinan	50
3.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia	51
3.3.	Profil Ekonomi	52
3.3.1.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	52
3.3.2.	Pendapatan Perkapita	53
3.3.3.	Sektor Ekonomi Unggulan	53
3.3.4.	Perkembangan Investasi	64
3.3.5.	Kapasitas Fisikal Daerah (KFD)	66
3.4.	Profil Sosial dan Budaya	67
3.5.	Profil Interaksi Antarkawasan	68
BAB 4	PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR	71
4.1.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	71
4.1.1.	Infrastruktur Penyediaan Air Baku	73
4.1.2.	Infrastruktur Penyediaan Irigasi	74
4.1.3.	Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	76
4.2.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	81
4.2.1.	Infrastruktur Jaringan Jalan	81
4.2.2.	Infrastruktur Jembatan	83
4.3.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	86
4.3.1.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Minum	88
4.3.2.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sanitasi	89
4.3.3.	Penanganan Kawasan Kumuh	91
4.1.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Prasarana Strategis	94
4.1.1.	Infrastruktur Sarana Pendidikan	94
4.1.2.	Infrastruktur Dukungan Perekonomian	94
4.1.3.	Infrastruktur Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	95
4.2.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PU	101
4.2.1.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan	101
4.2.2.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan	104
4.2.3.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Energi	105
4.2.4.	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	105
BAB 5	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	110
BAB 6	SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH	125
6.1.	Proyeksi Pertumbuhan	125
6.1.1.	Proyeksi Demografi	125
6.1.2.	Proyeksi Ekonomi	127
6.1.3.	Keberlanjutan Lingkungan	131
6.2.	Visi dan Strategi	132
6.2.1.	Perumusan Visi Wilayah	132
6.2.2.	Penyusunan Strategi Fokus Industri	132
6.2.3.	Penyusunan Strategi Fokus Pertanian	139
6.2.4.	Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata	144
6.2.5.	Penyusunan Strategi Fokus Pelayanan Dasar Perkotaan	149
6.3.	Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)	154
6.3.1.	Penentuan Kawasan Prioritas	155
6.3.2.	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas	160
BAB 7	ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	165

7.1.	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah	165
7.1.1.	Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Barat	165
7.1.2.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri	178
7.1.3.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian	195
7.1.4.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata	199
7.1.5.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan	214
7.2.	Analisis Keterpaduan Infrastruktur	245
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		252
8.1.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PU	252
8.1.1.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur SDA	252
8.1.2.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	264
8.1.3.	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman	279
8.2.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur	293
8.2.1.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri	295
8.2.2.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian	299
8.2.3.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata	305
8.2.4.	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar	310
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW		317
9.1.	Latar Belakang	317
9.2.	Tujuan	317
9.3.	Jenis Pemantauan dan Evaluasi	318

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Jawa Barat	17
Tabel 2.2	Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024	20
Tabel 2.3	Arahan Agenda Global untuk Provinsi Jawa Barat	21
Tabel 2.4	Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi Jawa Barat	24
Tabel 2.5	Infrastruktur PU Prioritas Provinsi Jawa Barat	29
Tabel 3.1	Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019	37
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat	47
Tabel 3.3	Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat	48
Tabel 3.4	PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat	53
Tabel 3.5	Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat	59
Tabel 3.6	Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Barat	60
Tabel 3.7	Interaksi Antara Metropolitan dan KSPN di Provinsi Jawa Barat	69
Tabel 4.1	Infrastruktur Bendungan di Provinsi Jawa Barat	74
Tabel 4.2	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Barat	75
Tabel 4.3	Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Jawa Barat	77
Tabel 4.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Prioritas Provinsi Jawa Barat	78
Tabel 4.5	Ruas Tol sudah Beroperasi 2024 di Provinsi Jawa Barat	82
Tabel 4.6	Ruas Tol Akan Beroperasi di Provinsi Jawa Barat	83
Tabel 4.7	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Provinsi Jawa Barat	85
Tabel 4.8	Kinerja Layanan Sampah Provinsi Jawa Barat	89
Tabel 4.9	Kinerja IPLT di Provinsi Jawa Barat	91
Tabel 4.10	Penetapan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat	92
Tabel 4.11	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi Jawa Barat	93
Tabel 4.12	Infrastruktur Prasarana Strategis di Provinsi Jawa Barat	95
Tabel 4.13	<i>Backlog</i> Provinsi Jawa Barat	101
Tabel 4.14	RTLH Provinsi Jawa Barat	102
Tabel 4.15	Rumah Khusus Provinsi Jawa Barat	103
Tabel 4.16	Rumah Susun Provinsi Jawa Barat	104
Tabel 5.1	Rumusan Isu Strategis Industri Provinsi Jawa Barat	113
Tabel 5.2	Rumusan Isu Strategis Pertanian Provinsi Jawa Barat	116
Tabel 5.3	Rumusan Isu Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat	119
Tabel 5.4	Rumusan Isu Strategis Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat	122
Tabel 6.1	Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Barat	126
Tabel 6.2	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat	127
Tabel 6.3	Proyeksi Wisatawan Domestik di Provinsi Jawa Barat	129
Tabel 6.4	Proyeksi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Barat	130
Tabel 6.5	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri	134
Tabel 6.6	Analisis 5-forces (Meso) Fokus Industri	134
Tabel 6.7	Analisis SWOT Fokus Industri	135
Tabel 6.8	<i>Skoring Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Industri	136
Tabel 6.9	<i>Skoring Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Industri	137
Tabel 6.10	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pertanian	139
Tabel 6.11	Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pertanian	140
Tabel 6.12	Analisis SWOT Fokus Pertanian	141
Tabel 6.13	<i>Skoring Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Pertanian	142
Tabel 6.14	<i>Skoring Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Pertanian	143
Tabel 6.15	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata	145
Tabel 6.16	Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pariwisata	145
Tabel 6.17	Analisis SWOT Fokus Pariwisata	146
Tabel 6.18	<i>Skoring Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Pariwisata	147
Tabel 6.19	<i>Skoring Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Pariwisata	148
Tabel 6.20	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pelayanan Dasar	150
Tabel 6.21	Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pelayanan Dasar	150
Tabel 6.22	Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar	151

Tabel 6.23	Skoring <i>Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Pelayanan Dasar	152
Tabel 6.24	Skoring <i>Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Pelayanan Dasar	153
Tabel 6.25	Parameter Penilaian Fokus Industri	155
Tabel 6.26	Penilaian Kawasan Fokus Industri	155
Tabel 6.27	Parameter Penilaian Fokus Pertanian	156
Tabel 6.28	Penilaian Kawasan Fokus Pertanian	157
Tabel 6.29	Parameter Penilaian Fokus Pariwisata	157
Tabel 6.30	Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata	158
Tabel 6.31	Parameter Penilaian Fokus Pelayanan Dasar	159
Tabel 6.32	Penilaian Kawasan Fokus Pelayanan Dasar	159
Tabel 6.33	Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat	160
Tabel 6.34	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat	160
Tabel 7.1	Bendungan Konstruksi dan Rencana di Provinsi Jawa Barat	165
Tabel 7.2	Waktu Tempuh Lintas Utama di Provinsi Jawa Barat	166
Tabel 7.3	Waktu Tempuh di Perkotaan di Provinsi Jawa Barat	167
Tabel 7.4	Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat	168
Tabel 7.5	Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat	169
Tabel 7.6	Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat	170
Tabel 7.7	Proyeksi Layanan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat	171
Tabel 7.8	Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat	172
Tabel 7.9	Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat	173
Tabel 7.10	Kebutuhan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	174
Tabel 7.11	Kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)	175
Tabel 7.12	Kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Jawa Barat	177
Tabel 7.13	Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Jawa Barat	179
Tabel 7.14	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri Prioritas	183
Tabel 7.15	Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Industri Prioritas	183
Tabel 7.16	Pertumbuhan Tenaga Kerja Kawasan Industri Prioritas	184
Tabel 7.17	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja Kawasan Industri Prioritas	184
Tabel 7.18	Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Industri Prioritas	184
Tabel 7.19	Proyeksi Bangkitan Lalulintas Kawasan Industri Prioritas	185
Tabel 7.20	Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Industri Prioritas (2034)	187
Tabel 7.21	Proyeksi Penduduk Keseluruhan di Kawasan Industri Prioritas	189
Tabel 7.22	Proyeksi Air Domestik dan Non Domestik berbasis Populasi di Kawasan Industri Prioritas	189
Tabel 7.23	Proyeksi Timbulan <i>Black Water</i> di Kawasan Industri Prioritas	190
Tabel 7.24	Proyeksi Timbulan <i>Greywater</i> di Kawasan Industri Prioritas	190
Tabel 7.25	Total Gap Supply dan Demand Air Limbah di Kawasan Industri Prioritas	190
Tabel 7.26	Rincian Gap Supply dan Demand Air Limbah Kabupaten	190
Tabel 7.27	Kebutuhan Jenis SPAL-D per Kepadatan Penduduk	191
Tabel 7.28	Kebutuhan Teknologi SPAL-D per Desa Berdasarkan Kepadatan Penduduk	191
Tabel 7.29	Rekomendasi Kebutuhan Penambahan Jumlah IPAL Skala Permukiman	192
Tabel 7.30	Analisis Timbulan Sampah Domestik Kawasan Industri Prioritas	192
Tabel 7.31	Analisis Timbulan Sampah Non Domestik Kawasan Industri Prioritas	193
Tabel 7.32	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Subang	194
Tabel 7.33	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kab. Majalengka	194
Tabel 7.34	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kab. Cirebon	194
Tabel 7.35	Ketentuan Gerobak, Transfer, dan Transport Mobil	194
Tabel 7.36	Kebutuhan Sarana Pengumpulan Sampah	195
Tabel 7.37	Ketentuan KK Tong dan Kontainer Komunal	195
Tabel 7.38	Kebutuhan Sarana Pewadahan Sampah	195
Tabel 7.39	Luas Daerah Irigasi di Kawasan Swasembada Pangan	196
Tabel 7.40	Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Swasembada Pangan	197
Tabel 7.41	Luasan Kawasan Pertanian Berisiko Banjir di Kawasan Rebana	198

Tabel 7.42	Proyeksi LHRT dan VCR Geopark Ciletuh	203
Tabel 7.43	Proyeksi LHRT dan VCR KSPN Bandung.....	205
Tabel 7.44	<i>Relevant Road</i> Jalan Nasional <i>Geopark</i> Ciletuh	207
Tabel 7.45	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Sukabumi.....	209
Tabel 7.46	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Bogor	209
Tabel 7.47	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Cianjur	210
Tabel 7.48	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kota Bogor	210
Tabel 7.49	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Bandung	210
Tabel 7.50	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Bandung Barat	211
Tabel 7.51	Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Kota Bandung.....	211
Tabel 7.52	Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	212
Tabel 7.53	Proyeksi Persentase Pelayanan TPA di Kabupaten Sukabumi*)	212
Tabel 7.54	Proyeksi Timbulan Sampah Terlayani TPA di Kabupaten Sukabumi.....	212
Tabel 7.55	Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya**).	212
Tabel 7.56	Kebutuhan Air Domestik WM Bandung	220
Tabel 7.57	Kebutuhan Air Wisatawan WM Bandung	220
Tabel 7.58	Kebutuhan Air Mahasiswa WM Bandung	220
Tabel 7.59	Total Kebutuhan Air WM Bandung	221
Tabel 7.60	Proyeksi Jumlah Kendaraan WM Bandung	223
Tabel 7.61	Proyeksi LHRT dan VCR WM Bandung pada Skenario 1	226
Tabel 7.62	Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 2	228
Tabel 7.63	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Bandung	231
Tabel 7.64	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Cimahi	231
Tabel 7.65	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung	231
Tabel 7.66	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung Barat	231
Tabel 7.67	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sumedang	232
Tabel 7.68	Proyeksi Timbulan Sampah WM Bandung	233
Tabel 7.69	GAP Sampah Terlayani Tanpa Penanganan Pada TPA Sarimukti.....	234
Tabel 7.70	GAP Sampah Terlayani Skenario Beroperasinya TPA Legok Nangka	234
Tabel 7.71	GAP Proyeksi Penanganan Air Limbah Cekungan Bandung.....	235
Tabel 7.72	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Cirebon.....	237
Tabel 7.73	Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Perkotaan Cirebon (2034).....	238
Tabel 7.74	Proyeksi Proyeksi Penduduk Perkotaan Cirebon	239
Tabel 7.75	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan Cirebon.....	239
Tabel 7.76	Proyeksi Timbulan Air Limbah Perkotaan Cirebon	239
Tabel 7.77	Total Gap Supply dan Demand Air Limbah Perkotaan Cirebon	240
Tabel 7.78	Kebutuhan Teknologi SPAL-D Perkotaan Cirebon.....	240
Tabel 7.79	Kebutuhan Penambahan Jumlah IPAL Perkotaan Cirebon	240
Tabel 7.80	Proyeksi Timbulan Sampah Perkotaan Cirebon	241
Tabel 7.81	Gap Kapasitas Pengelolaan Sampah Perkotaan Cirebon	241
Tabel 7.82	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Tasikmalaya.....	242
Tabel 7.83	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Tasikmalaya.....	242
Tabel 7.84	Proyeksi LHRT dan VCR Perkotaan Tasikmalaya	243
Tabel 7.85	Proyeksi Proyeksi Penduduk Perkotaan Tasikmalaya	243
Tabel 7.86	Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Perkotaan Tasikmalaya.....	244
Tabel 7.87	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah Perkotaan Tasikmalaya	244
Tabel 7.88	Proyeksi Timbulan Sampah Perkotaan Tasikmalaya	245
Tabel 7.89	Analisis Keterpaduan Infrastruktur	247
Tabel 8.1	Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat.....	253
Tabel 8.2	Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jawa Barat	264
Tabel 8.3	Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi Jawa Barat	279
Tabel 8.4	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri	295
Tabel 8.5	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian	299
Tabel 8.6	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata	305
Tabel 8.7	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar	311

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	2
Gambar 1.2	Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	6
Gambar 2.1	Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah	12
Gambar 2.2	Visium PUPR 2030	20
Gambar 3.1	Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat	36
Gambar 3.2	Mata Pencanharian Menurut Status Pekerjaan Provinsi Jawa Barat	49
Gambar 3.3	Mata Pencanharian Utama Provinsi Jawa Barat.....	49
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk dan Pengangguran Provinsi Jawa Barat	50
Gambar 3.5	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	51
Gambar 3.6	Sebaran Kawasan Peruntukan Industri dan PDRB Industri	55
Gambar 3.7	Persentase Nilai Ekspor Menurut Pintu Keluar	55
Gambar 3.8	Persentase Nilai Import Menurut Pintu Masuk.....	56
Gambar 3.9	Persebaran Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Barat.....	58
Gambar 3.10	Komoditas Utama Perkebunan.....	62
Gambar 3.11	Klaster Wisata Provinsi Jawa Barat.....	63
Gambar 3.12	Perkembangan Penanaman Modal Jawa Barat 2017-2020	65
Gambar 3.13	Realisasi Penanaman Modal di Jawa Barat Pada 2022	65
Gambar 3.14	Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	66
Gambar 3.15	Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Barat 2022	67
Gambar 3.16	Persebaran Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat	68
Gambar 3.17	Pola Pergerakan Orang dan Barang Provinsi Jawa Barat	70
Gambar 4.1	Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat	73
Gambar 4.2	Visualisasi Kondisi Infrstruktur Irigasi per Daerah Irigasi	76
Gambar 4.3	Tingkat Kebutuhan Air Minum Provinsi Jawa Barat	88
Gambar 5.1	Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis.....	110
Gambar 6.1	Kemampuan Lahan Provinsi Jawa Barat.....	131
Gambar 6.2	Kuadran Penentuan Strategi Fokus Industri	139
Gambar 6.3	Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pertanian	144
Gambar 6.4	Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	149
Gambar 6.5	Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pelayanan Dasar	154
Gambar 6.6	Tahap Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat	164
Gambar 7.1	Sebaran Kawasan Industri di Wilayah Jawa Barat	182
Gambar 7.2	Sebaran Kawasan Swasembada Pangan Jawa Barat	199
Gambar 7.3	Kawasan Pariwisata Prioritas Jawa Barat	200
Gambar 7.4	Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	201
Gambar 7.5	Proyeksi Jumlah Wisatawan	202
Gambar 7.6	Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	202
Gambar 7.7	Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	203
Gambar 7.8	Jaringan Transportasi Menuju Kawasan Pariwisata Jawa Barat.....	205
Gambar 7.9	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Pariwisata 2034	208
Gambar 7.10	Proyeksi Penanganan Limbah Kawasan Pariwisata 2034	214
Gambar 7.11	DAS WM Bandung	217
Gambar 7.12	Skema Makro Pengendalian Banjir Citarum Hulu	218
Gambar 7.13	Kawasan Rawan Banjir WM Bandung	219
Gambar 7.14	<i>Origin Destination</i> WM Bandung.....	223
Gambar 7.15	Skenario 1 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034	224
Gambar 7.16	Skenario 2 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034	225
Gambar 7.17	Proyeksi Kepadatan Penduduk WM Bandung 2034	229
Gambar 7.18	Proyeksi Kebutuhan Air Minum WM Bandung 2034	230
Gambar 7.19	Kebutuhan Penanganan Sampah WM Bandung 2034	232

Gambar 7.20 Kebutuhan Penanganan Limbah WM Bandung 2034 235
Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur 294

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	26
Peta 3.1	Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat.....	33
Peta 3.2	Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Barat	39
Peta 3.3	Profil Hidrologi Provinsi Jawa Barat.....	40
Peta 3.4	Profil Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat	41
Peta 3.5	Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat.....	3-42
Peta 3.6	Kerawanan Bencana Provinsi Jawa Barat.....	46
Peta 4.1	Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.....	72
Peta 4.2	Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat	84
Peta 4.3	Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat	87
Peta 4.4	Profil Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat.....	100
Peta 4.5	Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat	107
Peta 4.6	Profil Infrastruktur Perhubungan Provinsi Jawa Barat	108
Peta 4.7	Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Barat	109
Peta 7.1	Wilayah Administrasi WM Bandung	216

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) pada setiap wilayah perencanaan. Bab ini memuat sekurangnya penjelasan tentang latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, serta kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi maupun kependudukan. Dalam hal ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga secara nasional, dengan nilai PDRB sebesar 1.752,07 triliun rupiah atau 13,4% PDB nasional (BPS, 2024). Tiga sektor ekonomi penyumbang terbesar adalah sektor industri pengolahan/ manufaktur (42%), perdagangan (14%), dan pertanian (7%).

Dari segi kependudukan, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbesar secara nasional. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 50.345,19 Ribu Jiwa (18% Nasional) dan diperkirakan menjadi 54.748.300 jiwa pada tahun 2029, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata (CAGR 2014-2024) sebesar 1,6%. Selain jumlah penduduk, kepadatan penduduk di kawasan perkotaan tergolong tinggi. Tiga kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Bandung (151 jiwa/ha), Kota Cimahi (141 jiwa/ha), dan Kota Bekasi (124 jiwa/ha).

Peran penting Jawa Barat secara ekonomi dapat juga dilihat dari kontribusi industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Industri pengolahan menyumbang 28,9% terhadap industri nasional dengan subsektor industri utama meliputi industri otomotif, elektronik, serta makanan dan minuman. Dalam hal pertanian, Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung pangan terbesar kedua nasional dengan kontribusi 16,42% dari total produksi beras nasional (BPS, 2024). Terkait pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Barat mencapai 107 juta orang/tahun dengan pergerakan wisatawan nusantara terbesar secara nasional.

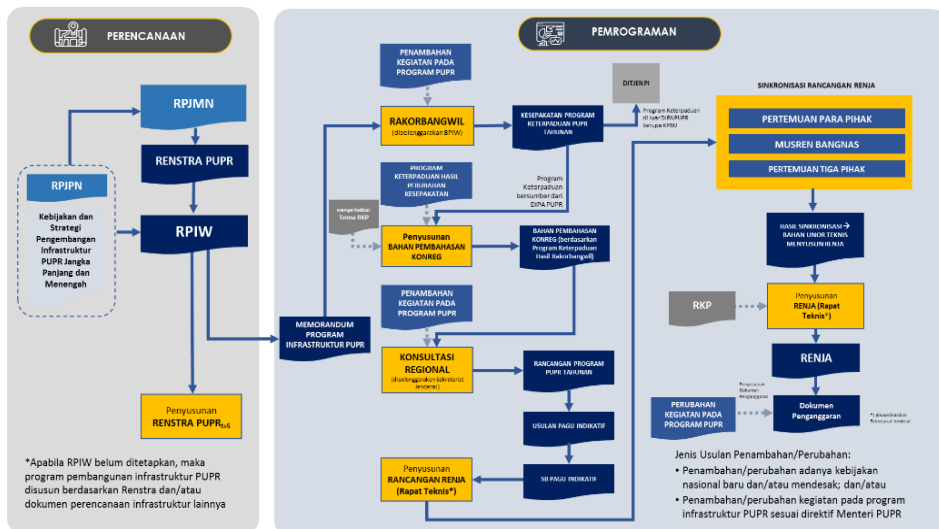
Dengan kapasitas ekonomi dan sosial yang besar tersebut, perkembangan Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya: (1) alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 12.000 Ha/tahun, terutama di bagian utara, (2) kesenjangan pembangunan wilayah utara-selatan karena 70% aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah utara, (3) tingkat risiko banjir tinggi terutama di wilayah metropolitan dan pesisir utara, (4) *land subsidence* yang mencapai 20 cm/tahun di Metropolitan Cekungan Bandung akibat tingginya penggunaan air tanah, (5) rendahnya

akses prasarana dasar, dan (6) neraca air yang sudah defisit terutama di wilayah utara karena tingginya kebutuhan air untuk industri dan pertanian.

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya *multi-stakeholder* dan pendekatan yang holistik dan terpadu. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jawa Barat dimaksudkan sebagai dasar dalam menterpadukan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

1.2. Kedudukan dalam Kebijakan

Dokumen RPIW Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2034 merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PU dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PU yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PU.

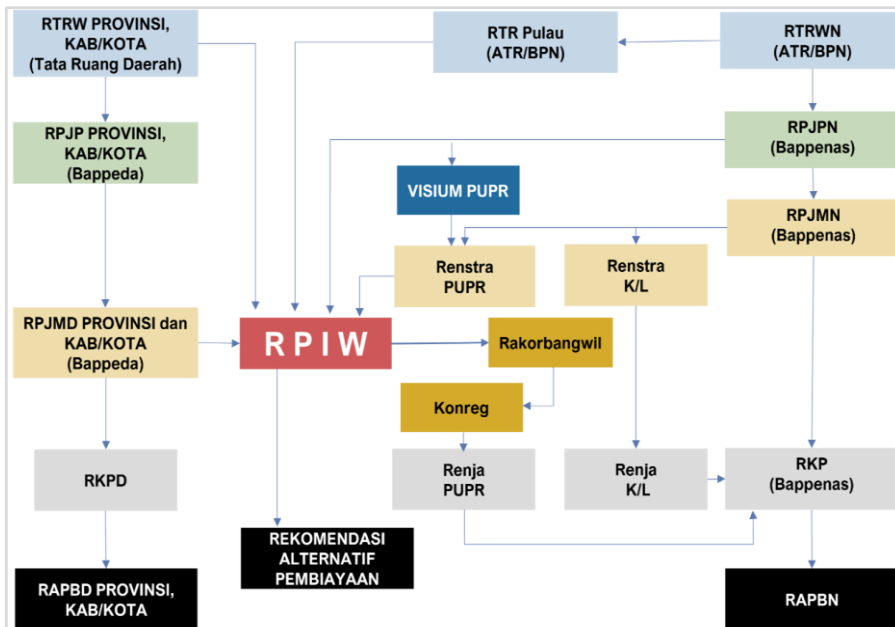


Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022

Dalam penyusunan RPIW Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2034, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam

menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka panjang maupun jangka menengah.



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

1.3. Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PU harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan **pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PU dan lintas sektor**. Dokumen RPIW merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PU yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4. Muatan RPIW

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah memuat 9 Bab dengan rincian sebagai berikut.

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PU;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PU tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

RPIW Provinsi Jawa Barat disusun dengan manfaat sebagai berikut.

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PU; dan

3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PU, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

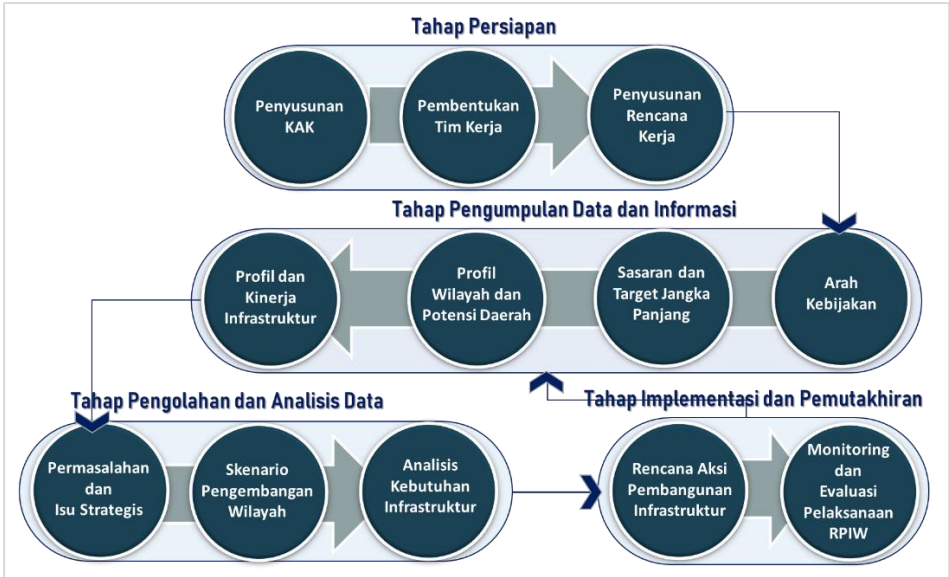
Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5-FORCES dan IFAS-EFAS. Dalam penyusunan skenario, juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2034. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan sintesis kebijakan dan strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, dan kawasan prioritas/strategis yang menjadi acuan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.1. Kebijakan Penataan Ruang

Subbab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010).

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Jawa Barat, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional.

Terkait sistem perkotaan, dalam RPIW ini terdapat 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 8 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Barat. Kedua PKN tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Wilayah yang ditetapkan sebagai PKN di Provinsi Jawa Barat adalah PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKN Cirebon. Sementara itu, kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Pelabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, dan PKW Cidaun. Kedelapan PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota.

Untuk penguatan konektivitas dan logistik, RTRWN menetapkan 24 ruas jalan bebas hambatan (JBH) untuk dikembangkan. Terdapat 13 ruas JBH yang belum/sedang dibangun yaitu Sukabumi–Ciranjang, Ciranjang–Padalarang, Jatiasih–Cipularang–Sadang, Cileunyi–Tasikmalaya–Banjar, Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Subang–Patimban, Banjar–Cilacap, Bogor Ring Road, Terusan Pasteur–Ujung Berung–Cileunyi, Ujung Berung–Gedebage–Majalaya, Bojong Gede–Dramaga–Ciawi, Bojong Gede–Balaraja, dan Akses Pelabuhan Patimban.

Simpul transportasi terdiri dari pelabuhan dan bandar udara. Pelabuhan utama ditetapkan di Pelabuhan Patimban, dengan pelabuhan pengumpul di Pelabuhan

Cirebon. Angkutan penyeberangan didukung oleh Pelabuhan Majingklak di Kabupaten Pangandaran. Simpul transportasi udara terdiri dari Bandar Udara Karawang sebagai bandar udara pengumpul primer, Bandar Udara Husein Sastranegara/Kertajati (Kabupaten Majalengka) sebagai pengumpul sekunder, dan Bandar Udara Cakrabhuwana (Kabupaten Cirebon) sebagai bandar udara pengumpul tersier.

Terkait pengelolaan sumber daya air, terdapat 5 wilayah sungai (WS) yang ditetapkan RTRWN dimana 4 diantaranya merupakan WS Lintas Provinsi (WS Cidanau–Ciujung–Cidurian, WS Ciliwung–Cisadane, WS Citanduy, dan WS Cimanuk–Cisanggarung) dan 1 merupakan WS Strategis Nasional (WS Citarum). Sementara itu, terdapat 49 kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 3 suaka margasatwa, 23 cagar alam, 2 cagar alam laut, 3 taman nasional, 3 taman hutan rakyat, 1 taman buru, dan 14 taman wisata alam.

RTRWN juga menetapkan 6 kawasan andalan yang memiliki potensi cepat tumbuh di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Sukabumi dan sekitarnya, Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), Kawasan Cekungan Bandung, Kawasan Cirebon–Indramayu–Majalengka–Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan sekitarnya, dan Kawasan Priangan Timur–Pangandaran serta kawasan andalan lintas provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Jakarta (DKI Jakarta–Jawa Barat–Banten).

Selain itu, RTRWN juga menetapkan 6 kawasan strategis nasional (KSN) di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari kawasan dengan sudut kepentingan ekonomi (Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung), sudut kepentingan lingkungan hidup (Kawasan Pangandaran–Kalipuncung–Segara Anakan–Nusakambangan), serta sudut kepentingan pendayaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi (Kawasan Produksi dan Pengujian Roket Pamengpeuk, Kawasan Stasiun Telecommand Rancabungur, Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin, serta Kawasan Teropong Bintang Bosscha).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup **peningkatan akses pelayanan perkotaan** dan **pengembangan kawasan strategis** berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang didukung oleh penguatan **konektivitas dan simpul transportasi** dengan tetap mempertahankan fungsi **kawasan lindung**.

2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa–Bali

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa–Bali menjadi strategi operasional bagi pengembangan sistem nasional yang berada di wilayah Pulau Jawa–Bali. Arahan penataan ruang Pulau Jawa–Bali terkait pengembangan Provinsi Jawa Barat adalah (1) pemertahanan lumbung pangan utama nasional, (2) pemantapan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, (3)

pengembangan pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan, (4) pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional, (5) pengembangan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE), (6) pemertahanan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan, (7) pengendalian perkembangan Provinsi Jawa Barat bagian selatan dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, (8) pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing, serta (9) pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali juga diatur mengenai pengembangan jalur lintas Pulau Jawa yang terdiri dari lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Lintas utara menghubungkan Jakarta–Karawang–Cirebon, lintas tengah menghubungkan Bogor–Sukabumi–Cianjur–Bandung–Banjar, dan lintas selatan menghubungkan Pelabuhanratu–Pangandaran. Selain itu, ditetapkan juga jalur *feeder* utara–selatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah, di antaranya Sukabumi–Cibadak, Cidaun–Ciwidey, dan Ciamis–Kuningan. Pengembangan dan pemantapan jalan nasional perlu diterpadukan dengan jalur kereta api antarkota, jalur kereta api perkotaan, dan pelabuhan penyeberangan, serta menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Jawa Barat, ditetapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Serang–Cilegon–Cikampek–Bandung (melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKW Cikampek–Cikopo);
2. Tegal Gede–Bitung, Nagrak–Bogor–Gunung Putri, Bogor–Cibinong, dan Laut Jawa–Tanjung Priok (melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek);
3. Cilamaya–Tegal Gede dan Subang–Cikampek (melayani PKW Cikampek–Cikopo);
4. Laut Jawa–Cilamaya dan Cemara–Cilamaya;
5. Cemara–Indramayu dan Jatibarang–Indramayu (melayani PKW Indramayu);
6. Jatibarang–Cirebon, Jatibarang–Palimanan, dan Cirebon–Muara Bekasi (melayani PKN Cirebon);
7. Kadipaten–Cirebon (melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten); dan
8. Semarang–Cirebon (melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan).

Terkait sistem jaringan sumber daya air, di Provinsi Jawa Barat terdapat 5 WS Nasional, 21 waduk, dan 33 daerah irigasi (DI). Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, di Provinsi Jawa Barat ditetapkan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana di 27 kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTR Pulau Jawa-Bali, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat diarahkan sebagai **lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan yang kompak, industri/perdagangan, dan pariwisata** yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh **konektivitas** lintas utara-tengah-selatan, **sistem jaringan energi**, dan **sumber daya air** dengan memperhatikan **kawasan lindung dan kawasan rawan bencana**.

2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 menetapkan 6 wilayah pengembangan (WP) yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional antar wilayah dan antarpusat pengembangan. Wilayah pengembangan meliputi WP Bodebekpunjur sebagai pengendalian perkembangan fisik wilayah, WP Purwasuka sebagai kawasan berkembang dengan tetap mengendalikan sawah di pantai utara Provinsi Jawa Barat, WP Ciayumajakuning pengembangan gerbang timur Provinsi Jawa Barat, WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai pusat pengembangan pariwisata dan pertanian, WP Sukabumi dan Sekitarnya sebagai sentra agribisnis dan pariwisata, serta WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung sebagai pusat pemerintahan dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung.

Selanjutnya, RTRW Provinsi Jawa Barat juga mengatur penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal serta terintegrasi untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan, mengatur penyediaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang handal, mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air, serta peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa **RTRW Provinsi Jawa Barat** mengarahkan **pembangunan ekonomi berbasis 6 Wilayah Pengembangan (WP)** dengan sektor unggulan **pertanian, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa**, yang didukung oleh **sistem transportasi dan infrastruktur dasar perkotaan/regional**, serta tetap memperhatikan **fungsi lindung dan kebencanaan**.

2.1.4. RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Perpres 45/2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menetapkan Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung yang terdiri meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkotaan inti adalah Kota Bandung yang memiliki 30 kecamatan.

2. Perkotaan sekitar meliputi Kota Cimahi (3 kecamatan), Kab. Bandung (31 kecamatan), Kab. Bandung Barat (15 kecamatan), dan sebagian Kab. Sumedang (5 kecamatan).
3. Konektivitas antara kota sekitar didukung oleh pembangunan jalan lingkar dan jalan radial yang menghubungkan Kawasan permukiman dengan kegiatan ekonomi.
4. Pengelolaan DAS Citarum khususnya penanganan banjir Citarum Hulu.

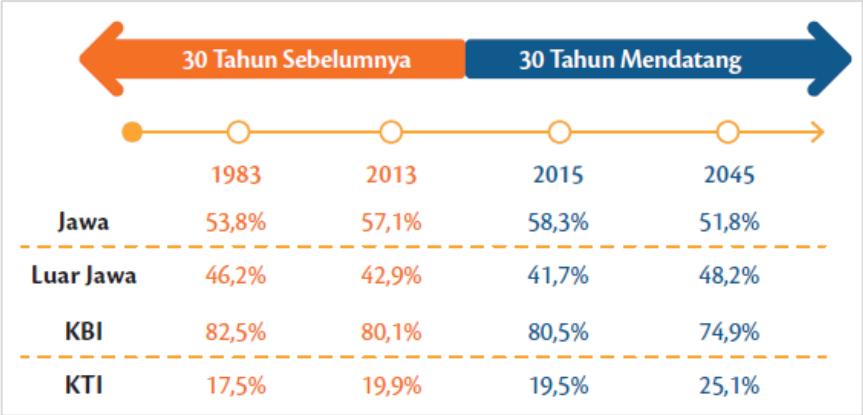
2.2. Kebijakan Sektor

Kebijakan sektor yang dibahas dalam bagian ini mencakup Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029, Proyek Strategis Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Visium PUPR 2030, dan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

2.2.1. Visi Indonesia 2045

Terdapat 4 pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* pencapaian 4 pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk Pilar 1 berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; untuk Pilar 2 berupa penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan *ease of doing business/investment*; untuk Pilar 3 berupa penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa; dan untuk Pilar 4 berupa reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Terkait Pilar 3, disparitas Wilayah Jawa dan Luar Jawa menurun dari 7,6% pada tahun 1983 menjadi 3,6% pada tahun 2045. Demikian juga dengan disparitas antara KBI dan KTI akan menurun dari 65% pada tahun 1983 menjadi 49,8% pada tahun 2045, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Arahan Visi Indonesia 2045 adalah **pengembangan infrastruktur** mendukung **pendidikan, pertumbuhan ekonomi** berkelanjutan dan **kemudahan investasi**, serta **pengurangan disparitas** Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.

2.2.2. Asta Cita

Asta Cita merupakan rangkaian program (Misi) yang dicanangkan pemerintah sebagai perjuangan untuk mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan infrastruktur PU direncanakan untuk mendukung terwujudnya Asta Cita. Terdapat 8 Misi yang disebut Asta Cita diantaranya:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum, termasuk di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Asta Cita 2 (**swasembada pangan, energi, dan air**), 3 (**industri kreatif**), 4 (**sarana pendidikan, kesehatan, dan olahraga**), 5 (**hilirisasi dan industrialisasi**), dan 6 (**membangun dari desa, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan**).

2.2.3. RPJMN 2025 – 2029

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi yaitu: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Sedangkan dalam RPJMN juga mengatur arah pembangunan wilayah masing – masing provinsi, setiap provinsi mempunyai tema yang berbeda. Tema pembangunan wilayah Jawa adalah megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya tema wilayah Pulau Jawa ini diturunkan menjadi tema provinsi “Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional”. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah “Pusat **Cutting-Edge Industry, Inovasi dan Pendidikan STEAM Bertaraf Global, serta Penumpu Ketahanan Pangan Nasional**.”

Adapun target pembangunan Provinsi Jawa Barat pada 2029 adalah target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, PDRB per kapita 84,9 Juta, Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional 12,3%, penurunan tingkat kemiskinan hingga 2,86-3,86%, penurunan gini ratio 0,381-0,383, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,94-6,56%. Untuk mencapai target-target tersebut diperlukan beberapa transformasi baik dalam bidang sosial, ekonomi, tata kelola, dan sosial budaya.

RPJMN 2025-2029 mengklasifikasikan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat ke dalam berbagai tema pengembangan, antara lain: (a) Kawasan Pertumbuhan; (b) Kawasan Komoditas Unggulan; (c) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi; (d) Kawasan Afirmasi; (e) Kawasan Konservasi/Rawan Bencana.

Arahan pengembangan kawasan pertumbuhan meliputi kawasan:

- WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung yang difokuskan pada penataan dan penyediaan infrastuktur dasar, pengembangan kawasan pendidikan (termasuk Jatinangor), dan penguatan konektivitas antar moda;
- Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya yang meliputi Kawasan Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung

Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon, peningkatan pariwisata, Tangkubanparahu dan Rancaupias-Pangalengan, Lembang, serta Ciwidey.

- Kawasan Industri yang meliputi Cirebon-Kertajati dan Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban
- Kawasan Perkotaan Wilayah Selatan Jawa Barat yang meliputi Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cianjur. Pertumbuhan Kawasan Perkotaan Tasikmalaya dipicu oleh pembangunan Jalan Tol dan Jalur KA, yaitu Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya dan Ciawi-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang. Kawasan perkotaan ini menjadi pengungkit pertumbuhan di Kawasan Pansela Jawa Barat.

Arahan pengembangan kawasan pangan, air, dan energi meliputi kawasan: 1) Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan); 2) Citanduy-Ciwanan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran); 3) Priangan Barat (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi). Fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi, konservasi sumber daya air, pembangunan infrastruktur penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air.

Arahan pengembangan kawasan afirmasi meliputi kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) sebagai pemerataan pembangunan. Kawasan perkotaan Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cianjur menjadi pengungkit pertumbuhan di Kawasan Pansela Jawa Barat

Arahan pengembangan kawasan konservasi/rawan bencana meliputi kawasan: TN Halimun-Salak, TN Gede-Prangango, TN Ceremai, dan Geopark Ciletuh.

RPJMN 2025-2029 memfokuskan pengembangan di Provinsi Jawa Barat mendukung **hilirisasi industri, pengembangan kawasan perkotaan (termasuk inovasi dan pendidikan), peningkatan daya saing pariwisata, serta swasembada pangan, air, dan energi.**

2.2.4. PSN

Berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, terdapat 17 PSN di Jawa Barat, yaitu 9 PSN telah selesai dibangun, 5 PSN sedang dilaksanakan, dan 3 PSN belum dimulai pembangunannya. Adapun 9 PSN yang telah selesai meliputi: (1) Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, (2) Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, (3) Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda), (4) Bendungan Kuningan, (5) Bendungan Ciawi, (6) Bendungan Sukamahi, (7) Bendungan Cipanas, (8) Bendungan Sadawarna, dan (9)

Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Selanjutnya, 5 PSN yang saat ini sedang dilaksanakan meliputi: (1) Jalan Tol Bogor *Ring-Road* (termasuk Caringin-Salabenda), (2) Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, (3) Bendungan Leuwikeris, (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang, dan (5) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur. 3 PSN yang belum dimulai pengerjaannya meliputi: (1) Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, (2) Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap, dan (3) Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: (a) North - South Link Bandung; dan (b) Bandung Inter Urban Toll Road.

Berdasarkan uraian **PSN**, proyek strategis di Provinsi Jawa Barat berfokus pada **swasembada pangan, air, dan energi** melalui pembangunan bendungan dan jaringan irigasi; **konektivitas** (pembangunan jalan tol); dan memperkuat **pembangunan pendidikan** (pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia).

2.2.5. RIPIN Tahun 2015 - 2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 disusun dengan tujuan untuk mendorong industri yang kompetitif dan berwawasan lingkungan sebagai salah satu pilar ekonomi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang memiliki struktur industri kuat dan berdaya saing, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI), salah satunya adalah WPI Jawa dan termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Barat. WPI sendiri terdiri atas beberapa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI di Jawa Barat antara lain Cirebon–Indramayu–Majalengka dan Bogor–Bekasi–Purwakarta–Subang–Karawang. WPPI Jawa Barat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri hingga 2 digit dan mencapai kontribusi industri hingga 60% pada tahun 2035. Industri di Jawa Barat diarahkan melalui pengembangan Industri Elektronik dan Telematika, Industri Barang Model, Komponen, dan Jasa Industri, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan turunannya, serta Industri Alat Transportasi.

Di dalam WPPI tersebut, terdapat 22 kawasan industri yang tersebar pada 8 kabupaten, yaitu:

1. Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi International Industrial Estate, MM2100 Industrial Town, Kawasan Industri Jababeka, East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Greenland International Industrial Center (GIIC), KIT Indonesia China, dan KI SKI;

2. Kawasan Industri di Kabupaten Karawang, yaitu KI Cimalaya, KI Indotaisei, KI Kujang Cikampek, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, dan Karawang Jabar Industrial Estate;
3. Kawasan Industri di Kabupaten Bogor, yaitu Cibinong Center Industrial Estate dan KI Sentul;
4. Kawasan Industri di Kabupaten Subang, yaitu KI Subang;
5. Kawasan Industri di Kabupaten Majalengka, yaitu KI Majalengka dan Kertajati Industrial Estate Majalengka;
6. Kawasan Industri di Kabupaten Sukabumi, yaitu KI Sukabumi;
7. Kawasan Industri di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta; dan
8. Kawasan Industri di Kabupaten Bandung, yaitu KI Rancaekek.

Program pengembangan untuk mendukung WPPI Periode 2020–2035 adalah (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara), (2) pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI, (3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, (4) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi, (5) penguatan kerja sama antar WPPI, (6) promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI, (7) pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa, dan (8) penguatan konektivitas antar WPPI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **pengembangan industri** di Provinsi Jawa Barat **terkonsentrasi di wilayah utara** dan berfokus pada **industri pengolahan berbasis teknologi** dengan dukungan **infrastruktur yang ramah lingkungan** dan manajemen industri yang handal.

2.2.6. RIPPARNAS Tahun 2010 – 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010–2025 menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam tahun 2010-2025. Prinsip pembangunan wisata nasional adalah (1) pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, (2) orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, (3) tata kelola yang baik, (4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta (5) mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Sementara itu, fokus pengembangan manajemen kepariwisataan adalah pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan

sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terdapat 3 DPN, 10 KPPN, dan 6 KSPN di Provinsi Jawa Barat dituliskan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Jawa Barat

DPN	KSPN/KPPN
Bogor–Halimun, dsk.	KSPN Halimun dsk.
	KSPN Puncak-Gede Pangrango dsk.
	KPPN Puncak-Gedepangrango dsk.
	KPPN Bogor-Ciawi dsk.
	KPPN Gn. Halimun dsk.
	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.
Bandung–Ciwidey dsk.	KSPN Ciwidey dsk.
	KSPN Tangkuban Perahu dsk.
	KSPN Bandung Kota dsk.
	KPPN Bandung Kota dsk.
	KPPN Tangkuban Perahu dsk.
	KPPN Lembang dsk.
Pangandaran–Nusakambangan dsk.	KPPN Ciwidey dsk.
	KSPN Pangandaran dsk.
	KPPN Tasikmalaya dsk.
	KPPN Pangandaran dsk.

Sumber: RIPPARNAS, 2010

Berdasarkan uraian RIPPARNAS di atas, pemantapan sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat ditekankan pada aspek **kepariwisataan berkelanjutan** serta **peningkatan ekonomi masyarakat** melalui penguatan aspek **manajemen industri kepariwisataan**.

2.2.7. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021

Berdasarkan Perpres 87/2021 tentang Pengembangan Reban dan Jawa Barat Selatan terdapat 81 program di wilayah Reban dengan 51 program merupakan program sektor PU serta 89 program di wilayah Jawa Barat Selatan dengan 27 program merupakan sektor PU.

Perpres Pengembangan Reban dan Jawa Barat Selatan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri baru di Kawasan Reban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Jawa Barat Selatan.

Dasar penetapan Perpres ini didasari latar belakang pengembangan wilayah di mana:

1. Jawa Barat meskipun memiliki angka usia produktif yang tinggi secara nasional, termasuk dalam 4 provinsi dengan UMP terendah di Indonesia; dan
2. Struktur ekonomi Jawa Barat didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Angka Kesenjangan Sosial di Jawa Barat tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan koefisien gini sebesar 0,403% atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,381%. Hal tersebut menandakan pembangunan di Jawa Barat masih belum merata.

Kawasan Rebana meliputi 7 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam perkembangan industri ke arah timur-utara Jawa Barat yang berbasis *ecoindustry*. Industri tersebut masuk dalam delineasi 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang sudah ditentukan:

- 3 titik di Kab Subang (KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, dan KPI Cipali Subang Timur);
- 6 titik di Kab Indramayu (KPI Krangkeng, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Tukdana, dan KPI Cipali Indramayu);
- 2 titik di Kab Majalengka (KPI Kertajati Jatitujuh dan KPI Jatiwangi);
- 1 titik di Kab Sumedang (KPI Butom); dan
- 1 titik di Kab Cirebon (KPI Cirebon)

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Kawasan Jawa Barat Selatan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan Kawasan Utara Jawa Barat (Rebana) karena keterbatasan geografis dan layanan infrastruktur yang belum memadai. Fokus titik pengembangan Kawasan Selatan Jawa Barat:

- Kabupaten Sukabumi: pariwisata dan perikanan;
- Kabupaten Cianjur: agribisnis dan perikanan;
- Kabupaten Garut: agribisnis dan perikanan;
- Kabupaten Tasikmalaya: perikanan;
- Kabupaten Ciamis: agribisnis; dan
- Kabupaten Pangandaran: pariwisata dan perikanan.

Pemerataan pembangunan diharapkan dapat menurunkan ketimpangan ekonomi dan sosial serta menunjang pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

2.2.8. RPJMD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2023 adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Dalam rangka mencapai visi, dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu **membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa** melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, **melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif** melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, **mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan** berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, **meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi** kerakyatan yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dan **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif** dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 9 agenda, yaitu reformasi pada sistem kesehatan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan berkelanjutan, perlindungan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kebencanaan, pelayanan publik, pembangunan desa, keagamaan, infrastruktur dan konektivitas, serta pariwisata.

Untuk meningkatkan sinergi dan integrasi pengembangan wilayah, strategi pembangunan daerah dilakukan dengan (1) peningkatan kualitas WP Bodebekpunjur melalui pengembangan industri padat modal yang efisien lahan dan air, berteknologi tinggi, serta nonpolutif, (2) mendorong perkembangan WP Purwasuka melalui pengembangan industri pengolahan berorientasi ekspor dengan tetap mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Pantura, (3) mendorong perkembangan WP Ciayumajakuning melalui pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, (4) mendorong perkembangan secara terbatas di WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai sentra produksi pertanian dan pariwisata yang mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana, (5) mengendalikan perkembangan WP Cekungan Bandung melalui industri kreatif, pariwisata, dan perdagangan/jasa yang memperhatikan fungsi konservasi, serta (6) mendorong perkembangan secara terbatas di WP Sukabumi dan sekitarnya melalui pariwisata dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, arah pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan **kapasitas sumber daya manusia**, percepatan **pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan**, dan **pengendalian risiko bencana**.

2.2.9. Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR

berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun; kemandapan jalan mencapai 99% dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Visium PUPR 2030 memfokuskan pada penyediaan infrastruktur **tampungan air**, peningkatan **kemandapan jalan**, pembangunan jalan dan jembatan baru, penyediaan **air minum**, pengurangan **kawasan kumuh**, penyediaan infrastruktur **sanitasi**, dan **penyediaan perumahan**.

	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENSTRA PUPR 2015 - 2019	Kapasitas Tampung 50 m ³ /c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T	Jalan Mantap 98% Jalan Tol 1000 Km Jalan Baru 2650 Km Jembatan Baru/ FO 29.859 M Anggaran Rp.278 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T
GAP 2017 - 2019	Kapasitas Tampung 57,75 m ³ /c/th Anggaran Rp.306 T	Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 M Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.202 T	78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp.45 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 2,76 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat
VISIUM 2020- 2024	Kapasitas Tampung 68,11 m ³ /c/th Anggaran Rp.577 T	Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T	88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
VISIUM 2030	Kapasitas Tampung 120 m ³ /c/th Anggaran Rp.1.423 T	Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Gambar 2.2 Visium PUPR 2030

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

2.2.10. Rencana Strategis Kementerian PUPR (2020–2024)

Target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Target infrastruktur SDA meliputi penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan mencakup pembangunan jalan tol, jalan baru (termasuk FO/UD) dan jembatan. Sedangkan infrastruktur cipta karya mencakup penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kumuh dan pengolahan sampah, serta sarana pendidikan dan olahraga. Untuk perumahan mencakup pembangunan rusun, rusun, rumah swadaya dan PSU.

Tabel 2.2 Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

No.	Sektor	Target Capaian
1.	Sumber Daya Air	- Peningkatan Kapasitas tampung infrastruktur SDA 58,5 m ³ /kapita/tahun; - Pembangunan 61 bendungan;

No.	Sektor	Target Capaian
		- Pembangunan 500 embung; - Pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi; - Rehabilitasi 2 juta Daerah Irigasi; - Penyediaan 50 m³/dtk air baku; dan - Pembangunan 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai
2.	Bina Marga	- Pembangunan 2.500 km jalan tol; - Pembangunan 3.000 km jalan baru; - Pembangunan 38.328 m jembatan; dan - Pembangunan 31.053 m <i>fly over/underpass</i>
3.	Cipta Karya	- Penyediaan 100% air minum layak; - Penyediaan 30% air minum perpipaan; - Penyediaan 90 % sanitasi layak; - Penyediaan 15 % sanitasi aman; - Penanganan 10.000 ha permukiman kumuh; - Penyediaan 100% hunian dengan akses pengelolaan sampah; dan - Pembangunan 5.555 unit Sarana Pendidikan dan Olahraga.
4.	Perumahan	- Pembangunan 51.340 rumah susun; - Pembangunan 10.000 rumah khusus; - Dukungan bantuan 813.660 rumah swadaya; dan - Pembangunan 262.345 prasarana dan sarana umum.

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 mengarahkan peningkatan **ketahanan air**, kelancaran dan pemerataan **konektivitas**, pemenuhan kebutuhan **perumahan** dan infrastruktur **permukiman**.

2.3. Agenda Global

Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai isu yang menjadi perhatian global, yaitu terkait isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebencanaan. Untuk menyikapi isu tersebut, terdapat beberapa agenda global terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030, dan *UNESCO Global Geopark*.

Tabel 2.3 Arahan Agenda Global untuk Provinsi Jawa Barat

No	Kebijakan Global	Arahan
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Komitmen global yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan dengan 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dengan diterbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB di Indonesia dengan diintegrasikannya 169 indikator TPB ke dalam RPJMN 2020-2024.
2	<i>New Urban Agenda</i> (NUA)	NUA menjawab Tujuan 11 TPB dengan menyusun poin-poin tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. NUA mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

No	Kebijakan Global	Arahan
3	Paris Agreement	Berisi kesepakatan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pasca Tahun 2020. Paris Agreement merupakan pengganti kesepakatan Protocol Kyoto. Poin penting kebijakan adalah menetapkan batas aman kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C diatas suhu bumi pada masa pra-industri. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia: menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario bisnis seperti biasa pada Tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Berisi pengurangan risiko dan kerugian akibat bencana. Tujuan: mencegah timbulnya dan mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, serta meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. Target: mengurangi kematian rata-rata per-100 ribu penduduk, mengurangi orang terdampak rata-rata per-100 ribu penduduk, mengurangi kerugian ekonomi/GDP, mengurangi kerusakan infrastruktur kunci, meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB, meningkatkan kerjasama internasional, serta meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS. Tindakan Prioritas: 1. Memahami risiko bencana 2. Penguatan tata kelola risiko 3. Investasi PRB untuk resiliensi 4. Meningkatkan manajemen risiko
5	UNESCO Global Geoparks	UNESCO telah menetapkan Global Geopark Ciletuh sebagai warisan dunia pada April 2018 dengan warisan dunia berupa: a. Geologi (<i>geodiversity</i>): Geopark Ciletuh memiliki formasi batuan tertua di Jawa Barat yang terbentuk 145 juta tahun yang lalu. b. Keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>): Geopark Ciletuh memiliki keragaman flora dan fauna yang didukung keberadaan Suaka Margasatwa Cikepuh dan Taman Nasional Halimun–Salak. Salah satu satwa yang dilindungi adalah macan tutul dan elang jawa, sedangkan flora yang dilindungi adalah berbagai macam anggrek. c. Keragaman budaya (<i>cultural diversity</i>): Geopark Ciletuh memiliki kekayaan budaya historis dan prahistoris yang ditunjukkan dengan keberadaan desa wisata (Kasepuhan), Situs Megalitikum, keunikan bentang sawah (Tatanen), dan kesenian budaya sunda.

Sumber: berbagai sumber diolah BPIW, 2022

Berdasarkan arahan kebijakan secara global, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah harus memperhatikan **kesejahteraan penduduk secara merata** dan **pembangunan berkelanjutan** dengan tetap memperhatikan **pelestarian lingkungan** dan aspek **kebencanaan**.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur memuat arah kebijakan pengembangan wilayah dan arah kebijakan pemanfaatan infrastruktur.

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dihasilkan fokus dan lokus yaitu: Kebijakan penataan ruang berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan, pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertambangan, serta ketahanan bencana; kebijakan

sektor berfokus pada industri, kawasan perkotaan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, serta ketahanan bencana; serta agenda global berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana.

Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan **empat konteks perencanaan dan kawasan prioritas, yang meliputi industrialisasi, pertanian, pariwisata, dan pelayanan dasar sebagai fokus pengembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat**. Fokus perencanaan ini menjadi dasar dalam menguraikan bab-bab berikutnya dalam dokumen RPIW Jawa Barat.

Masing-masing fokus mempunyai *longlist* kawasan yang diperoleh dari sintesa kebijakan. Wilayah dengan fokus industri di 38 kawasan industri yang tersebar di bagian utara; fokus pertanian di 12 kabupaten yang berada di bagian utara dan selatan; fokus pariwisata di 16 KSPN yang terutama berada di wilayah tengah dan selatan; dan fokus pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan transportasi perkotaan di 2 PKN dan 8 PKW di Provinsi Jawa Barat.

Sasaran dan target fokus industri, fokus pertanian, dan fokus pariwisata diambil dari Visi Indonesia 2045, sedangkan pelayanan perkotaan diambil dari RPJMN 2025-2029. Sasaran dan target untuk fokus industri yaitu pertumbuhan PDB industri rata-rata 6,4% per tahun, peningkatan kontribusi PDB industri 26,0% pada tahun 2045, dan biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 8 persen pada tahun 2045. Sasaran dan target untuk fokus pertanian yaitu mempertahankan lahan pertanian dan mengembangkan tambahan lahan sekitar 7 juta ha. Sasaran dan target untuk fokus pariwisata yaitu pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta, dan pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia. Sementara untuk fokus pelayanan perkotaan yaitu akses air minum aman rumah tangga 15%, akses air minum jaringan perpipaan 30%, akses sanitasi aman rumah tangga 15%, akses 1 juta rumah susun perkotaan, dan penanganan sampah perkotaan sebanyak 80% dan pengurangan sebanyak 20%. Secara lengkap, sintesis arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan yang secara spasial dapat dilihat pada Peta 2.1.

Tabel 2.4 Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi Jawa Barat

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional PP 13/2017	Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan strategis berbasis industri, pertanian, pariwisata, dan pertambangan yang didukung oleh penguatan konektivitas dan simul transportasi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.	- Kawasan Perkotaan	Industrialisasi 1. Bekasi International Industrial Estate 2. MM2100 Industrial Town 3. Kawasan Industri Jababeka 4. Kawasan Industri Lippo Cikarang 5. Greenland International Industrial Center (GIIC) 6. KIT Indonesia China 7. KI SKI 8. KI Cimalaya 9. KI Indotaisei 10. KI Kujang Cikampek 11. Karawang International Industrial City 12. Podomoro Industrial Park Karawang 13. Karawang Jabar Industrial Estate 14. Cibinong Center Industrial Estate 15. KI Sentul 16. Cipali West Subang 17. Butom 18. Tukdana 19. Patrol 20. Cipali East Subang (KIT Subang) 21. Losarang 22. Cirebon 23. Kertajati 24. Cipali Indramayu 25. Krangkeng 26. Balongan 27. Patimban 28. Jatiwangi 29. KI Sukabumi 30. Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta 31. Kawasan Industri Gobel 32. Bekasi Fajar Industrial Estate 33. GT Tech Park - Karawang 34. Artha Industrial Hill 35. Suryacipta City of Industri 36. Marunda Center Swasembada Pangan, Air, dan Energi Kawasan pertanian di:	Industri: <u>Visi Indonesia 2045:</u> • Pertumbuhan PDB industri rata-rata sebesar 6,4% per tahun • Peningkatan kontribusi PDB industri menjadi sebesar 26,0% pada tahun 2045 • Biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 8 persen pada tahun 2045 Pertanian: <u>Visi Indonesia 2045:</u> Mempertahankan lahan pertanian dan mengembangkan tambahan lahan sekitar 7 juta ha sampai tahun 2045 <u>RPJMN 2025-2029:</u> • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (2029): 8,46% • Kapasitas tampungan air (2029): 70 m3/kapita Pariwisata: <u>Visi Indonesia 2045:</u> • Pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun • Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta pada tahun 2045 • Pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012	Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat diarahkan sebagai lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/perdagangan, dan pariwisata yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh konektivitas lintas utara-tengah-selatan, sistem jaringan energi, dan sumber daya air dengan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Lindung - Pertanian - Pariwisata - Industri dan Jasa		
	RTRW Provinsi Jawa Barat Perda Provinsi Jawa Barat 22/2010	pembangunan ekonomi berbasis 6 Wilayah Pengembangan (WP) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa, yang didukung oleh sistem transportasi dan infrastruktur dasar perkotaan/regional, serta tetap memperhatikan fungsi lindung dan kebencanaan.	- Mitigasi Bencana		
Kebijakan Sektor	Visi Indonesia 2045	Pengembangan infrastruktur mendukung pendidikan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemudahan investasi, serta pengurangan disparitas Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Lindung - Industri - Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Pariwisata - Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Kawasan pertanian di:	
	Asta Cita	Rencana pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum, termasuk di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Asta Cita 2 (swasembada pangan, energi, dan air), 3 (industri kreatif), 4 (sarana pendidikan, kesehatan, dan olahraga), 5 (hilirisasi dan industrialisasi), dan 6 (pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan).			
	RPJMN 2025-2029 Perpres 12/2025	RPJMN 2025–2029 mengamanatkan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan fokus tema Pusat Cutting-Edge Industry, Inovasi dan Pendidikan STEAM Bertaraf Global, serta Penumpu Ketahanan Pangan Nasional. Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Target pembangunan Provinsi Jawa Barat pada 2029 adalah target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-6,1%, penurunan tingkat kemiskinan 3,11%-3,61%, penurunan gini ratio 0,412-0,13, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,24-6,99%.			
	Proyek Strategis Nasional Permenko Bidang Perekonomian	Berdasarkan uraian PSN, proyek strategis di Provinsi Jawa Barat berfokus pada swasembadan pangan, air, dan energi melalui pembangunan bendungan dan jaringan irigasi; konektivitas (pembangunan jalan tol); dan memperkuat pembangunan pendidikan (pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia).			

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
	Nomor 12 Tahun 2024			1. Kawasan Strategis Citarum-Cimanuk-Cisangarung dan Citanduy 2. Kab Bekasi 3. Kab Bogor 4. Kab Karawang 5. Kab Subang 6. Kab Indramayu 7. Kab Cirebon 8. Kab Majalengka 9. Kab Sukabumi 10. Kab Cianjur 11. Kab Garut 12. Kab Tasikmalaya 13. Kab Ciamis	Kawasan Perkotaan: <u>RPJMN 2020-2024:</u> - Akses air minum aman rumah tangga 15% - Akses air minum jaringan perpipaan 30% - Akses sanitasi aman rumah tangga 15% - Akses 1 juta rumah susun perkotaan - Penanganan sampah perkotaan sebanyak 80% dan pengurangan sebanyak 20%
	RIPIN 2015-2035 PP 14/2015	Pengembangan industri di Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah utara dan berfokus pada industri pengolahan berbasis teknologi dengan dukungan infrastruktur yang ramah lingkungan dan manajemen industri			
	RIPPARNAS 2010-2025 PP 50/2011	Pemantapan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat ditekankan pada aspek kepariwisataan berkelanjutan serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan aspek manajemen industri kepariwisataan			
	RPJMD Provinsi Jawa Barat Perda Jawa Barat 8/2021	Pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan pengendalian risiko bencana			
	Visium PUPR 2030	Penyediaan infrastruktur tampungan air, peningkatan kemandapan jalan, pembangunan jalan dan jembatan baru, penyediaan air minum, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan infrastruktur sanitasi dan perumahan			
	Renstra PUPR 2020-2024	Peningkatan ketahanan air, kelancaran dan pemerataan konektivitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman.			
Kebijakan Kawasan Prioritas	RTR Cekungan Bandung Perpres 45/2018	Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, peningkatan keterkaitan kota inti dan kota sekitar, penguatan konektivitas, dan peningkatan pelayanan dasar perkotaan.	- Kawasan Perkotaan - Industri - Pemenuhan infrastruktur dasar	Pariwisata 1. KSPN Halimun dsk. 2. KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk. 3. KSPN Ciwidey dsk. 4. KSPN Tangkuban Perahu dsk. 5. KSPN Bandung Kota dsk. 6. KSPN Pangandaran dsk. 7. KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk. 8. KPPN Bogor-Ciawi dsk. 9. KPPN Gn. Halimun dsk. 10. KPPN Pelabuhan Ratu dsk. 11. KPPN Bandung Kota dsk. 12. KPPN Tangkuban Perahu dsk. 13. KPPN Lembang dsk. 14. KPPN Ciwidey dsk. 15. KPPN Tasikmalaya dsk. 16. KPPN Pangandaran dsk.	
	Percepatan Rebana dan Jawa Barat Selatan Perpres 87/2021	Rebana: Percepatan dukungan terhadap sektor industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Jawa Barat Bagian Selatan: Pemenuhan layanan dasar guna mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara-selatan Jawa Barat.			
Agenda Global	SDG's	Indonesia: Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup, pengurangan kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan mengurangi dampak perubahan iklim	- Kawasan Lindung - Konservasi - Pariwisata - Mitigasi Bencana - Pemenuhan infrastruktur dasar ramah lingkungan	Pelayanan Dasar 1. PKN Cekungan Bandung 2. PKN Cirebon 3. PKW Sukabumi 4. PKW Cikampek-Cikopo 5. PKW Pelabuhan Ratu 6. PKW Indramayu 7. PKW Kadipaten 8. PKW Tasikmalaya 9. PKW Pangandaran 10. PKW Cidaun	
	NUA	Indonesia: Optimalisasi pembangunan berkelanjutan terkait <i>Climate Change</i>			
	Paris Agreement	Indonesia: Penurunan tingkat emisi gas buang			
	Sendai Frameworks	Indonesia: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana			
	UNESCO Global Geopark	Jawa Barat: Pelestarian cagar budaya dan alam dengan memperhatikan standar dan ketentuan UNESCO.			

Sumber: Berbagai Kebijakan, diolah BPIW, 2025

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PU Prioritas

Kementerian PU bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2025-2029, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PU meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan prasarana strategis, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (swasembada pangan), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendorong lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PU adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal, hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- Menurunnya kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- Menyebabkan ketimpangan pembangunan. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas

sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PU yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PU prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PU terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.5 Infrastruktur PU Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PU	Kab/Kota	Highlight Indikasi Intervensi	PSN
1	Sumber Daya Air	SPAM Regional Juanda / Jatiluhur II	Kabupaten Karawang	V	
2	Cipta Karta	TPST Regional Bekasi Raya	Kabupaten Bekasi	V	
3	Cipta Karta	TPST Regional Karawang-Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	V	
4	Jalan & Jembatan	SPAL Regional Perkotaan Bekasi-Cikarang	Kabupaten Bekasi	V	
5	Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi	Kabupaten Bogor	V	V
6	Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang	Kabupaten Sukabumi-Cianjur-Bandung Barat	V	V
7	Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung)	Kabupaten Bogor	V	
8	Cipta Karta	Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi	Kabupaten Bogor-Sukabumi	V	
9	Cipta Karta	Pembangunan SPAM Bogor Raya	Kabupaten Bogor	V	
10	Jalan & Jembatan	Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung	Kota Bandung	V	
11	Cipta Karta	Pembangunan TPST Regional Badung Raya	Kabupaten Bandung	V	
12	Cipta Karta	Pembangunan SPAM Regional Bandung	Kabupaten Bandung	V	
13	Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya	Kota Bandung-Tasikmalaya-Garut	V	
14	Cipta Karta	Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya	Kabupaten Cirebon	V	
15	Cipta Karta	Pembangunan SPAM Cirebon Raya	Kabupaten Cirebon	V	
16	Cipta Karta	Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya-Ciamis	Kabupaten Tasikmalaya	V	
17	Sumber Daya Air	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cipamingkis dan DI Ciletuh	Kabupaten Sukabumi	V	
18	Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Cibeet	Kabupaten Bogor	V	
19	Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Cijurey	Kabupaten Bogor	V	
20	Sumber Daya Air	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jatiluhur, Rentang, Cihea, Cikeusik, Seseupan, Cipanas, Cipancuh, Cileuleuy, Leuwintangka	Jawa Barat Utara	V	
21	Sumber Daya Air	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikunten, Cikunten II, Manganti, Bantarheulang, dan Lakbok Utara.	Jawa Barat Selatan	V	
22	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Kabupaten Subang	V	V
23	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Soreang - Pasirkoja	Kabupaten Bandung		V
24	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Kabupaten Sumedang		V
25	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Kabupaten Subang		V
26	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap	Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran		V

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PU	Kab/Kota	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	PSN
27	Jalan & Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Kabupaten Subang		V
28	Sumber Daya Air	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Kabupaten Indramayu		V

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2025

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini memberikan fakta tentang profil wilayah dan potensi daerah sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis. Pada bab ini dijelaskan tentang profil fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Profil fisik dan kebencanaan di Provinsi Jawa Barat menggambarkan kondisi administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, jasa ekosistem, tutupan lahan, serta kebencanaan.

3.1.1. Profil Administrasi

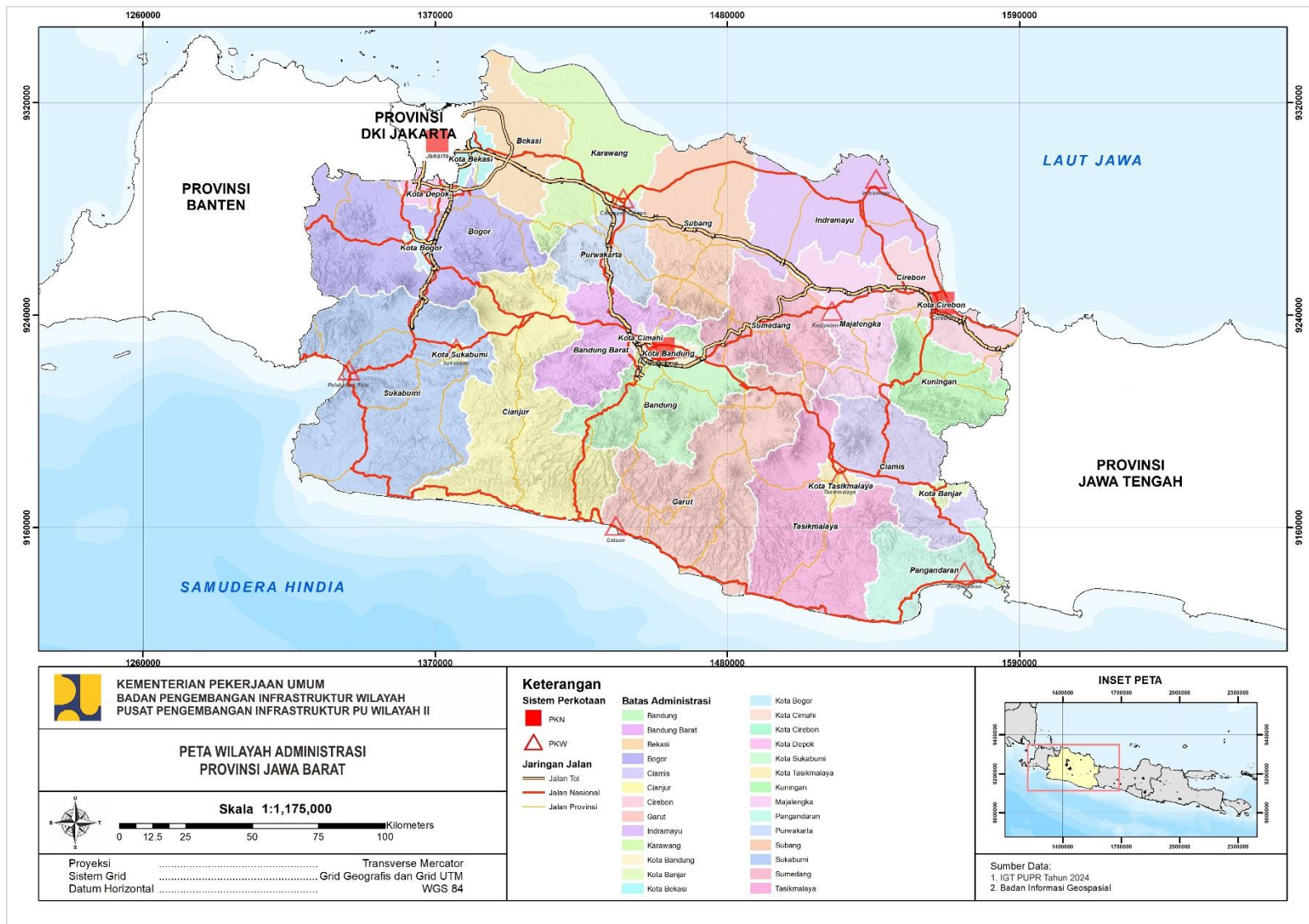
Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 34.816,96 km² dengan jumlah penduduk 50.489.208 jiwa (BPS, 2024). Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak pada koordinat 104° 48' BT s.d. 108° 48' BT dan 5° 50' LS s.d. 7° 50' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- sebelah utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
- sebelah timur, dengan Provinsi Jawa Tengah;
- sebelah selatan, dengan Samudra Indonesia; dan
- sebelah barat, dengan Provinsi Banten.

Provinsi ini terletak pada Jalur *Circum Pacific dan Mediteran*, sehingga termasuk daerah rawan bencana yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi yang aktif serta sering terjadi gempa Bumi. Provinsi ini beriklim tropis dengan suhu terendah 9°C di Puncak Gunung Pangrango dan tertinggi 34°C di Pantai Utara. Curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun, tetapi curah hujan di daerah pegunungan mencapai 3.000–5.000 mm/tahun.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, dimana 9 diantaranya merupakan kota administratif (Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar) dan 18 lainnya merupakan kabupaten. Secara lebih rinci, di Provinsi Jawa Barat terdapat 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat dengan 30 kecamatan. Dari 27 kabupaten/kota, wilayah terluas adalah Kabupaten Sukabumi dengan luas 48,33 km² dan wilayah terkecil adalah Kota Cirebon

dengan luas 37,36 km². Peta administrasi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Peta 3.1.



Peta 3.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

3.1.2. Profil Topografi

Kemiringan lereng di Provinsi Jawa Barat berada di rentang 0-25%. Bagian utara cenderung datar dan didominasi kemiringan 0-8%, sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, permukiman, serta budi daya terbangun. Sementara itu, di bagian selatan didominasi oleh wilayah berbukit dengan kemiringan 15-25%, sesuai untuk pengembangan kawasan lindung dan budi daya tidak terbangun.

Secara umum topografi wilayah daratan Provinsi Jawa Barat dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian meliputi:

1. Ketinggian 0–100 m dari permukaan laut sebesar 32,2% dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
2. Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut sebesar 31,6% dari luas wilayah dengan kondisi bergelombang dan bergunung;
3. Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut sebesar 23,9% dari luas wilayah dengan kondisi berbukit; dan
4. Ketinggian lebih dari 1.000 m dari permukaan laut sebesar 12,3% dari seluruh luas wilayah dengan kondisi bergunung dan terjal.

3.1.3. Profil Geologi

Secara umum, kondisi geologi Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu Zona Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan. Jenis tanah yang ada di Provinsi Jawa Barat terdiri dari jenis tanah aluvial, endapan gunung api muda, sedimen tersier, batuan beku intrusif maupun ekstrusif, serta batuan sedimen berumur neogen yang bertumpuk dengan batuan vulkanik berumur kuartar. Jenis tanah terluas di Provinsi Jawa Barat adalah aluvial dengan luas 264.487 Ha. Sementara itu, jumlah gunung di Jawa Barat relatif banyak. Beberapa di antaranya masih aktif, sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun.

Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi yang aktif di Jawa Barat, yaitu Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya dan Garut), Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon), Gunung Gede (Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Bogor), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Guntur (Kabupaten Garut) dan Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Subang dan Bandung). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Barat rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan kontinu. Peta topografi dan geologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.2.

3.1.4. Profil Klimatologi

Provinsi Jawa Barat memiliki 9 (sembilan) stasiun hujan namun hanya 5 (lima) stasiun hujan yang mengukur jumlah curah hujan pada tahun 2024. Curah hujan di Provinsi Jawa Barat cenderung menengah dengan nilai 30-512 mm/bulan. Curah hujan tertinggi di Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun, tercatat jumlah curah hujan tertinggi berada di bulan November dengan nilai sebesar 512 mm dengan jumlah hari hujan 26 hari. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Juli sebesar 30 mm dan jumlah hari hujan 7 hari.

Kelembapan udara di Provinsi Jawa Barat naik dari 80,5 persen pada tahun 2024 menjadi 82,9 persen di tahun 2024. Hal ini mengakibatkan naiknya curah hujan, dimana pada tahun 2023 curah hujan di Jawa Barat sebesar 3.736,0 mm, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 4.857,9 mm. Selain itu, jumlah hari hujan tercatat mengalami kenaikan menjadi 207 hari pada tahun 2023 dibandingkan 247 hari pada tahun 2024.

3.1.5. Profil Hidrologi

Wilayah Jawa Barat memiliki 5 (lima) wilayah sungai (WS) kewenangan nasional yang memberikan sumber air baku untuk kegiatan pertanian, industri, dan permukiman. Wilayah sungai yang sebagian besar bermuara ke wilayah utara mendukung perkembangan wilayah utara sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan pengelolaan secara lebih optimal untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi air permukaan sebesar 48 Miliar m³/tahun yang berasal dari 3.504 sungai dengan panjang 65.540 km, 831 danau dan situ, 20 waduk, 1.448 mata air. Selain itu, pantai Provinsi Jawa Barat membentang sepanjang 724,85 km dengan 356,75 km di wilayah utara dan 368,10 km di wilayah selatan.

Wilayah sungai tersebut memberikan sumber air baku untuk mendukung Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional dan perkembangan kawasan permukiman dan industri. Meskipun banyak potensi air baku dari wilayah sungai, belum terkelolanya air baku dengan baik mengakibatkan wilayah utara masih mengalami defisit air baku. Secara lengkap, profil hidrologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.3.

3.1.6. Jasa Ekosistem

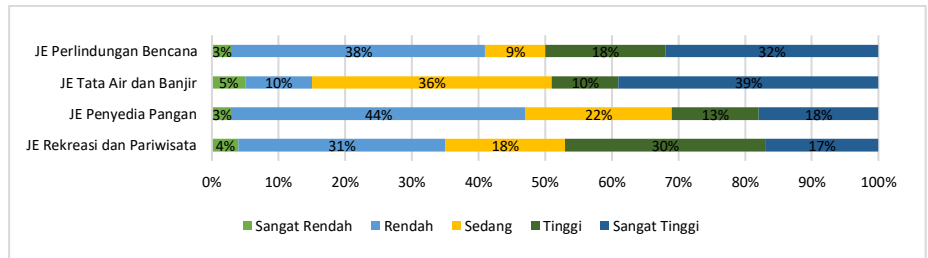
Jasa ekosistem menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam menentukan batasan pengembangan, terutama untuk mendukung penyediaan sumber daya secara berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi. Jasa ekosistem terdiri atas:

- 1. JE Penyedia, terdiri dari penyediaan pangan, air, energi, serat, dan genetik;
- 2. JE Pengaturan, terdiri dari pengaturan iklim, tata air dan banjir, perlindungan pencegahan bencana, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan, dan pengendalian hama;
- 3. JE Budaya, terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika; dan
- 4. JE Pendukung, terdiri dari pembentuk lapisan tanah dan kesuburan, siklus hara, produksi primer, serta perlindungan plasma nutfah.

Dari keseluruhan data jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat, ditetapkan 4 jasa ekosistem yang dinilai berpengaruh besar terhadap pengembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu Jasa Ekosistem Penyedia Pangan, Penyedia Air, Perlindungan Pencegahan Bencana, dan Pemurnian Air.

Kondisi lingkungan Provinsi Jawa Barat masih memungkinkan memberikan dukungan sumber daya bagi penghidupan masyarakatnya. Hal itu ditunjukkan dengan luasan wilayah dengan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan tinggi, yaitu sebesar 21% dari total luasan wilayah atau 7,7 juta hektar, yang merupakan kawasan pertanian produktif. Daya dukung Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan air baku juga masih mencukupi dengan wilayah yang memiliki Jasa Ekosistem Pemurnian Air tinggi sebesar 52% dari total luasan wilayah atau 19 juta hektar, yang menunjukkan masih tingginya lokasi wilayah resapan air yang mendukung ketersediaan air permukaan.

Tingginya potensi bencana di Provinsi Jawa Barat didukung dengan keberadaan wilayah dengan Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana yang cukup tinggi sebesar 40% atau 14 juta hektar dan wilayah dengan Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir sebesar 49% atau 18 juta hektar. Luasan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi dalam mengendalikan bencana harus dipertahankan untuk mengurangi tingkat risiko bencana terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.



Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2022

Penilaian dalam jasa ekosistem menentukan kesesuaian pengembangan untuk masing-masing wilayah di Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi untuk produksi pertanian berada di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu.

Daya dukung lingkungan tinggi untuk tata air dan banjir berada di wilayah tengah Provinsi Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Kuningan. Wilayah yang memiliki daya dukung tinggi dalam pengendalian bencana berada di kawasan perkotaan seperti wilayah Perkotaan Bodebek, Kota Bandung, dan Kota Cirebon sehingga sesuai untuk dikembangkan sebagai permukiman dengan kepadatan tinggi.

Keberadaan wilayah dengan daya dukung sangat tinggi dan tinggi ditetapkan menjadi Wilayah Prioritas Perlindungan (WPP) untuk mempertahankan daya dukung lahan Provinsi Jawa Barat dalam menampung segala aktivitas ekonomi dan sosial yang terus berkembang. WPP tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah terbesar berada di Sukabumi, Bogor, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Pangandaran. Total luas WPP yang perlu dibatasi pembangunannya adalah seluas 899.000 Ha. Secara lengkap, profil jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.4.

3.1.7. Tutupan Lahan

Tutupan lahan Provinsi Jawa Barat dengan kondisi lahan yang subur didominasi oleh lahan pertanian yang menyumbang 57% dari total luas wilayah atau sebesar 2,1 juta hektar (Tahun 2019). Lahan pertanian terbesar disumbangkan oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 890.438 Ha, diikuti dengan tutupan lahan Sawah sebesar 814.966 Ha. Dilihat dari tingkat persebarannya, tutupan lahan pertanian terutama berada di wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan hulu sungai besar dengan tingkat elevasi yang landai. Sedangkan wilayah tengah didominasi tutupan perkebunan, lahan hutan produksi dan hutan lindung yang memiliki luasan 28% dari total wilayah atau 10 juta hektar. Keberadaan kawasan hutan yang berfungsi lindung ini masih sedikit di bawah ketentuan rencana tata ruang bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa harus menyediakan setidaknya 30% dari luas wilayahnya sebagai kawasan berfungsi lindung. Untuk itu Provinsi Jawa Barat masih kurang luasan kawasan berfungsi lindungnya sebesar 70 ribu hektar untuk mencapai standar minimum kawasan lindung yang dapat mendukung kegiatan di seluruh wilayahnya.

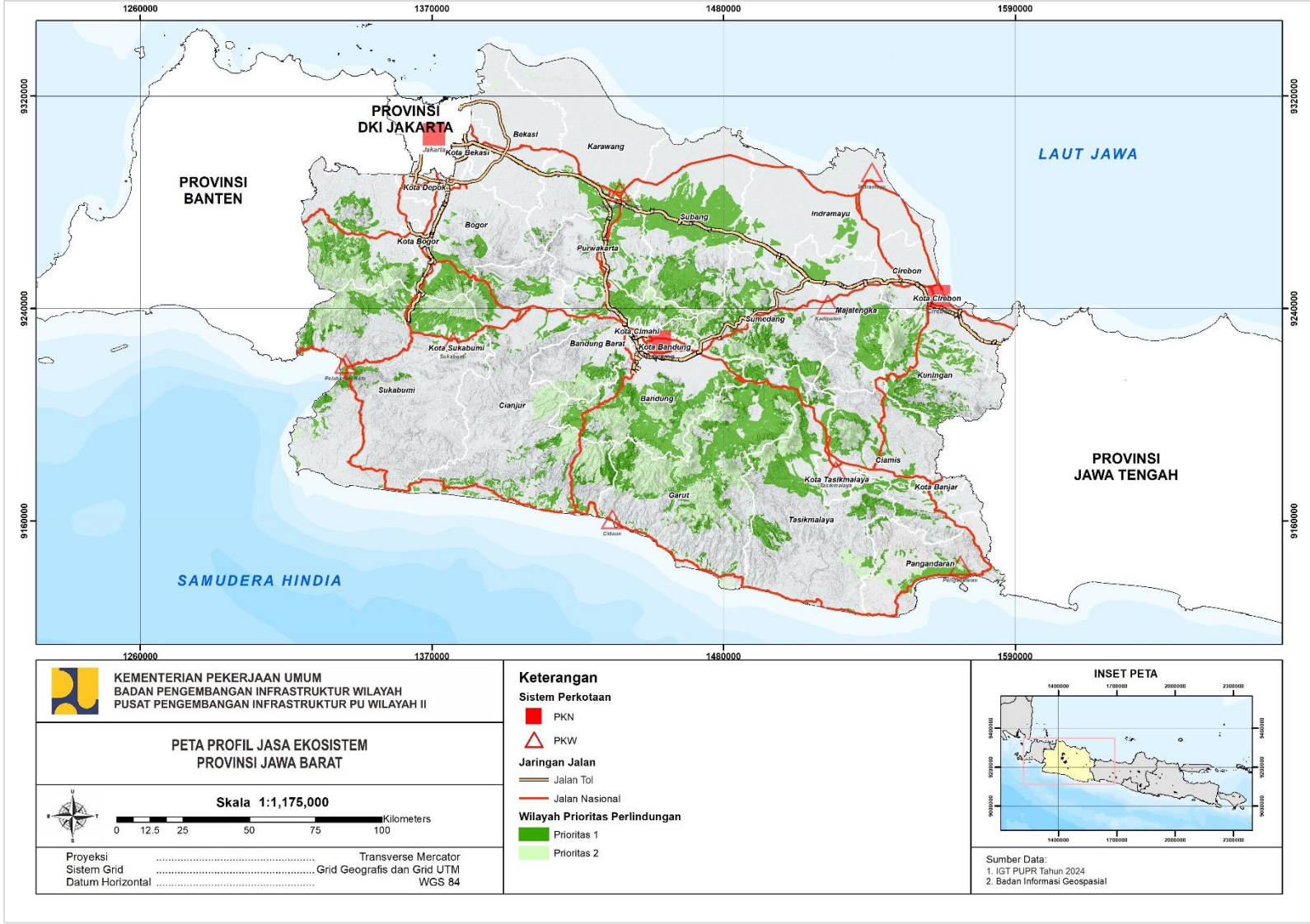
Tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup signifikan, yaitu seluas 326.182 hektar atau sebesar 13% dari total luas lahan pertanian, dimana yang terbesar berada di Kabupaten Cianjur (55.516 ha), Kabupaten Garut (29.442 ha), dan Kabupaten Bandung Barat (26.615 ha). Perubahan tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019

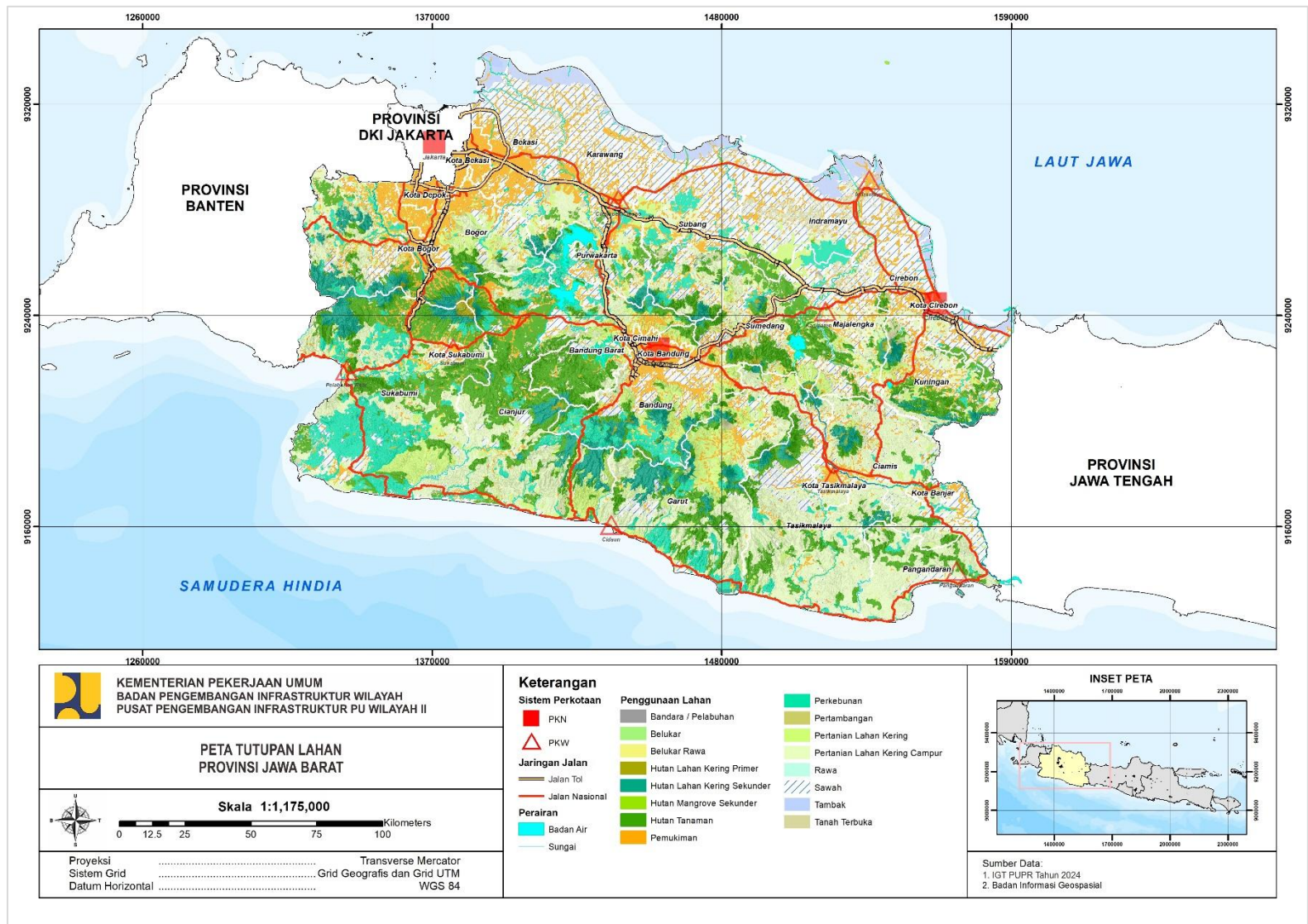
Penggunaan Lahan	Luas 2009 (ha)	Luas 2019 (ha)	Perubahan 2009-2019	Persentase perubahan
Belukar	37.062	8.615	-28.447	77%
Hutan Lahan Kering Primer	14.889	12.336	-2.553	17%
Hutan Lahan Kering Sekunder	152.932	193.311	40.379	26%
Hutan Mangrove	1.124	636	-488	43%
Hutan Tanaman	443.436	583.111	139.675	31%
Permukiman	168.604	353.399	184.795	110%
Perkebunan	302.958	250.127	-52.831	17%
Pertambangan	862	3.028	2.166	251%
Pertanian	2.450.169	2.123.987	-326.182	13%
Rawa	11	166	155	1409%
Tambak	79.094	67.648	-11.446	14%
Tanah Terbuka	19.869	74.646	54.777	276%

Sumber: BIG diolah BPIW, 2022

Guna lahan terbesar kedua pada tahun 2019 adalah hutan tanaman dengan luas 583.111 hektar (15%). Selanjutnya, guna lahan terbesar ketiga adalah permukiman dengan luas 353.399 hektar (9,6%) yang mengalami perubahan sebesar 184.795 hektar dari tahun 2009. Perubahan permukiman tertinggi berada di Kabupaten Bogor (11.460 ha), Kabupaten Bekasi (8.875 ha), dan Kabupaten Bandung (6.821 ha). Untuk kawasan lainnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat peningkatan luasan kawasan hutan sebesar 177.013 hektar, peningkatan luasan kawasan perkebunan sebesar 81.523 hektar, dan pengurangan luasan kawasan peruntukan tambak sebesar 11.446 ha. Secara lengkap, tutupan lahan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.5.



Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat



3.1.8. Kerawanan Bencana

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi karena berada di pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia dan jalur *Ring of Fire* atau deret sirkum pasifik. Dampak lainnya adalah terbentuknya patahan atau sesar yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat 5 wilayah sungai besar yang mengalir ke wilayah dengan tingkat kelandaian rendah yang mengakibatkan tingginya intensitas banjir.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dengan tingkat risiko bencana tinggi yang ditandai dengan jumlah penduduk terdampak gempa bumi tertinggi (15 juta orang), terdampak longsor tertinggi (3 juta orang), serta terdampak banjir tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur (32 juta orang). Data terkait tingkat risiko bencana tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah pengembangan permukiman pada wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana rendah.

A. Kerawanan Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak gunung api dengan kondisi aktif, di antaranya Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Ciremai di Kabupaten Kuningan, Gede di Kabupaten Bogor, Salak di Kabupaten Bogor, Papandayan di Kabupaten Garut, dan Tangkuban Perahu di Kabupaten Subang. Keberadaan gunung api, selain mengakibatkan tingginya risiko erupsi, namun juga memberikan manfaat bagi tingkat kesuburan tanah. Letusan gunung api terakhir di Provinsi Jawa Barat adalah letusan Gunung Papandayan yang terjadi pada tahun 2003 yang berdampak pada 2.951 jiwa.

Provinsi Jawa Barat memiliki luasan wilayah dengan risiko bencana gunung api sebesar 15.948 hektar, umumnya terkonsentrasi di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat hingga Cekungan Bandung. Jumlah penduduk yang terkena risiko bencana letusan gunung api sebesar 178 ribu orang, dengan tingkat kerugian kerusakan fisik sebesar Rp615 Miliar dan kerugian ekonomi sebesar Rp1,5 Miliar.

B. Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Provinsi Jawa Barat juga memiliki tingkat risiko bencana gempa bumi yang tinggi karena adanya 7 (tujuh) sesar aktif yaitu Sesar Cimandiri mencakup Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung; Baribis mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta; Cipamingkis mencakup Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur; Gersela mencakup Kabupaten Garut; Citarik mencakup Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bekasi; Lembang

mencangkup Kabupaten Bandung; serta Cugenang mencangkup Kabupaten Cianjur. Hal ini mengakibatkan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kawasan rawan bencana (KRB) menengah yang berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan intensitas VII–VIII MMI (modified Mercalli intensity) bahkan intensitas lebih besar dari VIII MM dengan intensitas tertinggi berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Cekungan Bandung.

Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan besarnya penduduk yang memiliki risiko gempa bumi sebesar 15 juta penduduk. Jumlah penduduk terpapar ini merupakan tertinggi secara nasional yang menunjukkan bahwa kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat masih dibangun di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Kepadatan permukiman yang tinggi belum diikuti dengan kesesuaian struktur bangunan gedung secara SNI, sehingga mengakibatkan tingginya risiko kerugian kerusakan bangunan sebesar Rp53 Triliun dan risiko kerugian ekonomi sebesar Rp9 Triliun.

C. Kerawanan Bencana Gerakan Tanah

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan terjadinya bencana longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah, khususnya di wilayah tengah dan selatan. Kelerengan yang cenderung curam dan kondisi tanah lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur menyebabkan tingginya risiko bencana longsor pada selatan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan lahan kritis pada kawasan dengan kecuraman tinggi juga memicu terjadinya longsor dan gerakan tanah pada saat musim hujan serta gempa bumi.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat risiko bencana longsor tertinggi di Indonesia dengan luasan kawasan terdampak sebesar 228.940 hektar. Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan tingginya penduduk dengan risiko bencana longsor yaitu sebesar 3 juta penduduk. Selain itu, tingginya kepadatan kawasan permukiman juga mengakibatkan tingginya kerugian materiil, dimana risiko kerusakan bangunan sebesar 11 triliun rupiah dan risiko kerugian ekonomi sebesar 16 triliun rupiah.

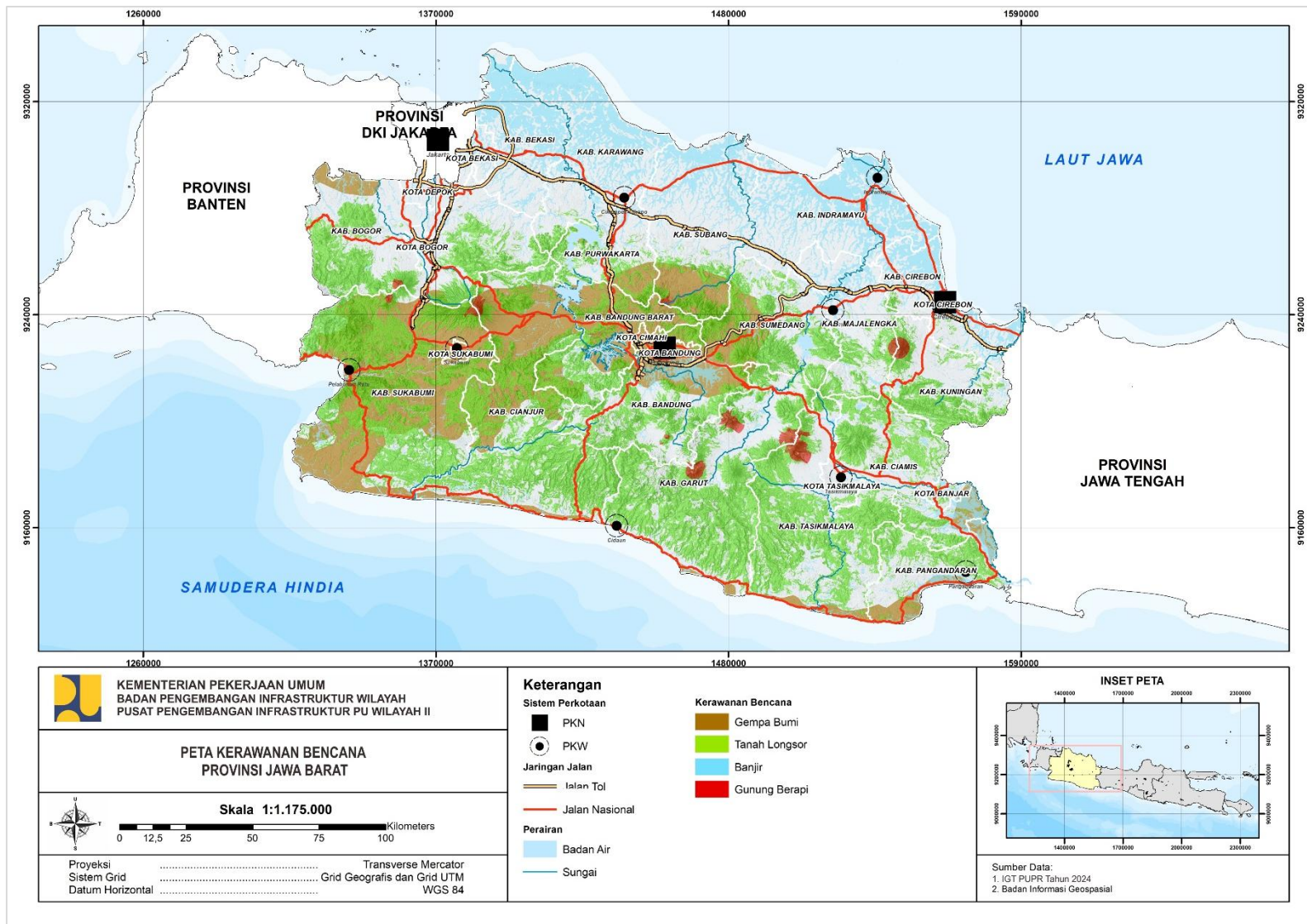
D. Kerawanan Bencana Banjir

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi khususnya di wilayah utara. Wilayah Sungai Citarum merupakan wilayah dengan tingkat risiko banjir tertinggi dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang mencapai 27 juta orang (54% Provinsi Jawa Barat). Penduduk di Wilayah Sungai Citarum terkonsentrasi di Kabupaten Bogor (20%), Kabupaten Bandung (13%), Kabupaten Bekasi (11%), Kota Bandung (10%), Kabupaten Cianjur (8,9%), dan Kabupaten Karawang (7,1%). Konsentrasi penduduk terbanyak berada di wilayah Jabodetabekpunjur dan Cekungan

Bandung di mana tekanan perkembangan kawasan permukiman mengakibatkan terjadinya banjir setiap tahunnya.

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung juga memiliki beberapa kawasan yang terdampak banjir seperti di Pamanukan, Kabupaten Subang. Banjir tersebut disebabkan karena Provinsi Jawa Barat memiliki luasan kawasan risiko banjir tinggi sebesar 388.110 hektar, umumnya disebabkan oleh Sungai Citarum baik di hulu sungai maupun di hilir. Wilayah dengan risiko banjir tersebut berada pada daerah dengan kepadatan tinggi sehingga yang mengakibatkan tingginya jumlah penduduk dengan risiko banjir sebesar 33 juta penduduk (69% dari total penduduk). Selain itu, tingginya kepadatan penduduk terutama di sepanjang DAS mengakibatkan tingginya kerugian materil, dimana risiko kerusakan bangunan sebesar 13 triliun rupiah dan risiko kerugian ekonomi sebesar 31 triliun rupiah.

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat (IRBI, 2021), wilayah dengan indeks risiko tinggi berada di beberapa kabupaten yaitu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran. Klasifikasi kawasan rawan bencana di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.6.



3.2. Profil Demografi

Profil demografi memberikan gambaran kondisi kependudukan Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, kepadatan wilayah, serta kualitas hidup manusia (IPM).

3.2.1. Kependudukan

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 50.345.200 jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2025), dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,04% per tahun. Pertumbuhan tertinggi berada di Kota Sukabumi (1,35%), Kab. Bandung Barat (1,30%), dan Kota Cimahi (1,29%). Penduduk terbanyak berada di Kab. Bogor (5,6 juta jiwa) dan penduduk terendah terdapat pada Kota Banjar (210 ribu jiwa).

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	48.683	49.316	48,274	48,728	49,406	49,927	50,345
Bogor	5.840	5.965	5,427	5,490	5,567	5,627	5,682
Sukabumi	2.460	2.466	2,726	2,762	2,807	2,802	2,828
Cianjur	2.260	2.263	2,478	2,507	2,543	2,558	2,585
Bandung	3.717	3.775	3,624	3,666	3,719	3,721	3,753
Garut	2.606	2.622	2,586	2,605	2,627	2,684	2,717
Tasikmalaya	1.751	1.754	1,865	1,884	1,906	1,907	1,921
Ciamis	1.188	1.195	1,229	1,238	1,248	1,252	1,259
Kuningan	1.074	1.080	1,168	1,180	1,196	1,202	1,214
Cirebon	2.176	2.192	2,271	2,291	2,315	2,360	2,388
Majalengka	1.199	1.205	1,306	1,319	1,335	1,341	1,353
Sumedang	1.149	1.152	1,153	1,159	1,167	1,178	1,187
Indramayu	1.719	1.728	1,834	1,851	1,872	1,894	1,914
Subang	1.579	1.595	1,595	1,609	1,624	1,650	1,663
Purwakarta	953	962	998	1,012	1,029	1,037	1,050
Karawang	2.336	2.353	2,439	2,469	2,505	2,526	2,554
Bekasi	3.630	3.763	3,113	3,158	3,215	3,237	3,274
Bandung Barat	1.683	1.699	1,788	1,814	1,847	1,860	1,884
Pangandaran	397	399	424	428	432	432	434
Kota Bogor	1.096	1 112	1,043	1,052	1,064	1,071	1,078
Kota Sukabumi	326	328	346	351	356	361	366
Kota Bandung	2.503	2.507	2,444	2,453	2,462	2,507	2,528
Kota Cirebon	316	319	333	337	341	342	345
Kota Bekasi	2.931	3.003	2,544	2,565	2,590	2,627	2,644
Kota Depok	2.330	2.406	2,056	2,086	2,123	2,145	2,164
Kota Cimahi	607	614	568	572	575	591	599
Kota Tasikmalaya	662	663	716	724	733	742	751
Kota Banjar	182	183	201	203	206	208	210

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, Hasil Analisis, 2025

Kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Jawa Barat adalah 13,6 jiwa/hektar dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Bandung (152 jiwa/hektar), Kota Cimahi (141

jiwa/hektar), dan Kota Bekasi (124 jiwa/hektar). Secara lengkap, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

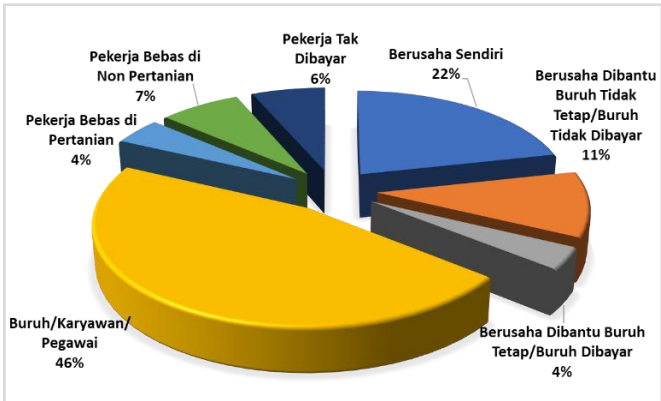
Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Kepadatan Penduduk (Ha/Jiwa)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	14	14	14	13	13	14
Kabupaten Bogor	22	20	20	19	19	19
Kabupaten Sukabumi	6	7	7	7	7	7
Kabupaten Cianjur	6	6	7	7	7	7
Kabupaten Bandung	21	21	21	21	21	22
Kabupaten Garut	9	8	8	8	9	9
Kabupaten Tasikmalaya	7	7	7	7	7	7
Kabupaten Ciamis	8	9	9	8	8	8
Kabupaten Kuningan	10	11	11	10	10	10
Kabupaten Cirebon	22	23	23	22	22	22
Kabupaten Majalengka	10	11	11	10	10	10
Kabupaten Sumedang	8	8	8	7	8	8
Kabupaten Indramayu	8	9	9	9	9	9
Kabupaten Subang	8	8	8	8	8	8
Kabupaten Purwakarta	12	12	12	10	10	11
Kabupaten Karawang	14	15	15	13	13	13
Kabupaten Bekasi	31	25	26	26	26	26
Kabupaten Bandung Barat	13	14	14	14	14	15
Kabupaten Pangandaran	4	4	4	4	4	4
Kota Bogor	94	88	89	96	96	97
Kota Sukabumi	68	72	73	74	75	76
Kota Bandung	150	146	146	148	150	152
Kota Cirebon	85	89	90	86	87	87
Kota Bekasi	145	123	124	122	123	124
Kota Depok	120	103	104	106	107	108
Kota Cimahi	156	145	146	136	139	141
Kota Tasikmalaya	39	42	42	40	40	41
Kota Banjar	16	18	18	16	16	16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2025

3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

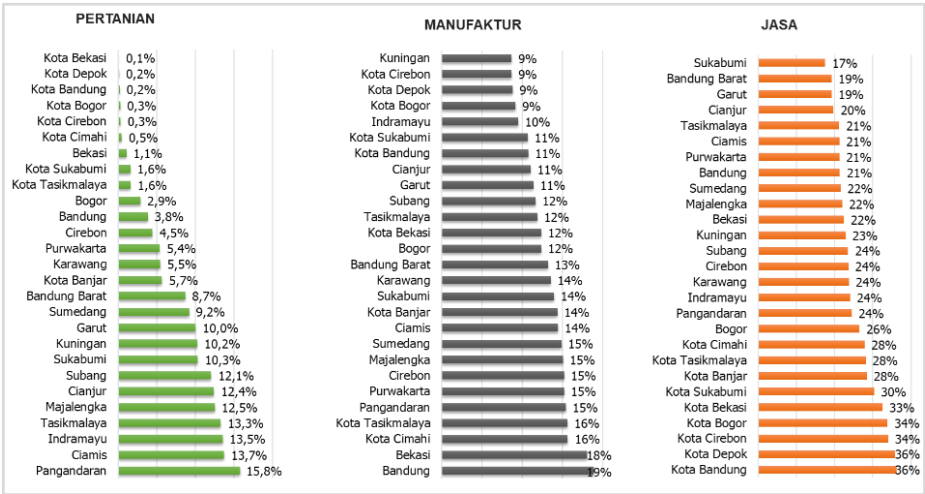
Jawa Barat memiliki total Angkatan kerja adalah sebesar 21 juta jiwa, dengan sebagian besar mata pencaharian menurut lapangan pekerjaan utama berada di sektor jasa (56%), diikuti sektor manufaktur (30%), dan sektor pertanian (14%) (BPS, 2022).



Gambar 3.2 Mata Pencaharian Menurut Status Pekerjaan Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Jenis pekerjaan masyarakat Jawa Barat berdasarkan status pekerjaan terbagi menjadi 7 (tujuh) sektor dominan, yaitu buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, pekerja tak dibayar, berusahan sendiri, buruh tidak dibayar, dan buruh dibayar. Jumlah pekerja terbanyak berasal dari buruh/karyawan. Hal ini sebanding dengan jumlah mata pencaharian terbanyak di bidang jasa dan manufaktur. Di semua kabupaten/kota, sebagian besar angkatan kerja (46%) memiliki status sebagai pegawai tetap yang didominasi oleh penduduk perkotaan, diikuti oleh wiraswasta (22%).



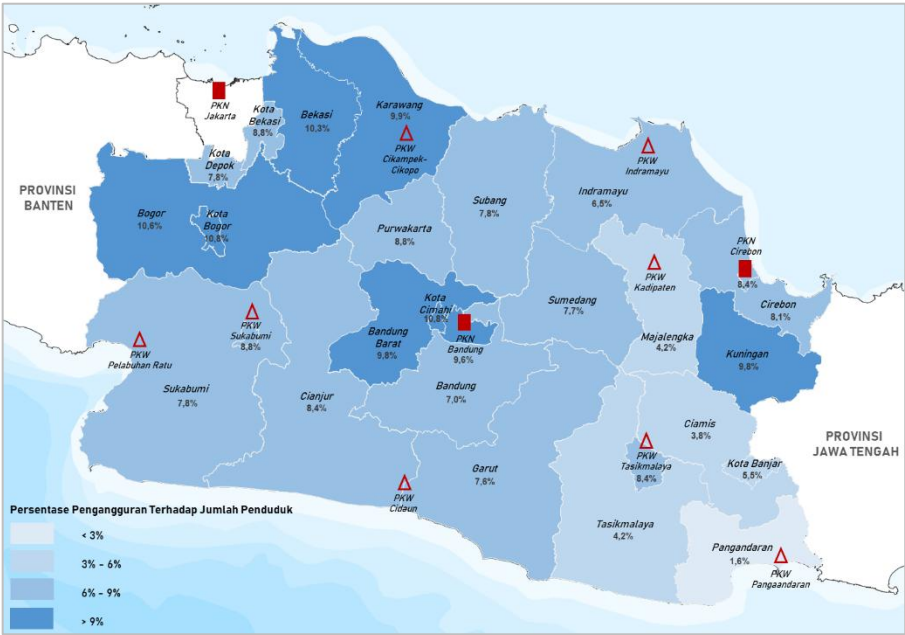
Gambar 3.3 Mata Pencaharian Utama Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

3.2.3. Pengangguran

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 6,75%. Nilai ini masih berada di atas rata-rata nasional (4,91%). Walaupun sudah mengalami penurunan 0,69% dari tahun 2023, Kota Cimahi memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,97%, Kabupaten Bekasi sebesar 8,82%, Kota Sukabumi sebesar 8,34%, dan Kota Bogor sebesar 8,13%.

Tingginya tingkat pengangguran diakibatkan karena tidak sesuai ketersediaan lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Tercatat di Provinsi Jawa Barat bahwa kegiatan ekonomi terutama berada pada sektor industri pengolahan dengan kontribusi 42% terhadap ekonomi. Sementara itu tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,05% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,01%. Hal ini mengakibatkan tidak mampunya tingkat lulusan sekolah menengah atas untuk memasuki dunia pekerjaan di sektor berteknologi tinggi.



Gambar 3.4 Jumlah Penduduk dan Pengangguran Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

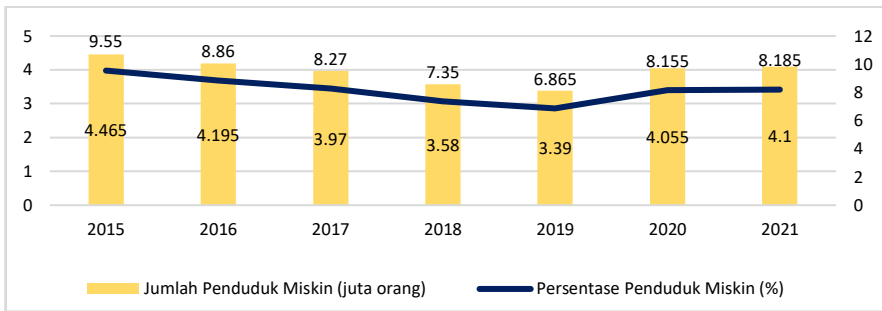
3.2.4. Kemiskinan

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 3,89 juta jiwa atau 7,08% dari total penduduk. Dari total jumlah kemiskinan tersebut, 403 ribu jiwa atau 10,5% dari total penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori kemiskinan

ekstrem. Persentase kemiskinan ekstrem ini mengalami penurunan cukup signifikan dibanding pada tahun 2022 yang mencapai 940 ribu jiwa atau 23% dari total penduduk miskin. Masih adanya penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kondisi ekonomi karena peluang produksi relatif kecil akibat keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya distribusi hasil pembangunan.

Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat justru berada di pusat lumbung pangan. Hal ini menunjukkan belum berkontribusinya sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten penghasil padi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Indramayu (11,08%), Kabupaten Kuningan (10,86%), Kabupaten Cirebon (10,30%), Kabupaten Majalengka (9,95%), dan Kabupaten Cianjur (9,26%). Selain itu, tingkat kemiskinan juga tergolong tinggi di wilayah Jawa Barat Selatan dimana tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kota Tasikmalaya (10,22%), Kabupaten Garut (9,54%), dan Kabupaten Tasikmalaya (9,72%) yang menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antara wilayah utara-selatan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat tercatat mengalami kenaikan dari 7,25% pada 2018 menjadi 8,43% pada 2020, lalu turun kembali hingga menjadi 7,08% pada 2024. Pada September 2024, juga tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,44% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,29.



Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai IPM sebesar 74,43 atau lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional sebesar 75,02 (BPS, 2024). IPM Provinsi Jawa Barat selalu meningkat setiap tahunnya dengan total peningkatan mencapai 2,3 point dari tahun 2020 sebesar 72,09 poin. IPM tertinggi berada di Kota Bekasi (83,54) yang pada beberapa tahun sebelumnya selalu menempati peringkat ke 2 sebagai kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung, lalu disusul Kota Bandung (83,52), dan Kota Depok (82,91). IPM terendah berada di wilayah selatan Jawa Barat, yaitu di

Kabupaten Cianjur (67,24), Kabupaten Tasikmalaya (68,36), dan Kabupaten Garut (68,79).

Berdasarkan masing-masing komponen, tingkat harapan hidup terendah berada di Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, dan Kab. Majalengka. Sementara itu, tingkat harapan hidup tertinggi dimiliki Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung. Tingkat pendidikan terendah berada di Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, dan Kab. Subang, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi berada pada Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cimahi. Pengeluaran per kapita paling rendah berada di Kab. Garut, Kab. Cianjur, dan Kab. Tasikmalaya, sedangkan pengeluaran paling tinggi adalah Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung.

3.3. Profil Ekonomi

Profil ekonomi menunjukkan gambaran kinerja ekonomi dilihat dari besaran PDRB, pendapatan perkapita, sektor unggulan wilayah, dan perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Jawa Barat. Tiga sektor unggulan Jawa Barat akan (industri, pertanian, dan pariwisata) dijabarkan lebih lanjut dalam profil dan rantai nilai ekonomi terhadap Provinsi Jawa Barat.

3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2024, PDRB Provinsi Jawa Barat (Rp1.752.071,20 Miliar) menyumbang 22,9% bagi perekonomian Pulau Jawa dan 13,41% bagi perekonomian Nasional. Sektor yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, yang berkontribusi sebesar 17,6% terhadap sektor industri pengolahan nasional. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 8,7% terhadap sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor nasional. Sementara itu, sektor konstruksi di Jawa Barat berkontribusi sebesar 6,4% terhadap sektor konstruksi nasional.

Wilayah dengan kontribusi ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Bekasi dengan PDRB sebesar 421.323,53 miliar rupiah (14,9% Jawa Barat), diikuti Kota Bandung sebesar 371.845,62 miliar rupiah (13,1% Jawa Barat) dan Kabupaten Karawang sebesar 309.842,85 miliar rupiah (10,9% Jawa Barat). Sedangkan wilayah dengan kontribusi ekonomi terendah berada di Kota Banjar dengan PDRB sebesar 5.549,26 miliar rupiah (0,2% Jawa Barat), Kabupaten Pangandaran sebesar 15.474,58 miliar rupiah (0,5% Jawa Barat) dan Kota Sukabumi sebesar 16.370,38 miliar rupiah (0,6% Jawa Barat).

3.3.2. Pendapatan Perkapita

Kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Bandung (Rp92,18 Juta), Bekasi (Rp89,7 Juta), dan Karawang (Rp76,3 Juta). Sementara itu, pendapatan perkapita terendah di Tasikmalaya (Rp15,03 Juta), Cianjur (Rp14,78 Juta), dan Cirebon (Rp16,51 Juta).

Tabel 3.4 PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	30,413	30,181	30,935	32,247	33,482	34,801
Bogor	26,709	28,476	29,100	30,230	31,399	32,713
Sukabumi	18,651	17,010	17,447	18,156	18,910	19,704
Cianjur	13,900	12,869	13,156	13,660	14,205	14,781
Bandung	22,321	22,433	22,985	23,985	24,947	25,981
Garut	14,939	14,949	15,298	15,860	16,428	17,030
Tasikmalaya	13,789	13,081	13,416	13,932	14,472	15,034
Ciamis	18,329	17,898	18,444	19,238	20,065	20,934
Kuningan	15,560	14,495	14,868	15,517	16,159	16,893
Cirebon	15,421	14,696	14,829	15,237	15,779	16,507
Majalengka	17,759	16,704	17,329	18,297	19,240	20,287
Sumedang	20,490	20,552	21,021	21,898	22,811	23,557
Indramayu	34,629	32,336	32,156	32,700	35,494	35,894
Subang	18,264	17,797	17,869	18,466	19,157	19,918
Purwakarta	48,924	45,549	46,426	48,176	49,891	51,547
Karawang	70,240	64,852	67,709	71,097	74,050	76,301
Bekasi	68,158	78,345	79,962	83,010	86,249	89,700
Bandung Barat	18,773	17,198	17,530	18,206	18,854	19,528
Pangandaran	19,307	18,304	18,851	19,660	20,558	21,479
Kota Bogor	29,643	30,893	31,755	33,234	34,608	36,134
Kota Sukabumi	26,527	24,724	25,278	26,234	27,179	28,171
Kota Bandung	77,545	79,032	81,422	85,039	88,554	92,183
Kota Cirebon	53,245	50,074	51,088	53,196	55,367	57,660
Kota Bekasi	23,580	26,629	27,179	28,198	29,401	30,730
Kota Depok	20,802	23,497	24,000	24,870	25,740	26,919
Kota Cimahi	38,002	39,336	40,518	42,312	43,894	45,594
Kota Tasikmalaya	23,320	21,601	22,100	22,910	23,973	24,922
Kota Banjar	17,291	16,229	16,633	17,142	17,745	18,514

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2024

3.3.3. Sektor Ekonomi Unggulan

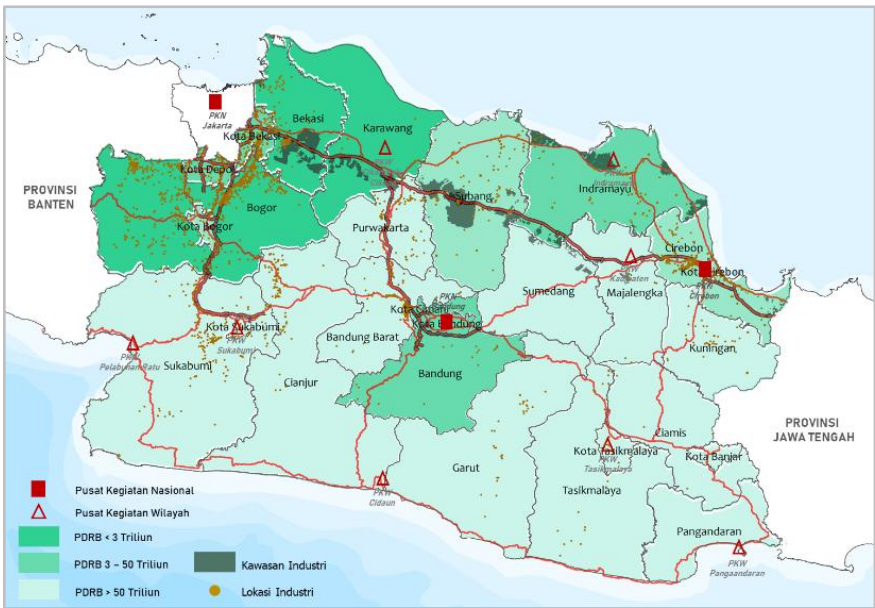
Sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jawa Barat terdiri dari sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

A. Profil Industri

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi industri terbesar ke-2 setelah Provinsi Jawa Timur sebesar 28,3% terhadap industri nasional (5,7% terhadap PDB

Nasional). Industri Provinsi Jawa Barat merupakan industri berbasis ekspor dengan sebagian besar atau 98,6% industri atau sebesar Rp628 Triliun dialokasikan untuk pangsa ekspor. Wilayah dengan kontribusi industri terbesar berada di Kabupaten Bekasi (Rp324 Triliun), Kabupaten Karawang (Rp134 Triliun), dan Kabupaten Bogor (Rp94 Triliun). Industri yang terdaftar sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN) berjumlah sebanyak 3.039 (32,1%) berstatus penanaman modal asing (PMA) berjumlah 1.900 (20,1%), lainnya tidak terdaftar.

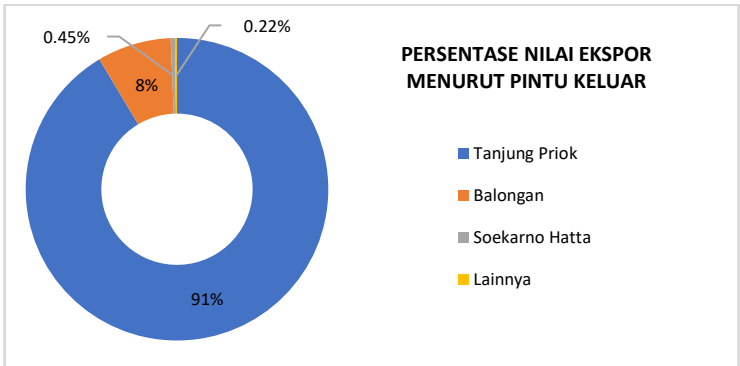
Dari total luas area kawasan industri Indonesia 94.054 Ha, sebanyak 39,17% di antaranya berada di Jawa Barat, yakni seluas 37.516 Ha (Kementerian Perindustrian, 2023). Peruntukan industri paling luas terdapat di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 23.437 Ha dan di Kabupaten Karawang sebesar 16.368 Ha. Terdapat 21 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Industri, yaitu KI Cilamaya, KI Subang, KI Majalengka, Bekasi International Industrial Estate, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town BFIE, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town MMID, Kawasan Industri Jababeka, Kab. Bekasi, East Jakarta Industrial Park dan Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kab. Bekasi, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kab. Bekasi, KIT Indonesia China, Kab. Bekasi, KI Cilamaya, KI Subang, KI Majalengka, Bekasi International Industrial Estate, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town BFIE, Kab. Bekasi; MM2100 Industrial Town MMID, Kawasan Industri Jababeka, Kab. Bekasi, East Jakarta Industrial Park dan Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kab. Bekasi, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kab. Bekasi, KIT Indonesia China, Kab. Bekasi, Cibinong Center Industrial Estate, Kab. Bogor, KI Sentul, Kab. Bogor, KI Marunda Center, Kota Bekasi, KI Indotaisei, Karawang, KI Kujang Cikampek, Karawang, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, Karawang Jabar Industrial Estate, Kertajati Industrial Estate Majalengka, Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta, KI SKI, KI Sukabumi; dan KI Rancaekek. Distribusi PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Sebaran Kawasan Peruntukan Industri dan PDRB Industri

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

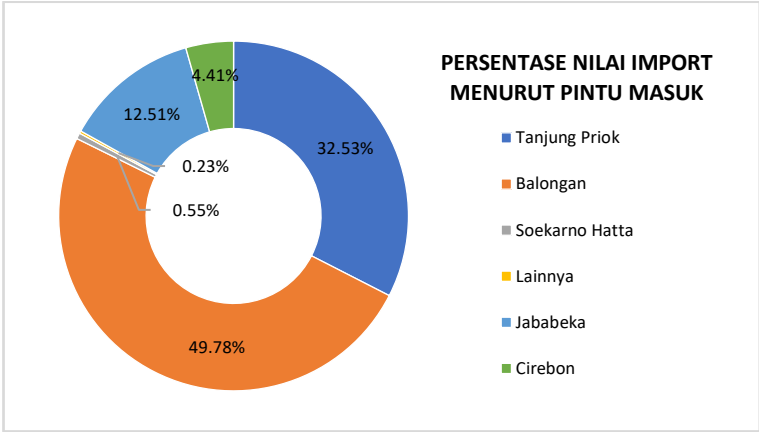
Selama tahun 2019-2024, nilai total ekspor rata-rata naik 6% per tahun. Namun, pada 2020 dan 2024 pertumbuhan ekspor Migas dan Nonmigas Jawa Barat mengalami pelemahan. Antara tahun 2019-2020, terjadi penurunan ekspor Migas sebesar 11,42% dan ekspor Nonmigas turun 11,11%. Sedangkan antara tahun 2023-2024, terjadi penurunan ekspor Migas sebesar 5% dan ekspor Nonmigas naik sebesar 3,5%. Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekspor Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 99,6% (2024) terhadap total ekspor Nonmigas. Pada 2020-2024, Impor Nonmigas cenderung meningkat sebesar 4%, sedangkan Minyak Mentah dan Gas mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 25,5%. Peningkatan impor migas terbesar terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar lebih dari 100% (BPS Provinsi Jawa Barat, 2025).



Gambar 3.7 Persentase Nilai Ekspor Menurut Pintu Keluar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Ekspor sektor industri pada tahun 2024 sebesar 9.022.721,29 Ton dengan nilai 37.872.912 Ribu USD, sektor hasil minyak dengan ekspor sebesar 590.300 Ton senilai 338.078 Ribu USD, sektor pertanian dengan ekspor sebesar 68.509 Ton senilai 158.773 Ribu USD. Dari sisi impor, sektor industri sebesar 2.469.350 Ton senilai 10.830.914 Ribu USD, sektor hasil minyak dengan impor sebesar 3.075.128 Ton senilai 1.917.641 Ribu USD, hasil pertanian dengan impor 134.773 Ton senilai 290.674 Ribu USD. Berdasarkan neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdapat net ekspor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 22 Juta USD atau 6,6 juta ton.



Gambar 3.8 Persentase Nilai Import Menurut Pintu Masuk

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Hampir seluruh nilai ekspor Jawa Barat (99,08%) diangkut melalui outlet di luar Jawa Barat: Tanjung Priok sebesar USD 26.829,3 Juta, Soekarna-Hatta senilai USD 2.767,1 Juta, dan Tanjung Emas senilai USD 28,9 Juta. Nilai ekspor barang Jawa Barat yang melalui outlet di Provinsi Jawa Barat (Balongan dan Husein Sastranegara) tahun 2019 hanya sebesar 0,9%.

Berdasarkan nilai komoditas impor, Pelabuhan Khusus Balongan di Tahun 2020 secara volume berkontribusi hingga 49,78%, diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 32,53%, serta Kawasan Jababeka (*dry port*) sebesar 12,51%. Lain halnya bila dilihat secara nilai. Impor terbesar melalui Tanjung Priok sebesar USD 5,36 Miliar (61,70%), diikuti Bandara Soekarno Hatta sebesar USD 1,33 Miliar (15,27%), dan Kawasan Jababeka sebesar USD 1,20 Miliar (13,76%).

Provinsi Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif tahun 2023, Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan kontribusi terbesar yaitu sebesar 11,81% terhadap PDB Ekraf Nasional, setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.

Dalam hal volume ekspor, Jawa Barat mencatat prestasi yang menonjol dengan menempati peringkat pertama secara nasional, memberikan kontribusi sebesar 31,96% terhadap total ekspor ekonomi kreatif. Produk-produk kreatif dari Jawa Barat telah berhasil menembus pasar internasional, dengan negara tujuan utama meliputi Amerika Serikat (30,29%), diikuti Swiss (10,45%), dan Jepang (6,79%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak hanya memiliki potensi yang besar dalam sektor ekonomi kreatif di tingkat domestik tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Provinsi Jawa Barat juga dikenal sebagai wilayah yang terdepan dan paling progresif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini tercermin dari jumlah unit usaha ekonomi kreatif yang mencapai 1.504.103 unit, dengan kemampuan menyerap tenaga kerja hingga 3.808.368 jiwa. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan peran strategis Jawa Barat dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

Sebanyak 16 sektor mendominasi industri kreatif di provinsi ini, dengan tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu kuliner (71,72%), fesyen (17,77%), dan kriya (6,62%). Ketiga sektor ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada daya saing produk Jawa Barat di pasar nasional dan internasional.

Kegiatan industri kreatif di Jawa Barat tersebar di berbagai wilayah, dengan kota/kabupaten utama meliputi Bandung, yang memiliki 126.184 unit usaha, Bekasi dengan 68.664 unit usaha, dan Depok dengan 55.708 unit usaha. Kota-kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung oleh infrastruktur, sumber daya manusia, dan inovasi yang terus berkembang, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu motor utama perekonomian kreatif di Indonesia.

Kota Bandung telah diakui sebagai salah satu kota kreatif dalam UNESCO Creative City Network, menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung berbagai subsektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Dari keseluruhan 16 subsektor ekonomi kreatif yang diidentifikasi, seluruhnya dapat ditemukan di Kota Bandung. Selain itu, Bandung menjadi lokasi penyelenggaraan Bekraf Festival pada tahun 2017 dan Bandung Design Biennale, yang diadakan secara dua tahunan pada tahun 2017 dan 2019. Kedua kegiatan berskala besar ini melibatkan para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor. Bandung juga memiliki fasilitas pendukung utama, yaitu Bandung Creative Hub (BCH), sebuah pusat kreativitas yang dilengkapi dengan berbagai sarana, termasuk perpustakaan, ruang auditorium, galeri, studio, dan fasilitas lainnya.

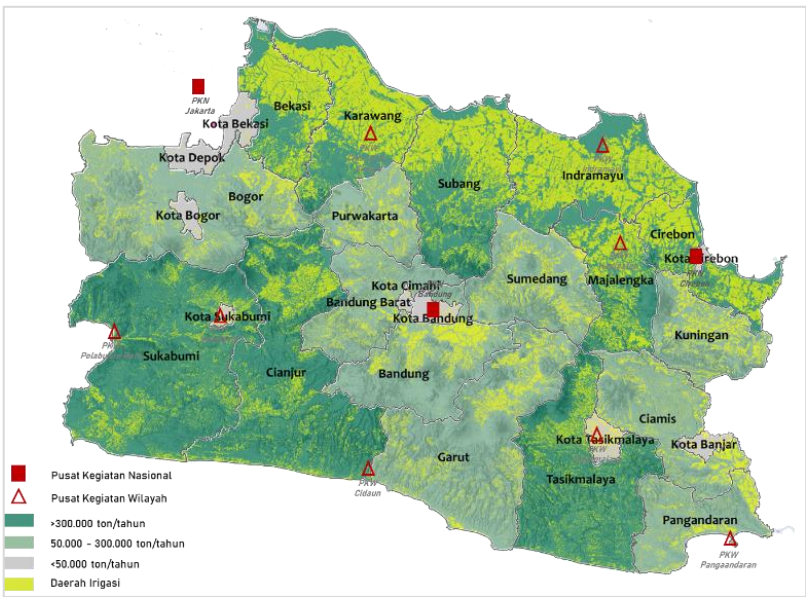
Kota Bandung memainkan peran strategis dalam industri kreatif dengan berfokus pada empat sektor utama, yaitu desain produk, fesyen, kuliner, dan kriya. Keempat sektor ini menjadi pilar utama yang menopang perkembangan ekonomi kreatif di kota tersebut. Berdasarkan data, subsektor kuliner memiliki jumlah pelaku usaha terbesar, mencapai

88.524 pelaku usaha. Sementara itu, subsektor fesyen mencatat 23.550 pelaku usaha, diikuti oleh subsektor kriya dengan 7.986 pelaku usaha.

Salah satu subsektor yang menunjukkan performa ekonomi yang signifikan adalah fesyen, dengan omzet tahunan yang berkisar antara 3 hingga 5 triliun rupiah (Bekraf Indonesia). Angka ini menegaskan posisi Kota Bandung sebagai pusat fesyen dan inovasi kreatif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional. Kombinasi antara kreativitas, inovasi, dan dukungan infrastruktur menjadikan Bandung sebagai kota yang terus berkembang dalam mendukung industri kreatif secara berkelanjutan.

B. Profil Pertanian

Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil padi tertinggi ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan produksi padi mencapai 8,62 juta ton atau 16,22% produksi nasional. Produktivitas Tanaman Padi rata-rata 58,47 kuintal/Ha, di atas rata-rata nasional sebesar 52,9 kuintal/Ha dan memiliki produktivitas tertinggi kedua setelah Provinsi Bali (BPS, 2024). Namun, nilai ini mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2018, tercatat penurunan produksi padi sebesar 1,03 juta ton atau 10,8% dalam 7 tahun terakhir. Produktivitas pertanian Provinsi Jawa Barat tergambarkan dalam Gambar 3.9.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Gambar 3.9 Persebaran Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Barat

Penurunan ini disebabkan terutama karena berkurangnya lahan pertanian sebesar 216 ribu hektar jika dibandingkan luasan tahun 2018 (BPS, 2024). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Tasikmalaya (156 ribu ton), Kabupaten Bekasi (128 ribu ton),

Kabupaten Karawang (92 ribu ton), Kabupaten Kuningan (91 ribu ton), Kabupaten Ciamis (79 ribu ton), Kabupaten Pangandaran (76 ribu ton), dan Kabupaten Majalengka (70 ribu ton). Penurunan ini terjadi karena berkurangnya luas panen terutama di Kabupaten Tasikmalaya (20,8 ribu ha), Kabupaten Bekasi (20 ribu ha), Kabupaten Karawang (18,1 ribu ha), Kabupaten Kuningan (12,7 ribu ha), dan Kabupaten Pangandaran (12,1 ribu ha).

Kabupaten Indramayu merupakan wilayah penghasil padi terbesar di Jawa Barat, yakni sebesar 1,39 juta ton atau 16,22% dari total produksi pada 2024, dengan luas panen padi mencapai 212,86 ribu Ha dan produktivitas 65,3 kuintal/Ha. Pada peringkat kedua, terdapat Kabupaten Karawang dengan produksi 1,04 juta ton atau 12,07%, dengan luas panen mencapai 183,06 ribu Ha dan produktivitas sebesar 56,89 kuintal/Ha.

Berikutnya adalah Kabupaten Subang dengan produksi padi sebesar 968,94 ribu ton atau 11,23%, dengan luas panen sebesar 163,882 ribu Ha dan produktivitas mencapai 59,12 kuintal/Ha. Total produksi padi dari ketiga kabupaten sentra padi tersebut mencapai 3,41 juta ton atau setara dengan 39,52% dari produksi padi Provinsi Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Luas LP2B Provinsi Jawa Barat adalah 925.549,65 Ha, dimana 644.072,91 Ha (69%) diantaranya telah terlayani jaringan irigasi teknis. Sementara itu terdapat 281.476,74 Ha (31%) belum terlayani irigasi teknis. Kabupaten/kota dengan luas LP2B terbesar adalah Kabupaten Indramayu (92.370 Ha), Kabupaten Karawang (85.339 Ha), dan Kabupaten Subang (77.638 Ha).

Tingkat konversi gabah kering giling (GKG) menjadi beras adalah 64,02% secara nasional. Sedangkan, GKG Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 58%, angka tersebut dibawah angka GKG nasional sehingga jumlah susut padi ke beras di Provinsi Jawa Barat tergolong lebih sedikit secara komparasi nasional. Berikut merupakan angka produksi beras Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.5 Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat

Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota (Ton)						
Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	176.868	171.763	164.671	173.183	163.581	173.057
Sukabumi	269.309	299.582	284.656	293.488	295.897	269.589
Cianjur	368.721	357.914	353.288	356.850	375.434	364.303
Bandung	197.754	159.228	179.433	167.011	173.327	192.987
Garut	258.181	244.116	256.009	254.852	262.054	262.718
Tasikmalaya	253.497	255.287	257.505	248.873	226.015	204.090
Ciamis	158.986	162.466	184.985	176.523	172.739	136.429
Kuningan	126.365	159.321	159.323	160.300	150.736	129.025
Cirebon	288.733	285.576	268.374	285.680	286.361	294.880
Majalengka	328.622	325.363	308.520	326.905	322.483	279.550
Sumedang	173.886	176.476	151.322	172.184	165.802	156.999
Indramayu	790.769	783.233	762.059	855.976	822.510	808.100

Subang	541.721	557.709	554.069	599.877	593.455	559.546
Purwakarta	82.626	91.897	96.939	108.989	107.720	104.176
Karawang	642.192	624.992	712.690	708.501	653.696	601.465
Bekasi	315.772	289.611	339.320	320.934	287.205	240.507
Bandung Barat	91.340	94.587	84.598	88.729	82.703	85.931
Pangandaran	100.307	89.039	80.848	85.855	80.443	68.251
Kota Bogor	175	87	99	100	71	86
Kota Sukabumi	8.677	8.349	8.733	7.654	9.348	7.907
Kota Bandung	4.204	3.906	4.099	4.150	3.653	3.781
Kota Cirebon	627	592	719	498	444	368
Kota Bekasi	1.749	1.564	1.331	1.079	760	699
Kota Depok	267	109	141	42	18	19
Kota Cimahi	234	251	256	195	254	251
Kota Tasikmalaya	21.281	20.883	28.365	31.319	23.081	20.444
Kota Banjar	16.514	16.300	20.573	18.059	18.417	16.697
Jawa Barat	5.219.374	5.180.202	5.262.925	5.447.806	5.278.209	4.981.868

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam mendukung Asta Cita ke-2 yaitu ketahanan pangan, perhatian terhadap produksi padi, produksi beras, hingga pada tingkat konsumsi beras Provinsi Jawa Barat menjadi kepentingan nasional. Dalam tabel diatas menunjukan bahwa produksi beras Provinsi Jawa Barat cenderung menunjukan tren stabil dalam 5 tahun ke belakang. Apabila dibandingkan dengan angka konsumsi beras penduduk Provinsi Jawa Barat dengan koefisien konsumsi harian sebesar 0,222 kg, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kebutuhan provinsinya sendiri. Berikut data terkait konsumsi beras penduduk Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.6 Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Konsumsi Beras Kab/Kota (Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	483.376	439.758	444.814	451.094	455.956	456,289
Sukabumi	199.844	220.847	223.764	227.451	227.078	227,088
Cianjur	183.379	200.760	203.118	206.059	207.283	207,576
Bandung	305.913	293.637	297.072	301.351	301.521	301,374
Garut	212.493	209.511	211.067	212.866	217.460	218,175
Tasikmalaya	142.135	151.137	152.636	154.443	154.532	154,248
Ciamis	96.847	99.594	100.291	101.125	101.409	101,114
Kuningan	87.577	94.619	95.648	96.912	97.382	97,476
Cirebon	177.691	183.987	185.640	187.584	191.263	191,756
Majalengka	97.641	105.785	106.879	108.175	108.629	108,606
Sumedang	93.379	93.387	93.946	94.562	95.470	95,324
Indramayu	140.060	148.641	150.019	151.688	153.495	153,694
Subang	129.308	129.267	130.345	131.593	133.683	133,555
Purwakarta	78.024	80.860	81.962	83.380	84.036	84,339
Karawang	190.737	197.640	200.031	202.980	204.682	205,118
Bekasi	304.989	252.246	255.893	260.511	262.327	262,894
Bandung Barat	137.743	144.906	147.005	149.662	150.683	151,301
Pangandaran	32.355	34.332	34.648	35.005	34.964	34,858
Kota Bogor	90.113	84.522	85.276	86.216	86.759	86,596
Kota Sukabumi	26.635	28.061	28.425	28.847	29.219	29,366
Kota Bandung	203.215	198.054	198.758	199.496	203.110	203,014

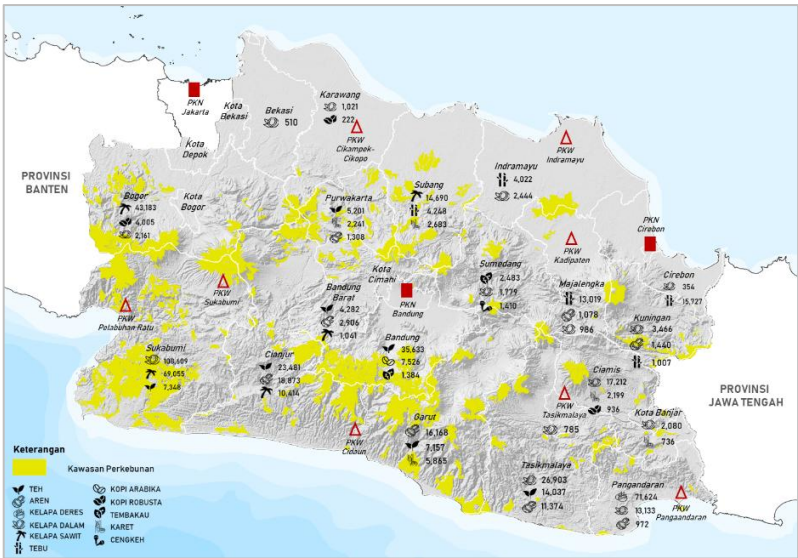
Kota Cirebon	25.873	27.007	27.299	27.631	27.712	27,695
Kota Bekasi	243.406	206.116	207.834	209.868	212.882	212,321
Kota Depok	195.023	166.622	169.020	172.027	173.842	173,737
Kota Cimahi	49.777	46.057	46.317	46.592	47.873	48,076
Kota Tasikmalaya	53.763	58.034	58.658	59.395	60.108	60,281
Kota Banjar	14.837	16.287	16.482	16.692	16.814	16,847
Jawa Barat	3.996.132	3.911.658	3.952.838	4.003.368	4.045.617	4,042,720

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam mencapai Asta Cita yang ke-2, yaitu terkait upaya mewujudkan swasembada pangan, keseimbangan antara **konsumsi beras** dengan **produksi beras** merupakan salah satu elemen utama yang harus dijaga. Namun, keberhasilan tujuan ini tidak hanya bergantung pada aspek produksi dan konsumsi semata. Ada komponen penting lainnya yang juga harus diperhatikan, yaitu Pengelolaan **Cadangan Beras Daerah (CBP)**. Pengelolaan CBP memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, terutama untuk menghadapi situasi darurat, fluktuasi produksi, atau lonjakan kebutuhan akibat bencana alam maupun perubahan kondisi sosial ekonomi. Salah satu pendekatan untuk memastikan efektivitas pengelolaan cadangan ini adalah dengan menghitung **Rasio Konsumsi-Aset Beras**, yang menjadi indikator kunci dalam menilai sejauh mana cadangan beras dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dalam periode tertentu.

Berdasarkan data konsumsi beras penduduk Jawa Barat, **kebutuhan beras per bulan** tercatat sebesar **339.956 ton**. Sementara itu, **surplus beras** yang tercatat pada tahun 2024 mencapai **1.198.737,4 ton**. Jika dihitung menggunakan rumus rasio aset-konsumsi beras, yang membandingkan jumlah surplus (aset pangan) dengan tingkat kebutuhan konsumsi bulanan, dapat disimpulkan bahwa cadangan pangan di **Provinsi Jawa Barat** mampu mencukupi kebutuhan selama sekitar **3 bulan**. Namun, angka tersebut belum memenuhi standar ketahanan pangan ideal, yang umumnya direkomendasikan untuk mencakup periode 6 hingga 12 bulan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan surplus yang lebih strategis dan upaya peningkatan produksi atau penyediaan cadangan pangan guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain lahan sawah, komoditas pertanian sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat mencapai 481.834 Ha, yang terdiri dari perkebunan besar negara seluas 64.457 Ha, perkebunan besar swasta 50.560 Ha, dan perkebunan rakyat seluas 366.817 Ha. Tiga komoditas tertinggi adalah Kelapa Sawit sebesar 133.969 ton/tahun, Teh sebesar 101.300 ton/tahun, dan Kelapa Dalam 88.379 ton/tahun. Sub sektor perkebunan terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun (2020-2024) sebesar 59.391 hektar, yang menunjukan bahwa perkebunan juga sangat potensial untuk dikembangkan terutama di wilayah tengah-selatan Provinsi Jawa Barat. Persebaran kawasan dan komoditas perkebunan di Provinsi Jawa Barat tergambarkan dalam Gambar 3.10 Komoditas Utama Perkebunan.



Gambar 3.10 Komoditas Utama Perkebunan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BIG diolah BPIW, 2024

Distribusi hasil pertanian dan perkebunan menghubungkan pusat produksi hasil perkebunan di selatan ke pusat industri pengolahan di utara, serta menghubungkan pusat produksi hasil pertanian pangan menuju ke pusat permukiman perkotaan sebagai konsumen.

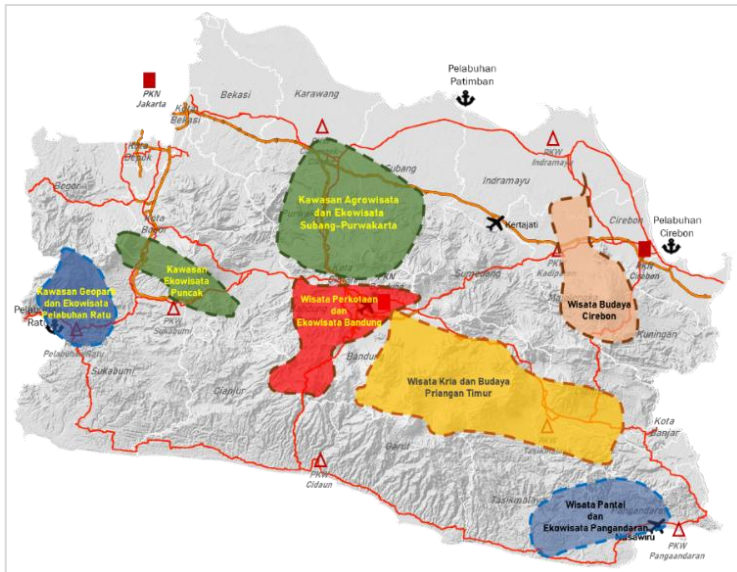
C. Profil Pariwisata

Berdasarkan data kunjungan wisatawan setelah pandemi (2023) tercatat sebanyak 85,6 juta wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebanyak 734,8 ribu. Jumlah ini sudah melampaui target yang diperkirakan yaitu sebanyak 84,7 juta wisatawan nusantara. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan wisata di Provinsi Jawa Barat setelah terjadinya pandemi Covid-19 meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung belum mencapai 107 juta seperti pada sebelum terjadinya pandemi (Kemenparekraf, 2024). Hal ini diakibatkan oleh besarnya pasar wisata yang karena keberadaan dua wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung yang memiliki jumlah dan daya beli tinggi. Selain itu, akses darat dan udara yang memadai memberikan kemudahan bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Namun, tingginya minat wisatawan yang berkunjung belum dapat didukung dengan kapasitas destinasi tujuan wisata (DTW), sehingga DTW sering mengalami kepadatan, terutama pada saat libur nasional.

Dilihat dari tingkat persebaran wisatawan, wilayah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbesar berada di Kabupaten Bogor (6,3 juta), Kabupaten Subang (5,9 juta), Kabupaten Pangandaran (3,9 juta), Kabupaten Garut (3,9 juta), Kabupaten Bandung

Barat (3,5 juta), Kota Depok (3,2 juta), Kabupaten Kuningan (3,1 juta), Kota Bandung (2,9 juta), serta Kabupaten Sukabumi (2,7 juta). Banyaknya kunjungan wisatawan di beberapa kabupaten/kota tersebut diakibatkan adanya atraksi wisata berupa bentang alam pegunungan, serta adanya kegiatan berupa *meeting, incentive, conference, and exhibition* (MICE) yang biasa dilakukan di Kota Bandung.

Wisatawan terutama berkunjung ke wilayah tengah dan selatan Provinsi Jawa Barat yang memiliki daya tarik alam pegunungan dan pemandangan. Selain itu, tingginya dukungan industri kreatif berupa kuliner, belanja, dan wisata buatan mengakibatkan tingginya waktu tinggal wisatawan. Tingkat lama tinggal wisatawan di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,66 hari atau bawah rata-rata tinggal nasional. Hal ini mengakibatkan berkembangnya akomodasi berbintang, dimana Provinsi Jawa Barat berada di urutan pertama nasional dengan akomodasi berbintang sebanyak 620 hunian (BPS, 2024). Kluster wisata Provinsi Jawa Barat tergambar dalam Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Kluster Wisata Provinsi Jawa Barat

Sumber: Kementerian Pariwisata diolah BPIW, 2022

Atraksi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat sangat beragam, mulai dari wisata cagar budaya, wisata alam, wisata ilmu pengetahuan, dan wisata belanja. Bagi wisatawan mancanegara, daya tarik utama berada pada atraksi wisata belanja, MICE, wisata sejarah, dan penelitian. Atraksi tersebut tersebar di 6 KSPN, 10 KPPN, 5 Geopark, 8 Wisata Minat Khusus, serta wisata perkotaan yang mendukung kegiatan MICE dan wisata belanja. Pengembangan berbagai destinasi tersebut didukung dengan penambahan atraksi buatan (*man-made*) yang dikembangkan oleh pelaku industri kreatif.

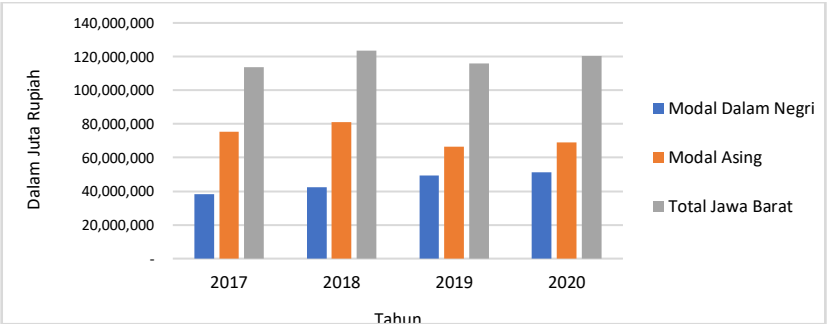
Berdasarkan RIPPARNAS (2010) dan Kajian Potensi Wisata Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat terbagi dalam beberapa klaster wisata, yaitu wilayah Bogor dsk. (10 DTW), wilayah Sukabumi-Pelabuhan Ratu (10 DTW), wilayah Bandung Barat (13 DTW), wilayah Cianjur (6 DTW), KSPN Tangkuban Perahu (3 DTW), KSPN Ciwidey (5 DTW), Garut dsk. (9 DTW), KSPN Pangandaran (7 DTW), dan Cirebon dsk. (7 DTW). Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata waktu kunjungan wisatawan menjadi 7,5 hari dan peningkatan pengeluaran wisatawan terutama sebesar Rp25 Juta per kunjungan untuk wisatawan nusantara dan US\$1.000 per kunjungan untuk wisatawan mancanegara.

Wisatawan nusantara memiliki minat atraksi utama wisata alam sebagai tujuan wisata penduduk perkotaan yang menyukai destinasi dengan iklim pedesaan yang sejuk. Berdasarkan data wisatawan pada destinasi, terdapat dua jalur pergerakan utama di Provinsi Jawa Barat dimana wisatawan dari Metropolitan Jakarta paling banyak mengunjungi KSPN Halimun, Pelabuhan Ratu, Gede Pangrango, dan Bandung, yang memiliki jarak tempuh terjangkau (3,5 jam). Sementara itu, wisatawan yang berasal dari Metropolitan Bandung, dengan kondisi kota cenderung padat terutama pada akhir pekan, cenderung memilih tempat wisata dengan tujuan Tasikmalaya, dan Pangandaran dengan daya tarik wisata pantai yang sulit ditemukan bagi masyarakat Metropolitan Bandung.

Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah usaha ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat hingga menempati peringkat pertama secara nasional, terutama pada sektor diversifikasi produk, wisata belanja, festival budaya, dan kuliner. Pengaruh yang diberikan juga berdampak pada pertumbuhan sebesar 1,66% terhadap kontribusi PDRB dan nilai *share* terhadap nasional sebesar 11,81%. Banyaknya peluang usaha yang berkembang memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, mencapai 3 juta tenaga kerja yang merupakan terbesar secara nasional.

3.3.4. Perkembangan Investasi

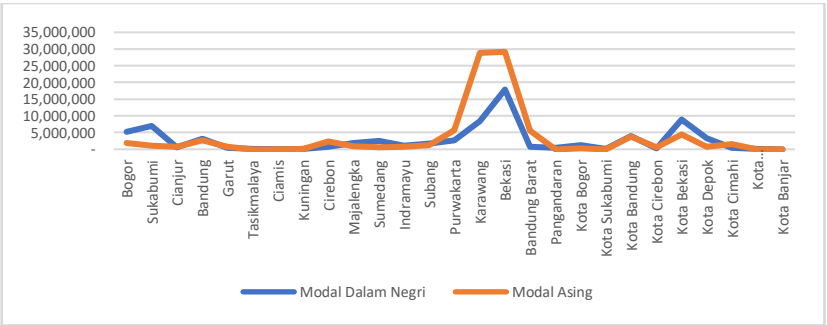
Realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020-2024 berada pada kisaran Rp130 Triliun dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp69 Triliun – Rp150 Triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp51 Triliun – Rp101 Triliun. Investasi setelah tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada saat terjadinya pandemi Covid-19.



Gambar 3.12 Perkembangan Penanaman Modal Jawa Barat 2017-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

Realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik sebesar 19,25% dari periode yang sama di tahun 2024 (*year-on-year*). Sebagai pembandingan, realisasi tahun lalu tercatat sebesar Rp107,23 Triliun. Selama triwulan III-2024 (Juli-September), tambahan investasi mencapai Rp49,5 Triliun. Dalam satu tahun terakhir, lima daerah di Provinsi Jawa Barat yang paling banyak menerima investasi adalah Kabupaten Bekasi (Rp71,8 Triliun), Kabupaten Karawang (Rp68,5 Triliun), Kabupaten Bogor (Rp22,9 Triliun), Kota Bekasi (Rp13,7 Triliun), dan Kota Bandung (Rp10,9 Triliun). Penanaman modal di kota/kabupaten lainnya nilainya tidak melebihi Rp10 Triliun.

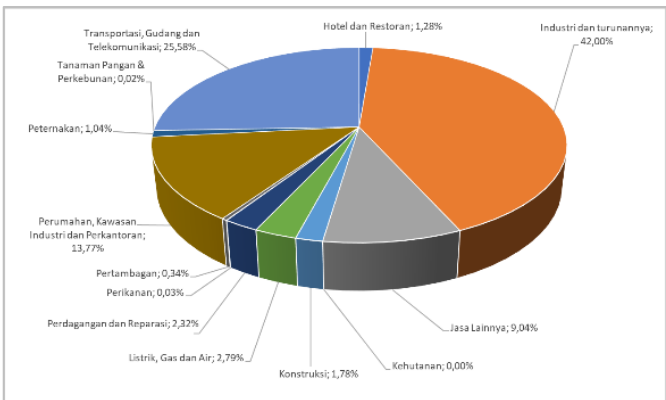


Gambar 3.13 Realisasi Penanaman Modal di Jawa Barat Pada 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2021) diolah BPIW, 2022

Pada tahun 2024, jumlah proyek yang direalisasikan di Provinsi Jawa Barat adalah 158.708 proyek, naik sebesar 68% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 (94.469 proyek). Berdasarkan data investasi PMA dan PMDN Januari-September 2024, wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap pencapaian Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi (28,6%), diikuti oleh Kabupaten Karawang (27,3%), dan Kabupaten Bogor (8,1%). Jika dilihat dari sektornya, penanaman modal terbesar berada pada empat sektor yaitu sektor industri, informasi dan komunikasi, *real estate*, transportasi dan perdagangan, serta jasa lainnya seperti ditampilkan pada Gambar 3.14. Industri dan turunannya yang mencapai (53,1%), diikuti oleh sektor informasi dan

komunikasi (12,3%), real estat (11,2%), transportasi, gudang dan telekomunikasi (4,9%); dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (4,6%).



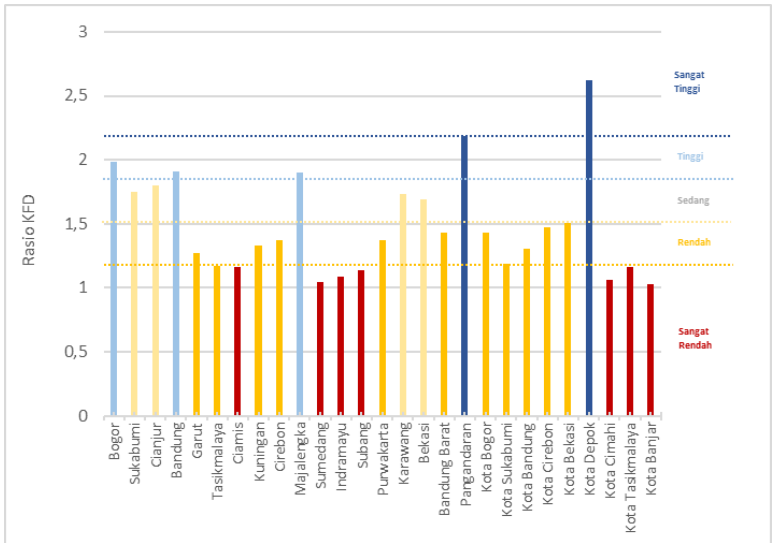
Gambar 3.14 Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

3.3.5. Kapasitas Fisikal Daerah (KFD)

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas tersebut kemudian dipetakan untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio KFD.

Peta KFD dapat digunakan sebagai (a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, (b) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, (c) pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah, (d) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, dan/atau (e) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkup provinsi, kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat pada 2024 tergolong sedang, yaitu sebesar 2,142. Sementara itu, kapasitas fiskal kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat bervariasi; 2 kabupaten dengan kategori sangat rendah, 11 kota/kabupaten dengan kategori rendah, 4 kota/kabupaten dengan kategori sedang, 2 kota dengan kategori tinggi, dan 8 kota/kabupaten dengan kategori sangat tinggi.



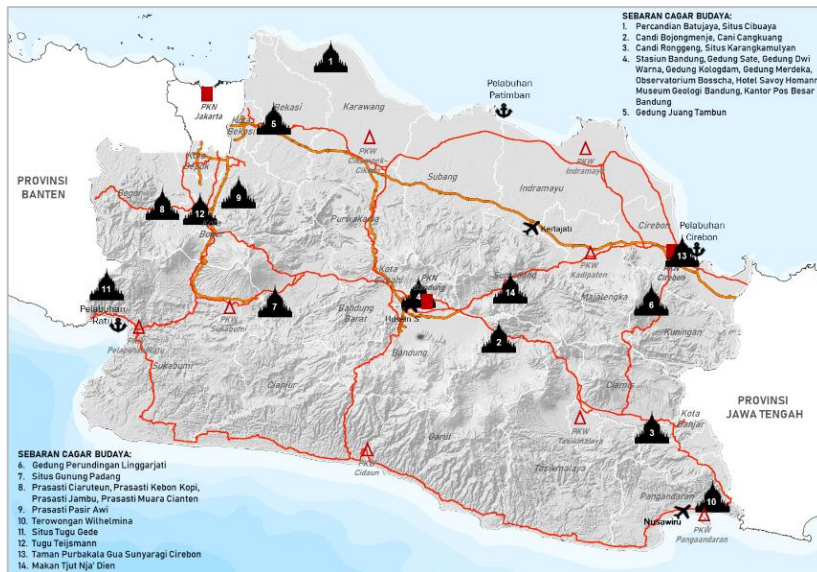
Gambar 3.15 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Barat 2022

Sumber: Kementerian Keuangan diolah BPIW, 2023

3.4. Profil Sosial dan Budaya

Masyarakat Provinsi Jawa Barat didominasi dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Sekitar 65% penduduk Provinsi Jawa Barat adalah masyarakat dengan kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda berkembang di Tataran Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan, sedangkan kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas karasidenan Cirebon. Kebudayaan lainnya adalah kebudayaan Jawa yang banyak dijumpai di daerah utara Jawa Barat, kebudayaan Betawi di daerah barat yang berdampingan dengan Jakarta, serta Kebudayaan Minang, Batak, dan Tionghoa.

Cagar kebudayaan yang mewarisi kebudayaan Sunda dan Cirebon banyak tersebar di Provinsi Jawa Barat seperti candi, prasasti, dan situs bersejarah lainnya. Selain itu, bangunan peninggalan pada saat penjajahan Belanda juga masih terpelihara dan dipergunakan sampai saat ini seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Gedung Kologdam, Gedung Juang, dan Gedung Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Persebaran cagar budaya Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Persebaran Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2023

Kebudayaan lain yang terdapat di Provinsi Jawa Barat diantaranya batik tradisional trusmi, kedok, rotan, lukis kaca dan kulit (Kabupaten Cirebon), tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba (Kabupaten Indramayu), payung, anyaman, batik tulis, kelom geulis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi (Kabupaten Tasikmalaya), keramik (Kabupaten Purwakarta), sepatu (Kabupaten/Kota Bandung), anyaman bambu dan pahat patung (Kabupaten Bekasi), serta kerajinan tanduk (Kabupaten Bogor).

3.5. Profil Interaksi Antarkawasan

Secara konektivitas, Provinsi Jawa Barat telah terhubung dengan provinsi lainnya, baik secara darat, laut, dan udara. Konektivitas darat berupa jalan tol super koridor Pantura Jawa Merak-Banyuwangi serta jaringan jalan nasional lintas utara dan lintas tengah dengan kemandirian >95%, serta lintas selatan yang masih dalam proses konstruksi. Terkait konektivitas laut, terdapat Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan utama di Provinsi Jawa Barat yang dikembangkan menjadi outlet ekspor/impor. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Kertajati menjadi outlet penting skala Pulau Jawa dan skala nasional untuk lalu lintas penumpang dan barang.

Interaksi antarkawasan terjadi antara kawasan metropolitan, yaitu Bodebek dan Cekungan Bandung, masing-masing dengan empat KSPN terdekat, yaitu KSPN Tangkuban Perahu, KSPN Ciwidey, KSPN Tasikmalaya, dan KSPN Pangandaran dengan Kota Bandung, serta KSPN Halimun, KSPN Pelabuhan Ratu, KSPN Gede-Pangrango, dan

KSPN Bandung dengan Kota Jakarta. Interaksi kawasan ditunjukkan dengan perkiraan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan rata-rata yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Interaksi Antara Metropolitan dan KSPN di Provinsi Jawa Barat

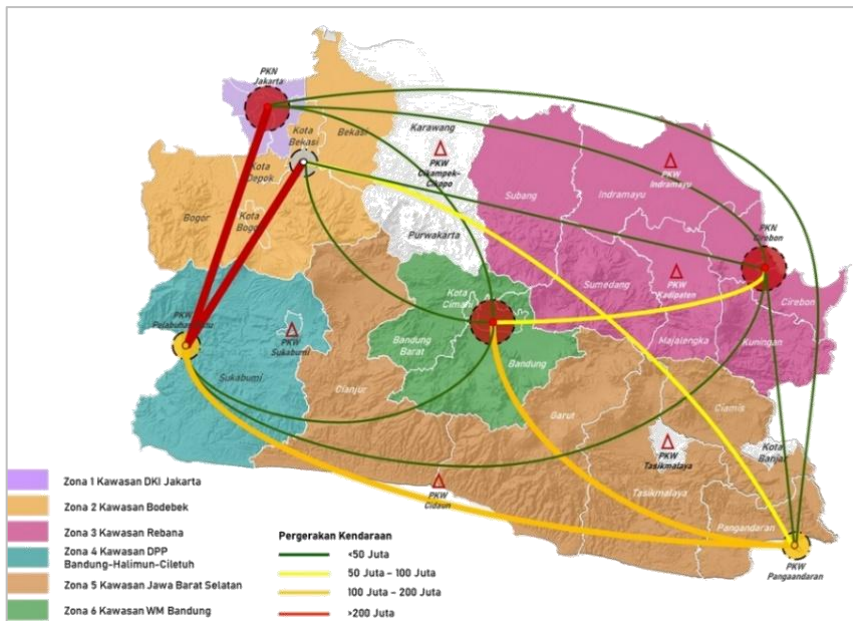
No	Kawasan Strategis		Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh (jam)	Kecepatan (km/jam)
	DTW Tujuan	Dari			
1	Tangkuban Perahu	Kota Bandung	25	1,5	16,7
2	Ciwidey	Kota Bandung	35	1,5	23,3
3	Tasikmalaya	Kota Bandung	120	3,5	34,3
4	Pangandaran	Kota Bandung	210	2,5	84
5	Halimun	Jakarta	95	2,5	38
6	Pelabuhan Ratu	Jakarta	135	3,5	38,6
7	Gede-Pangrango	Jakarta	80	2	40
8	Bandung	Jakarta	150	2,5	60

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Waktu tempuh menuju DTW dari 2 Wilayah Metropolitan yang memiliki bangkitan pergerakan tinggi sangat bervariasi. Untuk DTW di sekitar kawasan perkotaan relatif mudah terjangkau karena ketersediaan jalan tol dapat mempersingkat waktu tempuh untuk jarak perjalanan yang lebih jauh. DTW yang berada di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan waktu tempuh lebih lama karena terbatasnya akses.

Secara internal Jawa Barat, pergerakan terbesar berada pada hubungan antara kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Jabodetabek dan Cekungan Bandung memberikan porsi bangkitan dan tarikan terbesar terutama antara kota inti dan kota sekitar yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan. Bangkitan dari kegiatan pariwisata juga didukung oleh keberadaan pangsa pasar wisatawan terbesar yang berada di Jabodetabek dan Cekungan Bandung. Wilayah Jabodetabek memiliki tujuan pergerakan wisatawan terbesar menuju KSPN Puncak-Gede Pangrango, KSPN Halimun-Salak, KPPN Pelabuhan Ratu, serta KSPN Bandung Kota. Sedangkan wilayah Cekungan Bandung memiliki tujuan pergerakan wisatawan terbesar menuju KSPN Ciwidey, KSPN Tangkuban Perahu, KSPN Pangandaran, KPPN Ciwidey, dan KPPN Pangandaran.

Wilayah Metropolitan Bodebek dan Cekungan Bandung memberikan bangkitan pergerakan terbesar, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu rantai pasok industri, rantai pasok pertanian, dan jalur wisata. Rantai pasok industri berasal dari keterkaitan antara pusat industri pengolahan dengan pelabuhan sebagai outlet ekspor-impor, sedangkan rantai pasok pertanian berasal dari keterkaitan antara sentra pertanian dan pasar. Jalur wisata merupakan skenario pergerakan wisatawan berdasarkan destinasi unggulan. Pola pergerakan dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Pola Pergerakan Orang dan Barang Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

Berdasarkan analisis data Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), terdapat total pergerakan 2,7 Miliar pergerakan per tahun di Provinsi Jawa Barat. Pergerakan terbesar berasal dari wilayah Bodebek dengan total pergerakan 1,8 miliar pergerakan per tahun, diikuti oleh wilayah Cekungan Bandung dengan total pergerakan 465 juta pergerakan per tahun. Pada sektor pertanian, komoditas utama adalah beras dengan produksi 4,13 juta ton. Ekspor beras terbesar Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk Provinsi Jawa Tengah (969 ribu ton), DKI Jakarta (637 ribu ton), Banten (544 ribu ton), dan Jawa Timur (481 ribu ton). Pada sektor industri, Provinsi Jawa Barat mengirimkan hasil industri terutama otomotif, elektronik, telekomunikasi, tekstil, serta makanan dan minuman dari industri yang berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat ke provinsi lain.

Hubungan antara pasar dan destinasi serta antara pusat produksi dan outlet ekspor mengikuti jalur backbone nasional yang dilayani oleh jalan nasional dan jalan tol serta jalur kereta api. Untuk akses pariwisata, seluruh kota besar di Jawa Barat sudah terlayani oleh jaringan kereta api dan jalan tol. Sedangkan untuk destinasi unggulan sudah terlayani dengan akses jalan nasional. Akses dari kawasan industri menuju outlet pelabuhan dan bandara sudah didukung dengan adanya jalan tol dengan pelayanan cukup baik. Sementara itu, akses dari pusat produksi menuju konsumen dan pusat produksi sudah didukung sebagian dengan jalan nasional, dimana sebagian masih didukung oleh jalan kabupaten dengan kapasitas yang masih di bawah standar.

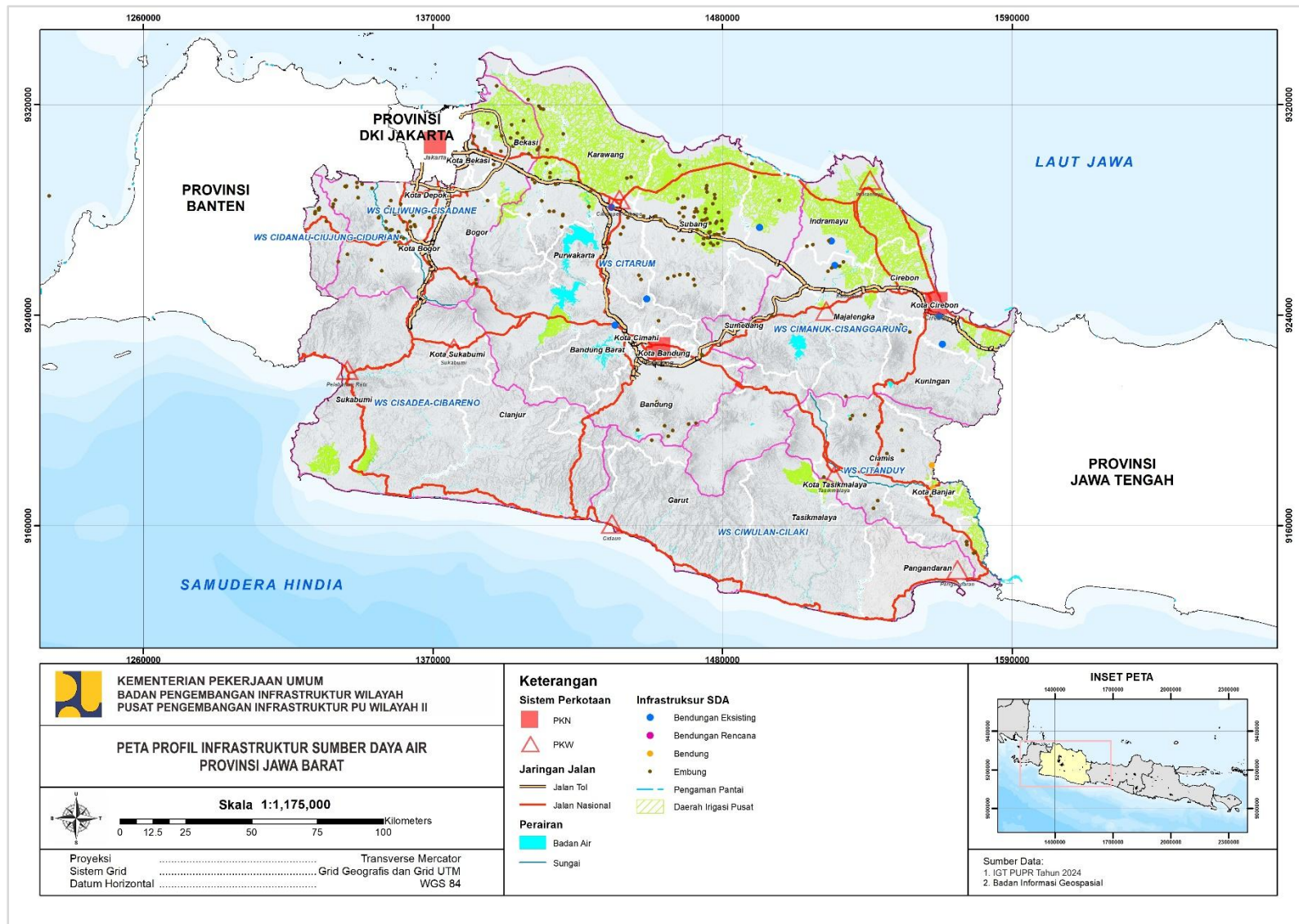
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Profil dan kinerja infrastruktur mendeskripsikan kondisi infrastruktur di bidang PU dan non-PU di Provinsi Jawa Barat. Pembahasan infrastruktur bidang PU meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA), infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur prasarana strategis. Bidang non-PU terdiri dari infrastruktur perumahan, perhubungan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Profil dan kinerja dilihat berdasarkan kondisi terkini secara fisik, manfaat pelayanan yang diberikan, dan gap terhadap standar pelayanan yang diharapkan. Profil dan kinerja ini kemudian menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis serta analisis kebutuhan infrastruktur.

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

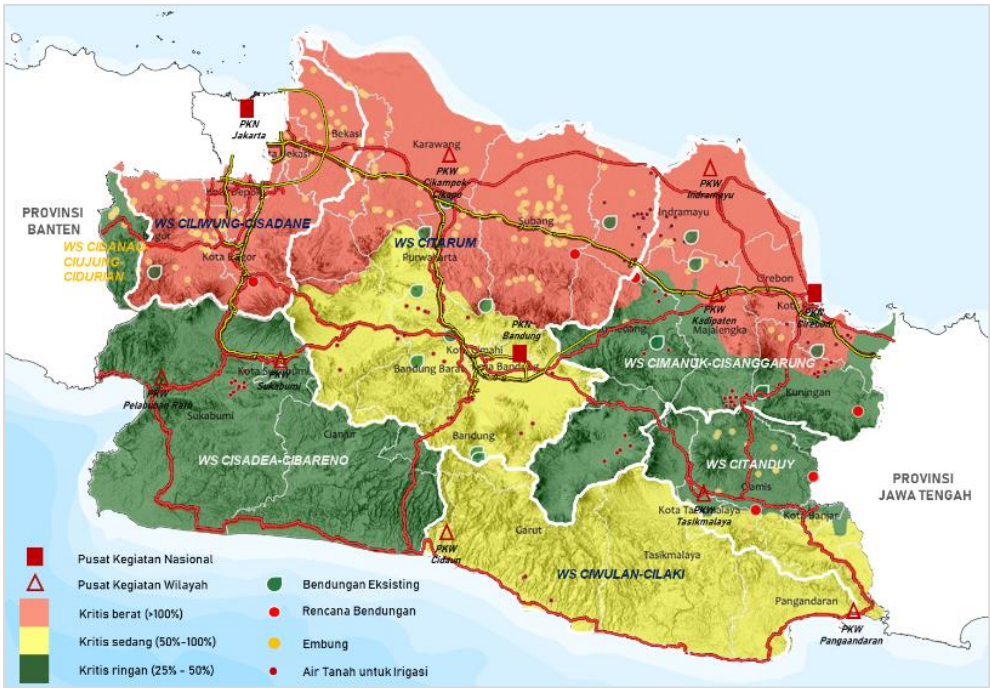
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan SDA meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Sumber Daya Air. Pengembangan infrastruktur SDA dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penyedia air baku yang terdiri dari embung, bendung, bendungan, danau, situ, serta infrastruktur penampung lainnya. Sementara itu, pengendalian daya rusak air dapat dilakukan melalui pembangunan tanggul, pompa, kolam retensi, bendungan, dan bangunan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan banjir, lahar, serta abrasi sehingga mengurangi risiko bencana pada manusia.

Pengelolaan SDA di Provinsi Jawa Barat didukung dengan keberadaan 4 (empat) wilayah sungai strategis nasional, yaitu WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, dan WS Ciujung-Cidanau-Cidurian yang memberikan ketersediaan air baku wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Jumlah infrastruktur SDA yang sudah beroperasi sebanyak 21 bendungan (17 bendungan PU dan 4 bendungan non PU), 45 bendung (40 bendung masih beroperasi dan 5 bendung tidak beroperasi), 19 daerah irigasi permukaan, 145 danau (17 danau mengalami sedimentasi sedang), 73 embung, 73 intake sungai (66 beroperasi dan 7 tidak beroperasi), 37 lokasi pengaman pantai, dan 295 situ. Infrastruktur SDA, khususnya bendungan terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai penyedia air baku, air irigasi, dan penghasil listrik tenaga air. Persebaran infrastruktur SDA seperti pada Peta 4.1.



4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kebutuhan air tertinggi kedua se-Pulau Jawa dengan total kebutuhan 54 Miliar m³/tahun (total ketersediaan air 79 Miliar m³/tahun dari air permukaan). Meskipun didukung infrastruktur penyedia air baku cukup banyak, wilayah utara Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat penggunaan air kategori kritis berat (penggunaan air diatas 100%) karena menjadi pusat industri dan permukiman berskala besar. Selain itu, terdapat 210 embung yang berfungsi sebagai sumber air baku bagi kawasan permukiman dan pertanian terutama pada wilayah dengan keterbatasan jaringan air baku. Indeks penggunaan air di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2025

Provinsi Jawa Barat dilayani oleh infrastruktur penyedia air baku berupa bendungan dan situ yang dapat digunakan untuk menyediakan air irigasi, air baku domestik, serta pembangkit listrik. Kondisi infrastruktur penyedia air baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Infrastruktur Bendungan di Provinsi Jawa Barat

No	Nama Bendungan	Nama WS	Kab/Kota	Irigasi (Ha)	Volume (m ³)	Status
1	Cileunca	Citarum	Bogor	1.224	9.890.000	Eksiting
2	Cipancuh	Citarum	Indramayu	6.319	8.160.000	Eksiting
3	Cipanunjang	Citarum	Bandung	-	22.400.000	Eksiting
4	Cirata	Citarum	Purwakarta	-	2.165.000.000	Eksiting
5	Darma	Cimanuk- Cisanggarung	Kuningan	22.060	36.140.000	Eksiting
6	Jatigede	Cimanuk- Cisanggarung	Sumedang	87.804	1.061.320.000	Eksiting
7	Jatiluhur/ Djuanda	Citarum	Purwakarta	242.000	2.893.000.000	Eksiting
8	Pongkor	Cimanuk- Cisanggarung	Bogor	-	588.306	Eksiting
9	Saguling	Citarum	Bandung Barat	-	875.000.000	Eksiting
10	Situ Bolang	Cimanuk- Cisanggarung	Indramayu	365	2.012.095	Eksiting
11	Situ Ciburuy	Citarum	Bandung	137	1.200.000	Eksiting
12	Situ Kamojing	Citarum	Karawang	176	13.581.000	Eksiting
13	Situ Lembang	Citarum	Bandung	21.350	1.980.000	Eksiting
14	Situ Patok	Cimanuk- Cisanggarung	Cirebon	1.494	14.100.000	Eksiting
15	Ranca Beureum	Cimanuk- Cisanggarung	Majalengka	188	1.021.306	Eksiting
16	Situ Sedong	Cimanuk- Cisanggarung	Cirebon	629	2.321.000	Eksiting
17	Ciawi	Ciliwung- Cisdane	Bogor	-	6.050.000	Eksiting
18	Sukamahi	Ciliwung- Cisdane	Bogor	-	1.680.000	Eksiting
19	Sadawarna	Citarum	Subang	4.284	70.860.000	Eksiting
20	Cipanas	Cimanuk- Cisanggarung	Majalengka	9.273	303.640.000	Eksiting
21	Kuningan	Cimanuk- Cisanggarung	Kuningan	3.000	30.370.000	Eksiting
22	Leuwikeris	Citanduy	Ciamis	6.219	81.440.000	Eksiting
23	Cibeet	Citarum	Bogor	1.037	92.0129.984	On going
24	Cijurey	Citarum	Bogor	2.047	801.800	On going

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2025

4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Luas Area Sawah di Jawa Barat – Menurut data resmi terakhir (Kepmen ATR/BPN No. 686/2019), luas lahan sawah di Provinsi Jawa Barat tercatat sekitar 928.218 hektare. Dari total luas sawah tersebut, sekitar 878.633 hektare telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan sawah dilindungi di Jawa Barat. Artinya, kurang lebih 94.7% lahan sawah di Provinsi masuk dalam peta sawah yang dilindungi sesuai kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan (berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Sebagian lahan LP2B tersebut masih belum terlayani jaringan irigasi (sawah tadah hujan). Kementerian Pertanian mencatat bahwa terdapat sekitar 201.702,6 hektare sawah tadah hujan di Jawa Barat.

Terdapat 19 daerah irigasi (DI) kewenangan nasional di Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 100.600 Ha, terutama tersebar di Kab Indramayu, Kab Subang, dan Kab Majalengka. Adapun 5.011 DI kewenangan kota/kabupaten dengan luas 346.920 Ha tersebar terutama di Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Garut.

Di Jawa Barat terdapat beberapa **Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat** yang besar (luas >3.000 ha atau lintas provinsi). Dua yang terbesar adalah: **DI Jatiluhur** yang mencakup **±237.790 ha** areal sawah, dan **DI Rentang** seluas **87.840 ha**. DI Jatiluhur memasok 10%

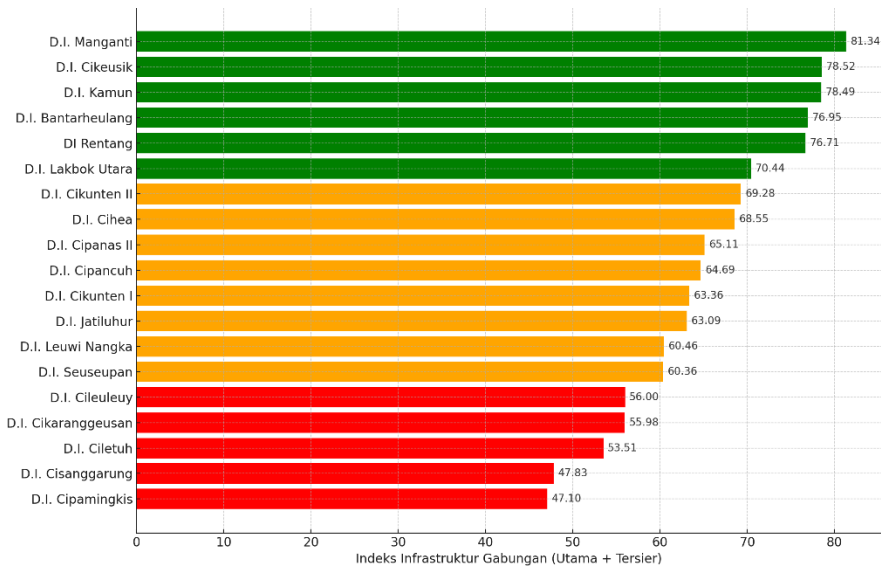
produksi beras nasional. Rincian luasan irigasi pusat Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten	Nama DI	Luas (ha)
Kota Banjar	DI Bantarheulang	569,71
Ciamis	DI Bantarheulang	316,79
Cianjur	DI Cihea	5.102,45
Sukabumi	DI Cikarangeusan	1.668,26
Cirebon	DI Cikeusik	5.800,31
Tasikmalaya	DI Cikunten I	2.991,74
Kota Tasikmalaya	DI Cikunten I	0,13
Kota Tasikmalaya	DI Cikunten II	2.122,70
Tasikmalaya	DI Cikunten II	1.147,41
Subang	DI Cileleuy	4.342,14
Sukabumi	DI Ciletuh	3.587,75
Bekasi	DI Cipamingkis	2.759,81
Bogor	DI Cipamingkis	1.342,04
Indramayu	DI Cipanas II	1.756,92
Indramayu	DI Cipancuh	7.782,39
Majalengka	DI Ciwaringin	3.235,30
Cirebon	DI Ciwaringin	1.249,16
Indramayu	DI Ciwaringin	231,29
Karawang	DI Jatiluhur	93.867,90
Bekasi	DI Jatiluhur	46.891,39
Indramayu	DI Jatiluhur	22.340,28
Subang	DI Jatiluhur	54.870,70
Kota Bekasi	DI Jatiluhur	0,47
Majalengka	DI Kamun	3.187,77
Ciamis	DI Lakkok Utara	4.645,80
Kota Banjar	DI Lakkok Utara	1.528,03
Subang	DI Leuwinangka	3.390,44
Pangandaran	DI Manganti	4.989,08
Ciamis	DI Manganti	318,62
Indramayu	DI Rentang	59.696,47
Cirebon	DI Rentang	20.305,46
Majalengka	DI Rentang	623,68
Cirebon	DI Seuseupan	4.001,65
Kuningan	DI Seuseupan	0,62

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2025

Daerah irigasi kewenangan pusat dengan cakupan layanan terbesar di Jawa Barat adalah DI Jatiluhur dan DI Rentang, di mana memiliki sumber air baku yang berasal dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede. Daerah irigasi Jatiluhur mengairi sawah terutama di Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Indramayu dan Kab Subang. Daerah irigasi terbesar berikutnya adalah DI Rentang mengairi sawah di sekitar Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, dan Kab. Majalengka. Selain DI pusat, terdapat 75.291 Ha DI Provinsi dan 201.836 Ha DI Kabupaten.



Gambar 4.2 Visualisasi Kondisi Infrstruktur Irigasi per Daerah Irigasi

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2025

Dari data indeks kinerja infrastruktur 21 Daerah Irigasi (DI) yang tercantumpada data IKSI, terdapat variasi signifikan dalam Indeks Infrastruktur untuk jaringan utama, tersier, dan gabungan (utama + tersier). Skor indeks berkisar dari terendah 30-an hingga tertinggi 85, yang dikategorikan ke dalam kondisi Baik, Sedang, atau Rendah.

DI Manganti mencatat nilai tertinggi dengan Indeks Infrastruktur Utama sebesar 85.00, Tersier 66.72, dan Gabungan 81.34, serta dikategorikan sebagai Kondisi Baik di semua jaringan. Ini menunjukkan pengelolaan infrastruktur irigasi yang sangat optimal. DI Cisanggarung mencatat nilai terendah dengan indeks gabungan sebesar 47.83 dan dikategorikan dalam Kondisi Jelek baik di jaringan utama, tersier, maupun gabungan. Ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus.

Daerah seperti DI Cipanas II dan DI Kamun juga memiliki kinerja baik, masing-masing dengan indeks gabungan 65.11 dan 78.49, dan dikategorikan sebagai Kondisi Baik. Sebaliknya, beberapa daerah irigasi lainnya seperti DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Cipamingkis memiliki indeks gabungan yang rendah (sekitar 47-56) dengan klasifikasi Kondisi Jelek di semua kategori jaringan.

4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengendalian daya rusak air dimaksudkan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, terpelihara dan berkelanjutan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem yang harmonis dan seimbang. Adapun lingkup kegiatan pengendalian daya rusak air meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kawasan beresiko banjir rob terutama di wilayah pesisir utara Jawa Barat di Kabupaten sudah mendapatkan dukungan pengaman pantai yang berada di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.3 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten	Pengaman Pantai	Vol	Kondisi
1	Indramayu	Pemecah Gelombang Losarang	2.630	Berfungsi
2	Indramayu	Jetty (Kanan+Kiri) Pantai Karangsong	1.500	Berfungsi
3	Indramayu	Pemecah Gelombang (Limbangan - Juntinyuat)	550	Berfungsi
4	Indramayu	Jetty (Kiri) Pantai Lombang/S. Kamal	220	Berfungsi
5	Indramayu	Jetty (Kanan) Pantai Lombang/S. Kamal	220	Berfungsi
6	Indramayu	Revetment Pantai Lombang	330	Berfungsi
7	Indramayu	Pemecah Gelombang Pantai Tirtamaya	380	Berfungsi
8	Indramayu	Jetty (Kiri) Pantai Glayem	200	Berfungsi
9	Indramayu	Jetty (Kanan) Pantai Glayem	240	Berfungsi
10	Indramayu	Breakwater Krowongan	240	Berfungsi
11	Indramayu	Jetty (Kanan + Kiri) Pantai Dadap/S. Kamal	160	Berfungsi
12	Indramayu	Dermaga Pelabuhan Pantai Dadap/S. Kamal	640	Berfungsi
13	Indramayu	Pemecah Gelombang - Dadap Juntinyuat	1.800	Berfungsi
14	Indramayu	Pemecah Gelombang Krangkeng	1.500	Berfungsi
15	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Bungko Lor/S. Kumpul Kuista	390	Berfungsi
16	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Bungko/S. Ciwaringin	1.000	Berfungsi
17	Cirebon	Pemecah Gelombang Kesenden	1.200	Berfungsi
18	Cirebon	Pemecah Gelombang Pangenan	4.900	Berfungsi
19	Cirebon	Jetty Kiri Gebang	370	Berfungsi
20	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Playangan	278	Berfungsi

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2025

Kawasan risiko banjir tinggi berada di sebagian besar pesisir utara diantaranya Kab. Bekasi (WS Ciliwung-Cisadane), Karawang, Subang (WS Citarum), Cirebon, dan Kota Cirebon (WS Cimanuk-Cisanggarung); wilayah metropolitan Bandung (WS Citarum); serta di wilayah selatan pada Pangandaran dan Kota Banjar (WS Citanduy). Luas risiko banjir berdasarkan WS yaitu WS Cilicis seluas 138.384 Ha sama dengan 26% dari luas wilayah sungai, WS Cimanuk seluas 277.429 Ha sama dengan 30% dari luas wilayah sungai, Sungai Citanduy seluas 277.429 Ha sama dengan 6% dari luas wilayah sungai, dan WS Citarum seluas 280.975 Ha sama dengan 32% luas wilayah sungai. Kawasan risiko banjir sedang: Kab Indramayu (WS Citarum dan WS Cimanuk-Cisanggarung), Kab. Ciamis (WS Citanduy), dan Kab. Pangandaran (WS Ciwulan-Cilaki). Jumlah penduduk terkena dampak risiko banjir sebanyak 14,5 juta jiwa, 50% berada di pesisir utara Jawa Barat.

Tabel 4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Bendungan Jatigede	Terbangun (2014)	979.500.000	976.000.000	– Direncanakan untuk mengairi DI. Rentang seluas ± 87.840 ha; – Direncanakan sebagai sumber air baku sebesar 3.500 lt/dtk; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 1.161 lt/dtk di Kabupaten Indramayu; – Direncanakan memberikan layanan <i>supply</i> listrik kepada kawasan Rebana.	– Telah digunakan untuk mengairi DI. Rentang seluas ± 87.840 ha; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 1.161 lt/dtk di Kabupaten Indramayu.	– Penyediaan layanan listrik tenaga air (PLTA) sebesar 110 MW belum terlaksana karena saat ini PT. PLN Indonesia Power sebagai pengelola sedang dalam tahap pembangunan power waterway; – Penyediaan air baku belum mampu memenuhi kebutuhan air baku karena intake tahap I sebesar 2.000 liter/detik yang sudah terbangun masih dalam tahap pembebasan lahan untuk IPA. Sedangkan intake tahap II akan dibangun jika IPA tahap I sudah optimal;
2	Terowongan Air Nanjung	Terbangun (2019)	Panjang 230 m (2 <i>tunnel</i>) Diameter 8 m	Panjang 230 m (2 <i>tunnel</i>) Diameter 8 m	– Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 44.280 lt/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 44.280 lt/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Daerah Baleendah masih mengalami fenomena banjir setelah terowongan nanjung dibangun. Hal ini diakibatkan karena daerah tersebut memang bertipe area rawa yang alaminya merupakan tempat air berkumpul
3	Bendungan Kuningan	Terbangun (2020)	25.960.000	25.960.000	– Direncanakan untuk mengairi irigasi seluas ± 9.145 ha; – Direncanakan sebagai sumber air baku sebesar 300 lt/dtk; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 419,8 m3/dtk; – Direncanakan memberikan layanan <i>supply</i> listrik sebesar 0,5 MW.	– Telah digunakan untuk mengairi DI. Rentang seluas ± 3.000 ha; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit menjadi 419,8 m3/dtk di sepanjang Sungai Cisanggarung; – Penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Penyediaan layanan listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 0,5 MW belum terlaksana karena menunggu pembangunan pompa air; – Target pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 300 liter/detik baru tercapai 100 liter/detik karena saat ini sedang pembangunan intake air baku tahap II sebesar 200 liter/detik yang direncanakan selesai pada tahun 2025; – Belum maksimalnya luas pelayanan daerah irigasi dikarenakan belum beroperasinya Bendung Cileuweng baru

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
							(dibangun tahun 2025) dan Bendung Cibendung (tahap rehabilitasi).
6	Bendungan Sadawarna	Terbangun (2022)	70.800.000	70.800.000	– Direncanakan mengairi irigasi ± 4.500 ha di Kabupaten Subang dan Indramayu; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 26,9 m3/dtk di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu – Direncanakan sebagai penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Telah digunakan untuk mengairi irigasi ± 4.500 ha di Kabupaten Subang dan Indramayu; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 26,9 m3/dtk di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu – Penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Proses impounding bendungan menyebabkan salah satu jalan akses terpendek yang biasa dilalui masyarakat tergenang air. BBWS Cimanuk-Cisanggarung merencanakan jalan lingkaran bendungan sebagai jalan akses pengganti untuk masyarakat, namun hingga saat ini pembangunan jalan tersebut masih berproses; – Biaya realisasi yang lebih besar karena ada permasalahan pembebasan lahan; – Agar reduksi banjir dapat terlaksana dengan optimal diperlukan normalisasi dan penghijauan di sekitar Sungai Cipunagara terutama pada kawasan bantaran sungai sebagai sarana pengaliran
7	Sudetan (Floodway) Cisangkuy	Terbangun (2020)	5,2 km	5,2 km	– Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 215 m3/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 215 m3/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Daerah Baleendah masih mengalami fenomena banjir setelah Floodway Cisangkuy dibangun, akan tetapi waktu genangan banjir berkurang menjadi kurang dari 7 jam; – Belum didukung dengan normalisasi drainase perkotaan yang optimal.
8	Bendungan Leuwikeris	2016 (on going)	81.440.000	-	– Direncanakan untuk mengairi DI. Lakbok Utara ± 6.600 ha di Kabupaten Ciamis dan DI. Manganti ± 6.600 di Kota Cilacap; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 59,68 m3/dtk di Kota	–	–

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
					Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis; – Direncanakan sebagai penyedia air baku sebesar 845 liter/detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis		
9	Bendungan Cipanas	2018 (on going)	250.810.000	-	– Direncanakan untuk mengairi DI. Cipanas, Cikawung, dan Cibunut sebesar ± 9.273 ha di Kabupaten Sumedang dan Indramayu; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 488 m3/dtk di Kabupaten Indramayu; – Direncanakan sebagai penyedia air baku sebesar 650 liter/detik untuk Kawasan Industri di Kabupaten Sumedang dan air baku untuk Kecamatan Terisi (Kabupaten Indramayu) sebesar 200 lt/dtk.	–	–

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2024

4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Barat memiliki panjang Jalan Nasional 1.783 km dengan kondisi yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemantapan yang mencapai 98%, lebar rata-rata di atas standar nasional sebesar 10 meter, dan tingkat layanan baik dengan $VCR < 0,7$. Kondisi jaringan jalan tersebut didukung dengan jalan arteri primer sepanjang 1.583,28 km yang menghubungkan antar-PKN dan antara PKN dengan PKW. Total panjang jalan kolektor primer adalah 193.368 km yang menghubungkan PKN dan PKW dengan pusat kegiatan lainnya.

4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan Provinsi Jawa Barat terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.783 km, jalan provinsi sepanjang 2.360,58 km, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 21.593,25 km. Wilayah dengan panjang jalan tertinggi berada di Kabupaten Bogor (1.953 km), Kabupaten Karawang (1.726 km), dan Kabupaten Sukabumi (1.716 km). Berdasarkan kewenangannya, jalan nasional terpanjang berada di Kabupaten Cianjur dengan panjang 217 km, jalan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Garut dengan panjang 286 km, dan jalan kabupaten terpanjang berada di Kabupaten Bogor dengan panjang 1.698 km.

Tingkat kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Jawa Barat sangat baik dengan nilai mencapai 97,9% mantap atau sepanjang 1.746,6 km dari total panjang jalan 1.783 km. Sementara untuk Jalan Provinsi, memiliki angka kemantapan jalan yang lebih rendah dengan nilai 88,8% mantap atau sepanjang 2.096,6 km dari total panjang Jalan Provinsi 2.360,6 km. Jalan Kabupaten/Kota memiliki tingkat kemantapan yang lebih rendah lagi dengan angka 79,6% atau sepanjang 14.138,8 km dari total panjang Jalan Kabupaten/Kota 17.747,7 km.

Meskipun secara kemantapan Jalan Nasional sangat baik (97,9%), tingkat pelayanan jalan (LOS) di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah akibat tingginya pergerakan logistik dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dari total 254 ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat, terdapat 74 ruas jalan nasional yang memiliki tingkat layanan rendah ($VCR > 0,85$). Hal tersebut disebabkan tingkat lalu lintas harian Provinsi Jawa Barat yang tertinggi secara nasional sejumlah 3,9 juta pergerakan per hari. Sebagian besar atau 70% dari total pergerakan logistik dan jalan berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan tingginya kepadatan jalan di wilayah utara. Jalan nasional yang memiliki tingkat pelayanan rendah (*Level of Service F*) di antaranya Puncak-Cianjur, Cikampek-Purwakarta-Kota Bandung, DKI-Bogor-Sukabumi, Bandung-Tasikmalaya, Kertajati-Cirebon, Cianjur-Padalarang, Jalan Perkotaan Bandung, Jalan Perkotaan Bogor, Jalan Perkotaan Cianjur, Jalan Perkotaan Cimahi, Jalan Perkotaan Bekasi, Jalan Perkotaan Karawang, dan Jalan Perkotaan Sukabumi.

Wilayah Jawa Barat Selatan yang memiliki tingkat kepadatan rendah sudah terlayani oleh jalan nasional sepanjang 417 km dengan kondisi 97% mantap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan ekonomi belum berkembang, wilayah selatan sudah didukung akses untuk membuka keterisolasian.

Selain jalan nasional, Provinsi Jawa Barat juga didukung dengan layanan jalan bebas hambatan, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki panjang jalan tol beroperasi terpanjang di Indonesia sebesar 838 km hingga tahun 2024. Jalan tol yang sudah beroperasi di Jawa Barat dapat dilihat secara rinci pada Peta 4.2 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Ruas Tol sudah Beroperasi 2024 di Provinsi Jawa Barat

No	Ruas	Panjang (km)	Operasi
1	Jakarta–Cikampek	83	Sebelum 2022
2	Jakarta–Cikampek II Elev. (MBZ)	38	Sebelum 2022
3	Cikopo–Palimanan	116,75	Sebelum 2022
4	Cikampek–Purwakarta–Padalarang	58,5	Sebelum 2022
5	Soreang–Pasir Koja	8,15	Sebelum 2022
6	Padalarang–Cileunyi	64,4	Sebelum 2022
7	Jakarta–Bogor–Ciawi	59	Sebelum 2022
8	Ciawi–Sukabumi (seksi 1-3)	40,1	2023
9	Lingkar Luar Bogor (seksi 1,2,3A)	10,45	2025
10	Akses Tj Priok	11,4	Sebelum 2022
11	Cimanggis–Cibitung	20,26	2024
12	Cibitung–Cilincing	34,39	2024
13	Cileunyi–Sumedang–Dawuan	61,67	2022
14	Cibitung–Cilincing	34,39	2022
15	Cinere–Jagorawi	14,89	2022
16	Jakarta–Cikampek II Selatan (seksi 1)	9,3	2025
17	Depok–Antasari (seksi 1-3A)	15,6	2024
18	Akses Patimban	37,05	2024
19	Bekasi–Cawang–Kp. Melayu	15,28	2024

Sumber: SIGI PU diolah BPIW, 2024

Pembangunan jaringan jalan tol disusun berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang mengacu pada sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional serta kebijakan perencanaan jalan tol yang terdiri atas ruas-ruas jalan tol yang berbentuk koridor. Ruas-ruas jalan tol pada Tabel 4.5 sebagian besar dibangun untuk mengurangi beban jalan nasional maupun jalan tol eksisting pada kawasan metropolitan. Selain itu juga, terdapat jaringan jalan tol yang dibangun untuk menghubungkan dan sebagai akses logistik ke pelabuhan baru, yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Ruas Tol Akan Beroperasi di Provinsi Jawa Barat

No	Ruas	Panjang (km)	Tahun Operasi
1	Ciawi–Sukabumi (seksi 4)	13	2027
2	Jakarta–Cikampek II Selatan (seksi 2-3)	52,7	2027
3	Depok–Antasari (seksi 3B)	5	2027
4	Cimanggis–Cibitung (seksi 2)	17	2027
5	Gedebage–Tasikmalaya	95,25	2029
6	Cipali–Patimban	37,05	2026
7	Bogor Ring Road (seksi 3C)	1,5	2027

Sumber: Rencana Umum Jalan Tol diolah BPIW, 2024.

4.2.2. Infrastruktur Jembatan

Infrastruktur jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam memperlancar mobilitas dan efektivitas waktu tempuh pada akses yang terputus atau terpisah akibat kondisi geografis. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat 862 unit jembatan pada jalan nasional, 81 unit jembatan gantung, dan 30 unit jembatan tol.

Dari total jembatan pada jalan nasional, berdasarkan hasil survei tahun 2024 diketahui 118 jembatan dalam kondisi tidak mantap dan 744 dalam kondisi mantap. Di samping kondisi jembatan, umur jembatan juga perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan pengguna jalan, dimana terdapat 648 jembatan yang sudah berumur di atas 30 tahun dan perlu diperbaharui.

Selain kondisi fisik jembatan, besaran lalu lintas harian dan kapasitas jalan nasional juga perlu diperhatikan, sehingga keberadaan jembatan tidak menjadi *bottleneck* bagi arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Terdapat 266 jembatan yang memiliki lebar di bawah 7 meter atau di bawah standar lebar jalan nasional. Selain itu, terdapat 55 unit jembatan yang merupakan bentang panjang untuk melewati sungai utama yang pemeliharaannya perlu diperhatikan karena membutuhkan penanganan khusus.



Tabel 4.7 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi	
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Terbangun (2023)	61,6	61,6	– Direncanakan untuk mendukung aksesibilitas menuju Bandara Kertajati dari Kawasan Cekungan Bandung	– Digunakan untuk mendukung aksesibilitas menuju Bandara Kertajati dari Kawasan Cekungan Bandung
2	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan	(On going)	64	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan industri, perumahan, dan pariwisata.	–
3	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	(On going)	37,05	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan industri rebana menuju Pelabuhan Patimban (gerbang ekspor-impor Provinsi Jawa Barat)	–
4	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang	(On going)	61	-	– Direncanakan untuk mendukung konektivitas Kawasan Selatan Jawa Barat yang berkembang di bidang pariwisata dan pertanian dengan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung sebagai penyumbang wisatawan terbanyak di Provinsi Jawa Barat.	–
5	Tol Gedebage-Tasik-Cilacap	(On going)	108,31	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan pertanian dan pariwisata di Kawasan Selatan Jawa Barat	–

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2025

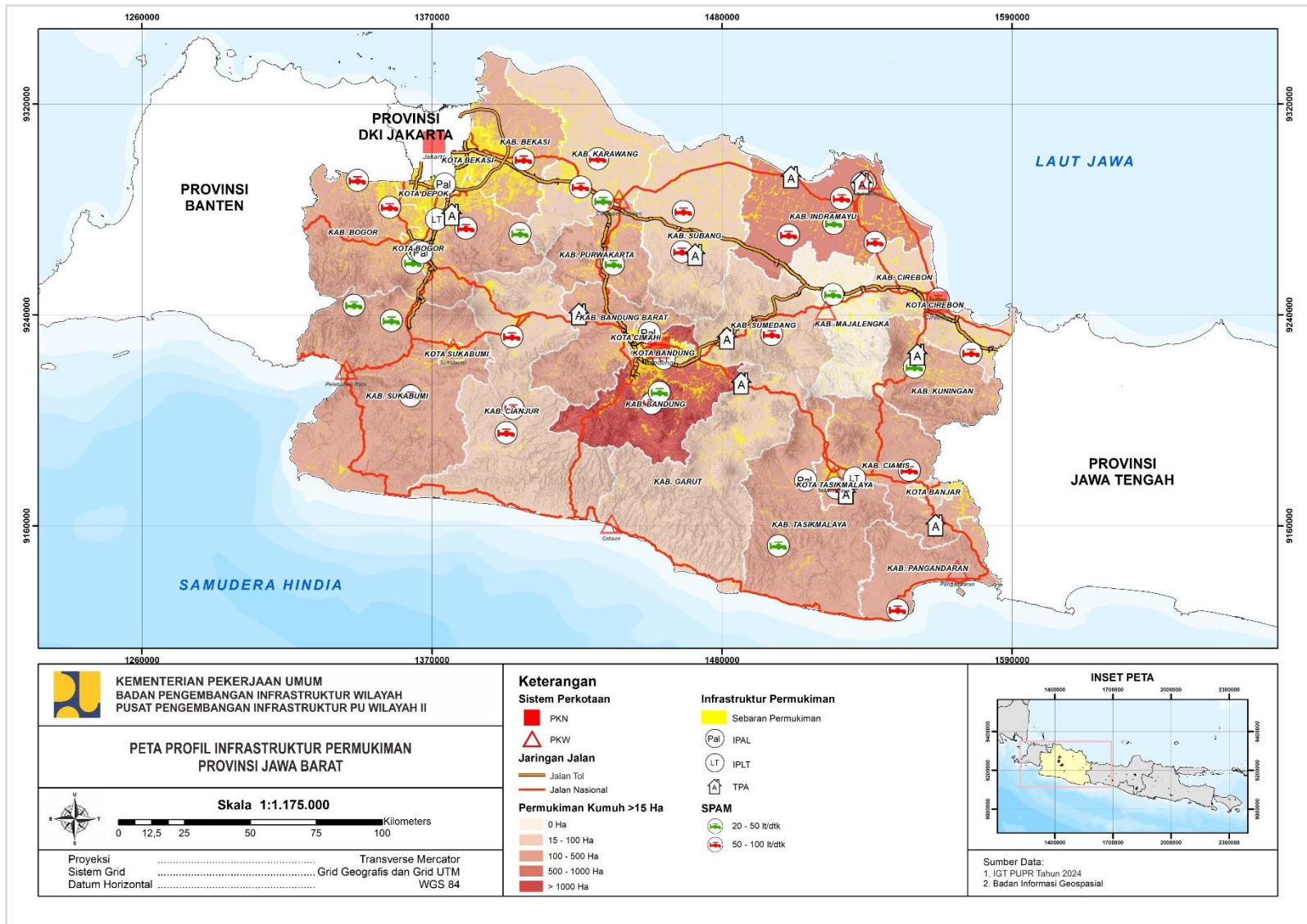
4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 50,3 juta (2024) dan tingkat pertumbuhan penduduk di atas rata-rata nasional sebesar 1,13% per tahun mengalami tekanan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur dasar yang sesuai dengan standar pelayanan minimal semakin penting untuk disediakan terutama pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Kota Bandung (152 org/ha), Kota Cimahi (141 org/ha), dan Kota Bekasi (124 org/ha). Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi membutuhkan tingkat pelayanan minimal yang memadai karena rendahnya daya dukung lingkungan terutama untuk pengolahan limbah dan penyediaan air bersih.

Pada umumnya, infrastruktur permukiman (meliputi air minum, pengolahan limbah domestik, pengolahan sampah, dan penanganan permukiman kumuh) sudah melayani seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat pelayanan yang beragam. Seiring dengan persebaran kawasan permukiman, layanan infrastruktur permukiman di wilayah tengah-utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah-selatan yang kawasan permukimannya rendah. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat layanan infrastruktur dasar terendah.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat layanan sanitasi layak terendah di Pulau Jawa dengan cakupan layanan hanya sebesar 74,02%. Tingkat pelayanan pengolahan persampahan masih di bawah standar pelayanan nasional, dimana hanya 35,67% timbunan sampah yang tertangani dan 46,53% sampah perkotaan yang tertangani. Timbunan sampah yang banyak tidak tertangani juga sebagai akibat dari tempat pembuangan akhir sampah regional yang sudah *overload*, sebagai contoh TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang melayani persampahan Kota Bandung dan sekitarnya. *Overload*-nya TPA Sarimukti hingga berakibat tercemarnya sungai yang berada di dekat TPA. Timbunan yang tidak ditimbun tanah atau masih *open dumping*, membuat air lindi sampah mengalir ke sungai dekat area TPA.

Jumlah kawasan kumuh perkotaan Provinsi Jawa Barat menempati posisi terluas kedua di Pulau Jawa, dengan jumlah hunian kumuh perkotaan mencapai 19,86% dari total rumah tangga. Kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar semakin tinggi pada wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi, terutama di kawasan perkotaan Cekungan Bandung, Cirebon Raya, serta di 8 PKW yang berada di Cikampek, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cidaun, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kadipaten. Profil dan kinerja infrastruktur permukiman di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 4.3.

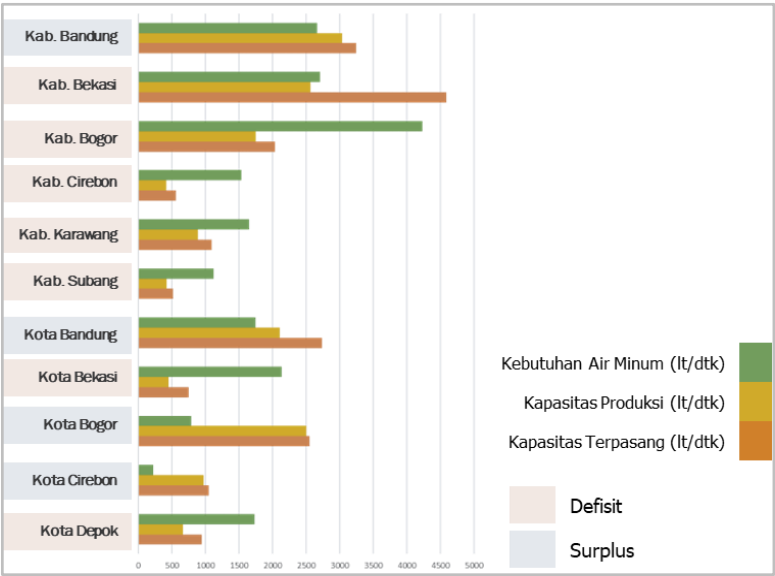


Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat

4.3.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Minum

Dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebesar 50,3 juta orang, secara total terdapat kebutuhan air bersih sebesar 58,3 m³/detik, dengan total produksi 25,05 m³/detik. Kebutuhan air minum perpipaan terutama diprioritaskan pada kawasan perkotaan dimana masih terdapat sampai dengan 3% penduduk yang belum memiliki layanan air minum layak. Berdasarkan gap antara kapasitas penyediaan air minum dan tingkat distribusi air minum, terdapat *idle capacity* sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar 5,5 m³/detik yang apabila dimanfaatkan secara optimal, maka kawasan perkotaan hanya perlu menambah kapasitas instalasi pengolahan air sebesar 13,1 m³/detik agar dapat mencapai standar pelayanan minimal perkotaan.

Selain itu, mempertimbangkan bahwa kawasan perkotaan sudah mengalami defisit ketersediaan air, kegiatan ekonomi lainnya untuk sektor industri dan komersial juga perlu didukung air perpipaan. Hal ini karena masih tingginya penggunaan air tanah oleh pelaku usaha yang akan meningkatkan risiko penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm/tahun, terutama di Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Wilayah dengan kondisi kritis air berada di Kabupaten Karawang, Subang, Bogor, dan Bekasi.



Gambar 4.3 Tingkat Kebutuhan Air Minum Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2024

Berdasarkan data kinerja PDAM Provinsi Jawa Barat, sebagian besar instalasi pengolahan air masih memiliki *idle capacity*. *Idle capacity* terbesar berada di Kabupaten Bekasi (425 L/detik), Kota Bandung (667 L/detik), Kabupaten Sumedang (100 L/detik), Kabupaten Purwakarta (452 L/detik), Kota Bogor (19 L/detik), Kabupaten Bogor (1.737 L/detik), Kabupaten Sukabumi (229 L/detik), Kabupaten Karawang (153 L/detik),

Kabupaten Subang (113 L/detik), Kabupaten Kuningan (227 L/detik), dan Kabupaten Ciamis (128 L/detik).

4.3.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi meliputi infrastruktur persampahan (TPA Regional) dan pengolahan limbah berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

A. Infrastruktur Persampahan

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 50,34 juta jiwa dapat menghasilkan timbunan sampah sebesar 39 juta m³/tahun. Timbunan sampah terbesar berada di Kabupaten Bogor (4,2 juta m³/tahun), Kota Bekasi (2,6 juta m³/tahun), Kabupaten Bekasi (2,5 juta m³/tahun), Kota Bandung (2,2 juta m³/tahun), Kabupaten Kuningan (1,9 juta m³/tahun), Kabupaten Bandung (1,9 juta m³/tahun). Timbunan sampah dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.8 Kinerja Layanan Sampah Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Timbunan m ³	Terlayani (%)
1	Bogor	4.171.908,5	30,91
2	Sukabumi	1.616.529,7	40,91
3	Cianjur	1.879.466,3	26,35
4	Bandung	1.945.761,7	62,83
5	Garut	1.699.191,9	33,85
6	Tasikmalaya	1.035.430,5	7,20
7	Ciamis	742.915,1	82,17
8	Kuningan	1.961.760,9	16,09
9	Cirebon	1.890.049,4	41,04
10	Majalengka	1.552.155,3	33,05
11	Sumedang	715.121,9	14,59
12	Indramayu	1.685.270,4	62,58
13	Subang	1.688.192,2	23,75
14	Purwakarta	620.233,2	18,18
15	Karawang	1.582.117,2	36,71
16	Bekasi	2.496.253,2	54,23
17	Bandung Barat	1.724.510,9	13,76
18	Pangandaran	1.201.620,6	62,35
19	Kota Bogor	1.156.315,9	93,39
20	Kota Sukabumi	276.580,9	71,00
21	Kota Bandung	2.218.740,4	85,59
22	Kota Cirebon	320.812,7	84,34
23	Kota Bekasi	2.591.169,2	57,24
24	Kota Depok	1.868.343,8	69,90
25	Kota Cimahi	343.956,8	95,85
26	Kota Tasikmalaya	494.426,9	85,88
27	Kota Banjar	128.473,2	97,55

Sumber: SIPSN, Open Data Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2024

Penanganan sampah domestik di Provinsi Jawa Barat sebesar 52%, lebih rendah dari penanganan pelayanan sampah domestik nasional sebesar 60,4% (SIPSN, 2024). Tingkat

sampah terkelola tertinggi berada di Kota Banjar (97,55%), Kota Cimahi (95,85%), Kota Bogor (93,39%), Kota Tasikmalaya (85,88%), dan Kota Bandung (85,59%). Sementara itu, tingkat pengelolaan persampahan terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya (13,00%), Kabupaten Bandung Barat (13,76%), Kabupaten Sumedang (14,59%), Kabupaten Kuningan (16,09%), dan Kabupaten Purwakarta (18,18%).

Rendahnya pengolahan sampah disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat, dimana dari total 21 TPA, hanya 2 TPA yang termasuk TPA Regional (TPPAS Sarimukti dan TPPAS Nambo). TPA Legok Nangka yang akan melayani Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, dan Kota Cimahi saat ini belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan konstruksi. Jika TPA ini beroperasi, kapasitas pengelolaan di Provinsi Jawa Barat akan meningkat, terutama di wilayah Cekungan Bandung dengan peningkatan 1.853–2.131 ton/hari.

Selain meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, TPA ini juga akan meningkatkan kualitas lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan sistem *waste to energy* melalui pengolahan berbasis Refused Derived Fuel (RDF). Dengan kapasitas TPA Legok Nangka, diharapkan pengolahan sampah dapat menghasilkan 500-600 ton RDF yang dapat dimanfaatkan oleh industri sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, akan terdapat produk olahan lainnya yang dapat bernilai ekonomi, seperti seperti kompos, bahan daur ulang, gas sintetik, minyak sintetik, dan biogas. Saat ini, TPPAS Nambo sudah menghasilkan 15 ton RDF per hari dan berpotensi mencapai 800 ton RDF per hari apabila sudah beroperasi penuh.

B. Infrastruktur Pengolahan Limbah

Penanganan limbah difokuskan pada peningkatan akses aman, terutama di kawasan perkotaan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi. Sanitasi aman merupakan sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga (sendiri), yang terhubung dengan *septic tank*. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT. Sementara itu, akses sanitasi layak merupakan sanitasi yang digunakan secara komunal dan sudah dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terhubung dengan *septic tank*.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat layanan sanitasi yang terendah di Pulau Jawa dengan tingkat sanitasi aman sebesar 10,54% dan tingkat sanitasi layak sebesar 75,10%. Wilayah perkotaan cenderung sudah memiliki tingkat sanitasi aman yang tinggi, seperti di Kota Cirebon (24,89%), Kota Bandung (22,01%), dan Kota Bekasi (21,41%). Sementara itu, kawasan selatan Provinsi Jawa Barat cenderung memiliki tingkat sanitasi aman yang

rendah seperti di Kabupaten Bandung Barat (2,03%), Kuningan (2,05%), dan Garut (2,45%).

Untuk tingkat sanitasi layak, tingkat pelayanan yang tertinggi berada di wilayah Kota Bekasi (99,08%), Kota Depok (98,76%), Kabupaten Indramayu (97,27%), Kota Cirebon (95,38%), Kota Banjar (91,07%), Kabupaten Pangandaran (90,30%), dan Kabupaten Subang (90,29%). Sementara itu, tingkat pelayanan sanitasi terendah berada di Kota Sukabumi (45,88%), Kabupaten Garut (49,99%), Kabupaten Sukabumi (51,90%), Kota Tasikmalaya (53,16%), dan Kabupaten Bandung Barat (54,02%). Tingkat sanitasi layak yang rendah ini disebabkan oleh jumlah layanan sanitasi komunal yang sedikit karena mayoritas sudah memiliki layanan sanitasi aman ataupun karena masih tingginya tingkat BABS pada kabupaten/kota tersebut. Kantong-kantong kemiskinan biasanya menjadi wilayah dengan tingkat sanitasi terendah. Kondisi kinerja infrastruktur sanitasi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Kinerja IPLT di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Nama IPLT	Luas (ha)	Kapasitas (m ³)
1	Kota Bekasi	Bekasi	Sumur Batu	1,2	54
2	Kota Bogor	Bogor	Tegal Gundil	2,01	26
3	Kota Cirebon	Cirebon	Kesenden	7	80
4	Kota Depok	Depok	Kali Mulya	9,8	22
5	Kota Tasik	Tasikmalaya	Singkup	5	38
6	Kab. Majalengka	Majalengka	Kadipaten	2,5	40
7	Kab. Indramayu	Indramayu	Pecuk	-	-
8	Kab. Karawang	Karawang	Leuwi Sisir	1,5	11
9	Kab. Subang	Subang	Cibarolak	5	17
10	Kota Sukabumi	Sukabumi	Cikundul	2,2	26
11	Kab. Sukabumi	Pelabuhan Ratu	Cibadak	0,5	28
12	Kab. Cianjur	Cianjur	Babakan Karet	2	23
13	Kab. Bandung	Soreang	Babakan	0,5	18
14	Kab. Bandung		Cibeet	0,7	28
15	Kab. Bogor	Cibinong	Cibinong	-	75
16	Kab. Bekasi	Kab. Bekasi	Muktiwari	-	75
17	Kota Bandung	Kota Bandung	Kompak (Strategis)	-	-

Sumber: SIGI PU, Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2024

4.3.3. Penanganan Kawasan Kumuh

Provinsi Jawa Barat memiliki luasan wilayah kumuh terbesar kedua di Pulau Jawa, yaitu seluas 5.794,76 ha. Luasan kumuh terbesar berada di Kabupaten Bandung seluas 1.457,45 ha, Kabupaten Bekasi seluas 443,34 ha, Kabupaten Indramayu seluas 673,52 ha, dan Kota Cirebon seluas 315,91 ha. Sementara itu, wilayah dengan luasan kumuh terkecil berada di Kota Banjar seluas 20,60 ha, Kabupaten Cianjur seluas 34,40 ha, dan Kabupaten Subang seluas 36,90 ha.

Tabel 4.10 Penetapan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	No. SK	Luas (ha)
Kota Banjar	650/245.a/2021	184,75
Kabupaten Cianjur	648/Kep.196-Tarkim/2014	34,40
Kabupaten Subang	PT.02.01/Kep.590-DPKP/2019	177,25
Kabupaten Garut	663/KEP.1131-BAPPEDA/2021	312,88
Kabupaten Sumedang	660/KEP. 320 – BAPPPPEDA/2020	164,69
Kabupaten Karawang	765/Kep.217-Huk/2019	327,06
Kabupaten Cirebon	600/Kep.4-DPKPP/2021	258,4
Kota Bandung	No. 648/Kep.1227-DPKP3/2020	491,94
Kabupaten Purwakarta	653.2/Kep705-DCKTR/2014	103,90
Kabupaten Bandung Barat	663/kep.77-DCKTR/2015	121,77
Kabupaten Sukabumi	640/Kep.492-DPKP/2020	682,57
Kota Depok	591/250/Kpts/Bapp/Huk/2015	132,72
Kota Sukabumi	185.45/359-Bappeda/2021	118,17
Kabupaten Kuningan	663/KPTS-54-DPKPP/2021	376,69
Kota Cimahi	663/Kep.2330.DPKP/2021	156,47
Kabupaten Bogor	663/141/Kpts/Per-UU/2019	116,995
Kabupaten Tasikmalaya	648.11/Kep.283-Distarkim/2015	270,34
Kota Tasikmalaya	633/Kep.733.1-Disperwaskim/2021	168,49
Kabupaten Pangandaran	659/Kpts.87.C-Huk.Org Tahun 2014	295,30
Kota Cirebon	663/Kep.421-DPRKP/2021	148,53
Kabupaten Indramayu	648/Kep.81-DPKP2/2018	673,52
Kabupaten Bandung	No. 648/Kep.286-DisTarCip/2015	1.457,45
Kabupaten Ciamis	648/KPTS.501-HUK/2017	112,39
Kota Bogor	600.2.1/KEP.216-DISPERUMKIM/2024	391,95
Kabupaten Bekasi	663/Kep.508 - Disperkimtan/2020	1380,62
Kota Bekasi	600/Kep.399.A - Disbangkim/VI/2016	443

Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2025

Kawasan kumuh banyak terdapat di sekitar Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung karena tingginya kebutuhan permukiman yang mendukung aktivitas perkotaan, seperti industri dan jasa, yang tidak sebanding dengan ketersediaan perumahan layak. Salah satu kendala pemerintah dalam membantu kawasan kumuh adalah legalitas kepemilikan lahan. Tanpa adanya status kepemilikan lahan, maka bantuan pemerintah untuk penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan aksesibilitas tidak bisa dialokasikan.

Tabel 4.11 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	SPAM Regional Jatigede	2023 (On going)	3.500	2.000	Memberikan layanan air minum untuk Kabupaten Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon (Kawasan Rebana)	- Intake SPAM Jatigede I sebesar 2.000 lt/dtk sudah terbangun, namun air belum bisa dimanfaatkan dengan optimal karena saat ini masih dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan IPA. - Intake SPAM 1.500 lt/dtk dapat dilakukan pembangunan setelah SPAM Jatigede I dapat dimanfaatkan secara optimal.	Intake SPAM Jatigede I sebesar 2.000 lt/dtk sudah terbangun, namun air belum bisa dimanfaatkan dengan optimal karena saat ini masih dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan IPA.

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2023

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Prasarana Strategis

Prasarana strategis merupakan infrastruktur penting yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya pembangunan fasilitas seperti sekolah, madrasah, dan sarana olahraga, pemerintah berkomitmen menyediakan akses pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan prasarana ini juga mencakup dukungan terhadap berbagai jenis aktivitas sehingga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan maupun pinggiran.

4.1.1. Infrastruktur Sarana Pendidikan

Pembangunan infrastruktur sarana pendidikan di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara masif dan merata. Sejumlah institusi pendidikan tinggi, madrasah, serta sekolah dasar dan menengah telah didirikan dan dijalankan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Di Provinsi Jawa Barat, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) telah dibangun di Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (2019)
2. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (2019, 2020)
3. Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Negeri Media Kreatif (2020)
4. Institut Teknologi Bandung, (2021)
5. Universitas Indonesia (2022)
6. Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Pertanian Bogor (2023)

Di sisi lain, pembangunan madrasah di Provinsi Jawa Barat juga terus diperluas hingga berbagai jenjang, seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah). Terdapat total puluhan unit madrasah baru yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dengan rincian 11 MI, 23 MTs, dan 12 MA. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.

Untuk pendidikan umum, pembangunan sekolah dasar dan menengah juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 139 SD dan 12 SMP yang dibangun mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 dan tersebar di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, ada pula pembangunan lembaga pendidikan formal setingkat Taman Kanak-kanak (TK) yang berbasis agama islam, yaitu Raudhatul Athfal (RA). Terdapat 6 RA yang dibangun di tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Lembaga pendidikan berbasis agama Islam lainnya yang dibangun adalah Pondok Pesantren sejumlah 2 Ponpes di tahun 2023.

4.1.2. Infrastruktur Dukungan Perekonomian

Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perekonomian terus dilaksanakan secara terpadu, meskipun pada data tidak mencantumkan secara rinci fasilitas ekonomi secara langsung. Namun demikian, keberadaan sarana pendidikan, olahraga, serta fasilitas sosial dan budaya memberikan efek berganda terhadap aktivitas perekonomian

lokal, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum belum melaksanakan pembangunan infrastruktur pasar di Provinsi Jawa Barat.

4.1.3. Infrastruktur Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya

Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, pembangunan infrastruktur olahraga yang juga mendukung pengembangan potensi generasi muda juga terus dilakukan. Beberapa fasilitas olahraga yang telah dibangun di Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Lapangan Jati Padjajaran (UNPAD), Lapangan IPDN, Stadion Sidolik, serta Gedung Pusat Pelatihan dan Asrama Olahraga Dayung (2020)
2. Gudang perahu Pangalengan dan Sarana Atletik Pangalengan (2021)

Kehadiran sarana olahraga tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Selain itu, fasilitas ini juga berperan penting sebagai pusat pengembangan berbagai aktivitas fisik serta pembinaan atlet yang berkompetisi pada tingkat regional.

Tabel 4.12 Infrastruktur Prasarana Strategis di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis	Lokasi	Kab/Kota	Tahun
1	PTKIN	Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Kota Depok	2019 - 2020
2	PTN	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Kota Bandung	2019
3	PTN	Politeknik Negeri Jakarta	Kota Depok	2020
5	PTN	Institut Teknologi Bandung	Kota Bandung	2021
6	PTN	Universitas Indonesia	Kota Depok	2022
7	PTN	Institut Pertanian Bogor	Subang	2023
8	PTN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Sumedang	2023
9	Madrasah	Pondok Pesantren Al Muthmainnah	Cianjur	2023
10	Madrasah	Pondok Pesantren Tarbiyatussibyan	Cianjur	2023
11	Madrasah	RA Al - Adzkiya 2	Cianjur	2023
12	Madrasah	RA Cita Sabit	Cianjur	2023
13	Madrasah	RA Hidayatul Muftadien	Cianjur	2023
14	Madrasah	RA Islahul Ummah	Cianjur	2023
15	Madrasah	RA Nurul Akhlak	Cianjur	2023
16	Madrasah	RA Yaa Bunayyah	Cianjur	2023
17	Madrasah	MI Negeri 12 Ciamis	Ciamis	2021
18	Madrasah	MI Negeri 13 Ciamis	Ciamis	2021
19	Madrasah	MI Negeri 2 Garut	Garut	2021
20	Madrasah	MI Negeri 5 Cirebon	Cirebon	2021
21	Madrasah	MI Negeri 5 Kuningan	Kuningan	2021
22	Madrasah	MI Negeri 2 Indramayu	Indramayu	2022
23	Madrasah	MI Anatussibyan	Cianjur	2023
24	Madrasah	MI Baetussibyan	Cianjur	2023
25	Madrasah	MI Haregeum	Cianjur	2023
26	Madrasah	MI Jamiatul Hidayah	Cianjur	2023
27	Madrasah	MI Negri 1 Indramayu	Indramayu	2023
28	Madrasah	MTS Negeri 2 Cianjur	Cianjur	2020
29	Madrasah	MTs Negeri 1 Sukabumi	Sukabumi	2021
30	Madrasah	MTs Negeri 10 Ciamis	Ciamis	2021
31	Madrasah	MTs Negeri 13 Ciamis	Ciamis	2021
32	Madrasah	MTs Negeri 13 Majalengka	Majalengka	2021

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

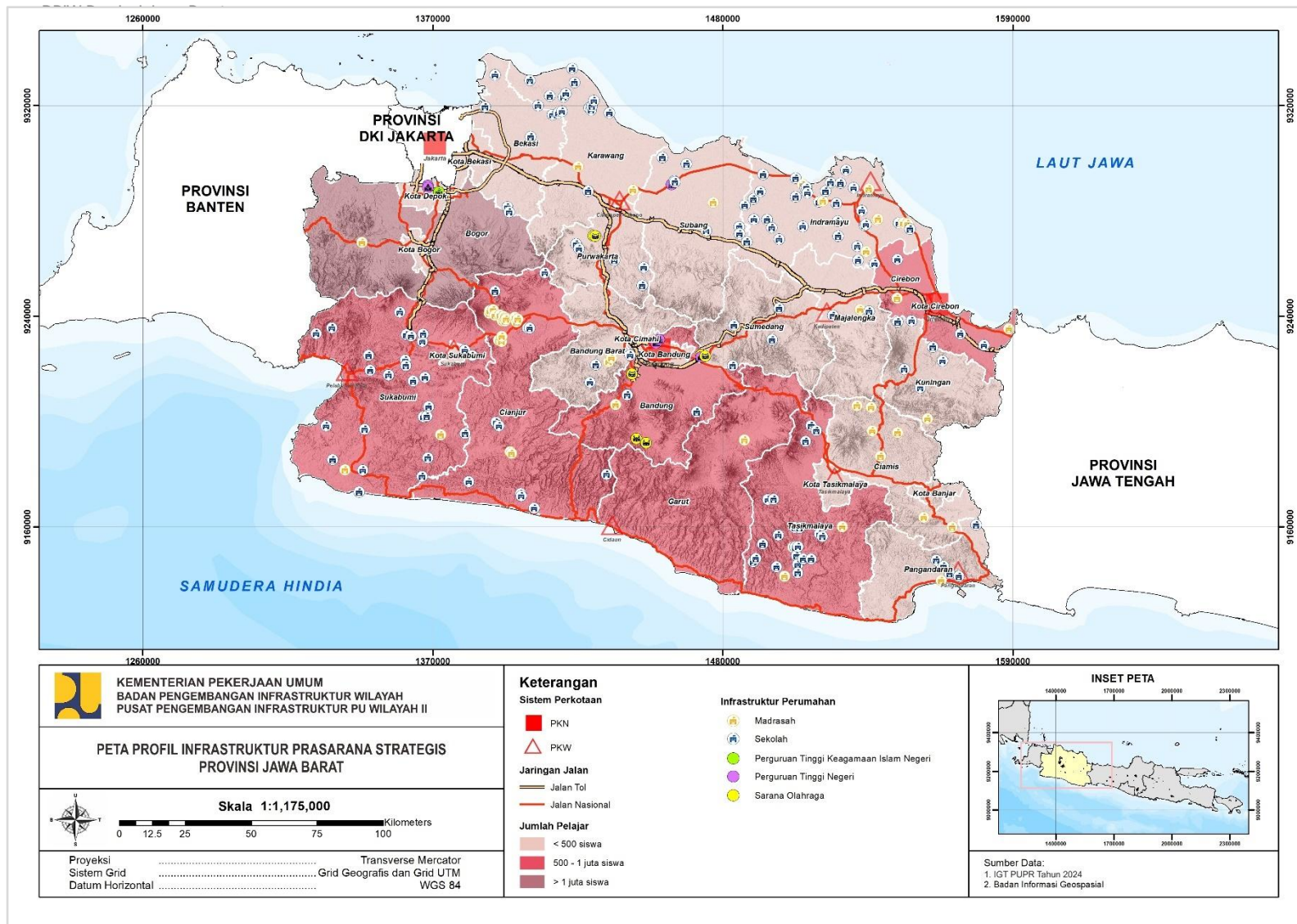
No	Jenis	Lokasi	Kab/Kota	Tahun
33	Madrasah	MTs Negeri 2 Bandung	Bandung	2021
34	Madrasah	MTs Negeri 2 Ciamis	Ciamis	2021
35	Madrasah	MTs Negeri 2 Karawang	Karawang	2021
36	Madrasah	MTs Negeri 5 Cirebon	Cirebon	2021
37	Madrasah	MTs Negeri 5 Tasikmalaya	Tasikmalaya	2021
38	Madrasah	MTs Negeri 7 Ciamis	Ciamis	2021
39	Madrasah	MTs Negeri 10 Indramayu	Indramayu	2022
40	Madrasah	MTs Negeri 11 Ciamis	Ciamis	2022
41	Madrasah	MTs Negeri 13 Indramayu	Indramayu	2022
42	Madrasah	MTs Negeri 2 Bandung Barat	Bandung Barat	2022
43	Madrasah	MTs Negeri 3 Indramayu	Indramayu	2022
44	Madrasah	MTs Negeri 9 Tasikmalaya	Tasikmalaya	2022
45	Madrasah	MTs Al Ihsan Sarampad	Cianjur	2023
46	Madrasah	MTs Darul Fikri	Cianjur	2023
47	Madrasah	MTs Darussalam Al Mubarak	Cianjur	2023
48	Madrasah	MTs Negeri 1 Indramayu	Indramayu	2023
49	Madrasah	MTs Negeri 4 Indramayu	Indramayu	2023
50	Madrasah	MTs Yaa Bunayyah	Cianjur	2023
51	Madrasah	MA Negeri 2 Subang	Subang	2020
52	Madrasah	MA Negeri 1 Bandung Barat	Bandung Barat	2021
53	Madrasah	MA Negeri 1 Pangandaran	Pangandaran	2021
54	Madrasah	MA Negeri 2 Bogor	Bogor	2021
55	Madrasah	MA Negeri 2 Karawang	Karawang	2021
56	Madrasah	MA Negeri 3 Cianjur	Cianjur	2021
57	Madrasah	MA Negeri 3 Karawang	Karawang	2021
58	Madrasah	MA Negeri 3 Sukabumi	Sukabumi	2021
59	Madrasah	MA Negeri 7 Tasikmalaya	Tasikmalaya	2021
60	Madrasah	MA Darussalam Al Mubarak	Cianjur	2023
61	Madrasah	MA Negeri 1 Cianjur	Cianjur	2023
62	Madrasah	MA Negeri 2 Indramayu	Indramayu	2023
63	Sekolah	SD Negeri Jaya Mulya IV	Cianjur	2019
64	Sekolah	SD Negeri Sirnajati 02	Indramayu	2019
65	Sekolah	SD Negeri Walahar II	Bekasi	2019
66	Sekolah	SD Negeri Segarjaya III	Karawang	2019
67	Sekolah	SD Negeri Sadari III	Karawang	2019
68	Sekolah	SD Negeri Pusakajaya Utara III	Karawang	2019
69	Sekolah	SD Negeri Medankarya I	Karawang	2019
70	Sekolah	SD Negeri Srijaya III	Karawang	2019
71	Sekolah	SD Negeri Srikamulyan III	Karawang	2019
72	Sekolah	SD Negeri Bulak II	Karawang	2019
73	Sekolah	SD Negeri Bulak III	Indramayu	2019
74	Sekolah	SD Negeri Pranti	Indramayu	2019
75	Sekolah	SD Negeri Bugis Tua II	Indramayu	2019
76	Sekolah	SD Negeri Bugis Tua I	Indramayu	2019
77	Sekolah	SD Negeri Sukajadi	Indramayu	2019
78	Sekolah	SD Negeri Pagedangan	Indramayu	2019
79	Sekolah	SD Negeri Cibeber	Indramayu	2019
80	Sekolah	SD Negeri Sumuradem	Indramayu	2019
81	Sekolah	SD Negeri Ujung Gebang II	Indramayu	2019
82	Sekolah	SD Negeri I Kertajaya	Indramayu	2019
83	Sekolah	SD Negeri 3 Sidomulyo	Pangandaran	2019
84	Sekolah	SD Negeri 3 Kersaratu	Pangandaran	2019
85	Sekolah	SD Negeri 2 Kersaratu	Pangandaran	2019

No	Jenis	Lokasi	Kab/Kota	Tahun
86	Sekolah	SD Negeri 1 Karanglayung	Pangandaran	2019
87	Sekolah	SD Negeri Kiarakoneng	Tasikmalaya	2019
88	Sekolah	SD Negeri 2 Toblongan	Tasikmalaya	2019
89	Sekolah	SD Negeri Budiasih	Tasikmalaya	2019
90	Sekolah	SD Negeri Gandasari	Tasikmalaya	2019
91	Sekolah	SD Negeri Tajurhalang	Tasikmalaya	2019
92	Sekolah	SD Negeri 4 Geresik	Tasikmalaya	2019
93	Sekolah	SD Negeri Leles	Tasikmalaya	2021
94	Sekolah	SD Negeri Gantungan	Bandung	2021
95	Sekolah	SD Negeri Babakan I	Bandung	2021
96	Sekolah	SD Negeri 1 Babakangebong	Cirebon	2021
97	Sekolah	SD Negeri Sigong	Cirebon	2021
98	Sekolah	SD Negeri Bulak IV	Indramayu	2021
99	Sekolah	SD Negeri Sumbon II	Indramayu	2021
100	Sekolah	SD Negeri Karangsari	Indramayu	2021
101	Sekolah	SD Negeri Kiajaran Kulon I	Indramayu	2021
102	Sekolah	SD Negeri Kerimun II	Indramayu	2021
103	Sekolah	SD Negeri Bondan III	Indramayu	2021
104	Sekolah	SD Negeri Kopyah	Indramayu	2021
105	Sekolah	SD Negeri Cantigi Kulon	Indramayu	2021
106	Sekolah	SD Negeri Lamaran Tarung 3	Indramayu	2021
107	Sekolah	SD Negeri Cikandang	Indramayu	2021
108	Sekolah	SD Negeri Maja	Indramayu	2021
109	Sekolah	SD Negeri Eretan Kulon I	Indramayu	2021
110	Sekolah	SD Negeri Karanganyar 4	Indramayu	2021
111	Sekolah	SD Negeri Mundu	Indramayu	2021
112	Sekolah	SD Negeri Tanjung Pura 2	Indramayu	2021
113	Sekolah	SD Negeri Tunggul Panyung 2	Indramayu	2021
114	Sekolah	SD Negeri 1 Sukaraja	Kuningan	2021
115	Sekolah	SD Negeri 1 Koreak	Kuningan	2021
116	Sekolah	SD Negeri 2 Cisantana	Kuningan	2021
117	Sekolah	SD Negeri Cirukem	Kuningan	2021
118	Sekolah	SD Negeri 2 Nangela	Kuningan	2021
119	Sekolah	SD Negeri 3 Pasawahan	Kuningan	2021
120	Sekolah	SD Negeri 2 Girimukti	Majalengka	2021
121	Sekolah	SD Negeri Parakan 1	Majalengka	2021
122	Sekolah	SD Negeri Cimanggung III	Sumedang	2021
123	Sekolah	SD Negeri Margaluyu	Sumedang	2021
124	Sekolah	SD Negeri Pasirlaja	Sumedang	2021
125	Sekolah	SD Negeri Karang Nangka	Sumedang	2021
126	Sekolah	SD Negeri Sindangsari	Tasikmalaya	2021
127	Sekolah	SD Negeri Padahyu	Tasikmalaya	2021
128	Sekolah	SD Negeri Ciawi 3	Tasikmalaya	2021
129	Sekolah	SD Negeri Nangkasari	Tasikmalaya	2021
130	Sekolah	SD Negeri Sampalan Landeuh	Tasikmalaya	2021
131	Sekolah	SD Negeri Sukasari	Tasikmalaya	2021
132	Sekolah	SD Negeri Santrijaya	Tasikmalaya	2021
133	Sekolah	SD Negeri Cipadung	Tasikmalaya	2021
134	Sekolah	SD Negeri Margalaksana	Tasikmalaya	2021
135	Sekolah	SD Negeri Satu Atap Cibarusah	Bekasi	2021
136	Sekolah	SD Negeri Sumber Urip 03	Bekasi	2021
137	Sekolah	SD Negeri Sumber Urip 2	Bekasi	2021
138	Sekolah	SD Negeri Sukamanah 05	Bekasi	2021

No	Jenis	Lokasi	Kab/Kota	Tahun
139	Sekolah	SD Negeri Segara Jaya 03	Bekasi	2021
140	Sekolah	SD Negeri Cibantala 1	Cianjur	2021
141	Sekolah	SD Negeri Kidangkencana	Cianjur	2021
142	Sekolah	SD Negeri Mekarsari	Cianjur	2021
143	Sekolah	SD Negeri Puncakwangi	Cianjur	2021
144	Sekolah	SD Negeri Bojongkoneng	Cianjur	2021
145	Sekolah	SD Negeri Selaawi	Cianjur	2021
146	Sekolah	SD Negeri Gelarpawitan	Cianjur	2021
147	Sekolah	SD Negeri Simpang 1	Cianjur	2021
148	Sekolah	SD Negeri Baturaden III	Karawang	2021
149	Sekolah	SD Negeri Ciptamarga II	Karawang	2021
150	Sekolah	SD Negeri Dongkal II	Karawang	2021
151	Sekolah	SD Negeri 1 Pedes	Karawang	2021
152	Sekolah	SD Negeri Payungsari II	Karawang	2021
153	Sekolah	SD Negeri Rangdumulya II	Karawang	2021
154	Sekolah	SD Negeri I Sadari	Karawang	2021
155	Sekolah	SD Negeri Purbarahayu	Pangandaran	2021
156	Sekolah	SD Negeri 1 Margaluyu	Purwakarta	2021
157	Sekolah	SD Negeri Sukajadi	Purwakarta	2021
158	Sekolah	SD Negeri 2 Panyidangan	Purwakarta	2021
159	Sekolah	SD Negeri 4 Panyidangan	Purwakarta	2021
160	Sekolah	SD Negeri Sumurugul	Purwakarta	2021
161	Sekolah	SD Negeri 3 Rawameneng	Subang	2021
162	Sekolah	SD Negeri Sukamandi IV	Subang	2021
163	Sekolah	SD Negeri Sidamulya	Subang	2021
164	Sekolah	SD Negeri Sindangsono	Subang	2021
165	Sekolah	SD Negeri Tanjungjaya	Subang	2021
166	Sekolah	SD Negeri Kebon Kapas	Sukabumi	2021
167	Sekolah	SD Negeri Paris	Sukabumi	2021
168	Sekolah	SD Negeri Cikanteh	Sukabumi	2021
169	Sekolah	SD Negeri Linggarjati	Sukabumi	2021
170	Sekolah	SD Negeri Csonggom	Sukabumi	2021
171	Sekolah	SD Negeri Sampalan	Sukabumi	2021
172	Sekolah	SD Negeri Cibitung	Sukabumi	2021
173	Sekolah	SD Negeri Cikokosan	Sukabumi	2021
174	Sekolah	SD Negeri Cikawung	Sukabumi	2021
175	Sekolah	SD Negeri 1 Cipatat	Sukabumi	2021
176	Sekolah	SD Negeri Sirnasari	Sukabumi	2021
177	Sekolah	SD Negeri Tugu	Sukabumi	2021
178	Sekolah	SD Negeri 1 Cipari	Sukabumi	2021
179	Sekolah	SD Negeri Cirejeg	Sukabumi	2021
180	Sekolah	SD Negeri Neglaasih	Sukabumi	2021
181	Sekolah	SD Negeri Cipamingkis	Sukabumi	2021
182	Sekolah	SD Negeri Rambay	Sukabumi	2021
183	Sekolah	SD Negeri Cigadog	Sukabumi	2021
184	Sekolah	SD Negeri 5 Pamuruyan	Sukabumi	2021
185	Sekolah	SD Negeri Kalibunder	Sukabumi	2021
186	Sekolah	SD Negeri Durajaya	Sukabumi	2021
187	Sekolah	SD Negeri Gunungrosa	Sukabumi	2021
188	Sekolah	SD Negeri Cikukulu	Tasikmalaya	2021
189	Sekolah	SD Negeri Cacaban	Tasikmalaya	2021
190	Sekolah	SD Negeri Wandasari	Tasikmalaya	2021
191	Sekolah	SD Negeri Giriwangi	Bandung Barat	2022

No	Jenis	Lokasi	Kab/Kota	Tahun
192	Sekolah	SD Negeri Binawarga	Bandung Barat	2022
193	Sekolah	SD Negeri Gunung Putri	Bandung Barat	2022
194	Sekolah	SD Negeri Sugihmukti	Cianjur	2022
195	Sekolah	SD Negeri Gegesik Kulon	Cirebon	2022
196	Sekolah	SD Negeri 1 Panyingkiran	Indramayu	2022
197	Sekolah	SD Negeri Bulak 1	Indramayu	2022
198	Sekolah	SD Negeri Tukdana 1	Indramayu	2022
199	Sekolah	SD Negeri Kerenceng	Sukabumi	2022
200	Sekolah	SD Negeri Kubang	Sukabumi	2022
201	Sekolah	SD Negeri Mandalasari	Sukabumi	2022
202	Sekolah	SD Negeri Sukawangi	Tasikmalaya	2022
203	Sekolah	SMP Negeri 1 Muara Gembong	Bekasi	2019
204	Sekolah	SMP Negeri Satu Atap 1 Batujaya	Karawang	2019
205	Sekolah	SMP Negeri Satu Atap 3 Bojonggambir	Tasikmalaya	2019
206	Sekolah	SMP Negeri 03 Kroya	Indramayu	2021
207	Sekolah	SMP Negeri 4 Cidaun	Cianjur	2021
208	Sekolah	SMP Negeri 3 Blanakan	Subang	2021
209	Sekolah	SMP Negeri 3 Cibadak	Sukabumi	2021
210	Sekolah	SMP Negeri 2 Jatibarang	Indramayu	2022
211	Sekolah	SMP Negeri 1 Ciasem	Subang	2022
212	Sekolah	SMP Negeri Bantargadung	Sukabumi	2022
213	Sekolah	SMP Negeri 4 Satu Atap Culamega	Tasikmalaya	2022
214	Sekolah	SMP Negeri Satu Atap Puspahiyang	Tasikmalaya	2022
215	Olahraga	Stadion Sidolik	Bandung	2020
216	Olahraga	Gedung Pusat Pelatihan dan Asrama Olahraga Dayung	Bandung	2020
217	Olahraga	Gedung Pusat Pelatihan dan Asrama Olahraga Dayung	Purwakarta	2020
218	Olahraga	Gedung Pusat Pelatihan dan Asrama Olahraga Dayung	Purwakarta	2020
219	Olahraga	Lapangan IPDN	Sumedang	2020
220	Olahraga	Lapangan Jati Padjajaran (UNPAD)	Bandung	2020
221	Olahraga	Gudang Perahu Pangalengan	Bandung	2021
222	Olahraga	Sarana Atletik Pangalengan	Bandung	2021

Sumber: Sigi PU, 2025



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat

4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PU

Infrastruktur Non-PU meliputi infrastruktur perhubungan, infrastruktur energi, dan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

4.2.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Infrastruktur perumahan meliputi permasalahan *backlog* perumahan dan rumah tidak layak huni yang saat ini masih menjadi permasalahan mendasar bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

A. Backlog

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kepemilikan rumah terendah kedua se-Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta, dengan 63,7% penduduk tinggal di rumah milik (BPS, 2024). Sementara itu, kepemilikan rumah di pedesaan relatif lebih tinggi (75%) dibandingkan kepemilikan rumah di perkotaan (61%). Hal ini ditunjukkan dengan tercatatnya 3 juta keluarga yang belum memiliki rumah sendiri karena tingginya biaya hunian, terutama di perkotaan.

Wilayah dengan tingkat *backlog* tertinggi berada di Kabupaten Bandung Barat (16,7%), Kabupaten Sukabumi (17%), dan Kota Banjar (17,8%). Tingkat backlog yang tinggi ini berada di wilayah yang memiliki tingkat ekonomi relatif rendah. Dalam survei Penanganan Kemiskinan Ekstrem, sebagian besar warga yang tidak memiliki rumah memiliki kecenderungan menumpang ataupun tinggal pada bangunan temporer yang berada di tanah negara. Dalam survei tersebut, dipelajari bahwa keterbatasan ekonomi terjadi karena tingginya pengangguran musiman, yang disebabkan oleh jenis lapangan kerja yang bersifat musiman juga, seperti sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel 4.13 *Backlog* Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga 2024	Backlog Kepemilikan 2024	Backlog Kepemilikan 2024 (%)
1	Bogor	1.400.324	273.244	19,5
2	Sukabumi	949.015	135.384	14,3
3	Cianjur	827.627	141.007	17,0
4	Bandung	1.039.634	266.564	25,6
5	Garut	789.962	141.085	17,9
6	Tasikmalaya	579.826	90.667	15,6
7	Ciamis	343.286	70.423	20,5
8	Kuningan	291.978	80.865	27,7
9	Cirebon	776.436	184.676	23,8
10	Majalengka	373.386	89.996	24,1
11	Sumedang	388.442	79.012	20,3
12	Indramayu	539.503	80.396	14,9
13	Subang	482.999	81.173	16,8
14	Purwakarta	280.213	53.316	19,0
15	Karawang	608.755	80.912	13,3

No	Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga 2024	Backlog Kepemilikan 2024	Backlog Kepemilikan 2024 (%)
16	Bekasi	828.608	95.637	11,5
17	Bandung Barat	407.309	116.729	28,7
18	Pangandaran	133.739	18.347	13,7
19	Kota Bogor	242.443	69.800	28,8
20	Kota Sukabumi	103.303	29.138	28,2
21	Kota Bandung	519.288	238.262	45,9
22	Kota Cirebon	80.217	28.746	35,8
23	Kota Bekasi	748.157	163.862	21,9
24	Kota Depok	457.256	139.238	30,5
25	Kota Cimahi	121.495	62.190	51,2
26	Kota Tasikmalaya	204.791	57.840	28,2
27	Kota Banjar	51.885	15.296	29,5
Jawa Barat		13.569.877	2.883.805	23,9

Sumber: Ditjen Perumahan diolah BPIW, 2024

B. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat RTLH terendah kedua di Pulau Jawa sebesar 0,9% dari total jumlah rumah tangga (144.258. rumah). Kualitas rumah layak dinilai berdasarkan aspek fisik, mental, dan sosial, yang terdiri dari kondisi lantai bukan tanah (98,6%), kondisi atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (97%), kondisi dinding terluas tembok dan kayu (97,9%), kondisi rata-rata luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m² (94,26%), dan kondisi rata-rata luas lantai per kapita ≥ 8 m² (82,5%).

Secara jumlah, kondisi RTLH tertinggi berada di Kab. Indramayu (27.455 rumah), Kab. Tasikmalaya (16.829 rumah), Kota Tasikmalaya (10.233 rumah), Kota Bandung (10.232 rumah), dan Kab. Majalengka (9,964 rumah). Kondisi RTLH terendah berada di Kab. Bogor (34 rumah), Kota Bekasi (50 rumah), dan Kab. Cianjur (196 rumah). Indikator rumah layak tertinggi disumbangkan karena sudah memadainya kondisi sumber air layak dan luas lantai bukan tanah. Sedangkan indikator rumah tidak layak tertinggi disumbangkan karena rendahnya tingkat layanan sanitasi layak terutama di kawasan kumuh baik yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Tabel 4.14 RTLH Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Jumlah RTLH	RTLH (%)
1	Bogor	1.362.226	104.182	7,44
2	Sukabumi	742.642	40.472	4,26
3	Cianjur	679.231	198.148	23,94
4	Bandung	939.812	6.702	0,64
5	Garut	650.096	143.954	18,22
6	Tasikmalaya	524.460	66.833	11,53
7	Ciamis	368.192	25.894	7,54
8	Kuningan	301.470	8.145	2,79
9	Cirebon	604.271	6.666	0,86
10	Majalengka	387.399	15.440	4,14
11	Sumedang	344.824	3.443	0,89
12	Indramayu	538.578	17.160	3,18

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Jumlah RTLH	RTLH (%)
13	Subang	456.960	6.168	1,28
14	Purwakarta	264.847	22.027	7,86
15	Karawang	659.659	70.813	11,63
16	Bekasi	850.135	5.894	0,71
17	Bandung Barat	475.931	16.354	4,02
18	Pangandaran	127.204	15.698	11,74
19	Kota Bogor	259.121	43.066	17,76
20	Kota Sukabumi	89.263	1.451	1,40
21	Kota Bandung	654.898	4.016	0,77
22	Kota Cirebon	86.174	5.181	6,46
23	Kota Bekasi	658.090	2.074	0,28
24	Kota Depok	528.111	3.954	0,86
25	Kota Cimahi	153.772	2.221	1,83
26	Kota Tasikmalaya	187.530	9.081	4,43
27	Kota Banjar	56.274	1.622	3,13
Jawa Barat		13.569.877	846.659	6,24

Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

C. Rumah Khusus

Kementerian Perumahan telah membangun rumah khusus di 50 lokasi dengan jumlah keseluruhan 896 unit. Akan tetapi, dalam pembahasan ini hanya rusus yang memiliki manfaat khusus sesuai dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas yang ada di Provinsi Jawa Barat tersebar di 10 lokasi dengan jumlah keseluruhan 729 unit yang digunakan untuk kepentingan nelayan, penanganan bencana alam, korban terdampak program pemerintah, dan program MBR. Berbeda dengan rumah susun, rumah khusus adalah kompleks perumahan *landed* dimana setiap unit dihuni oleh satu keluarga. Peruntukan rumah khusus yang dibangun bervariasi. Sejumlah 171 unit di 4 lokasi dibangun sebagai peruntukan rusus untuk nelayan, 508 unit rumah khusus untuk korban terdampak bencana alam, 25 unit rusus untuk korban terdampak program pembangunan pemerintah, dan 25 rusus untuk program MBR. Untuk tahun 2025, kedepan kebijakan pengembangan rumah khusus hanya ditujukan bagi relokasi warga terdampak bencana, sehingga kebutuhan perumahan bagi kepentingan lain akan dialihkan dengan pembangunan rumah susun.

Tabel 4.15 Rumah Khusus Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Khusus	Target Hunian	Jumlah Unit
1	Pangandaran	Rusus Nelayan Cimerak	Nelayan	54
2	Pangandaran	Rusus Nelayan Pangandaran	Nelayan	50
3	Garut	Rusus Bencana Karang Pawitan	Korban Bencana	50
4	Kuningan	Rusus Kecamatan Ciwaru	Korban Bencana	60
5	Kuningan	Rusus Kecamatan Karang Kencana	Korban Bencana	40
6	Kuningan	(Masyarakat Relokasi Pembangunan Bendungan)	Dampak Program Pembangunan	25
7	Kuningan	Rusus MBR Randusari	MBR	25
8	Indramayu	Komplek Perumahan Nelayan	Nelayan	37
9	Karawang	Komplek Perumahan Sekong	Nelayan	30

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Khusus	Target Hunian	Jumlah Unit
10	Bogor	Rusus Kecamatan Sukajaya (Korban Longsor)	Korban Bencana	358

Sumber: *sigi.pu.go.id*, 2024

D. Rumah Susun

Kementerian Perumahan telah membangun 109 rumah susun di 27 kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan 4.561 unit. Akan tetapi, dalam pembahasan ini hanya rusun yang memiliki manfaat khusus sesuai dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas yang ada di Provinsi Jawa Barat diantaranya rusun untuk pekerja, pekerja industri, dan MBR. Berbeda dengan rumah khusus, rumah susun adalah kompleks perumahan bertingkat/vertikal. Berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas, sejumlah 4 rumah susun dengan total 356 unit lokasi dibangun sebagai peruntukan MBR, sejumlah 3 rusun dengan total 158 unit dibangun untuk peruntukan fasilitas pekerja, dan sejumlah 2 rusun dengan total 116 unit dibangun untuk pekerja industri. Berikut merupakan sebaran rumah susun di Jawa Barat.

Tabel 4.16 Rumah Susun Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Infrastruktur Rumah Susun	Jumlah Unit
1	Bandung	Rusun Pekerja Industri Pemprov Jawa Barat (Penghargaan Provinsi)	58
2		Rusun Pekerja Industri Pemprov Jawa Barat (Penghargaan Provinsi)	58
3	Bogor	Rusun Pekerja LIPI Cibinong Bogor	50
4		Rusun Pekerja DIKLAT BASARNAS Bogor	50
5		Rusun Pekerja LIPI	58
6		Rusun MBR Yayasan Madaniah	43
7	Garut	Rusun MBR Pemkab Garut	140
8	Sumedang	Rusun MBR ITB-Jatinangor	66
9	Kota Bandung	Rusun MBR Rancacili	107

Sumber: *sigi.pu.go.id*, 2024

4.2.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan

Persebaran infrastruktur perhubungan, terlihat bahwa pesisir selatan belum terdapat terminal dikarenakan aksesibilitas yang masih minim. Jumlah terminal di Provinsi Jawa Barat mencapai 24 terminal yang terdiri dari 11 Terminal Tipe A dan 13 Terminal Tipe B. Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan utama dibangun untuk menggantikan Pelabuhan Cirebon. Pada pesisir selatan, terdapat Pelabuhan ratu dengan kelas pelabuhan regional dan Pelabuhan Bojongselawe di Kabupaten Pangandaran dengan kelas pelabuhan lokal.

Terdapat 10 Bandara di Provinsi Jawa Barat, namun hanya 3 (tiga) bandara yang merupakan bandara pengumpul, yaitu Husein Sastranega di Kota Bandung, Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Stasiun Kereta Api di

Provinsi Jawa Barat terdapat 10 Stasiun Kereta Api besar dan 7 Stasiun Kereta Api kecil yang tersebar. Lebih dari 100 stasiun kelas lainnya di Provinsi Jawa Barat, namun pada beberapa ruas non-aktif sejak puluhan tahun lalu. Peta Simpul Transportasi dapat dilihat pada Peta 4.5.

Bandara Internasional Jawa Barat sudah beroperasi sejak tahun 2023 dengan peruntukan sebagai bandara khusus haji dan umroh dengan jumlah penumpang 307.756. BIJB memiliki kapasitas sebesar 5,6 juta penumpang/tahun dengan luas lahan 121.000 m² dan panjang runway 3.000 x 60 m. Peta infrastruktur perhubungan seperti pada Peta 4.6.

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Energi

Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas energi terbesar kedua nasional setelah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 9.079 mega watt yang dikelola oleh PLN. Dari total kapasitas tersebut, Provinsi Jawa Barat merupakan pemasok listrik berbasis energi terbarukan terbesar nasional dengan kapasitas sebesar 8.700 mega watt. Pembangkit listrik di Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berada di Kabupaten Bekasi, yaitu PLTGU Muara Tawar, PLTGU Cikarang Listrindo, dan PLTGU Bekasi;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sunyaragi (Kota Cirebon);
3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu PLTU Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), dan PLTU Jawa Barat Baru; dan
4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Saguling, PLTA Cirata dan PLTA Rajamandala.

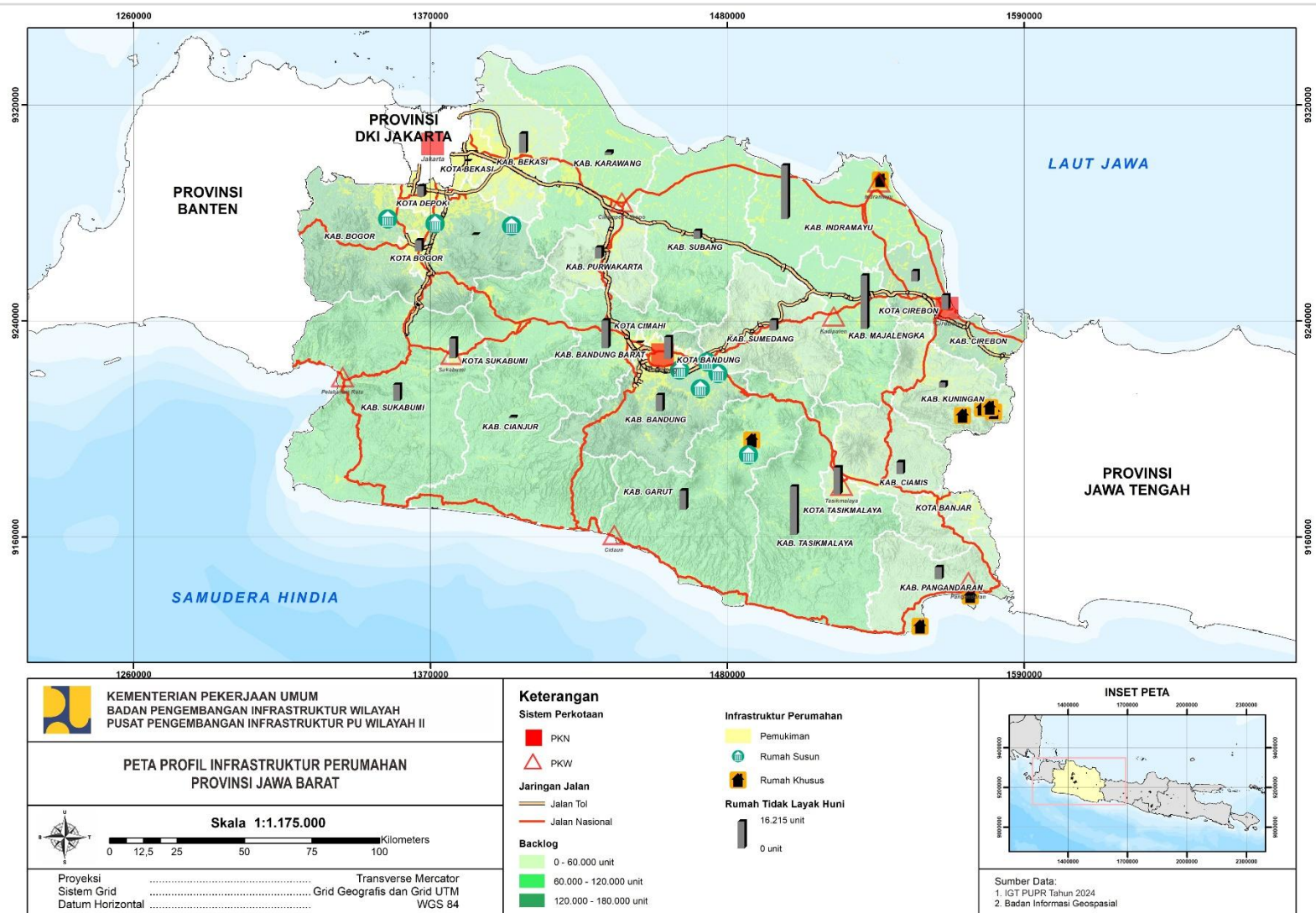
Selain itu, terdapat tujuh pembangkit panas bumi yang dikelola swasta dengan kapasitas sebesar 1.504 MW yang diantaranya adalah PLTP Kamojang dan PLTP Gunung Salak. Selain itu, besarnya jumlah industri di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan banyaknya kawasan industri yang mengelola pembangkit listrik secara swasta yang menggunakan PLTU berbasis batubara.

4.2.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

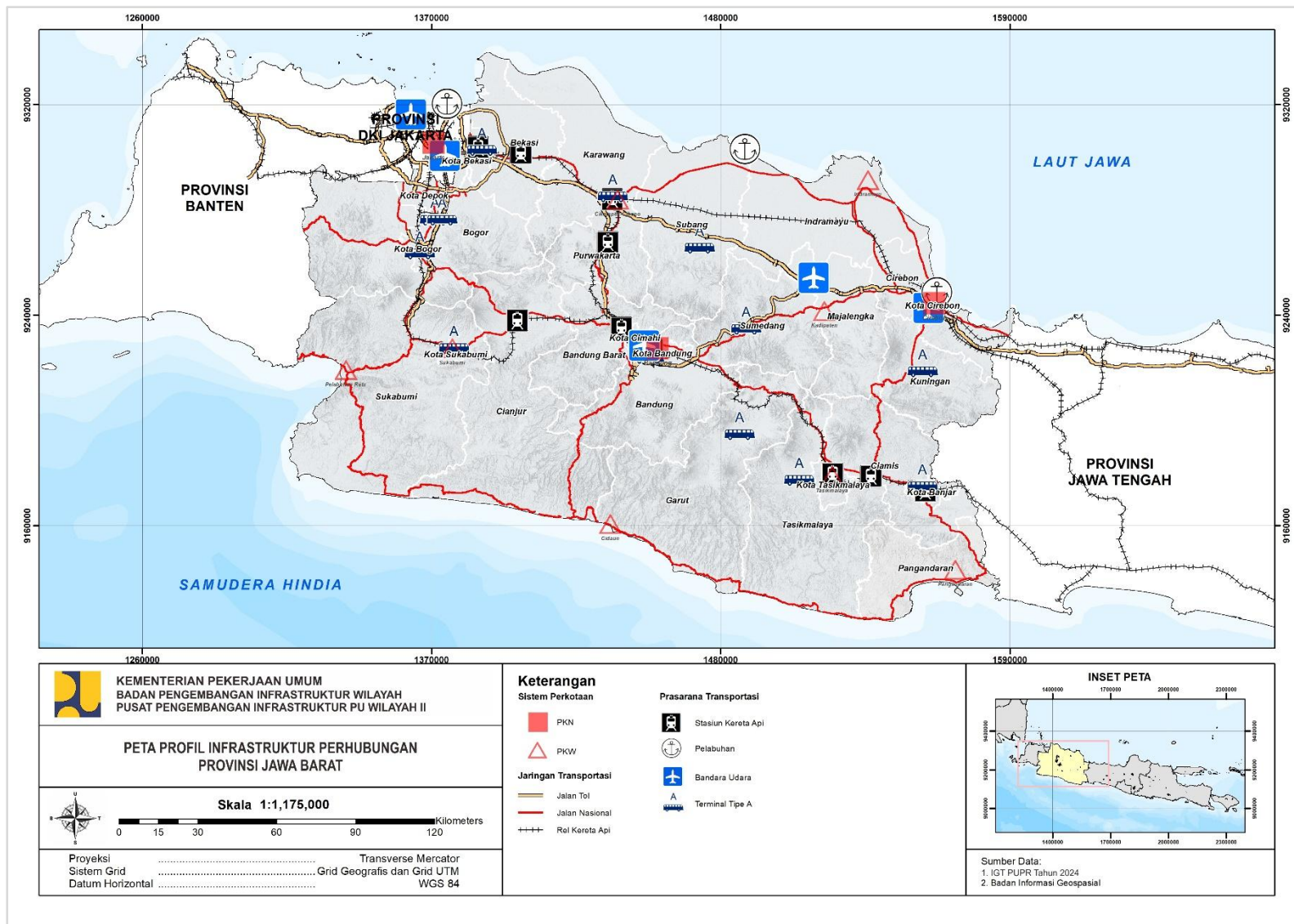
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah desa/kelurahan penerima sinyal kuat seluler terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 5.517 desa/kelurahan. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan jumlah desa/kelurahan yang terlayani sinyal dengan kecepatan tinggi 4G/LTE, yakni sebanyak 410 desa (96,7%) dari total 424 desa yang ada. Sisanya, 14 desa baru terlayani jaringan 3G/H/H+/EVDO. Kemudian sebanyak 386 desa (88%) di Kabupaten Bogor sudah terlayani jaringan 4G dari 435 desa, sisanya 49 baru terlayani jaringan 3G.

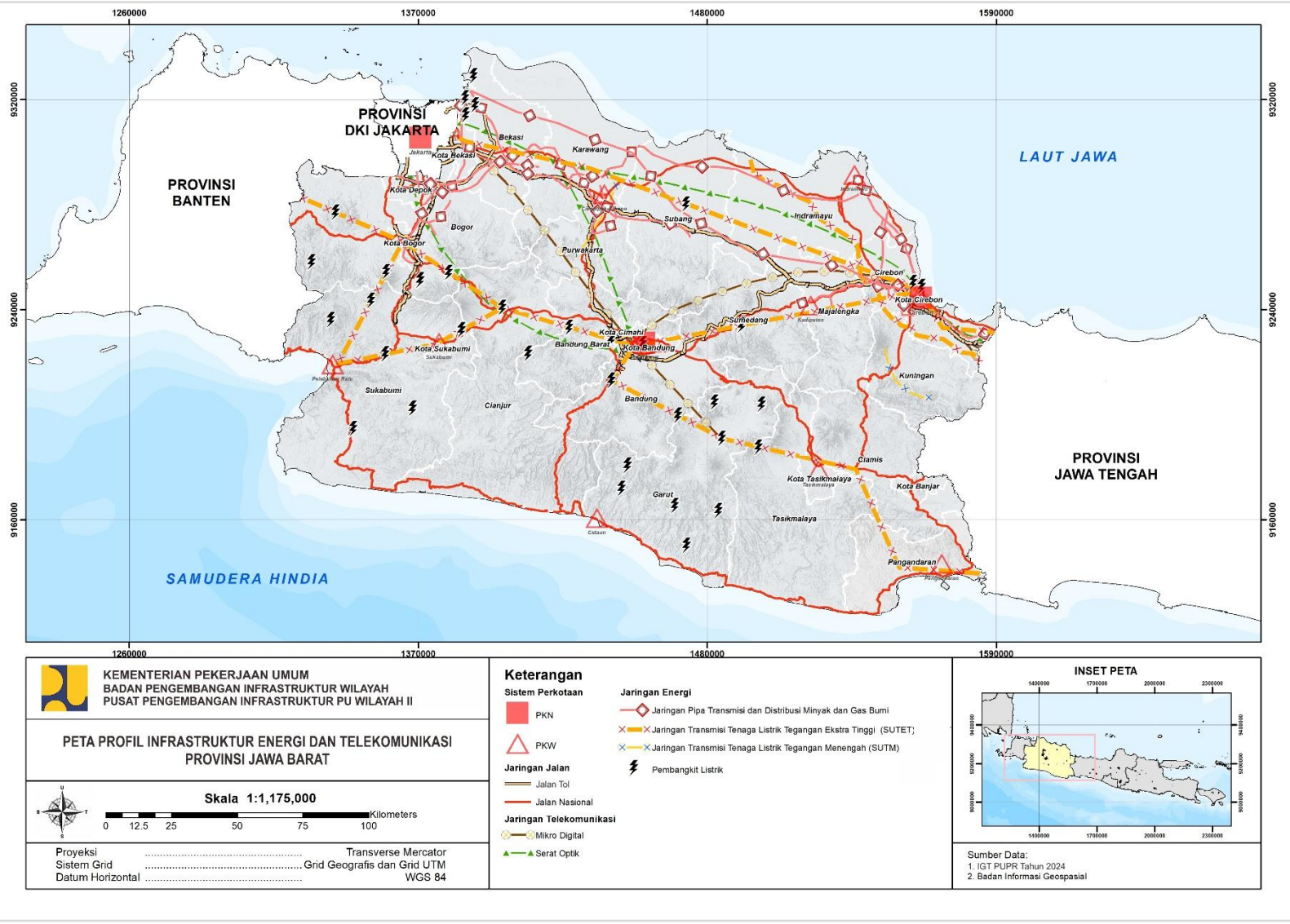
Sebanyak 356 desa (81,46%) Kabupaten Garut terlayani jaringan 4G dari total 437 desa, sisanya 78 desa baru terlayani jaringan 3G.

Meski tercatat sebagai kawasan dengan utilitas internet terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat masih memiliki *blank spot* atau kosong sinyal di sejumlah titik. Hal ini berdampak pada lambatnya adopsi digital di masyarakat. Lokasi yang dekat dengan Ibukota dan akses jalan yang telah mendukung, membuat penggelaran jaringan di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, lebih mudah dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cakupan jaringan di Jawa Barat belum *ter-cover* sepenuhnya. Masyarakat menggunakan sinyal dari satelit yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sinyal dari serat optik. Terdapat enam kota di Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Depok (63 kelurahan), Kota Bekasi (56 kelurahan), Kota Sukabumi (33 kelurahan), Kota Banjar (25 kelurahan), Kota Cirebon (22 kelurahan), dan Kota Cimahi (15 kelurahan) semuanya sudah terlayani jaringan cepat 4G. Sedangkan 3 desa di Kabupaten Tasikmalaya, 1 desa di Kabupaten Kuningan, dan 1 desa di Kabupaten Sukabumi belum mendapat layanan jaringan telekomunikasi. Peta infrastruktur energi dan telekomunikasi dapat dilihat pada Peta 4.7.



Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat





Peta 4.7 Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Barat

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyusun suatu perencanaan terutama rencana pengembangan, pastinya tidak terlepas dari *root cause* (akar masalah) yang harus diketahui sebelumnya, kemudian dilakukan *mapping* atau pemetaan hingga analisis yang tepat, sehingga menghasilkan rencana aksi (*action plan*) yang sesuai untuk mencapai *goal* atau tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dan isu strategis selalu muncul dalam dinamika suatu negara, apalagi dengan Indonesia sebagai negara berkembang, yang tentunya juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan adalah hal yang menjadi masalah atau persoalan; dan isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Perumusan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan ancaman yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PU, dibahas dalam bab 5 ini, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah pada bab 6.



Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Sumber: SE Pedoman Muatan RPIW, 2022

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan berdasarkan fokus perencanaan yang dihasilkan dari rumusan arah kebijakan. Fokus perencanaan tersebut yaitu fokus industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Isu strategis juga menjadi dasar masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah berdasarkan masing-

masing fokus perencanaan. Berikut merupakan alur perumusan permasalahan dan isu strategis.

Permasalahan dan isu strategis pada setiap fokus ditinjau dalam 3 konteks perencanaan, yaitu konteks makro yang bersifat skala nasional, konteks meso dengan skala Pulau Jawa, serta konteks mikro dengan skala provinsi dan kawasan prioritas. Isu strategis diperoleh dengan mempertimbangkan *baseline* (kondisi eksisting dan fokus kebijakan) dan skenario (opsi masa depan dan masalah utama dalam mewujudkan opsi masa depan).

A. Industri *High-Tech* Berorientasi Ekspor

Didominasi oleh industri manufaktur, Provinsi Jawa Barat memiliki **kontribusi sektor industri terbesar** secara nasional. Industri manufaktur memiliki output sebesar Rp638 Triliun atau menyumbang 19,8% pada PDB Industri Nasional dan 5% ke PDB Nasional (BPS, 2022). Secara kebijakan, industri di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada industri berbasis teknologi pada 5 subsektor prioritas, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB (RPJMN 2020-2024).

Sektor industri juga menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat 1 penghasil ekspor nasional (17% dari total nasional). Tingginya peringkat ekspor ini didukung oleh keberadaan ***backbone* jalan tol dan kereta api**, serta **Pelabuhan Patimban** dan **Bandara Kertajati** sebagai outlet. Namun, optimalisasi operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati harus segera dilakukan karena saat ini outlet Jawa Barat masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan arahan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai *hub* internasional dengan kapasitas ekspor 7,5 juta TEUs peti kemas dan 600.000 kendaraan roda empat.

Dengan adanya infrastruktur jalan tol dan kereta api, **konektivitas logistik dengan transportasi antarmoda** diharapkan dapat meningkat, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan waktu menuju gerbang ekspor. Namun, optimalisasi ini dapat meningkatkan beban logistik pada koridor utara akibat terkonsentrasinya outlet ekspor, sehingga harus dilakukan kajian lebih lanjut untuk mempelajari dan menanggulangi potensi masalah ini.

Jika dilihat secara spasial, kawasan industri di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada wilayah utara. Hal ini disebabkan oleh keberadaan **super koridor Pantura Jawa** yang menghubungkan pusat industri di Pulau Jawa. Sesuai dengan arahan kebijakan, pengembangan wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan berfokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan

teknologi tinggi. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku.

Dengan adanya perkembangan kawasan industri, terdapat beberapa tantangan dari sektor lain, seperti pertanian. **Alih fungsi lahan pertanian** di Provinsi Jawa Barat mencapai 921 Ha/tahun di Kabupaten Karawang, 1.131 Ha/tahun di Kabupaten Bekasi, dan tertinggi 1.980 Ha/tahun di Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali. Perkembangan ini juga menyebabkan Provinsi Jawa Barat bagian utara memiliki tingkat risiko **banjir** tinggi–sangat tinggi. Namun, kawasan ini juga memiliki tingkat kritis air tinggi karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, maupun permukiman, sehingga pengembangan kawasan industri perlu diarahkan agar memperhatikan kemampuan penggunaan teknologi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya.

Pada aspek **sumber daya manusia**, terdapat ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung industri berbasis teknologi. Berdasarkan BPS (2020), sebanyak 76% dari penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Provinsi Jawa Barat belum mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya *miss-match* antara kebutuhan industri dengan keahlian tenaga kerja. Dengan adanya pengembangan pusat pendidikan vokasi/pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif, diharapkan dapat terjadi peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dari segi ekonomi, sektor industri Provinsi Jawa Barat memiliki *multiplier effect* tertinggi dengan nilai sebesar 1,5. Sektor yang memberikan dampak terbesar adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, ketenagalistrikan. Namun, hal ini dapat **menyebabkan disparitas kawasan utara dan selatan** Provinsi Jawa Barat karena kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Pantura. Permasalahan ini ditanggapi oleh arahan pengembangan Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian. Harapannya, pengembangan di wilayah utara dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan isu strategis pada sektor industri adalah **perlunya penguatan infrastruktur dan kapasitas tenaga kerja mendukung industri high-tech berbasis ekspor**. Ringkasan isu fokus industri dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rumusan Isu Strategis Industri Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	Kontribusi dan Aktivitas Ekonomi (Memiliki kontribusi ekspor terbesar yang didukung dengan industri pengolahan)	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Mewujudkan industri berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Provinsi Jawa Barat.	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	Perlunya Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Tenaga Kerja Mendukung Industri High-Tech Berbasis Ekspor
		Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.					
MESO	Potensi Industri berbasis Ekspor & Distribusi Barang/ Komoditas/ Konektivitas (Pelabuhan Patimban sebagai pintu keluar masuk barang)	Outlet kawasan industri Jawa Barat masih bergantung dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta karena belum optimalnya pengembangan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.	Pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai hub internasional dengan kapasitas ekspor peti kemas sebesar 7,5 juta teus dan 600.000 kendaraan	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	Peningkatan beban logistik pada koridor utara akibat terkonsentrasinya outlet ekspor pada wilayah Patimban dan Kertajati	
		Kawasan Industri didukung oleh keberadaan super koridor Pantura Jawa yang mendukung penyediaan bahan baku industri terutama petrokimia dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur, karet dan ban dari Provinsi Banten, serta gula dari Provinsi Jawa Tengah.	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang fokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor	
MIKRO	Kondisi Fisik Kewilayahan & Kualitas SDM	Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.	Pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan kemampuan		Konservasi Sumber Daya Air mendukung	Terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.	penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia di sekitarnya		air baku industri dan pengendalian banjir	terbangun pada kawasan rawan banjir	
		Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Tertinggi di Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).	Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk menjaga keutuhan lahan pertanian		Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung industri peningkatan aktivitas dan produktivitas tenaga kerja industri	Pengembangan kawasan industri tidak mempertimbangkan bangkitan tenaga kerja yang membutuhkan infrastruktur dasar dan layanan publik	
		Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	Pengembangan pusat pendidikan vokasi/pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif		Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri	Masih terjadinya miss match antara kebutuhan industri dengan keahlian tenaga kerja	
		Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar adalah: Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Ketenagalistrikan.	Pengembangan Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian		Pengembangan wilayah utara sebagai motor penggerak ekonomi Provinsi Jawa Barat	Disparitas kawasan utara dan selatan Jawa Barat semakin besar akibat terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Pantura.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Pertanian Pangan Padi dengan Intensifikasi

Provinsi Jawa Barat merupakan **penghasil padi tertinggi kedua nasional** dengan produksi padi mencapai 5,3 juta ton atau 16% produksi nasional (2022). Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki luas baku sawah (LBS) 928.218 Ha, terluas ketiga jika dibandingkan luas LBS Indonesia (7.463.948 Ha). Sebagian besar lahan pertanian di Jawa Barat belum ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya, alih fungsi lahan pertanian tidak dapat terpantau.

Provinsi Jawa Barat, diarahkan sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan yang diharapkan akan meningkatkan produksi tanaman pangan melalui **intensifikasi sistem pertanian**. Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pemasok beras ke wilayah lain, seperti DKI Jakarta (sebanyak 12 ribu ton). Namun, tingginya biaya produksi dan logistik sering kali mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian. Selain itu, **sistem logistik** pertanian Provinsi Jawa Barat **belum terbentuk**, sehingga **distribusi pertanian belum optimal**.

Dari segi produktivitas lahan, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian yang tertinggi se-Pulau Jawa dengan nilai 56,75 kuintal/Ha dengan nilai Indeks Pertanaman (IP) Jawa Barat juga merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa (2,1). Saat ini, sektor pertanian menjadi penyumbang **30% jumlah penduduk miskin terbesar**, meski menempati peringkat ke-3 (14%) sebagai mata pencaharian terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Usaha pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan **teknik pertanian inovatif dan modern**.

Dengan segala potensinya, sektor pertanian Provinsi Jawa Barat juga mempunyai risiko kebencanaan. Tingginya **risiko bencana banjir dan kekeringan** yang terjadi di wilayah utara menyebabkan terganggunya produktivitas lahan. Di sisi lain, pengembangan kawasan permukiman seluas 18.000 Ha/tahun juga menyebabkan **pengurangan lahan pertanian sawah** yang tinggi (12.000 Ha/tahun). Perlu dilakukan usaha pertahanan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional.

Selain tingginya risiko bencana dan tingginya alih fungsi lahan, sistem jaringan irigasi di Jawa Barat juga **belum terintegrasi antara jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier**. Harapannya, pengembangan infrastruktur sumber daya air seperti jaringan irigasi ini dapat memenuhi kebutuhan air dan mengurangi risiko banjir. Perlunya pemantapan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan **mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, mengatasi tingginya risiko bencana**, dan **mendorong berkembangnya sistem pertanian yang berbasis intensifikasi**. Ringkasan isu fokus pertanian dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Rumusan Isu Strategis Pertanian Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	Komoditas Unggulan (Provinsi Jawa Barat memiliki potensi lokal sektor unggulan skala nasional)	Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	Pengembangan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional terutama di wilayah utara	Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung	Peningkatan produksi tanaman pangan padi melalui penerapan teknologi mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum ditetapkannya sebagian besar lahan pertanian menjadi LSD	Perlunya Pemantapan Provinsi Jawa Barat Sebagai Lumbung Pangan Utama Nasional
		Sebagai salah satu wilayah dengan luas baku sawah terbesar di Indonesia sebesar 928.218 ha, Provinsi Jawa barat memiliki tingkat produksi terbesar kedua nasional sebesar 9,4 juta ton.					
MESO	Jaringan Transportasi & Distribusi Barang/ Komoditas (Pelabuhan Patimban sebagai pintu keluar masuk barang)	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton, Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	Penguatan sistem jaringan transportasi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cilandiri	Peningkatan aksesibilitas distribusi hasil pertanian dari sentra pertanian menuju ke sentra pengolahan dan pusat permukiman	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal	
MIKRO	Aktivitas Ekonomi, Komoditas Unggulan & Fisik Kewilayahan (Karakteristik pertanian dengan	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	Pemertahanan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional		Pemertahanan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur di Jawa Barat)	Sektor pertanian berada di peringkat ke-3 (14%) sebagai mata pencaharian terbanyak di Provinsi Jawa Barat akan tetapi sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk miskin.	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknik pertanian inovatif dan modern				
		Terganggunya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (luasan kawasan risiko kekeringan 154.547 ha).	Pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah		Pengembangan infrastruktur Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan air dan mengurangi risiko banjir	Belum terintegrasinya sistem jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam meningkatkan hasil pertanian	
		Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar per tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar per tahun).	Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Pariwisata Berbasis Industri Kreatif

Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah **kunjungan wisatawan nusantara terbesar** di Indonesia, yaitu sejumlah 107 juta orang/tahun (data kunjungan wisatawan 2019, sebelum pandemi). Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah akomodasi berbintang, dimana Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua nasional setelah Provinsi Bali dengan 495 hunian (BPS, 2021). Kontribusi PDRB Pariwisata Provinsi Jawa Barat juga termasuk tertinggi ke-2 (12%) di antara sebaran data PDB Pariwisata Nasional.

Kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Barat didukung **dengan keberadaan akses transportasi jalan tol dan jalan nasional yang sudah menjangkau kawasan daya tarik wisata (DTW)**. Pangsa pasar wisata Provinsi Jawa Barat adalah wisatawan dari perkotaan yang didukung dengan adanya 2 metropolitan besar yang menjadi asal wisatawan nusantara dengan daya beli tinggi. Perlu dilakukan pemantapan aksesibilitas tujuan wisata dengan pengembangan jaringan transportasi yang memadai.

Kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bandung-Halimun-Ciletuh dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandung Kota, Ciwidey, dan Tangkuban Perahu sebagai tujuan destinasi wisata utama yang menyumbang 23% terhadap seluruh kedatangan wisatawan. Pengembangan 6 KSPN, 10 KPPN, dan 3 DPN ini dapat diarahkan pada terbentuknya **paket wisata terintegrasi** dari destinasi wisata utama hingga destinasi baru dengan mengakomodasi minat wisatawan yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata. Tantangan terbesar adalah belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, serta pelaku usaha sebagai media pemasaran.

Daya tarik utama wisata Provinsi Jawa Barat adalah **ekonomi kreatif** dengan komoditas kuliner, *fashion*, kesenian, ekowisata yang didukung alam pegunungan yang sejuk, serta budaya Sunda di daerah perdesaan. Wisata belanja sebagai 98% tujuan wisatawan Provinsi Jawa Barat turut mendukung perkembangan industri kreatif. Walaupun **kualitas produk industri kreatif belum terstandardisasi**, harapannya pengembangan industri kreatif dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kebutuhan sektor pariwisata untuk meningkatkan *tourism spending*.

Dengan membandingkan kondisi eksisting dengan target, didapatkan isu strategis sektor pariwisata adalah **daya saing industri pariwisata yang belum didukung industri kreatif berbasis teknologi**. Industri pariwisata juga diharapkan dapat menerapkan prinsip wisata berkelanjutan. Ringkasan isu fokus pariwisata seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Rumusan Isu Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	Kontribusi Ekonomi (Pariwisata Skala Nasional dan Internasional)	Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbesar se-Indonesia sejumlah 107 juta org/thn (2019 sebelum pandemi).	Wilayah Jawa-Bali menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia	Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak	Pemantapan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Barat	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana	Daya Saing Industri Pariwisata yang Belum Didukung Industri Kreatif Berbasis Teknologi
		Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB Pariwisata tertinggi (12% terhadap PDB Pariwisata nasional).		Kawasan Konservasi TN Gede-Pangrango			
		Jumlah akomodasi berbintang berada di urutan kedua nasional setelah Provinsi Bali sebesar 495 hunian.	Pembangunan prasarana/fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Peningkatan kualitas akomodasi pariwisata yang memenuhi standar internasional		
MESO	Jaringan Transportasi & Akses Pariwisata	Kegiatan pariwisata di Jawa Barat didukung dengan keberadaan akses transportasi Jalan Tol dan Jalan Nasional Lintas Provinsi di Pulau Jawa yang sudah menjangkau kawasan pariwisata.	Pemantapan aksesibilitas tujuan wisata dengan pengembangan jaringan transportasi yang memadai	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan	Pengembangan tourism relevant road dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	Tingginya jumlah wisatawan terutama pada hari libur tidak sebanding dengan kapasitas jalan menuju destinasi wisata sehingga menyebabkan kemacetan	
		Pangsa pasar wisatawan nusantara di Jawa Barat terutama berasal dari metropolitan jabodetabek dan cekungan bandung yang memiliki daya beli tinggi.		Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur			

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIKRO	Aktivitas Ekonomi, Destinasi Unggulan & Fisik Kewilayahan (Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik destinasi wisata yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Konsentrasi wisata utama Jawa Barat berada di DPP Bandung-Halimun-Ciletuh dengan KSPN Bandung Kota, KSPN Ciwidey, dan KSPN Tangkupan Perahu sebagai tujuan destinasi wisata utama menyumbang 23% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Jawa Barat.	Pengembangan 6 KSPN, 10 KPPN, dan 3 DPN sebagai paket wisata terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata		Pengembangan paket wisata yang mengintegrasikan destinasi wisata utama dan destinasi baru dengan mengakomodasi minat wisatawan	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	
		Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.					
		Daya tarik utama wisata Jawa Barat terutama adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian dengan jumlah 1,5 juta usaha lokal dan menghasilkan 3,8 juta lapangan kerja.	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata		Pengembangan industri kreatif yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor pariwisata untuk meningkatkan <i>tourism spending</i>	Belum terstandarisasinya kualitas produk industri kreatif untuk mendukung industri pariwisata	
		Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Kawasan Perkotaan Berkelanjutan

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar secara nasional (49 juta jiwa), dengan **tingkat urbanisasi tertinggi nasional** dengan 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan. Akibatnya, wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional; Cekungan Bandung berkontribusi 3% terhadap GDP. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dapat dilakukan pemanfaatan dampak urbanisasi. Namun, dengan **masifnya pertumbuhan kawasan perkotaan**, potensi terjadinya *urban sprawl* yang menyebabkan **tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan** menjadi semakin besar.

Kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat **terkoneksi dengan kawasan perkotaan lain** di Pulau Jawa, sehingga dapat tercipta aglomerasi ekonomi dan perkembangan perkotaan yang lebih terintegrasi. Di sisi lain, peningkatan bangkitan lalu lintas antarkota **membebani kapasitas jalan** yang sudah ada, sehingga dapat menyebabkan *urban sprawl* hingga memicu terbentuknya konurbasi antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Hal ini disebabkan belum berkembangnya **sistem angkutan umum massal perkotaan** yang menghubungkan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman.

Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kawasan budi daya tidak terbangun (43%). Provinsi Jawa Barat juga merupakan wilayah dengan **multi bahaya bencana tinggi** dengan kondisi fisik yang sulit dikembangkan. Tingginya risiko bencana di kawasan perkotaan diakibatkan belum diterapkan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Dari segi **infrastruktur pelayanan dasar**, akses air minum aman Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 24,32%, namun **penggunaan air tanah masih tinggi** terutama di wilayah kepadatan tinggi. Akses sanitasi aman Provinsi Jawa Barat masih rendah yaitu 7,3%, sehingga mengakibatkan **pencemaran limbah pada DAS kritis** yang mengganggu ekosistem dan ketersediaan air baku permukaan. Tingkat pelayanan sampah domestik relatif tinggi (70%). Jumlah penduduk perkotaan yang sangat tinggi menyebabkan banyak **sampah yang tidak terkelola dengan baik**, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bencana, dan masalah kesehatan di daerah sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) dan aliran sungai.

Target infrastruktur pelayanan dasar untuk menangani masalah penurunan muka tanah, penanganan banjir perkotaan, pengolahan sampah ke *waste-to-energy*. Sebagai kesimpulan, saat ini **sistem pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan lintas wilayah belum dapat melayani tingginya kebutuhan masyarakat**. Ringkasan isu fokus pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Rumusan Isu Strategis Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	Kondisi Demografi Wilayah dan Kesesuaian Kemampuan Lahan (Jumlah Penduduk dan Kemampuan Lahan untuk pengembangan wilayah)	Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 51 juta jiwa (peringkat 1 nasional), dengan tingkat urbanisasi tertinggi nasional dimana 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan	Pemanfaatan dampak urbanisasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Pengembangan aktivitas ekonomi yang berkualitas sebagai lapangan usaha bagi penduduk perkotaan dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang pendidikan	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	Perkem-bangan Kawasan Perkotaan yang Belum Didukung Penyediaan Infrastruktur yang Memadai
		Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)		Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon–Kertajati			
MESO	Pusat Ekonomi dan Kawasan Permukiman (Pengembangan kegiatan industri, jasa, dan pariwisata berskala internasional serta permukiman dengan kepadatan tinggi-sangat tinggi)	Kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat terkoneksi dengan kawasan perkotaan lain di Pulau Jawa sehingga dapat menciptakan aglomerasi ekonomi dan perkembangan perkotaan yang lebih terintegrasi	Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan pelayanan untuk mendukung sektor ekonomi utama di Provinsi Jawa Barat	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya Kawasan Perkotaan Bogor–Sukabumi dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor–Sukabumi–Cianjur	Peningkatan integrasi antar kawasan perkotaan di Pulau Jawa sebagai aglomerasi yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat	Peningkatan bangkitan lalu lintas antar kota yang membebani kapasitas jalan yang sudah ada	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIKRO	Kondisi Fisik, Komoditas Utama & Pelayanan Infrastruktur Dasar (Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang berada pada kawasan rawan bencana dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur dasar)	Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 34% dari seluruh wilayah atau sebesar 1,2 juta hektar yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan kawasan perkotaan sehingga pengembangan perkotaan secara vertikal dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang kompak dan mendukung prinsip mitigasi bencana		Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana	
		Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.					
		Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam	Penguatan konektivitas melalui pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan yang terkoneksi dengan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman		Pengembangan sistem transportasi umum massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat ekonomi dengan permukiman	Masih tingginya tingkat ketergantungan akan penggunaan transportasi berbasis jalan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Akses air minum aman provinsi adalah 24,32%, akses air minum layak provinsi adalah 91,83%. Meskipun akses air minum layak relatif tinggi, penggunaan air tanah yang berlebihan terutama di wilayah kepadatan tinggi telah mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah dan pencemaran air tanah secara masif	Pemenuhan layanan dasar perkotaan melalui penyediaan 10 juta akses air minum perpipaan, 1 juta rumah susun perkotaan, 90% akses sanitasi layak, pemulihan DAS kritis, serta penanganan kota-kota pesisir di Pantura Jawa		Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman untuk mendukung kegiatan ekonomi perkotaan	Belum terbentuknya sistem pengelolaan layanan infrastruktur permukiman perkotaan lintas wilayah administrasi	
		Akses sanitasi layak relatif tinggi dengan tingkat pelayanan 71,66%, akan tetapi tingkat kepadatan wilayah perkotaan yang tinggi mengakibatkan pencemaran limbah pada DAS kritis yang mengganggu ekosistem dan ketersediaan air baku permukaan					
		Tingkat pelayanan sampah domestik relatif tinggi dengan tingkat pelayanan 70%, akan tetapi dengan jumlah penduduk perkotaan yang sangat tinggi, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bencana, dan masalah kesehatan di daerah sekitar TPA dan aliran sungai					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan wilayah membahas mengenai proyeksi pertumbuhan, visi dan strategi, serta skenario perumusan kawasan prioritas. Tujuan penyusunan skenario pengembangan wilayah adalah untuk menjadi acuan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah pada bab selanjutnya.

6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Perkembangan atau pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap skenario pengembangan di masa mendatang yang ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk, kegiatan pariwisata, dan industri.

6.1.1. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan layanan infrastruktur hingga tahun 2034. Perhitungan proyeksi penduduk di Provinsi Jawa Barat dihitung berdasarkan kecenderungan 10 tahun terakhir (2010–2020). Perhitungan proyeksi dilakukan menggunakan metode geometri dimana tingkat pertumbuhan meningkat sepanjang tahun (namun tidak konstan) di setiap tahunnya.

Penduduk terbanyak Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Penduduk di Kabupaten Bogor berjumlah 6 juta penduduk dan diperkirakan akan terus mengalami pertambahan jumlah penduduk hingga 7 juta penduduk pada tahun 2034. Penduduk di Kabupaten Bekasi berjumlah 3,9 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga berjumlah hampir 4,8 juta jiwa pada tahun 2034. Selanjutnya, penduduk di Kabupaten Bandung berjumlah 3,8 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 4,8 juta jiwa pada tahun 2034. Proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 6.1.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kepadatan bruto Provinsi Jawa Barat pada 2023 berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kota Bandung dengan kepadatan 158 jiwa/Ha, diikuti dengan Kota Cimahi dengan kepadatan 153 jiwa/Ha dan Kota Bekasi dengan kepadatan 151 jiwa/Ha.

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
JAWA BARAT	54,138,021	55,019,969	55,916,286	56,827,204	57,752,961	58,693,800	59,649,966	60,621,708	61,609,281	62,612,942
Bogor	6,600,565	6,708,093	6,817,373	6,928,433	7,041,303	7,156,011	7,272,587	7,391,063	7,511,469	7,633,837
Sukabumi	2,678,091	2,721,719	2,766,058	2,811,119	2,856,914	2,903,455	2,950,755	2,998,825	3,047,678	3,097,327
Cianjur	2,454,874	2,494,866	2,535,509	2,576,814	2,618,792	2,661,455	2,704,812	2,748,875	2,793,656	2,839,167
Bandung	4,153,931	4,221,601	4,290,374	4,360,268	4,431,300	4,503,489	4,576,854	4,651,415	4,727,190	4,804,199
Garut	2,858,513	2,905,080	2,952,406	3,000,503	3,049,384	3,099,060	3,149,547	3,200,855	3,252,999	3,305,993
Tasikmalaya	1,903,455	1,934,464	1,965,978	1,998,005	2,030,554	2,063,633	2,097,251	2,131,417	2,166,139	2,201,427
Ciamis	1,302,808	1,324,032	1,345,601	1,367,522	1,389,800	1,412,441	1,435,451	1,458,835	1,482,601	1,506,754
Kuningan	1,178,586	1,197,786	1,217,299	1,237,130	1,257,284	1,277,766	1,298,581	1,319,736	1,341,236	1,363,085
Cirebon	2,395,576	2,434,602	2,474,263	2,514,571	2,555,535	2,597,167	2,639,477	2,682,476	2,726,175	2,770,587
Majalengka	1,312,592	1,333,975	1,355,706	1,377,792	1,400,237	1,423,048	1,446,230	1,469,790	1,493,734	1,518,068
Sumedang	1,251,575	1,271,964	1,292,685	1,313,744	1,335,145	1,356,896	1,379,001	1,401,466	1,424,297	1,447,500
Indramayu	1,883,847	1,914,536	1,945,726	1,977,423	2,009,637	2,042,375	2,075,647	2,109,461	2,143,825	2,178,750
Subang	1,748,276	1,776,757	1,805,702	1,835,118	1,865,013	1,895,396	1,926,273	1,957,654	1,989,545	2,021,956
Purwakarta	1,053,675	1,070,840	1,088,285	1,106,014	1,124,031	1,142,343	1,160,952	1,179,865	1,199,086	1,218,620
Karawang	2,569,967	2,611,834	2,654,383	2,697,625	2,741,571	2,786,233	2,831,623	2,877,752	2,924,633	2,972,278
Bekasi	4,227,124	4,295,987	4,365,972	4,437,097	4,509,380	4,582,842	4,657,499	4,733,374	4,810,484	4,888,850
Bandung Barat	1,859,300	1,889,589	1,920,372	1,951,656	1,983,450	2,015,762	2,048,600	2,081,974	2,115,891	2,150,360
Pangandaran	435,279	442,370	449,577	456,901	464,344	471,908	479,596	487,409	495,349	503,419
Kota Bogor	1,221,759	1,241,663	1,261,890	1,282,447	1,303,339	1,324,572	1,346,150	1,368,080	1,390,367	1,413,017
Kota Sukabumi	358,519	364,360	370,295	376,328	382,458	388,689	395,021	401,456	407,996	414,643
Kota Bandung	2,721,331	2,765,664	2,810,718	2,856,507	2,903,042	2,950,334	2,998,398	3,047,244	3,096,886	3,147,336
Kota Cirebon	349,446	355,139	360,924	366,804	372,779	378,852	385,024	391,296	397,671	404,149
Kota Bekasi	3,334,513	3,388,835	3,444,041	3,500,147	3,557,167	3,615,116	3,674,009	3,733,862	3,794,689	3,856,507
Kota Depok	2,693,233	2,737,108	2,781,698	2,827,013	2,873,068	2,919,872	2,967,439	3,015,781	3,064,910	3,114,840
Kota Cimahi	672,600	683,557	694,693	706,010	717,511	729,200	741,079	753,152	765,421	777,891
Kota Tasikmalaya	719,861	731,588	743,506	755,619	767,928	780,438	793,152	806,073	819,205	832,550
Kota Banjar	198,724	201,961	205,251	208,595	211,993	215,447	218,956	222,523	226,149	229,833

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa/Ha)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
JAWA BARAT	43	44	44	45	46	47	48	48	49	50
Bogor	22	22	23	23	23	24	24	24	25	25
Sukabumi	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cianjur	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Bandung	24	24	25	25	25	26	26	27	27	27
Garut	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11
Tasikmalaya	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Ciamis	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
Kuningan	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12
Cirebon	22	23	23	23	24	25	25	25	26	26
Majalengka	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12
Sumedang	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
Indramayu	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11
Subang	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10
Purwakarta	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12
Karawang	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
Bekasi	34	34	35	35	36	37	38	38	39	39
Bandung Barat	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17
Pangandaran	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Kota Bogor	110	111	113	115	117	119	121	123	125	127
Kota Sukabumi	74	75	76	78	79	81	82	83	85	86
Kota Bandung	163	166	168	171	174	177	180	183	186	189
Kota Cirebon	89	90	92	93	95	96	98	99	101	103
Kota Bekasi	156	159	161	164	166	169	172	175	177	180
Kota Depok	134	137	139	141	143	146	148	150	153	155
Kota Cimahi	158	161	163	166	168	171	174	177	180	183
Kota Tasikmalaya	39	40	40	41	42	43	43	44	45	45
Kota Banjar	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18

Sumber: Hasil Analisis, 2025

6.1.2. **Proyeksi Ekonomi**

Sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jawa Barat meliputi industri, pertanian, dan pariwisata. Pada tahun 2034, PDRB ADHK memiliki persentase terbesar di sektor industri pengolahan (33,77%), sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 13,07%. Pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan nilai Rp. 32.689.919,61 pada tahun 2023 hingga mencapai Rp. 40.157.220,05 pada tahun 2034.

A. Proyeksi Pertumbuhan Industri

Provinsi Jawa Barat memiliki 2 Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), dengan kawasan WPPI 1 mencakup Kawasan Bogor-Bekasi-Karawang yang memiliki sektor unggulan industri alat elektronik, tekstil, otomotif, dan makanan minuman. Sementara itu, kawasan WPPI 2 yang diproyeksikan akan berkembang pesat mencakup Kawasan Subang-Indramayu-Cirebon (Rebana), memiliki sektor unggulan mobil listrik, alas kaki, *halal hub*, dan makanan minuman.

WPPI 2 diproyeksikan akan berkembang lebih pesat dengan beberapa pertimbangan, seperti adanya keunggulan komparatif. Adanya pelabuhan baru yakni Pelabuhan Patimban yang berperan juga sebagai pelabuhan utama dan menggantikan peran Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta. Akses WPPI 2 juga dipermudah dengan adanya akses Tol Cipali-Patimban yang dapat mempersingkat waktu tempuh, Bandara Kertajati sebagai bandara pengumpul primer, upah pekerja yang cenderung rendah dibanding pada Kawasan WPPI 1, dan adanya dorongan dari pemerintah untuk mengembangkan KI Subang setelah permasalahan lahan selesai. Perkembangan industri yang cukup pesat dengan perkiraan 18% dari tahun 2016-2020 diprioritaskan pada kawasan industri di Kawasan Rebana yang direncanakan menjadi relokasi industri Jabodetabek dan Cekungan Bandung. Terdapat 22 kawasan industri yang beroperasi di WPPI I dan WPPI II, yaitu (Kemenperin, 2021):

1. Delapan (8) KI di Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi International Industrial Estate, MM2100 Industrial Town, Kawasan Industri Jababeka, East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Greenland International Industrial Center (GIIC), KIT Indonesia China, dan KI SKI;
2. Enam (6) KI di Kabupaten Karawang, yaitu KI Cimalaya, KI Indotaisei, KI Kujang Cikampek, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, dan Karawang Jabar Industrial Estate;
3. Dua (2) KI di Kabupaten Bogor, yaitu Cibinong Center Industrial Estate dan KI Sentul;
4. Satu (1) KI di Kabupaten Subang, yaitu KI Subang;
5. Dua (2) KI di Kabupaten Majalengka, yaitu KI Majalengka dan Kertajati Industrial Estate Majalengka;
6. Satu (1) KI di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta;
7. Satu (1) KI di Kabupaten Sukabumi, yaitu KI Sukabumi; dan
8. Satu (1) KI di Kabupaten Bandung, yaitu KI Rancaekek.

B. Proyeksi Pertumbuhan Wisatawan

Wilayah Jawa Barat memiliki destinasi yang beragam dan pangsa pasar yang sangat besar sehingga terdapat pertumbuhan kunjungan sangat besar dan diproyeksikan mencapai 52 juta wisatawan (2034) dengan kontribusi wisnus sebesar 95%. Potensi ini cukup besar dalam menyumbang ekonomi daerah karena dengan pengeluaran rata-rata perhari wisnus 4,5 juta akan menyumbangkan bangkitan ekonomi sebesar 700 triliun rupiah. Proyeksi pertumbuhan sektor wisata dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Domestik di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Jumlah Wisatawan Domestik (orang/tahun)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bogor	13.417	14.247	15.128	16.063	17.056	18.110	19.230	20.418	21.681	23.021
Sukabumi	1.130.247	1.200.116	1.274.305	1.353.080	1.436.725	1.525.540	1.619.846	1.719.982	1.826.308	1.939.206
Cianjur	542.847	576.404	612.037	649.872	690.045	732.702	777.997	826.091	877.158	931.382
Bandung	112.570	119.529	126.918	134.764	143.095	151.941	161.334	171.307	181.897	193.141
Garut	49.542	52.605	55.857	59.310	62.976	66.869	71.003	75.392	80.053	85.001
Tasikmalaya	52.168	55.393	58.817	62.453	66.314	70.413	74.766	79.388	84.295	89.506
Ciamis	63.868	67.816	72.009	76.460	81.187	86.206	91.535	97.193	103.201	109.581
Kuningan	99.030	105.152	111.652	118.554	125.883	133.665	141.927	150.701	160.017	169.909
Cirebon	277.055	294.182	312.368	331.678	352.181	373.953	397.070	421.616	447.679	475.354
Majalengka	2.928	3.109	3.301	3.505	3.722	3.952	4.196	4.456	4.731	5.024
Sumedang	10.300	10.937	11.613	12.331	13.093	13.903	14.762	15.675	16.644	17.673
Indramayu	101.767	108.058	114.738	121.831	129.362	137.359	145.851	154.867	164.440	174.606
Subang	305.901	324.811	344.890	366.210	388.849	412.887	438.410	465.512	494.289	524.845
Purwakarta	159.956	169.844	180.343	191.492	203.329	215.899	229.245	243.417	258.464	274.442
Karawang	714.716	758.899	805.812	855.626	908.519	964.682	1.024.317	1.087.638	1.154.874	1.226.266
Bekasi	2.986.545	3.171.167	3.367.202	3.575.356	3.796.378	4.031.062	4.280.254	4.544.851	4.825.805	5.124.126
Bandung Barat	101.567	107.845	114.512	121.591	129.107	137.089	145.563	154.561	164.116	174.262
Pangandaran	5.128	5.445	5.782	6.139	6.518	6.921	7.349	7.804	8.286	8.798
Kota Bogor	7.109.061	7.548.529	8.015.164	8.510.645	9.036.756	9.595.391	10.188.559	10.818.395	11.487.167	12.197.280
Kota Sukabumi	287.274	305.032	323.889	343.911	365.171	387.745	411.715	437.166	464.191	492.886
Kota Bandung	8.547.481	9.075.869	9.636.922	10.232.657	10.865.219	11.536.886	12.250.073	13.007.348	13.811.436	14.665.232
Kota Cirebon	1.048.234	1.113.034	1.181.840	1.254.899	1.332.474	1.414.845	1.502.308	1.595.178	1.693.788	1.798.495
Kota Bekasi	1.326.632	1.408.642	1.495.722	1.588.184	1.686.363	1.790.610	1.901.302	2.018.837	2.143.637	2.276.153
Kota Depok	434	461	490	520	552	586	622	661	702	745
Kota Cimahi	39.795	42.255	44.867	47.641	50.586	53.713	57.033	60.559	64.303	68.278
Kota Tasikmalaya	796.161	845.378	897.638	953.128	1.012.049	1.074.611	1.141.042	1.211.579	1.286.476	1.366.003
Kota Banjar	49.105	52.141	55.364	58.786	62.420	66.279	70.376	74.727	79.346	84.251

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*Rata-rata Pertumbuhan Wisatawan Domestik = 6,18%

Tabel 6.4 Proyeksi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Barat

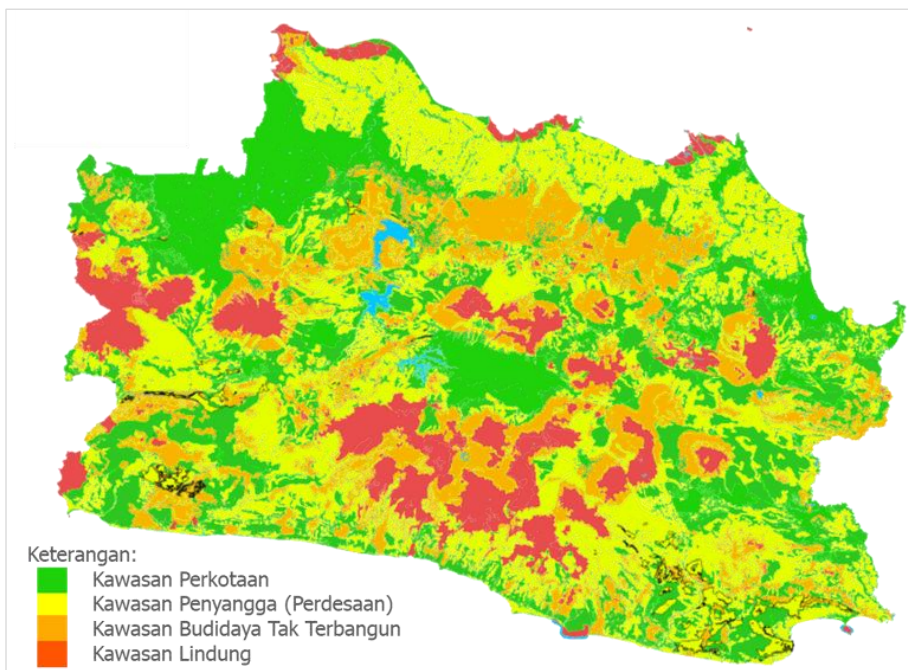
Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang/tahun)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bogor	47	50	52	55	58	61	65	68	72	76
Sukabumi	34.676	36.591	38.613	40.746	42.997	45.373	47.879	50.525	53.316	56.262
Cianjur	52.258	55.146	58.192	61.407	64.800	68.380	72.158	76.144	80.351	84.790
Bandung	14.872	15.694	16.561	17.476	18.442	19.460	20.536	21.670	22.867	24.131
Garut	49.498	52.233	55.119	58.164	61.377	64.768	68.346	72.122	76.107	80.312
Tasikmalaya	1.698	1.792	1.891	1.996	2.106	2.222	2.345	2.475	2.611	2.756
Ciamis	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7
Kuningan	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
Cirebon	2.879	3.038	3.206	3.383	3.570	3.767	3.975	4.195	4.427	4.671
Majalengka	374	395	417	440	464	490	517	545	575	607
Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indramayu	99	105	111	117	123	130	137	145	153	161
Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purwakarta	21.489	22.676	23.929	25.251	26.646	28.118	29.672	31.311	33.041	34.866
Karawang	175.800	185.512	195.761	206.577	217.989	230.033	242.741	256.152	270.304	285.237
Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandung Barat	8.348	8.809	9.296	9.810	10.352	10.924	11.527	12.164	12.836	13.545
Pangandaran	968	1.021	1.078	1.137	1.200	1.267	1.336	1.410	1.488	1.570
Kota Bogor	337.061	355.683	375.334	396.070	417.952	441.042	465.409	491.121	518.254	546.886
Kota Sukabumi	25	26	28	29	31	33	34	36	38	40
Kota Bandung	3.378.863	3.565.536	3.762.522	3.970.390	4.189.743	4.421.215	4.665.475	4.923.229	5.195.224	5.482.246
Kota Cirebon	133.135	140.490	148.252	156.443	165.086	174.206	183.831	193.987	204.704	216.013
Kota Bekasi	71.478	75.427	79.594	83.991	88.631	93.528	98.695	104.148	109.901	115.973
Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Cimahi	537	567	598	631	666	703	742	783	826	871
Kota Tasikmalaya	141	149	157	165	175	184	194	205	217	229
Kota Banjar	46	48	51	54	57	60	63	66	70	74

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*Rata-rata Laju Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara = 5,52%

6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan

Daya dukung lahan untuk kawasan permukiman dilihat berdasarkan analisis kemampuan lahan menampung kehidupan menggunakan metode *multicriteria analysis* (MCA). Lahan yang memiliki daya tampung tinggi sebagai kawasan perkotaan dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Barat mencapai 11% (4.052 km²), kawasan penyangga sebagai perdesaan mencapai 23% (8.323 km²), kawasan budidaya tak terbangun mencapai 43% (15.759 km²), dan kawasan lindung mencapai 24% (8.834 km²). Berdasarkan proyeksi penduduk, wilayah Bandung Selatan hingga ke Pantai Selatan akan mengalami tingkat pertumbuhan sedang, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan dengan kategori kawasan lindung.



Gambar 6.1 Kemampuan Lahan Provinsi Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang terbatas untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi atau sebesar 11% dari total luasan wilayah. Untuk itu, pengembangan budi daya terbangun perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana terlihat dari Gambar 6.1.

6.2. Visi dan Strategi

Subbab ini memuat perumusan visi Provinsi Jawa Barat dan analisis penyusunan strategi provinsi.

6.2.1. Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat meliputi pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan layanan infrastruktur dasar perkotaan.

Visi pengembangan infrastruktur Provinsi Jawa Barat adalah

“Pusat Industri Berdaya Saing, Pariwisata Berbasis Lingkungan, dan Lumbung Pangan Utama Nasional”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi yang harus dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Perkuatan daya saing sektor industri manufaktur di koridor Utara Jawa Barat melalui hilirisasi, penguatan konektivitas-logistik, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penyediaan infrastruktur industri.
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian komoditas unggulan padi melalui intensifikasi produksi, pemertahanan lahan, penguatan konektivitas, peningkatan nilai produk dan pengembangan sistem pertanian.
3. Pewujudan wisata berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan variasi atraksi, penguatan konektivitas-aksesibilitas, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan SDM, serta integrasi manajemen dan bisnis pariwisata.
4. Pengembangan perkotaan yang kompak, berketahanan, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui pemenuhan layanan dasar, penguatan kelembagaan, serta pengembangan konektivitas dan angkutan umum.

6.2.2. Penyusunan Strategi Fokus Industri

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan Analisis 5 FORCES (*Porter Five Force Analysis*). Analisis PESTLE (Pestle Analysis) merupakan metode manajemen risiko yang

digunakan agar bisa melakukan evaluasi lingkungan eksternal. Analisis ini dilakukan dengan cara membagi peluang dan risiko menjadi faktor-faktor PESTLE yaitu: *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment*.

Analisis 5 FORCES adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Peluang dan tantangan di level meso dijabarkan berdasarkan beberapa aspek yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Kelima aspek tersebut masing-masing memiliki 3 parameter, yaitu: 1) Parameter untuk aspek *rivalry among existing competitor* adalah 'konversi *threat* menjadi *opportunity*', 'kualitas yang diinginkan', dan 'inovasi'; 2) Parameter untuk aspek *bargaining power of customers* adalah 'sensitivitas target', 'trend *existing*', dan 'penciptaan nilai'; 3) Parameter untuk aspek *bargaining power of suppliers* adalah 'ketergantungan saat ini', 'kualifikasi yang dibutuhkan', dan 'daya dukung *existing*'; 4) Parameter untuk aspek *threat of new entrants* adalah 'tantangan yang dihadapi', 'strategi untuk memenangkan kompetisi', dan 'ancaman terhadap *legacy*'; dan 5) Parameter untuk aspek *threat of substitutes* adalah 'trend analisis PESTLE', 'trend yang mengganggu kebijakan', dan 'peralihan *cost*'. Parameter yang digunakan pada masing-masing aspek didapatkan berdasarkan pembobotan tertinggi yang dinilai paling relevan dalam pengembangan fokus perencanaan di Provinsi Jawa Barat.

Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS, EFAS, SWOT dan *grand strategy* sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Industri

Analisis PESTLE fokus industri menunjukkan bahwa parameter teknologi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan industri di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti penggunaan teknologi pada sektor industri berkontribusi besar dalam perkembangan industri dan peningkatan daya saing industri di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat merebut pasar industri regional maupun global. Analisis PESTLE fokus industri secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri

Parameter	Opportunities	Threats	Bobot
Political	Peningkatan industri nasional melalui kebijakan peningkatan TKDN pada seluruh sektor ekonomi	Guna mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pengembangan industri diarahkan ke luar Pulau Jawa.	15%
Economic	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	20%
Sociological	Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Angkatan Kerja, jumlah penduduk, dan tenaga kerja tertinggi se-Indonesia, serta PDRB tertinggi ke tiga se-Indonesia	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	10%
Technological	"Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB "	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	25%
Legal	Penetapan Kawasan Utara Jawa Barat (Rebana) sebagai pusat kegiatan industri yang terintegrasi dengan outlet Patimban dan Kertajati	Perubahan agenda prioritas nasional mendukung kawasan industri	10%
Environment	Kawasan industri berada di wilayah utara Jawa Barat yang memiliki kondisi geografis yang mendukung aktivitas industri	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.	20%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.) Analisis 5-forces Fokus Industri

Dalam analisis 5-forces fokus industri, 5 aspek yang ditinjau adalah pengembangan tenaga kerja industri, kemampuan ekspor, sinergisitas hulu-hilir, legal, dan pengembangan teknologi. Secara rinci analisis 5-forces fokus industri dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Analisis 5-forces (Meso) Fokus Industri

Parameter	Opportunities	Threats
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Kawasan Rebana sebagai klaster industri berbasis teknologi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	Kemampuan <i>transfer of knowledge</i> proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional

Parameter	Opportunities	Threats
Bargaining Power of Customers		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	Terbatasnya variasi bahan inputan industri dari suppliers lokal pada komoditas yang bersifat hightech sehingga masih tingginya impor komponen teknologi
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	"Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB "	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.) Analisis SWOT Fokus Industri

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus industri ditampilkan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Analisis SWOT Fokus Industri

Strengths			Weaknesses		
1	Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	1	Terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun pada kawasan rawan banjir		
2	Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar: Industri Mesin dan Perlengkapan, Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2	Tingkat pelayanan air minum perpipaan 19,8%		
3	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	3	Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.		

Strengths		Weaknesses	
4	Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	4	Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).
5	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi	5	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan SDM karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.
Opportunities		Threats	
1	Kawasan Rebana sebagai klaster industri berbasis teknolgi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	1	Kemampuan <i>transfer of knowledge</i> proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional
2	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai <i>outlet</i> .	2	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat
3	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	3	Terbatasnya variasi bahan baku lokal pada komoditas yang bersifat <i>hightech</i> sehingga masih tingginya impor komponen teknologi
4	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	4	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi
5	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi PDB	5	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada setiap komponen untuk menghasilkan skor seperti pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8 *Scoring Strengths dan Weaknesses Fokus Industri*

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	0,27	4	1,09
	2	Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar adalah: Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Ketenagalistrikan.	0,18	3	0,55

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
	3	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	0,18	3	0,55
	4	Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	0,18	2	0,36
	5	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang berfokus pada sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi	0,18	3	0,55
		Subtotal	1		3,09
Weaknesses	1	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.	0,18	-3	-0,55
	2	Tingkat pelayanan air minum perpipaan 19,8%	0,18	-1	-0,18
	3	Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.	0,27	-2	-0,55
	4	Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Tertinggi di Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).	0,18	-1	-0,18
	5	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	0,18	-3	-0,55
		Subtotal	1		-2,00
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			1,09

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pembobotan faktor eksternal fokus industri ditampilkan pada Tabel 6.9.

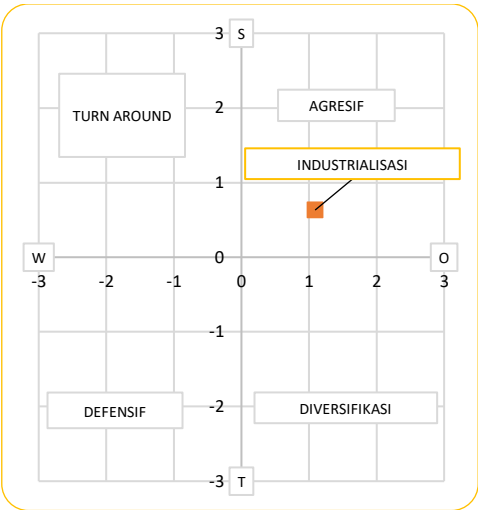
Tabel 6.9 *Skoring Opportunities dan Threats Fokus Industri*

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Kawasan Rebanda sebagai klaster industri berbasis teknologi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	0,23	3	0,69
	2	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.	0,23	4	0,92
	3	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	0,23	2	0,46

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Threats	4	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	0,15	2	0,31
	5	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB	0,15	3	0,46
	Subtotal		1		2,85
	1	Kemampuan transfer of knowlage proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional	0,21	-2	-0,43
	2	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat	0,21	-2	-0,43
	3	Terbatasnya variasi bahan inputan industri dari suppliers lokal pada komoditas yang bersifat hightech sehingga masih tingginya impor komponen teknologi	0,21	-2	-0,43
	4	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi	0,21	-3	-0,64
	5	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	0,14	-2	-0,29
	Subtotal		1		-2,21
	TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				0,63

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.2 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Industri

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi memperkuat daya saing sektor industri manufaktur di sepanjang koridor Utara Jawa Barat tersebut dijabarkan menjadi:

1. **Integrasi pengelolaan kawasan industri** melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri (S3-O4);
2. **Peningkatan konektivitas dan distribusi logistik** untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran (S1-S4-O2-O3);
3. **Peningkatan kualitas tenaga kerja industri** melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi informasi (S2-S3-O1); dan
4. **Perkuatan struktur industri berbasis teknologi** dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri (S1-O3-O5).

6.2.3. Penysusunan Strategi Fokus Pertanian

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pertanian diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pertanian

Analisis PESTLE fokus pertanian menunjukkan bahwa parameter ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah dan perlu dipertahankan produktivitasnya agar dapat menjadi pemasok utama pada tingkat nasional. Analisis PESTLE fokus pertanian secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pertanian

Parameter	Opportunities	Threats	Bobot
Political	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	Kebijakan impor beras dapat mengancam produksi beras dalam negeri	21%
Economic	Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil beras tertinggi kedua dengan produksi mencapai 5,3 juta ton beras pada 2022 (16% dari total produksi nasional)	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian	26%
Sociological	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	Keterbatasan kapasitas petani dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian	11%
Technological	Peningkatan produksi tanaman pangan padi melalui penerapan teknologi mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum terintegrasinya sistem jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam meningkatkan hasil pertanian	16%

Legal	Sudah ditetapkan program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	Belum ditetapkan sebagian besar lahan pertanian menjadi LSD	11%
Environment	Pertanian di Pulau Jawa berada pada wilayah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi	Terganggunya produktivitas lahan pertanian akibat tingginya risiko bencana banjir dan kekeringan	16%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.) Analisis 5-forces Fokus Pertanian

Dalam analisis 5-forces fokus pertanian, 5 aspek yang ditinjau adalah pengembangan teknologi, simpul logistik, infrastruktur, diversifikasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan produktivitas,. Secara rinci analisis 5-forces fokus pertanian dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11 Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pertanian

Parameter	Opportunities	Threats
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi
Bargaining Power of Customers		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain, didukung Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah 815 ribu ton, Banten 574 ribu ton, DKI Jakarta 541 ribu ton).	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.) Analisis SWOT Fokus Pertanian

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pertanian ditampilkan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12 Analisis SWOT Fokus Pertanian

<i>Strengths</i>		<i>Weaknesses</i>	
1	Sudah ditetapkannya program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	1	Ketersediaan air pada Kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Utara Jawa Barat) kritis
2	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	2	Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan irigasi teknis
3	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	3	Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar/tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar/tahun)
4	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	4	Terganggunya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (risiko kekeringan 154.547 ha).
5	Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian tertinggi se pulau Jawa sebesar 56,75 kw/ha	5	Biaya cetak sawah yang tinggi di Kawasan Tengah Selatan untuk melakukan pergantian lahan sawah yang beralihfungsi di Kawasan Utara
<i>Opportunities</i>		<i>Threats</i>	
1	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	1	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi
2	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton, Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	2	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal
3	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	3	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk
4	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	4	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian

5	Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	5	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian
---	--	---	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pertanian ditampilkan pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pertanian

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Sudah ditetapkan program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	0,23	4	0,92
	2	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	0,23	3	0,69
	3	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	0,15	3	0,46
	4	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	0,15	2	0,31
	5	Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian tertinggi se pulau Jawa sebesar 56,75 kw/ha	0,23	3	0,69
	Subtotal		1		3,08
Weaknesses	1	Ketersediaan air pada Kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Utara Jawa Barat) kritis	0,17	-2	-0,33
	2	Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan Irigasi Teknis	0,25	-3	-0,75
	3	Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar per tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar per tahun).	0,25	-2	-0,50
	4	Terganggunya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (luasan kawasan risiko kekeringan 154.547 ha).	0,17	-2	-0,33
	5	Biaya cetak sawah yang tinggi di Kawasan Tengah Selatan untuk melakukan pergantian lahan sawah yang beralihfungsi di Kawasan Utara	0,17	-1	-0,17
	Subtotal		1		-2,08
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			0,99

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pembobotan faktor eksternal fokus pertanian seperti pada

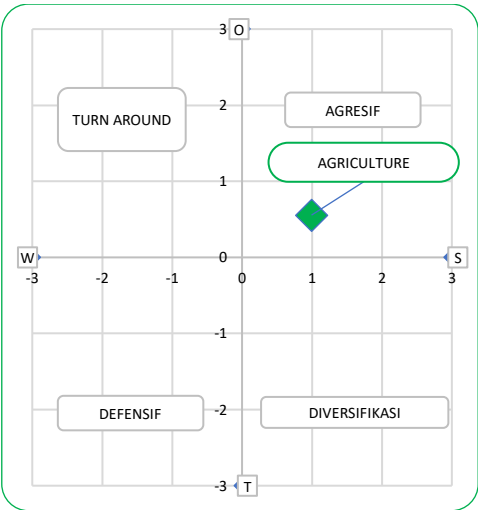
Tabel 6.14.

Tabel 6.14 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pertanian

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	0,22	2	0,44
	2	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton,Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	0,11	2	0,22
	3	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	0,22	4	0,89
	4	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	0,22	3	0,67
	5	Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	0,22	3	0,67
		Subtotal	1		2,89
Threats	1	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi	0,17	-2	-0,33
	2	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal	0,17	-2	-0,33
	3	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk	0,17	-1	-0,17
	4	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian	0,25	-3	-0,75
	5	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian	0,25	-3	-0,75
		Subtotal	1		-2,33
	TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				0,56

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pertanian berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.3 Kudran Penentuan Strategi Fokus Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Terdapat 5 strategi memperkuat daya saing sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. **Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian** untuk mendorong efektivitas pengelolaan sektor pertanian (S4-O4);
2. **Pemertahanan lahan pertanian** melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD (S5-O3);
3. **Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air** melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Air alternatif (S1-O1-O3);
4. **Pemanfaatan teknologi** melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan pertanian (S3-S5-O1); dan
5. **Peningkatan konektivitas dan jalur logistik** untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian (S2-S5-O2-O5).

6.2.4. Penusunan Strategi Fokus Pariwisata

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pariwisata diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pariwisata

Analisis PESTLE fokus pariwisata menunjukkan bahwa parameter sosiologi dinilai menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat didominasi oleh wisata ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisatawan. Analisis PESTLE fokus pariwisata dijelaskan pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata

Parameter	Opportunities	Threats	Bobot
<i>Political</i>	Penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional	Perubahan agenda prioritas nasional menjadi sektor non pariwisata sebagai sektor unggulan	16%
<i>Economic</i>	Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB Pariwisata tertinggi (12% terhadap PDB Pariwisata nasional).	Kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata (pandemi, keamanan, bencana, krisis ekonomi) yang biasanya bersifat tentatif	21%
<i>Sociological</i>	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan	26%
<i>Technological</i>	Ketersediaan sistem teknologi informasi IT yang mendukung peningkatan industri pariwisata	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	5%
<i>Legal</i>	Sudah ditetapkannya wilayah Jawa-Bali menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia	Belum terintegrasinya kebijakan multisektor dalam pengembangan kawasan wisata	11%
<i>Environment</i>	Keunikan bentang alam yang didukung dengan keanekaragaman hayati, cagar budaya, serta geopark skala nasional dan global dalam mendukung pertumbuhan industri wisata	Provinsi Jawa Barat memiliki IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kurang Baik (peringkat ke 3 terendah setelah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta)	21%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.) Analisis 5-forces Fokus Pariwisata

Dalam analisis 5-forces fokus pariwisata, 5 aspek yang ditinjau adalah ekonomi kreatif, kawasan pariwisata prioritas, jumlah pengunjung, pengembangan pariwisata, dan kolaborasi komunitas. Secara rinci analisis 5-forces fokus pariwisata dapat dilihat pada Tabel 6.16.

Tabel 6.16 Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pariwisata

Parameter	Opportunities	Threats
<i>Rivalry Among Existing Competitor</i>		
Inovasi	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya
<i>Bargaining Power of Customers</i>		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta	KSPN Unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami

Parameter	Opportunities	Threats
	10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu sehingga menghambat perkembangan industri kreatif lokal
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.) Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strengths			Weaknesses		
1	Daya tarik utama wisata Jawa Barat terutama adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian dengan jumlah 1,5 juta usaha lokal dan menghasilkan 3,8 juta lapangan kerja.	1	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana		
2	Pengembangan tourism relevant road dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	2	Waktu tempuh dari Wilayah Metropolitan menuju DTW Unggulan masih tergolong lama		
3	Industri kreatif Jawa Barat memiliki potensi terbesar nasional dengan jumlah usaha 1,5 juta dan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,8 juta orang	3	Tingkat pelayanan kebutuhan dasar di kawasan pariwisata masih belum optimal		
4	Terdapatnya Destinasi Wisata yang diakui Unesco (Global Geopark Ciletuh) yang dapat dikembangkan menjadi Destinasi Unggulan	4	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran		

Strengths		Weaknesses	
5	Ketersediaan sistem teknologi informasi IT yang mendukung peningkatan industri pariwisata	5	Kawasan Wisata yang belum tertata dengan baik
	Opportunities		Threats
1	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	1	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya
2	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	2	KSPN Unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami
3	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	3	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah
4	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	4	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu sehingga menghambat perkembangan industri kreatif lokal
5	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	5	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.18.

Tabel 6.18 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pariwisata

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Daya tarik utama wisata Jawa Barat adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian	0,27	3	0,82
	2	Pengembangan <i>tourism relevant road</i> dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	0,18	4	0,73
	3	Industri kreatif Jawa Barat memiliki potensi terbesar nasional dengan jumlah usaha 1,5 juta dan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,8 juta orang	0,18	3	0,55
	4	Terdapatnya destinasi wisata yang diakui UNESCO (Global Geopark Ciletuh) yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan	0,18	3	0,55
	5	Ketersediaan sistem teknologi informasi yang mendukung peningkatan industri pariwisata	0,18	2	0,36
	Subtotal		1		3,00
Weaknesses	1	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana	0,2	-2	-0,40
	2	Waktu tempuh dari wilayah metropolitan menuju DTW unggulan masih tergolong lama	0,2	-1	-0,20

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
	3	Tingkat pelayanan kebutuhan dasar di kawasan pariwisata masih belum optimal	0,2	-3	-0,60
	4	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	0,2	-2	-0,40
	5	Kawasan wisata yang belum tertata dengan baik	0,2	-2	-0,40
		Subtotal	1		-2,00
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			1,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

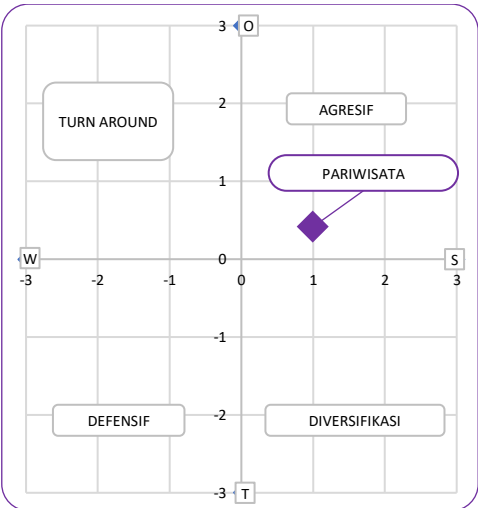
Pembobotan faktor eksternal fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.19.

Tabel 6.19 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pariwisata

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	0,25	4	1,00
	2	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun, Puncak-Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	0,17	3	0,50
	3	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	0,25	2	0,50
	4	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	0,17	3	0,50
	5	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	0,17	2	0,33
	Subtotal		1		2,83
Threats	1	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya	0,25	-2	-0,50
	2	KSPN unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami	0,25	-3	-0,75
	3	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah	0,17	-2	-0,33
	4	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu yang menghambat perkembangan industri kreatif lokal	0,17	-3	-0,50
	5	Belum terbentuknya kolaborasi antarkomunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan	0,17	-2	-0,33
	Subtotal		1		-2,42
	TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				0,42

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.4 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Terdapat 4 strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata, yaitu:

1. **Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kreatif** melalui peningkatan kerjasama dan kelembagaan serta pengembangan bisnis dan pemasaran (S1-S3-O4-O5);
2. **Penguatan konektivitas dan transportasi** untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata (S2-O1-O2);
3. **Peningkatan keterkaikan destinasi pariwisata** melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan (S1-S4-O2-O3); dan
4. **Pemanfaatan kemajuan teknologi** untuk memperkuat kualitas industri dan pangsa pasar pariwisata berbasis ekonomi kreatif (S5-O2-O3).

6.2.5. Penysusunan Strategi Fokus Pelayanan Dasar Perkotaan

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pariwisata diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pelayanan Dasar Perkotaan

Analisis PESTLE fokus pelayanan dasar menunjukkan bahwa parameter lingkungan dinilai menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pemenuhan pelayanan dasar perkotaan Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan. Analisis PESTLE fokus pelayanan dasar secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.20.

Tabel 6.20 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pelayanan Dasar

Parameter	Opportunities	Threats	Bobot
Political	Kawasan Metropolitan di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat merupakan motor penggerak ekonomi nasional	Belum jelasnya kewenangan pengelolaan kawasan perkotaan terutama metropolitan yang multisektor dan administrasi	6%
Economic	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	12%
Sociological	Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 51 juta jiwa (peringkat 1 nasional), dengan tingkat urbanisasi tertinggi nasional dimana 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan	Tidak tersedianya aktivitas ekonomi yang berkualitas sebagai lapangan usaha bagi penduduk perkotaan dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang pendidikan	12%
Technological	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	Ketergantungan terhadap teknologi dapat meningkatkan kerentanan kejahatan cyber dalam sistem pelayanan perkotaan	24%
Legal	Telah ditetapkan rencana induk pengembangan perkotaan (RTR KSN) sebagai arah pengembangan perkotaan kedepan	Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuai pembangunan dengan rencana pengembangan	18%
Environment	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	Perkembangan perkotaan yang tidak didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan	29%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.) Analisis 5-forces Fokus Pelayanan Dasar Perkotaan

Dalam analisis 5-forces fokus pelayanan dasar, 5 aspek yang ditinjau adalah aksesibilitas, kependudukan, aktivitas perkotaan, pengembangan kawasan, dan infrastruktur. Secara rinci analisis 5-forces fokus pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 6.21.

Tabel 6.21 Analisis 5-forces (Meso) Fokus Pelayanan Dasar

Parameter	Opportunities	Threats
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan
Bargaining Power of Customers		

Parameter	Opportunities	Threats
Trend Eksisting	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan
Threat of Substitutes		
Trend Analisis PESTLE	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	Perkembangan perkotaan yang tidak didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.) Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar Perkotaan

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing *grand* strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.22

Tabel 6.22 Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar

Strengths		Weaknesses	
1	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	1	Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.
2	Tingginya aktivitas ekonomi kreatif dan fasilitas pendidikan sehingga mendorong tingginya pendatang baik wisatawan maupun mahasiswa	2	Akses Air Minum Perpipaan dan Pengolahan Limbah Aman masih jauh dari target RJMN 2024.
3	Ketersediaan idle capacity di Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih hingga 2030	3	Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam
4	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	4	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana

Strengths		Weaknesses	
5	Ketersediaan lahan di perhi-urban untuk membentuk permukiman kepadatan tinggi seperti di kota baru dan kawasan pendidikan	5	Telah terbentuk beberapa infrastruktur pengolahan persampahan yang masih belum dimanfaatkan karena terkenda masalah lahan
Opportunities		Threats	
1	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	1	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan
2	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	2	Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan
3	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	3	Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan
4	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	4	Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan
5	Telah ditetapkan rencana induk pengembangan perkotaan (RTR KSN) sebagai arah pengembangan perkotaan ke depan	5	Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuai pembangunan dengan rencana pengembangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.23.

Tabel 6.23 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pelayanan Dasar

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	0,25	3	0,75
	2	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	0,17	2	0,33
	3	Ketersediaan idle capacity di Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih hingga 2030	0,25	3	0,75
	4	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	0,17	2	0,33
	5	Ketersediaan lahan untuk membentuk permukiman vertikal baru untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk	0,17	2	0,33
	Subtotal		1		2,50
Weak	1	Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.	0,25	-2	-0,50

Faktor Internal		Bobot	Rating	Skor
2	Akses Air Minum Perpipaan dan Pengolahan Limbah Aman masih jauh dari target RJMN 2024.	0,25	-2	-0,50
3	Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam	0,17	-2	-0,33
4	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana	0,17	-2	-0,33
5	Telah terbentuk beberapa infrastruktur pengolahan persampahan yang masih belum dimanfaatkan karena terkenda masalah lahan	0,17	-3	-0,50
Subtotal		1		-2,17
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL				0,33

Sumber: Hasil Analisis, 2025

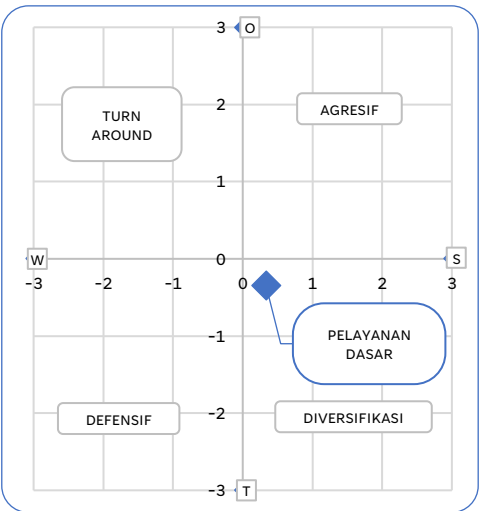
Pembobotan faktor eksternal fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.24.

Tabel 6.24 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pelayanan Dasar

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	0,20	3	0,60
	2	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	0,13	2	0,27
	3	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	0,27	4	1,07
	4	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	0,20	2	0,40
	5	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	0,20	2	0,40
		Subtotal	1		2,73
	Threats	1	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	0,15	-2
2		Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan	0,23	-4	-0,92
3		Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan	0,15	-3	-0,46
4		Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan	0,23	-3	-0,69
5		Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuai pembangunan dengan rencana pengembangan	0,23	-3	-0,69
		Subtotal	1		-3,08
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			-0,34

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pelayanan dasar berada pada kuadran **diversifikasi**, yang berarti strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan ancaman (*threats*).



Gambar 6.5 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pelayanan Dasar

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Strategi pemenuhan standar pelayanan sektor pelayanan dasar dijabarkan menjadi:

1. **Pengembangan permukiman secara polisentris** melalui revitalisasi kawasan dan ekonomi bernilai tambah (S4-S5-T1-T3);
2. **Peningkatan layanan dasar** melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan (S2-S3-T2-T3);
3. **Peningkatan ketahanan terhadap bencana** melalui sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana (S2-T5);
4. **Peningkatan layanan transportasi publik dan kemasyarakatan** dengan memanfaatkan teknologi informasi (S1-T5); dan
5. **Peningkatan integrasi pengelolaan** melalui penguatan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan (S4-T4).

6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Skenario perumusan kawasan prioritas meliputi penentuan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya.

6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam menentukan kawasan prioritas disusun penilaian kawasan berdasarkan metode *multicriteria analysis*. Daftar panjang kawasan prioritas yang telah disusun diberikan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai untuk mendapatkan daftar kawasan prioritas yang akan ditangani hingga tahun 2034.

A. Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Industri

Parameter penilaian untuk fokus industri adalah sebagai berikut.

Tabel 6.25 Parameter Penilaian Fokus Industri

Kode	Parameter	Keterangan	Penilaian	
			Tidak	Ya
A	RPJMN 2025-2029	Tercantum dalam Kawasan Prioritas RPJMN 2025-2029	0	1
B	RIPIN 2015-2035	Tercantum dalam RIPIN	0	1
C	Perpres 87/2021	Tercantum dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	0	1
D	Kedekatan dengan jalan tol	Berjarak <10 km	0	1
E	Kedekatan dengan pelabuhan utama	Berjarak <50 km	0	1
F	WPPI	Termasuk dalam delineasi WPPI	0	1
G	Kondisi eksisting	Sudah beroperasi	0	1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan industri yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.26.

Tabel 6.26 Penilaian Kawasan Fokus Industri

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter							Total
			A	B	C	D	E	F	G	
1	Bekasi International Industrial Estate	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	1	1	0	1	0	1	1	5
2	MM2100 Industrial Town		1	1	0	1	0	1	1	5
3	Kawasan Industri Jababeka		1	1	0	1	0	1	1	5
4	East Jakarta Industrial Park		1	1	0	1	0	1	1	5
5	Kawasan Industri Lippo Cikarang		1	1	0	1	0	1	1	5
6	Greenland International Industrial Center (GIIC)		1	1	0	1	0	1	1	5
7	KIT Indonesia China		1	1	0	0	0	1	1	4
8	KI SKI		1	1	0	0	0	1	0	3
9	KI Cilamaya		1	1	0	0	1	1	1	5
10	KI Indotaisei		1	1	0	1	0	1	0	4
11	KI Kujang Cikampek		1	1	0	1	0	1	1	5
12	Karawang International Industrial City		1	1	0	1	0	1	1	5
13	Podomoro Industrial Park Karawang		1	1	0	0	0	1	1	4
14	Karawang Jabar Industrial Estate		1	1	0	1	0	1	0	4
15	Cibinong Center Industrial Estate		1	1	0	1	0	1	1	5
16	KI Sentul		1	1	0	0	0	1	1	4

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter							Total
			A	B	C	D	E	F	G	
17	Kawasan Industri Gobel		1	0	0	1	1	1	1	5
18	Bekasi Fajar Industrial Estate		1	0	0	1	1	1	1	5
19	GT Tech Park – Karawang		1	0	0	0	0	1	0	2
20	Artha Industrial Hill		1	0	0	1	0	1	0	3
21	Suryacipta City of Industri		1	0	0	1	0	1	0	3
22	Marunda Center		1	0	0	1	0	1	1	4
23	KPI Cipali Subang Barat		1	1	1	1	0	1	1	6
24	KPI Cipali Subang Timur		1	1	1	1	1	1	0	6
25	Patimban		1	1	1	1	1	1	0	6
26	KI Rancaekek	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	1	1	0	1	0	0	1	4
27	Tukdana	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	1	1	1	0	0	1	0	4
28	Cirebon		1	1	1	1	0	1	1	6
29	Kertajati		1	1	1	1	1	1	0	6
30	Jatiwangi		1	1	1	1	0	1	0	5
31	Patrol	Non Kawasan	0	1	1	0	1	1	0	4
32	Losarang	Non Kawasan	0	1	1	0	1	1	1	5
33	Cipali Indramayu	Non Kawasan	0	1	1	1	0	1	1	5
34	Krangkeng	Non Kawasan	0	1	1	0	1	1	1	5
35	Balongan	Non Kawasan	0	1	1	0	1	1	1	5
36	KI Sukabumi	Non Kawasan	0	1	1	1	0	0	1	4
37	Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta	Non Kawasan	0	1	0	1	0	1	1	4
38	Butom	Non Kawasan	0	0	1	1	0	1	0	3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, lokasi spesifik untuk **fokus industri** adalah kawasan industri dalam Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang) yaitu **(1) Cipali West Subang, (2) Cipali East Subang, (3) Cirebon**, serta Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati meliputi **(4) Kertajati dan (5) Patimban**.

B. Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Pertanian

Parameter penilaian untuk fokus pertanian sesuai dengan Kawasan Prioritas RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.27 Parameter Penilaian Fokus Pertanian

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	Indeks Penanaman (IP)	< 1	1–2	> 2
B	Jumlah produksi pertanian (2021)	< 500 ribu ton/tahun	500 ribu–1 juta ton/tahun	> 1 juta ton/tahun
C	Produktivitas tanam padi	< 50 kuintal/Ha	50–60 kuintal/Ha	> 60 kuintal/Ha
D	Luas Tanam Padi 2021	< 50.000 Ha	50.000-150.000 Ha	> 150.000 Ha

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
E	Luas Daerah Irigasi Teknis	< 20.000 Ha	20.000-50.000 Ha	> 50.000 Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pertanian yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.28.

Tabel 6.28 Penilaian Kawasan Fokus Pertanian

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter					Total
			A	B	C	D	E	
1	Karawang	Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung	1	2	1	2	2	8
2	Subang		1	2	1	2	2	8
3	Indramayu		1	2	1	2	2	8
4	Bandung		1	2	1	2	2	8
5	Cirebon		1	1	1	2	1	6
6	Bekasi		1	0	1	1	1	4
7	Majalengka		1	1	1	1	1	5
8	Sumedang		1	0	1	1	1	4
9	Kuningan		1	1	1	1	1	5
10	Bandung Barat		1	0	1	1	1	4
11	Purwakarta	Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki	1	0	1	0	1	3
12	Garut		1	1	1	2	2	7
13	Tasikmalaya		1	1	1	1	2	6
14	Ciamis		1	1	1	1	1	5
15	Pangandaran	Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri	1	0	1	1	1	4
16	Cianjur		1	2	1	2	1	7
17	Sukabumi		1	0	1	1	1	4
18	Bogor		1	0	1	0	1	3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, lokasi spesifik untuk **fokus pertanian** adalah Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi di **(1) Kabupaten Karawang, (2) Kabupaten Subang, (3) Kabupaten Indramayu, (4) Kabupaten Bandung, (5) Kabupaten Cirebon, (6) Kabupaten Majalengka, (7) Kabupaten Kuningan, (8) Kabupaten Garut, (9) Kabupaten Tasikmalaya dan (10) Kabupaten Cianjur.**

C. Pariwisata & Industri Kreatif

Parameter penilaian untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut.

Tabel 6.29 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	RPJM 2025-2029	Tercantum dalam Kawasan Prioritas RPJMN 2025-2029	0	1
B	Jarak dari metropolitan terdekat	> 100 km	50-100 km	< 50 km
C	Kedekatan dengan hub (bandara, stasiun, pelabuhan)	> 40 km	20-40 km	< 20 km
D	RIPPARNAS	Tidak tercantum dalam RIPPARNAS	Tercantum dalam RIPPASNAS sebagai KPPN	Tercantum dalam RIPPASNAS sebagai KSPN

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
E	Kunjungan wisatawan per tahun	< 1 juta orang/tahun	1-2 juta orang/tahun	> 2 juta orang/tahun
F	Lama tinggal (<i>length of stay</i>) wisatawan	< 1,5 hari	1,5-1,7 hari	> 1,7 hari
G	RTRW Nasional	Tidak termasuk dalam Kawasan Andalan	Termasuk dalam Kawasan Andalan	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pariwisata yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.30.

Tabel 6.30 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter							Total
			A	B	C	D	E	F	G	
1	KSPN Halimun dsk.	Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak	1	1	1	2	1	1	0	7
2	KPPN Gn. Halimun dsk.		1	1	1	1	2	1	0	7
3	KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Kawasan Konservasi TN Gede-Pangrango	1	1	0	2	2	1	0	7
4	KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.		1	2	0	1	2	1	0	7
5	KSPN Ciwidey dsk.	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	1	2	1	2	2	0	0	8
6	KSPN Tangkuban Perahu dsk.		1	2	1	2	2	0	0	8
7	KSPN Bandung Kota dsk.		1	2	2	2	2	1	1	12
8	KPPN Bandung Kota dsk.		1	2	2	1	2	2	1	11
9	KPPN Tangkuban Perahu dsk.		1	2	1	1	2	1	0	8
10	KPPN Lembang dsk.		1	2	1	1	1	1	0	7
11	KPPN Ciwidey dsk.		1	2	1	1	2	1	0	8
12	KPPN Tasikmalaya dsk.	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan	1	0	2	1	0	0	0	4
13	KPPN Bogor-Ciawi dsk.	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	1	1	0	1	2	1	0	6
14	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.		1	1	2	1	2	1	0	8
15	KSPN Pangandaran dsk.	Non Kawasan	0	0	2	2	1	1	1	7
16	KPPN Pangandaran dsk.	Non Kawasan	0	1	2	1	1	1	1	7

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, lokasi spesifik untuk **fokus pariwisata** adalah kawasan pariwisata di **(1) KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk., (2) KSPN dan KPPN Ciwidey dsk., (3) KSPN dan KPPN Tangkuban Perahu dsk., (4) KSPN dan KPPN Bandung Kota dsk., dan (5) KPPN Pelabuhan Ratu dsk.**

D. Pelayanan Dasar Perkotaan

Berdasarkan parameter pada Tabel 6.31, dilakukan penilaian kuantitatif terhadap setiap lokasi kawasan pelayanan dasar perkotaan dengan skala skor 0–2 yang dikalikan bobot masing-masing. Nilai akumulatif yang dihasilkan menggambarkan tingkat prioritas.

Tabel 6.31 Parameter Penilaian Fokus Pelayanan Dasar

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	Keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029	Tidak tercantum	Terkait tidak langsung	Tercantum eksplisit
B	Beban perkotaan berdasarkan ukuran kota	< 1 juta penduduk	1-5 juta penduduk	> 5 juta penduduk
C	Kepadatan penduduk	< 10 jiwa/Ha	10-20 jiwa/Ha	> 20 jiwa/Ha
D	Fungsi pelayanan perkotaan	PKL	PKW	PKN
E	Kontribusi PDRB terhadap Jawa Barat	< 2%	2-4%	> 4%
F	Akses air minum perpipaan	< 15%	15-30%	> 30%
G	Akses sanitasi layak	< 60%	60-90%	> 90%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pelayanan dasar yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.32.

Tabel 6.32 Penilaian Kawasan Fokus Pelayanan Dasar

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Perkotaan Prioritas	Penilaian (Parameter x Bobot)							Total
			A	B	C	D	E	F	G	
1	PKN Cekungan Bandung	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	2	2	4	2	2	1	8	21
2	PKN Cirebon	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon–Kertajati	1	2	4	2	2	2	8	21
3	PKW Tasikmalaya	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	1	2	2	0	0	0	8	13
4	PKW Indramayu	Non Kawasan Perkotaan	1	0	2	2	1	1	4	11
5	PKW Sukabumi	Kawasan Perkotaan Bogor–Sukabumi dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor–Sukabumi–Cianjur	1	2	2	1	0	0	4	10
6	PKW Cikampek–Cikopo	Non Kawasan Perkotaan	2	1	2	2	1	1	0	9
7	PKW Pelabuhan Ratu	Non Kawasan Perkotaan	1	0	2	1	0	1	4	9
8	PKW Kadipaten	Non Kawasan Perkotaan	1	1	2	0	0	1	4	9
9	PKW Pangandaran	Non Kawasan Perkotaan	0	0	2	1	1	1	4	9
10	PKW Cidaun	Non Kawasan Perkotaan	1	0	2	0	0	0	0	3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil penilaian di atas, lokasi spesifik untuk **fokus pelayanan dasar** adalah **(1) PKN Bandung**, **(2) PKN Cirebon**, dan **(3) PKW Tasikmalaya**.

E. Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil *multicriteria analysis* yang telah dilakukan, terdapat 4 kawasan prioritas di Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing fokus perencanaan. Terdapat kawasan prioritas yang memiliki lebih dari satu fokus perencanaan, yaitu Kawasan Rebana, karena memiliki fungsi ganda pada kawasan tersebut. Sebagai contoh, sektor pertanian pada Kawasan Rebana berada di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, sedangkan sektor industri berada di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Kawasan prioritas Provinsi Jawa Barat beserta fokus perencanaannya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 6.33 Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

No	Kawasan Prioritas	Fokus
1	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban	Industri
	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	
2	Swasembada Pangan, Air, Energi : Citarum–Cimanuk–Cisanggarung	Pertanian
	Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki	
	Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri	
3	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Pariwisata
	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	
4	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Pelayanan Dasar Perkotaan
	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon–Kertajati	
	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

6.3.2. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan kawasan prioritas dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2025-2029 bagi kawasan prioritas terpilih sesuai dengan hasil *multicriteria analysis*. Sementara itu, bagi kawasan prioritas lainnya pengembangan dilakukan setelah tahun 2030-2034. Keterangan lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.34.

Tabel 6.34 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I 2025- 2029	Tahap II 2030-2034
	Industri			
1	Bekasi International Industrial Estate	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)		
2	MM2100 Industrial Town			
3	Kawasan Industri Jababeka			
4	East Jakarta Industrial Park			
5	Kawasan Industri Lippo Cikarang			
6	Greenland International Industrial Center (GIIC)			
7	KIT Indonesia China			
8	KI SKI			
9	KI Cilamaya			
10	KI Indotaisei			
11	KI Kujang Cikampek			
12	Karawang International Industrial City			
13	Podomoro Industrial Park Karawang			
14	Karawang Jabar Industrial Estate			

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
15	Cibinong Center Industrial Estate			
16	KI Sentul			
17	Kawasan Industri Gobel			
18	Bekasi Fajar Industrial Estate			
19	GT Tech Park - Karawang			
20	Artha Industrial Hill			
21	Suryacipta City of Industri			
22	Marunda Center			
23	KPI Cipali Subang Barat			
24	KPI Cipali Subang Timur			
25	Patimban			
26	KI Rancaekek	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung		
27	Tukdana	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati		
28	Cirebon			
29	Kertajati			
30	Jatiwangi	Non Kawasan		
31	Patrol			
32	Losarang			
33	Cipali Indramayu			
34	Krangkeng			
35	Balongan			
36	KI Sukabumi			
37	Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta			
38	Butom			
	Pertanian			
1	Karawang	Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung		
2	Subang			
3	Indramayu			
4	Bandung			
5	Cirebon			
6	Bekasi			
7	Majalengka			
8	Sumedang			
9	Kuningan			
10	Bandung Barat			
11	Purwakarta	Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki		
12	Garut			
13	Tasikmalaya			
14	Ciamis	Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri		
15	Pangandaran			
16	Cianjur			
17	Sukabumi	Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak		
18	Bogor			
	Pariwisata			
1	KSPN Halimun dsk.			
2	KPPN Gn. Halimun dsk.			
3	KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Kawasan Konservasi TN Gede-Pangrango		
4	KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.			
5	KSPN Ciwidey dsk.	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya		
6	KSPN Tangkuban Perahu dsk.			
7	KSPN Bandung Kota dsk.			
8	KPPN Bandung Kota dsk.			
9	KPPN Tangkuban Perahu dsk.			

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
10	KPPN Lembang dsk.			
11	KPPN Ciwidey dsk.			
12	KPPN Tasikmalaya dsk.	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan		
13	KPPN Bogor-Ciawi dsk.	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur		
14	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.			
15	KSPN Pangandaran dsk.	Non Kawsan		
16	KPPN Pangandaran dsk.	Non Kawsan		
	Perkotaan			
1	PKN Cekungan Bandung	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung		
2	PKN Cirebon	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati		
3	PKW Tasikmalaya	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya		
4	PKW Indramayu	Non Kawasan Perkotaan		
5	PKW Sukabumi	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur		
6	PKW Cikampek-Cikopo	Non Kawasan Perkotaan		
7	PKW Pelabuhan Ratu	Non Kawasan Perkotaan		
8	PKW Kadipaten	Non Kawasan Perkotaan		
9	PKW Pangandaran	Non Kawasan Perkotaan		
10	PKW Cidaun	Non Kawasan Perkotaan		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis pada subbab 6.3.1, diperoleh kawasan prioritas untuk masing-masing fokus pengembangan yang ditentukan berdasarkan indikator: kesiapan kawasan, dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan, serta kontribusi ekonomi yang signifikan. Kawasan prioritas dari setiap fokus pengembangan adalah sebagai berikut:

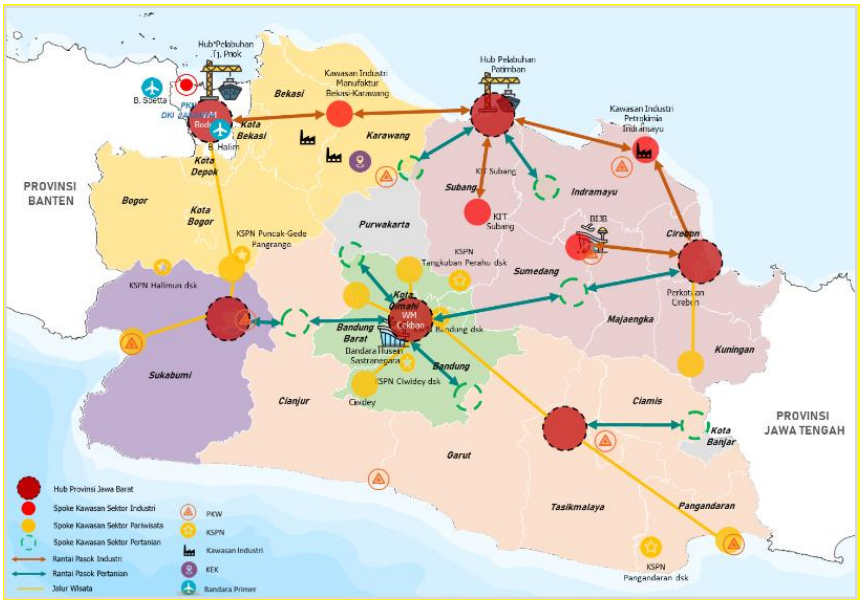
1. Fokus pengembangan industri berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat yang berada di Kawasan Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang) dan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati;
2. Fokus pengembangan pertanian berada di Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Bandung, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka); Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki (Kabupaten Garut dan Tasikmalaya); dan Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri (Kabupaten Cianjur);

3. Fokus pengembangan pariwisata berada di Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya serta Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur; dan
4. Fokus pengembangan perkotaan berada di WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon–Kertajati, serta Kawasan Perkotaan Tasikmalaya.

Setiap kawasan memiliki hirarki pusat pengembangan yang ditentukan berdasarkan gambaran arus logistik komoditas unggulan baik untuk sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata. Pembangunan *hub* dan *spoke* untuk Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. *Hub* PKW Sukabumi dengan *spoke* PKW Pelabuhan Ratu, Cianjur, dan Bogor yang dikembangkan dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata;
2. *Hub* PKN Cekungan Bandung dengan *spoke* Padalarang, Lembang, Ciwidey, dan Garut dengan sektor unggulan pariwisata dan perkotaan;
3. *Hub* Patimban dengan *spoke* KIT Subang, PKW Cikampek-Kopo, dan PKW Indramayu dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
4. *Hub* Cirebon dengan *spoke* Kuningan, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, dan Sumedang dengan sektor unggulan pertanian dan industri; serta
5. *Hub* PKW Tasik dengan *spoke* PKW Pangandaran dan Kota Banjar yang dikembangkan dengan sektor unggulan pariwisata dan perkotaan.

Rumusan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya dapat dilihat dalam Gambar 6.6.



Gambar 6.6 Tahap Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan industri prioritas penanganan hingga tahun 2029 di Provinsi Jawa Barat yaitu Kawasan Cekungan Bandung, Kawasan Rebana, Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh, dan Kawasan Jawa Barat Selatan.

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Subbab ini akan menjelaskan mengenai proyeksi kebutuhan infrastruktur masa mendatang berdasarkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kawasan, dan perkembangan sektor prioritas, yang dibandingkan dengan ketersediaan masa kini sehingga menghasilkan gap kebutuhan pembangunan infrastruktur.

7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Barat

1) Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat

Total kapasitas tampung di Jawa Barat berupa bendungan/waduk adalah sebesar 7.337.453.977 m³ sedangkan kapasitas tampung embung sebesar 24.837.600 m³, sehingga total kapasitas tampung di Provinsi Jawa Barat sebesar 7.362.291.577 m³. Dengan jumlah penduduk sebesar 50.345.200 jiwa, kapasitas tampung yang ada sebesar 146 m³/capita/tahun. Saat ini telah ada beberapa waduk/bendungan di Jawa Barat yang direncanakan dibangun hingga 2034 yaitu:

Tabel 7.1 Bendungan Konstruksi dan Rencana di Provinsi Jawa Barat

Bendungan	Kabupaten/ Kota	Tahun Selesai	Volume Tampungan (m ³)
Eksisting Infrastruktur SDA			
Seluruh Bendungan/Waduk	Jawa Barat	-	7.337.453.977
Seluruh Embung	Jawa Barat	-	24.837.600
Total Tampungan Eksisting			7.362.291.577
Rencana Infrastruktur SDA			
Cibeet	Bogor	2028	63.000.000
Cijurey	Bogor	2028	11.864.721
Kadumanik	Majalengka	2034	65.000.000
Total Tampungan Rencana Infrastruktur SDA			139.864.721
Total Tampungan Tahun 2034			7.502.156.298
GAP Kebutuhan Air Baku			
GAP 2024 – 2029		Total: 140,38 Target: 70	70,38
GAP 2022 – 2034		Total: 134,31 Target: 115	19,31
GAP 2022 – 2045		Total: 119,71 Target: 200	-80,28

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan selesai dibangunnya waduk/bendungan di atas maka kapasitas tampung di Jawa Barat pada tahun 2034 berkurang menjadi 134,31 m³/capita/tahun. Hasil tersebut sudah bisa mencukupi kebutuhan air karena besar kapasitas dari bendungan/waduk yang terbangun sebanding dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dengan target 115 m³/capita/tahun (2034), gap yang dihasilkan adalah sebesar 19,31 m³/capita/tahun. Kapasitas tampung bendungan tidak akan mencukupi apabila hingga tahun 2045 tidak ada peningkatan kapasitas tampung air. Dengan target tahun 2045 sebesar 200 m³/capita/tahun, kapasitas tampung di Provinsi Jawa Barat diperkirakan hanya sebesar 119 m³/capita/tahun, sehingga terdapat gap 80 m³/capita/tahun. Untuk memenuhi hingga tahun 2045 diperlukan penambahan kapasitas tampung sebesar 5.030.874.409 m³/capita/tahun.

2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama dan waktu tempuh perkotaan. Waktu tempuh lintas utama diukur pada koridor jalan yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Ditjen Bina Marga, dimana terdapat 9 koridor jalan utama di Provinsi Jawa Barat. Koridor dan waktu tempuh tersebut terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama di Provinsi Jawa Barat

Ruas Lintas Utama	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Menit)	Kecepatan (jam/100km)	GAP Kecepatan (2029)	GAP Kecepatan (2034)
Jakarta-Cikampek	66,1	129	3,3	-1,55	-1,65
Jakarta-Sukabumi	73,7	166	3,8	-2,05	-2,15
Cikampek-Cirebon	160	221	2,3	-0,60	-0,70
Cikampek-Bandung	88,9	186	3,5	-1,79	-1,89
Sukabumi-Bandung	118	265	3,7	-2,04	-2,14
Bandung-Tasikmalaya	109	240	3,7	-1,97	-2,07
Cirebon-Tasikmalaya	108	200	3,1	-1,39	-1,49
Cirebon-Semarang	235	335	2,4	-0,68	-0,78
Tasikmalaya-Yogyakarta	291	430	2,5	-0,76	-0,86

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target waktu tempuh lintas utama pada tahun 2029 adalah sebesar 1,7 dan meningkat menjadi 1,6 pada 2034. Dari data di atas seluruh ruas masih belum bisa mencapai target waktu tempuh terutama saat melintasi Jalan Nasional. Apabila menggunakan Jalan Tol, maka hanya tersisa ruas Bandung-Tasikmalaya dan Tasikmalaya-Yogyakarta yang belum memenuhi target kecepatan karena masih belum terdapat Jalan Tol yang saling menghubungkan wilayah tersebut. Waktu tempuh kedua koridor tersebut akan

membaik apabila rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dapat terealisasi.

Waktu tempuh perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Waktu tempuh perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Waktu Tempuh di Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Ruas Lintas Utama	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Menit)	Kecepatan (jam/100km)	GAP Kecepatan (2029)	GAP Kecepatan (2034)
Kota Bogor	1,7	10	9,8	-7,00	-7,30
Kota Bandung	3,8	24	10,5	-7,73	-8,03
Karawang	14	25	3,0	-0,18	-0,48
Kota Bekasi	4,1	15	6,1	-3,30	-3,60
Subang	4,2	14	5,6	-2,76	-3,06
Indramayu	3,9	8	3,4	-0,62	-0,92
Kota Cirebon	5,3	19	6,0	-3,17	-3,47
Garut	6,3	16	4,2	-1,43	-1,73
Sukabumi	17,4	72	6,9	-4,10	-4,40
Pangandaran	5,9	11	3,1	-0,31	-0,61

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target waktu tempuh di perkotaan pada tahun 2029 adalah sebesar 2,8 dan meningkat menjadi 2,5 pada 2034. Ruas yang terpilih adalah ruas pada kabupaten/kota yang memiliki tingkat pelayanan jalan tinggi terutama pada kawasan perkotaan/pusat kota. Dari data di atas, tidak ada yang memenuhi target waktu tempuh terutama pada hari kerja (di kawasan industri) dan hari libur atau akhir pekan (di kawasan wisata). Waktu tempuh yang cenderung lama ini bisa disebabkan karena arus yang bertumpuk antara arus lokal dan arus menerus. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan jalan tol hingga tahun 2034 berpotensi mengurangi kepadatan jalan perkotaan.

3) Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di kawasan permukiman dibutuhkan diantaranya adalah akses air minum perpipaan, akses sanitasi aman, akses pengolahan sampah, dan penataan kawasan kumuh.

A. Air Minum

Air minum perpipaan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menggunakan air tanah. *Baseline* yang digunakan dalam menghitung kebutuhan air minum ini berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996), tingkat konsumsi air rumah tangga bergantung pada kategori kota, kebutuhan air non domestik didasari pada Permen PUPR 18/2007 (kebutuhan air nondomestik adalah 15% dari kebutuhan air domestik), dan perhitungan jam puncak serta faktor kebocoran air berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, faktor jam puncak (fpuncak) berada dalam rentang 1,15–3. Pada dokumen ini, digunakan fpuncak 1,2. Tingkat kebutuhan air secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Kebutuhan Air Minum (lt/dtk)				
	2024	2029	2034	2039	2045
Bogor	14,985	15,861	16,787	17,768	19,021
Sukabumi	7,125	7,458	7,806	8,170	8,630
Cianjur	6,710	7,072	7,452	7,854	8,364
Bandung	9,832	10,268	10,724	11,199	11,797
Garut	7,585	8,064	8,572	9,112	9,806
Tasikmalaya	4,558	4,727	5,883	6,102	6,375
Ciamis	2,920	3,009	3,721	3,834	3,975
Kuningan	2,639	2,769	3,486	3,657	3,874
Cirebon	6,254	6,655	7,082	7,537	8,121
Majalengka	2,927	3,058	3,834	4,006	4,222
Sumedang	2,834	2,940	3,659	3,796	3,967
Indramayu	4,132	4,355	5,507	5,804	6,182
Subang	3,598	3,788	4,786	5,040	5,361
Purwakarta	2,150	2,290	3,252	3,464	3,737
Karawang	6,724	7,118	7,536	7,979	8,545
Bekasi	8,767	9,330	9,928	10,565	11,383
Bandung Barat	5,066	5,403	5,763	6,146	6,640
Pangandaran	860	886	1,218	1,255	1,301
Kota Bogor	3,512	3,660	3,051	3,179	3,341
Kota Sukabumi	1,043	1,116	1,432	1,531	1,660
Kota Bandung	8,994	9,378	7,823	8,157	8,576
Kota Cirebon	1,225	1,278	1,066	1,112	1,170
Kota Bekasi	6,485	6,803	7,137	7,487	7,930
Kota Depok	7,195	7,661	6,526	6,948	7,492
Kota Cimahi	1,517	1,617	1,723	1,837	1,984
Kota Tasikmalaya	1,781	1,888	2,401	2,545	2,728
Kota Banjar	437	461	648	684	728
Prov. Jawa Barat	131,854	138,910	148,804	156,769	166,910

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara keseluruhan, kebutuhan air minum di Provinsi Jawa Barat cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk hingga tahun 2045. Kabupaten Bogor memiliki kebutuhan air terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, tingkat pelayanan air minum perpipaan di Provinsi Jawa Barat masih belum memenuhi target pembangunan infrastruktur air minum perpipaan tahun 2025 sebesar 39%. Untuk target tahun 2034 sebesar 75% secara keseluruhan kabupaten/kota cenderung memiliki defisit. Secara lebih rinci, tingkat pelayanan air minum perpipaan seperti tabel berikut.

Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Kebutuhan Air Minum 2024	Pelayanan						GAP 2022- 2029	GAP 2022- 2034
		Baseline 2024		Target 2029		Target 2034			
	lt/dtk	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	lt/dtk
Bogor	14.985	4.582	30,6	8.146	51,36	12.590	75,0	-3.664	-8.108
Sukabumi	7.125	875	12,3	3.830	51,36	5.854	75,0	-3.035	-5.059
Cianjur	6.710	764	11,4	3.632	51,36	5.589	75,0	-3.066	-5.024
Bandung	9.832	851	8,66	5.274	51,36	8.043	75,0	-2.714	-5.483
Garut	7.585	782	10,3	4.141	51,36	6.429	75,0	-3.365	-5.653
Tasikmalaya	4.558	155	3,4	2.428	51,36	4.412	75,0	-2.318	-4.302
Ciamis	2.920	582	19,9	1.545	51,36	2.790	75,0	-1.024	-2.269
Kuningan	2.639	684	25,9	1.422	51,36	2.614	75,0	-697	-1.889
Cirebon	6.254	412	6,6	3.418	51,36	5.312	75,0	-2.868	-4.761
Majalengka	2.927	340	11,6	1.571	51,36	2.875	75,0	-838	-2.143
Sumedang	2.834	426	15,0	1.510	51,36	2.745	75,0	-1.120	-2.354
Indramayu	4.132	1.159	28,1	2.236	51,36	4.130	75,0	-1.015	-2.909
Subang	3.598	454	12,6	1.946	51,36	3.590	75,0	-1.196	-2.840
Purwakarta	2.150	348	16,2	1.176	51,36	2.439	75,0	-910	-2.173
Karawang	6.724	1.417	21,1	3.656	51,36	5.652	75,0	-2.467	-4.463
Bekasi	8.767	2.855	32,6	4.792	51,36	7.446	75,0	-2.610	-5.264
Bandung Barat	5.066	139	2,8	2.775	51,36	4.322	75,0	-2.608	-4.155
Pangandaran	860	67	7,8	455	51,36	914	75,0	-365	-823
Kota Bogor	3.512	2.292	65,3	1.880	51,36	2.288	75,0	1.279	870
Kota Sukabumi	1.043	101	9,7	573	51,36	1.074	75,0	-477	-978
Kota Bandung	8.994	3.108	34,6	4.817	51,36	5.867	75,0	-665	-1.716
Kota Cirebon	1.225	416	33,9	656	51,36	800	75,0	289	146
Kota Bekasi	6.485	952	14,7	3.494	51,36	5.353	75,0	-2.631	-4.489
Kota Depok	7.195	1.536	21,4	3.935	51,36	4.894	75,0	-2.471	-3.431
Kota Cimahi	1.517	104	6,8	830	51,36	1.293	75,0	-642	-1.104
Kota Tasik	1.781	239	13,4	970	51,36	1.801	75,0	-754	-1.585
Kota Banjar	437	98	22,4	237	51,36	486	75,0	-168	-417
Jawa Barat	131.854	25.739	18,5	71.344	51,36	111.603	75,0		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan air minum perpipaan di Provinsi Jawa Barat sebesar 18,48%. Beberapa wilayah yang sudah melampaui target layanan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Bogor (65,3%), Kota Bandung (34,6%), dan Kota Cirebon 33,9%). Untuk wilayah lainnya masih berada dibawah target layanan dengan Kabupaten Tasikmalaya (3,4%), Kabupaten Bandung Barat (2,8%), dan Kabupaten Cirebon (6,6%) sebagai wilayah dengan tingkat layanan terendah. Pembangunan SPAM diarahkan kabupaten yang masih memiliki layanan air minum perpipaan dibawah target (30%).

B. Air Limbah

Sanitasi aman digunakan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. *Baseline* yang digunakan dalam menghitung timbulan air limbah ini berdasarkan Buku A Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T Kementerian PUPR (2018), persentase timbulan air limbah domestik adalah 60–80% dari pemakaian air minum. Dalam dokumen ini, digunakan angka 80% dalam perhitungan. Timbulan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Timbulan Air Limbah (lt/dtk)				
	2024	2029	2034	2039	2045
Bogor	11,988	12,689	13,430	14,214	15,217
Sukabumi	5,700	5,966	6,245	6,536	6,904
Cianjur	5,368	5,657	5,962	6,283	6,691
Bandung	7,866	8,215	8,579	8,959	9,438
Garut	6,068	6,451	6,858	7,290	7,845
Tasikmalaya	3,646	3,782	4,706	4,881	5,100
Ciamis	2,336	2,407	2,976	3,067	3,180
Kuningan	2,111	2,215	2,788	2,926	3,099
Cirebon	5,003	5,324	5,666	6,029	6,497
Majalengka	2,342	2,446	3,067	3,204	3,377
Sumedang	2,267	2,352	2,928	3,037	3,174
Indramayu	3,305	3,484	4,406	4,644	4,946
Subang	2,878	3,031	3,829	4,032	4,289
Purwakarta	1,720	1,832	2,602	2,771	2,989
Karawang	5,379	5,695	6,029	6,383	6,836
Bekasi	7,014	7,464	7,943	8,452	9,107
Bandung Barat	4,053	4,322	4,610	4,917	5,312
Pangandaran	688	709	974	1,004	1,041
Kota Bogor	2,809	2,928	2,441	2,543	2,673
Kota Sukabumi	835	893	1,146	1,225	1,328
Kota Bandung	7,195	7,503	6,258	6,525	6,861
Kota Cirebon	980	1,022	853	890	936
Kota Bekasi	5,188	5,443	5,710	5,990	6,344
Kota Depok	5,756	6,129	5,221	5,559	5,994
Kota Cimahi	1,213	1,293	1,379	1,470	1,587
Kota Tasikmalaya	1,425	1,510	1,921	2,036	2,183
Kota Bnjar	350	369	519	547	583
Provinsi Jawa Barat	105,483	111,128	119,043	125,415	133,528

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara keseluruhan, kabupaten/kota sudah telayani akses sanitasi aman, namun persentase layanan masih tergolong rendah terutama pada wilayah kabupaten seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.7 Proyeksi Layanan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Timbulan air limbah 2024	Pelayanan						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
		Baseline 2024		Target 2029		Target 2034			
	lt/dtk	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	lt/dtk
Bogor	11.988	837	6,98	3.807	30	7.386	55	-3.052	-6.632
Sukabumi	5.700	518	9,08	1.790	30	3.435	55	-1.641	-3.286
Cianjur	5.368	488	9,1	1.697	30	3.279	55	-1.570	-3.152
Bandung	7.866	1.582	20,11	2.464	30	4.718	55	-1.866	-4.120
Garut	6.068	149	2,45	1.935	30	3.772	55	-1.841	-3.677
Tasikmalaya	3.646	101	2,76	1.134	30	2.589	55	-1.092	-2.546
Ciamis	2.336	62	2,67	722	30	1.637	55	-667	-1.582
Kuningan	2.111	43	2,05	664	30	1.534	55	-626	-1.495
Cirebon	5.003	689	13,77	1.597	30	3.116	55	-1.333	-2.852
Majalengka	2.342	121	5,17	734	30	1.687	55	-664	-1.617
Sumedang	2.267	95	4,18	706	30	1.610	55	-630	-1.535
Indramayu	3.305	370	11,18	1.045	30	2.423	55	-725	-2.103
Subang	2.878	90	3,11	909	30	2.106	55	-771	-1.968
Purwakarta	1.720	71	4,11	550	30	1.431	55	-470	-1.351
Karawang	5.379	652	12,13	1.708	30	3.316	55	-1.313	-2.920
Bekasi	7.014	1.064	15,17	2.239	30	4.368	55	-957	-3.087
Bandung Barat	4.053	82	2,03	1.297	30	2.536	55	-1.229	-2.468
Pangandaran	688	33	4,73	213	30	536	55	-185	-508
Kota Bogor	2.809	351	12,5	878	30	1.342	55	-623	-1.088
Kota Sukabumi	835	26	3,07	268	30	630	55	-236	-599
Kota Bandung	7.195	1.584	22,01	2.251	30	3.442	55	-1.080	-2.272
Kota Cirebon	980	244	24,89	307	30	469	55	-79	-241
Kota Bekasi	5.188	1.111	21,41	1.633	30	3.140	55	-126	-1.633
Kota Depok	5.756	701	12,18	1.839	30	2.871	55	-941	-1.974
Kota Cimahi	1.213	112	9,21	388	30	758	55	-301	-671
Kota Tasikmalaya	1.425	97	6,83	453	30	1.056	55	-362	-965
Kota Banjar	350	13	3,79	111	30	285	55	-86	-261
Prov. Jawa Barat	105.483	11.284	10,54	33.338	30	65.474	55		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 55%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan sanitasi aman di Provinsi Jawa Barat sebesar 10,5%. Belum ada wilayah yang melampaui target layanan sanitasi hingga tahun 2034, akan tetapi terdapat beberapa wilayah yang sudah memiliki layanan sanitasi yang tinggi dan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Cirebon (24,89%), Kota Bandung (22,01%), dan Kota Bekasi (21,41%). Untuk wilayah lainnya masih masih berada dibawah target layanan dengan layanan sanitasi terendah

berada di Kabupaten Ciamis (2,67%), Kabupaten Kuningan (2,05%), dan Kabupaten Bandung Barat (2,03%). Pembangunan beberapa fasilitas pengolahan limbah cair diarahkan pada kabupaten yang masih memiliki layanan sanitasi aman dibawah target (15%).

C. Persampahan

Layanan persampahan diharapkan tidak hanya menampung sampah saja akan tetapi juga terdapat pengolahan sampah. *Baseline* yang digunakan dalam menghitung timbulan sampah ini berdasarkan SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. Tingkat timbulan sampah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.8 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)				
	2024	2029	2034	2039	2045
Bogor	2.814	2.944	3.116	3.298	3.531
Sukabumi	1.021	1.059	1.108	1.160	1.225
Cianjur	1.268	1.322	1.393	1.468	1.563
Bandung	1.312	1.359	1.419	1.482	1.561
Garut	1.146	1.203	1.279	1.360	1.463
Tasikmalaya	698	719	746	773	808
Ciamis	501	513	529	545	565
Kuningan	599	623	654	686	726
Cirebon	1.275	1.340	1.426	1.517	1.635
Majalengka	1.047	1.084	1.133	1.183	1.247
Sumedang	482	497	515	534	559
Indramayu	1.137	1.185	1.249	1.317	1.402
Subang	660	688	724	762	811
Purwakarta	418	440	469	499	538
Karawang	1.067	1.117	1.182	1.252	1.341
Bekasi	1.683	1.769	1.883	2.004	2.159
Bandung Barat	743	782	834	890	961
Pangandaran	176	180	186	192	199
Kota Bogor	780	806	840	875	920
Kota Sukabumi	184	195	208	223	241
Kota Bandung	1.496	1.547	1.613	1.682	1.769
Kota Cirebon	216	224	233	244	256
Kota Bekasi	954	991	1.040	1.091	1.156
Kota Depok	781	821	874	931	1.004
Kota Cimahi	216	227	242	258	279
Kota Tasikmalaya	271	284	301	319	342
Kota Banjar	76	79	83	88	94
Provinsi Jawa Barat	23.021	23.998	25.279	26.632	28.354

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara keseluruhan, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah telayani akses pengelolaan sampah, namun persentase layanan masih tergolong rendah terutama pada wilayah kabupaten. Tingkat layanan akses pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.9 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Timbulan Sampah 2024	Pelayanan						GAP 2024-2029	GAP 2024-2034
		Baseline 2024		Target 2029		Target 2034			
	ton/hari	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	ton/hari
Bogor	2.814	978	30.9	1,119	38	1,870	60	-141	-892
Sukabumi	1.021	383	40.9	402	38	1,108	100	-19	-725
Cianjur	1.268	307	26.4	502	38	836	60	-195	-529
Bandung	1.312	883	62.8	516	38	1,419	100	367	-535
Garut	1.146	395	33.9	457	38	768	60	-62	-372
Tasikmalaya	698	48	7.2	273	38	447	60	-225	-399
Ciamis	501	412	82.2	195	38	317	60	217	95
Kuningan	599	273	48.4	237	38	392	60	36	-120
Cirebon	1.275	508	41.0	509	38	855	60	-1	-347
Majalengka	1.047	135	13.8	412	38	1,133	100	-277	-997
Sumedang	482	72	14.6	189	38	309	60	-117	-237
Indramayu	1.137	678	62.6	450	38	1,249	100	227	-571
Subang	660	422	62.9	261	38	434	60	161	-12
Purwakarta	418	74	18.2	167	38	281	60	-93	-207
Karawang	1.067	382	36.7	424	38	1,182	100	-43	-801
Bekasi	1.683	1,141	54.2	672	38	1,130	60	469	12
Bandung Barat	743	158	22.2	297	38	834	100	-140	-677
Pangandaran	176	75	43.8	69	38	112	60	6	-37
Kota Bogor	780	799	93.4	306	38	840	100	493	-41
Kota Sukabumi	184	174	99.2	74	38	208	100	100	-34
Kota Bandung	1.496	1,335	85.6	588	38	1,613	100	747	-279
Kota Cirebon	216	179	84.3	85	38	233	100	94	-55
Kota Bekasi	954	818	70.2	377	38	1,040	100	441	-222
Kota Depok	781	529	56.2	312	38	874	100	217	-345
Kota Cimahi	216	225	95.9	86	38	242	100	139	-17
Kota Tasikmalaya	271	216	85.9	108	38	301	100	108	-85
Kota Banjar	76	68	97.6	30	38	83	100	38	-16
Provinsi Jawa Barat	23.021	11,666	54,5	9,119		20,112			

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tingkat layanan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat sudah tergolong baik sebesar 54,5% sampah terkelola dan sudah melampaui target sampah terkelola tahun 2029 sebesar 38%, akan tetapi masih berada dibawah target tahun 2034 sebesar 60%. Kawasan perkotaan sudah memiliki tingkat layanan pengelolaan sampah yang tinggi (lebih dari 70%). Oleh karena itu, target pelayanan hingga tahun 2034 ditingkatkan menjadi 100% agar seluruh kawasan perkotaan terlayani akses persampahan. Hal tersebut menyebabkan, pelayanan menjadi defisit sehingga perlu penanganan pada kawasan perkotaan terutama pada WM seperti Cekungan Bandung dan Cirebon Raya.

Masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat pengelolaan sampah rendah diantaranya Kabuapten Tasikmalaya (7,2%), Kabupaten Majalengka (13,8%), dan Kabupaten Sumedang (14,6%). Sementara itu, tingkat daur ulang sampah di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 7,7% dari total timbunan sampah terangkut (kurang dari target tahun 2034 sebesar 25%). Perlu direncanakan beberapa TPST terutama pada permukiman padat penduduk untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah di Provinsi Jawa Barat.

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat

Infrastruktur prasarana strategis yang dibutuhkan diantaranya adalah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Kebutuhan infrastruktur ini didasarkan dari proyeksi penduduk dalam lima dan sepuluh tahun ke depan, yaitu di tahun 2029 dan 2034.

A. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Kebutuhan infrastruktur SD/MI di Provinsi Jawa Barat didasarkan dari proyeksi penduduk usia 05-09 tahun di tahun 2029 dan 2034. Perbandingan kapasitas SD/MI, dengan asumsi satu SD/MI mampu menampung 192 murid, dengan proyeksi penduduk di kedua tahun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Kebutuhan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Prov. Jawa Barat	Penduduk Usia 05-09 (2024)	Proyeksi Penduduk (2029)	Proyeksi Penduduk (2034)	Jumlah SD + MI (2024)	Kapasitas SD + MI	Perbandin gan 2029	Perban dengan 2034
Bogor	540.233	571.795	605.202	2.560	491.520	0,86	0,81
Sukabumi	260.191	272.334	285.043	1.562	299.904	1,10	1,05
Cianjur	251.770	265.332	279.624	1.479	283.968	1,07	1,02
Bandung	333.965	348.770	364.232	1.602	307.584	0,88	0,84
Garut	268.914	285.866	303.887	1.872	359.424	1,26	1,18
Tasikmalaya	155.909	161.700	167.706	1.287	247.104	1,53	1,47
Ciamis	93.877	96.741	99.692	912	175.104	1,81	1,76
Kuningan	99.580	104.478	109.617	751	144.192	1,38	1,32
Cirebon	215.023	228.820	243.502	1.003	192.576	0,84	0,79
Majalengka	107.486	112.299	117.327	759	145.728	1,30	1,24
Sumedang	94.910	98.458	102.138	678	130.176	1,32	1,27
Indramayu	165.064	173.968	183.352	1.021	196.032	1,13	1,07
Subang	132.099	139.086	146.443	984	188.928	1,36	1,29
Purwakarta	97.448	103.799	110.564	489	93.888	0,90	0,85
Karawang	238.225	252.214	267.025	1.128	216.576	0,86	0,81
Bekasi	320.922	341.507	363.413	1.309	251.328	0,74	0,69
Bandung Barat	167.254	178.382	190.251	910	174.720	0,98	0,92
Pangandaran	32.004	32.981	33.988	348	66.816	2,03	1,97
Kota Bogor	99.116	103.290	107.640	343	65.856	0,64	0,61
Kota Sukabumi	32.676	34.948	37.378	153	29.376	0,84	0,79
Kota Bandung	208.421	217.318	226.594	563	108.096	0,50	0,48

Prov. Jawa Barat	Penduduk Usia 05-09 (2024)	Proyeksi Penduduk (2029)	Proyeksi Penduduk (2034)	Jumlah SD + MI (2024)	Kapasitas SD + MI	Perbandin gan 2029	Perban dian 2034
Kota Cirebon	29.967	31.264	32.617	186	35.712	1,14	1,09
Kota Bekasi	217.541	228.216	239.414	773	148.416	0,65	0,62
Kota Depok	168.512	179.425	191.046	576	110.592	0,62	0,58
Kota Cimahi	46.358	49.417	52.678	140	26.880	0,54	0,51
Kota Tasik	63.586	67.391	71.424	282	54.144	0,80	0,76
Kota Banjar	16.075	16.950	17.872	112	21.504	1,27	1,20
Prov. Jawa Barat	4.457.126	4.696.749	4.945.194	23.782	4.566.144	0,97	0,92

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Provinsi Jawa Barat secara umum belum mampu untuk memenuhi kebutuhan SD/MI di tahun 2029 dan 2034. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya sebesar 97% di tahun 2029 dan 92% di tahun 2034 yang berarti bahwa di tahun 2029 sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan untuk menampung 97% kebutuhan, sedangkan tahun 2034 sebesar 92% kebutuhan. Provinsi Jawa Barat masih memiliki kekurangan kapasitas SD/MI sebesar 3% tahun 2029 dan 8% di tahun 2034.

Kabupaten Pangandaran memiliki nilai tertinggi sebesar 203% di tahun 2029 dan 197% tahun 2034. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran mampu memenuhi kebutuhan SD/MI bagi penduduknya di tahun 2029 dan 2034 serta memiliki surplus kapasitas sebesar 103% dan 97%. Adanya surplus kapasitas ini akan menguntungkan ketika terjadi pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar.

Kota Bandung memiliki nilai terendah sebesar 50% tahun 2029 dan 48% tahun 2034. Hal ini berarti bahwa Kota Bandung hanya mampu memenuhi kebutuhan SD/MI sebesar 50% di tahun 2029 dan 48% di tahun 2034. Di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki nilai perbandingan yang paling rendah sehingga perlu menjadi prioritas penanganan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SD/MI di Provinsi Jawa Barat.

B. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Kebutuhan infrastruktur SMP/MTs di Provinsi Jawa Barat didasarkan dari proyeksi penduduk usia 10-14 tahun di tahun 2029 dan 2034. Perbandingan kapasitas SMP/MTs, dengan asumsi satu SMP/MTs mampu menampung 324 murid, dengan proyeksi penduduk di kedua tahun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.11 Kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Prov. Jawa Barat	Penduduk Usia 10-14 (2024)	Proyeksi Penduduk (2029)	Proyeksi Penduduk (2034)	Jumlah SMP + MTs (2024)	Kapasitas SMP + MTs	GAP 2029	GAP 2034
Bogor	539.704	571.236	604.609	1.142	370.008	0,65	0,61
Sukabumi	257.581	269.602	282.184	705	228.420	0,85	0,81
Cianjur	249.658	263.106	277.278	617	199.908	0,76	0,72
Bandung	350.193	365.718	381.931	617	199.908	0,55	0,52
Garut	272.774	289.970	308.249	735	238.140	0,82	0,77

Prov. Jawa Barat	Penduduk Usia 10-14 (2024)	Proyeksi Penduduk (2029)	Proyeksi Penduduk (2034)	Jumlah SMP + MTs (2024)	Kapasitas SMP + MTs	GAP 2029	GAP 2034
Tasikmalaya	162.726	168.771	175.039	531	172.044	1,02	0,98
Ciamis	993.36	102.367	105.490	253	81.972	0,80	0,78
Kuningan	1.020.56	107.076	112.343	185	59.940	0,56	0,53
Cirebon	2.068.51	220.124	234.249	357	115.668	0,53	0,49
Majalengka	111.275	116.258	121.463	218	70.632	0,61	0,58
Sumedang	97.620	101.270	105.055	214	69.336	0,68	0,66
Indramayu	165.299	174.216	183.613	309	100.116	0,57	0,55
Subang	137.437	144.707	152.361	258	83.592	0,58	0,55
Purwakarta	96.935	103.253	109.982	187	60.588	0,59	0,55
Karawang	234.128	247.877	262.434	287	92.988	0,38	0,35
Bekasi	321.630	342.261	364.215	581	188.244	0,55	0,52
Bandung Barat	170.824	182.190	194.313	355	115.020	0,63	0,59
Pangandaran	33.440	34.462	35.514	90	29.160	0,85	0,82
Kota Bogor	99.829	104.034	108.415	183	59.292	0,57	0,55
Kota Sukabumi	32.244	34.486	36.884	75	24.300	0,70	0,66
Kota Bandung	213.879	223.009	232.528	316	102.384	0,46	0,44
Kota Cirebon	30.491	31.811	33.188	66	21.384	0,67	0,64
Kota Bekasi	216.109	226.714	237.839	392	127.008	0,56	0,53
Kota Depok	172.368	183.532	195.418	346	112.104	0,61	0,57
Kota Cimahi	48.035	51.205	54.584	67	21.708	0,42	0,40
Kota Tasik	64.798	68.676	72.786	149	48.276	0,70	0,66
Kota Banjar	16.527	17.427	18.375	43	13.932	0,80	0,76
Prov. Jawa Barat	4.503.747	4.745.358	5.000.339	9.278	3.006.072	0,63	0,60

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Provinsi Jawa Barat secara umum belum mampu untuk memenuhi kebutuhan SMP/MTs di tahun 2029 dan 2034. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya sebesar 63% di tahun 2029 dan 60% di tahun 2034 yang berarti bahwa di tahun 2029 sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat hanya memiliki kemampuan untuk menampung 63% kebutuhan, sedangkan tahun 2034 sebesar 60% kebutuhan. Provinsi Jawa Barat masih memiliki kekurangan kapasitas SMP/MTs sebesar 37% tahun 2029 dan 40% di tahun 2034.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai tertinggi di antara sebluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 102% di tahun 2029 dan 98% tahun 2034. Di tahun 2029, Kabupaten Tasikmalaya memiliki surplus sebesar 2%, sedangkan tahun 2034 terjadi kekurangan kapasitas SMP/MTs sebesar 2%.

Kabupaten Karawang memiliki nilai terendah sebesar 38% tahun 2029 dan 35% tahun 2034. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Karawang hanya mampu memenuhi kebutuhan SMP/MTS sebesar 38% di tahun 2029 dan 35% di tahun 2034. Di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki nilai perbandingan yang paling rendah sehingga perlu menjadi prioritas penanganan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SMP/MTS di Provinsi Jawa Barat.

C. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA)

Kebutuhan infrastruktur SMA/MA di Provinsi Jawa Barat didasarkan dari proyeksi penduduk usia 15-19 tahun di tahun 2029 dan 2034. Perbandingan kapasitas SMA/MA, dengan asumsi satu SMA/MA mampu menampung 432 murid, dengan proyeksi penduduk di kedua tahun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.12 Kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Penduduk Usia 15-19 (2024)	Proyeksi Penduduk (2029)	Proyeksi Penduduk (2034)	Jumlah SMA + MA (2024)	Kapasitas SMA + MA	GAP 2029	GAP 2034
Bogor	452.118	478.533	506.490	366	158.112	0.33	0.31
Sukabumi	196.899	206.088	215.706	241	104.112	0.51	0.48
Cianjur	180.282	189.993	200.227	183	79.056	0.42	0.39
Bandung	304.612	318.117	332.219	257	111.024	0.35	0.33
Garut	221.276	235.225	250.054	282	121.824	0.52	0.49
Tasikmalaya	136.277	141.339	146.589	176	76.032	0.54	0.52
Ciamis	92.985	95.822	98.745	93	40.176	0.42	0.41
Kuningan	94.582	99.235	104.115	67	28.944	0.29	0.28
Cirebon	168.933	179.773	191.308	126	54.432	0.30	0.28
Majalengka	96.587	100.912	105.431	64	27.648	0.27	0.26
Sumedang	89.000	92.327	95.779	56	24.192	0.26	0.25
Indramayu	131.515	138.610	146.086	85	36.720	0.26	0.25
Subang	106.244	111.864	117.781	90	38.880	0.35	0.33
Purwakarta	81.995	87.339	93.032	71	30.672	0.35	0.33
Karawang	190.016	201.175	212.989	84	36.288	0.18	0.17
Bekasi	267.541	284.703	302.964	181	78.192	0.27	0.26
Bandung Barat	143.601	153.156	163.347	143	61.776	0.40	0.38
Pangandaran	33.307	34.325	35.373	26	11.232	0.33	0.32
Kota Bogor	89.318	93.080	97.000	76	32.832	0.35	0.34
Kota Sukabumi	30.736	32.874	35.159	41	17.712	0.54	0.50
Kota Bandung	196.220	204.596	213.329	176	76.032	0.37	0.36
Kota Cirebon	29.725	31.012	32.354	37	15.984	0.52	0.49
Kota Bekasi	196.616	206.265	216.386	150	64.800	0.31	0.30
Kota Depok	159.246	169.560	180.541	113	48.816	0.29	0.27
Kota Cimahi	46.732	49.816	53.104	28	12.096	0.24	0.23
Kota Tasik	61.962	65.671	69.601	68	29.376	0.45	0.42
Kota Banjar	16.108	16.985	17.909	13	5.616	0.33	0.31
Prov. Jawa Barat	3.814.433	4.018.381	4.233.605	3.293	1.422.576	0.35	0.34

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Provinsi Jawa Barat secara umum belum mampu untuk memenuhi kebutuhan SMA/MA di tahun 2029 dan 2034. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya sebesar 35% di tahun 2029 dan 34% di tahun 2034 yang berarti bahwa di tahun 2029 sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan untuk menampung 35% kebutuhan, sedangkan tahun 2034 sebesar 34% kebutuhan. Provinsi Jawa Barat memiliki kekurangan kapasitas SMA/MA sebesar 65% tahun 2029 dan 66% di tahun 2034.

Kota Sukabumi memiliki nilai tertinggi sebesar 54% di tahun 2029 dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai tertinggi sebesar 54% di tahun 2034. Meskipun memiliki nilai

tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya juga masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan SMA/MA. Nilai perbandingan tersebut juga berarti bahwa Kota Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki kekurangan kapasitas SMA/MA sebesar 46% di tahun 2029 dan 2034.

Kabupaten Karawang memiliki nilai terendah sebesar 18% tahun 2029 dan 17% di tahun 2034. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Karawang hanya mampu memenuhi kebutuhan SMA/MA sebesar 18% di tahun 2029 dan 17% di tahun 2034. Di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki nilai perbandingan yang paling rendah sehingga perlu menjadi prioritas penanganan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SMA/MA di Provinsi Jawa Barat

7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan industri prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat adalah KI Cipali West Subang, KI Cipali Indramayu, KI Cirebon, KI Losarang, KI Krangkeng, dan KI Balongan pada Kawasan Industri Rebana, serta KI Bekasi Industrial Estate, KI MM 2100, KI Jababeka, KI East Jakarta Industrial Park, KI Lippo Cikarang, dan KI Cibinong Industrial Estate pada Kawasan Industri Bodebek. Perhitungan kebutuhan infrastruktur Kawasan Industri Bodebek tidak dilakukan karena kawasan tersebut dijelaskan pada dokumen RPIW Jabodetabek Tahun 2029-2034.

1) Kawasan Industri

Kawasan Rebana ditetapkan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 sebagai pusat pengembangan industri di wilayah timur Provinsi Jawa Barat, dengan kontribusi PDRB provinsi 21,22%. Tingginya kontribusi ekonomi tersebut didukung oleh keberadaan 3 (tiga) kawasan strategis yaitu Kawasan Industri Subang, Pelabuhan Patimban, dan Aerocity Kertajati. Sementara itu, dalam RPJMN 2025-2029 kawasan industri di Jawa Barat Utara juga mencakup Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang saat ini berkontribusi besar terhadap PDRB Jawa Barat dari sektor industri sebesar 22,97%.

Dalam pengembangannya, industri di Kawasan Rebana terbagi menjadi 5 klaster pengembangan, yaitu: Subang sebagai klaster industri pengolahan makanan dan minuman, logam, transportasi, dan manufaktur; Indramayu sebagai klaster industri perikanan, petrokimia, perkapalan, dan plastik; Majalengka sebagai klaster industri pertahanan, logistik, dan dirgantara; Cirebon sebagai klaster industri furnitur, bahan bangunan, dan perikanan.

Tabel 7.13 Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Jawa Barat

No	Nama	Kawasan Prioritas	Jenis Industri	Luas (Ha)	Status Operasi (2025)	Perusahaan Terkait
1	KPI Patimban (Subang)	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban	- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, - Industri pengolahan makanan dan minuman, - Logistik dan Pergudangan Terpadu	542	Dalam Pengembangan	PT. Wahana Mitra Semesta , PT. Patimban International Car Terminal
2	KPI Cipali Subang Barat (Subang)		- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, - Industri pengolahan makanan dan Minuman, dan - Industri karton dan kertas	10.408	KPI Cipali Subang Barat	PT. Surya Cipta BYD
3	KPI Cipali Subang Timur (Subang)		- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, - Industri pengolahan makanan dan minuman, - Logistik (dry port), - Industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan), - Industri pengolahan Makanan dan Minuman, - Industri pertahanan	4.806	Dalam Pengembangan	VinFast
10	KPI Kertajati-Jatitujuh (Majalengka)	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	- Penerbangan; - Cargo/logistik; - Industri elektronik, sensor, robotika; - Industri alat angkut berbasis elektrik; - Industri pertahanan; - Industri tekstil; - Industri pengolahan makanan dan minuman; - Industri resin sintetik dan plastik	1.415	Dalam Pengembangan	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) , PT. Dwipapuri Abadi
11	KPI Jatiwangi (Majalengka)		- Industri tekstil, - Industri pengolahan makanan dan minuman, - Industri resin sintetik dan plastik, - Industri bahan bangunan, - Industri pengolahan hotmix dan beton, - Industri furnitur dan barang dari kayu	972	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.
13	KPI Cirebon (Cirebon)		- Industri pengolahan makanan dan minuman, - Industri furnitur dan barang dari kayu, - Industri perkapalan, - Industri pakan, - Industri bahan galian non logam, - Industri bahan bangunan, - Industri pengolahan garam konsulasi,	1.815	Beroperasi	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk.

No	Nama	Kawasan Prioritas	Jenis Industri	Luas (Ha)	Status Operasi (2025)	Perusahaan Terkait
			- Industri pengolahan hotmix dan beton			
4	KPI Krangkeng (Indramayu)	Non Kawasan	- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri bahan penolong, - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, - Industri hulu agro, - Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastic, - Industri pengolahan bahan makanan, - Industri Perkapalan	3.452	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.
5	KPI Patrol (Indramayu)		- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri pengolahan ikan, - Industri bahan penolong, - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, - Industri hulu agro, - Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastik, - Industri perkapalan	414	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.
6	KPI Losarang (Indramayu)		- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri pengolahan ikan, - Industri bahan penolong, - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, - Industri hulu agro, - Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastik	6.710	Dalam Pengembangan/Konstruksi	PT Food Packaging Jaya
7	KPI Balongan (Indramayu)		- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri pengolahan ikan, - Industri bahan penolong, - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, - Industri hulu agro, - Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastik,	2.122	Beroperasi	PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan
8	KPI Tukdana (Indramayu)		- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri pengolahan makanan dan minuman, - Industri mesin dan alat-alat pertanian, - Industri bahan penolong, - Industri hulu agro,	563	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.

No	Nama	Kawasan Prioritas	Jenis Industri	Luas (Ha)	Status Operasi (2025)	Perusahaan Terkait
9	KPI Cipali Indramayu (Indramayu)		- Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastik	2.875	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.
			- Industri kimia hulu (pengolahan garam), - Industri pengolahan ikan, - Industri bahan penolong, - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, - Industri hulu agro, - Industri petrokimia hulu, - Industri resin sintetik dan bahan plastic, - Industri pengolahan bahan makanan, - Industri metal stamping electrical automotif, - Industri knitting (rajut) dan garmen, - Industri Ban dalam dan ban luar sepeda motor			
12	KPI Butom (Sumedang)		- Industri pengolahan makanan dan minuman, - Industri Tekstil, - Logistik dan Pergudangan, - Agroindustri, - Industri furnitur dan barang dari kayu	4.092	Belum Beroperasi	Data spesifik mengenai perusahaan belum tersedia.
Total Luas				33.476		

Sumber: Badan Pengelola Reban diolah BPIW, 2025



2) Analisis Kebutuhan Air Baku Kawasan Industri

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kawasan industri didasarkan pada luasan kawasan industri yang telah terokupansi dan Program Prioritas sesuai yang tercantum dalam Rencana Induk Kawasan Rebana. Berdasarkan data tabel, total proyeksi okupansi untuk enam Kawasan Industri (KI) Prioritas di Rebana pada tahun 2025 adalah 1.526 Ha. Rincian okupansi ini terdiri dari 499 Ha di Kabupaten Cirebon, 429 Ha di Kabupaten Majalengka, 407 Ha di Kabupaten Indramayu (gabungan KPI Losarang dan Balongan), serta 191 Ha di Kabupaten Subang (gabungan KPI Cipali Subang Barat dan Patimban). Proyeksi okupansi lahan ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 1.714,25 Ha pada tahun 2029 dan mencapai 1.978,51 Ha pada tahun 2034.

Tabel 7.14 Proyeksi Okupansi Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Luas Total (Ha)	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)		
			2025	2029	2034
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban					
1	KPI Cipali Subang Barat	10.408	624	2.581	5.027
2	KPI Cipali Subang Timur	4.806	120	1057	2229
3	KPI Patimban	542	79	172	287
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati					
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	1.415	429	626	873
5	KPI Cirebon	1.816	499	762	1.092
Total		18.987	1.752	5.199	9.508

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Okupansi KI yang telah diproyeksikan kemudian dijadikan dasar dalam menghitung kebutuhan air industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, kebutuhan air kawasan industri adalah 0,55–0,75 L/detik/ha. Dalam dokumen ini, digunakan standar 0,55 L/detik/ha dalam perhitungan. Hasil perhitungan kebutuhan air industri di Kawasan Strategis Rebana dapat dilihat pada Tabel 7.15.

Tabel 7.15 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Proyeksi Kebutuhan Air Industri (L/detik)		
		2025	2029	2034
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban				
1	KPI Cipali Subang Barat	344	1.420	2.765
2	KPI Cipali Subang Timur	66	581	1.226
3	KPI Patimban	43	94	158
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati				
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	236	344	480
5	KPI Cirebon	274	419	600
Total		964	2.859	5.229

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain pertambahan luas okupansi, pertumbuhan kawasan industri juga menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja. Berdasarkan Permenperin Nomor 40 Tahun 2016, per hektar lahan di kawasan industri dapat menyerap 100 tenaga kerja.

Tabel 7.16 Pertumbuhan Tenaga Kerja Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Proyeksi Pertumbuhan Tenaga Kerja		
		2025	2029	2034
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban				
1	KPI Cipali Subang Barat	62.485	258.148	502.727
2	KPI Cipali Subang Timur	12.000	105.720	222.870
3	KPI Patimban	7.900	17.160	28.735
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati				
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	42.900	62.620	87.270
5	KPI Cirebon	49.900	76.240	109.165
Total		175.185	519.888	950.767

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pertumbuhan tenaga kerja ini selain meningkatkan aktivitas, juga meningkatkan kebutuhan air kawasan industri. Berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996), standar kebutuhan air minum perkotaan adalah 90 L/orang/hari. Hasil proyeksi kebutuhan air tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 7.17.

Tabel 7.17 Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja (L/detik)		
		2025	2029	2034
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban				
1	KPI Cipali Subang Barat	65,1	268,9	523,7
2	KPI Cipali Subang Timur	12,5	110,1	232,2
3	KPI Patimban	8,2	17,9	29,9
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati				
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	44,7	65,2	90,9
5	KPI Cirebon	52,0	79,4	113,7
Total		182,5	541,6	990,4

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil proyeksi kebutuhan air industri dan tenaga kerja kemudian dijumlahkan seperti dalam Tabel 7.18.

Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja (L/detik)		
		2025	2029	2034
	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban			

No	Kawasan Industri	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja (L/detik)		
		2025	2029	2034
1	KPI Cipali Subang Barat	408,8	1.688,7	3.288,7
2	KPI Cipali Subang Timur	78,5	691,6	1.457,9
3	KPI Patimban	51,7	112,3	188,0
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati				
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	280,6	409,6	570,9
5	KPI Cirebon	326,4	498,7	714,1
Total		1.146,0	3.400,9	6.219,6

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari segi penyediaan air, Kawasan Rebana disuplai oleh berbagai sumber air baku. Sumber air baku untuk Kawasan Rebana bisa memanfaatkan dari Bendungan Sadawarna, Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas, dan beberapa rencana bendungan lainnya. Terdapat 4 kawasan industri di Kawasan Rebana yang sudah teraliri air baku dari berbagai sumber. Kawasan Industri di Kabupaten Subang mendapatkan air baku dari PDAM Kabupaten Subang Unit Purwadadi (8 L/dtk), PDAM Kabupaten Subang Unit Subang 170 L/dtk, dan SPAM Cipunegara 5 L/dtk. Sementara untuk Kawasan Industri di Majalengka mendapatkan air dari Waduk Jatigede dan SPAM Cipanas 850 L/dtk.

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kegiatan industri menimbulkan bangkitan lalu lintas, terutama dari kawasan industri menuju outletnya (pelabuhan). Bangkitan lalu lintas industri dihitung berdasarkan Permenperin 40/2016 dimana diasumsikan bangkitan lalu lintas sebesar 5,5 smp/hari/hektar. Luas kawasan yang dihitung adalah luas kawasan yang telah terokupansi dengan perkiraan waktu efektivitas pekerja industri dalam sehari selama 10 jam. Proyeksi bangkitan lalu lintas berasal dari kawasan industri prioritas di Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 7.19 Proyeksi Bangkitan Lalulintas Kawasan Industri Prioritas

No	Kawasan Industri	Proyeksi Bangkitan Kendaraan (smp/hari)		
		2025	2029	2034
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban				
1	KPI Cipali Subang Barat	3.437	14.198	27.650
2	KPI Cipali Subang Timur	660	5.815	12.258
3	KPI Patimban	435	944	1.580
Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati				
4	KPI Kertajati-Jatitujuh	2.360	3.444	4.800
5	KPI Cirebon	2.745	4.193	6.004
Total		178.586	526.108	950.767

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Proyeksi bangkitan kendaraan terbesar di Kawasan Rebana terjadi akibat perkembangan kawasan industri yang relatif sudah berkembang dan dikelola baik yaitu di KI di Kabupaten Indramayu dengan bangkitan mencapai 1.659 smp/hari, diikuti dengan KI di Kabupaten Cirebon (466 smp/hari). Perkembangan kawasan industri dengan komoditas petrokimia, plastik, logam, transportasi dan elektronik yang berorientasi ekspor mengakibatkan tingginya bangkitan arus logistik dari kawasan industri menuju ke Pelabuhan Patimban.

Selain dari dalam wilayah Rebana, bangkitan logistik ditimbulkan juga dari kawasan industri pengguna Pelabuhan Patimban terutama di wilayah Bekasi dan Karawang. Menghitung lahan industri di Kabupaten Bekasi sebesar 8.800 hektar dan Kabupaten Karawang sebesar 16.368 hektar, diproyeksikan akan terjadi peningkatan arus logistik dari dua kabupaten tersebut sebesar 48 ribu smp/hari (Kabupaten Bekasi) dan 90 ribu smp/hari (Kabupaten Karawang). Bangkitan kendaraan dari luar wilayah Rebana menjadi faktor penting dikarenakan Pelabuhan Patimban merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Jawa Barat yang akan mengubah orientasi ekspor industri yang sebelumnya melalui DKI Jakarta menjadi melalui kawasan Rebana.

Tabel 7.20 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Industri Prioritas (2034)

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	AADT	Lebar	LHR 2020	VCR 2020	LOS 2020	Prakiraan Beban	Prakiraan VCR 2034	LOS 2034
007	Bts. Kab. Subang/Karawang–Bts. Kota Pamanukan	30,69	21.189	14,15	882,88	0,49	A	10.597,88	0,74	C
007.11	Jln. Eyang Tirtayasa (Pamanukan)	1,43	22.352	14,191	931,33	0,48	A	10.646,33	0,71	C
008	Bts. Kota Pamanukan–Sewo	11,13	25.718	14,189	1071,58	0,44	A	10.786,58	0,62	B
008.11	Jln. H. Syahbana (Pamanukan)	0,47	25.718	14,121	1071,58	0,44	A	10.786,58	0,62	B
013	Jatibarang–Bts. Kab. Cirebon/ Indramayu	11,85	18.633	14,202	776,38	0,45	A	3.945,25	0,55	A
014	Bts. Kab. Indramayu/Crb (Cadang Pinggan)	16,17	17.695	11,228	737,29	0,42	A	1.883,29	0,46	A
014.11	Jln. Raya Palimanan 2 (Palimanan)	1,09	17.684	14,218	736,83	0,64	B	1.882,83	0,71	C
015	Bts. Kota Palimanan–Bts Kota Cirebon	8,79	18.754	14,259	781,42	0,89	D	1.927,42	0,98	E
015.11	Jln. Raya Palimanan I (Palimanan)	0,24	18635	14.174	776,46	0,31	A	2.266,46	0,35	A
015.12	Jln. Raya Jamblang (Cirebon)	1,30	18660	14.223	777,50	0,91	E	2.267,50	1,02	F
015.13	Jln. Raya Klagenan (Cirebon)	0,78	18458	14.164	769,08	0,81	D	2.259,08	0,91	E
015.14	Jln. Brigjen. Darsono (Cirebon)	2,65	15928	14.183	663,67	0,9	E	2.153,67	1,02	F
015.15	Jln. Jend. A. Yani (Cirebon)	3,60	17153	14.186	714,71	0,65	B	2.204,71	0,73	C
015.16	Jln. Pilangsari (Cirebon)	2,58	13474	6.991	561,42	0,54	A	2.051,42	0,62	B
015.17	Jln. Slamet Riyadi (Cirebon)	0,44	13785	14.154	574,38	0,34	A	2.064,38	0,39	A
015.18	Jln. Siliwangi (Cirebon)	0,20	13539	14.25	564,13	0,11	A	2.742,13	0,13	A
018	Karangampel–Bts. Kab. Cirebon/ Indramayu	9,92	9785	14.265	407,71	0,3	A	3.129,40	0,40	A
019	Bts.Kab.Cirebon/Indramayu (Singakerta)	17,90	11984	14.183	499,33	0,23	A	2.677,33	0,28	A
019.11	Jln. Raya Panyindangan (Cirebon)	0,31	19217	14.165	800,71	0,58	A	2.978,71	0,67	B
019.12	Jln. Diponegoro (Cirebon)	0,56	19166	14.172	798,58	0,13	A	2.976,58	0,15	A
019.13	Jln. Kapten Samadikun (Cirebon)	1,32	19429	14.146	809,54	0,15	A	2.987,54	0,17	A
019.14	Jln. Sisingamangaraja (Cirebon)	0,90	19836	14.144	826,50	0,3	A	3.004,50	0,35	A
019.15	Jln. Benteng (Cirebon)	0,42	20111	13.124	837,96	0,25	A	3.015,96	0,29	A
019.16	Jln. Yos Sudarso (Cirebon)	0,65	20114	14.185	838,08	0,16	A	3.016,08	0,18	A

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	AADT	Lebar	LHR 2020	VCR 2020	LOS 2020	Prakiraan Beban	Prakiraan VCR 2034	LOS 2034
020	Bts. Kota Cirebon–Losari (Bts. Prov. Jawa Tengah)	27.68	20243	14.253	843,46	0,39	A	3.021,46	0,45	A
020.11	Jln. Kasunean (Cirebon)	0.68	21071	14.174	877,96	0,2	A	3.055,96	0,23	A
020.12	Jln. Kalijaga (Cirebon)	2.39	20360	14.167	848,33	0,3	A	3.026,33	0,34	A

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan perhitungan proyeksi pertumbuhan tenaga kerja, 72% nya merupakan tenaga pendatang yang akan dijumlahkan dengan penduduk lokal tiap kabupaten dengan Kawasan Rebana untuk menghasilkan proyeksi penduduk keseluruhan yang akan digunakan untuk analisis-analisis berikutnya seperti berikut.

Tabel 7.21 Proyeksi Penduduk Keseluruhan di Kawasan Industri Prioritas

No	Kabupaten	Proyeksi Penduduk Keseluruhan		
		2025	2029	2034
1	Subang	1.694.185	1.766.618	1.861.622
2	Cirebon	2.453.816	2.581.587	2.750.867
3	Majalengka	1.395.289	1.447.757	1.516.379

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dalam perhitungan *Supply* dan *Demand* air bersih berbasis populasi, dilakukan berbagai perhitungan. Yang pertama adalah Qd atau kebutuhan air domestik, yang dihitung langsung berdasarkan populasi penduduk, dalam hal ini dibagi per kabupaten delineasi Kawasan Industri menggunakan standar yang diletakkan dalam RISPAM. Kemudian Qnd atau kebutuhan air non domestik berbasis populasi dihitung sebagai bagian dari Qd, sebesar 20%. Setelah dijumlahkan, dikalikan dengan Fmd atau Faktor Maksimum per harinya yang sudah dijumlahkan dengan (1+k), dimana k adalah persentase kehilangan air secara umum, sebesar 20%. Dari perhitungan tersebut, akan didapat Qt atau kebutuhan total air bersih berbasis populasi. Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat dalam tabel kebutuhan air domestik dan nondomestik berbasis populasi sebagai berikut:

Tabel 7.22 Proyeksi Air Domestik dan Non Domestik berbasis Populasi di Kawasan Industri Prioritas

No	Kabupaten	Kebutuhan Total Air Bersih (Liter/Detik)		
		2025	2029	2034
1	Subang	4,037.8	4,210.4	4,436.9
2	Cirebon	5,848.3	6,152.8	6,556.2
3	Majalengka	3,325.4	3,450.5	3,614.0
Total		13,211.5	13,813.7	14,607.1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, air limbah pada kegiatan domestik terdiri dari dua jenis, yakni *grey water* yang dihasilkan dari kegiatan non kakus dan *black water* yang dihasilkan dari kegiatan kakus. Dalam menentukan *demand* infrastruktur pengelolaan air limbah, digunakan timbulan air limbah yang diproyeksikan berdasarkan jumlah penduduk suatu wilayah dan kebutuhan air bersih. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017, standar timbulan *black water* dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Produksi Black Water} = (0,5 \text{ liter}) \times \text{Jumlah Penduduk}$$

Berikut proyeksi timbulan air limbah *black water* untuk KI di Kawasan Rebana

Tabel 7.23 Proyeksi Timbulan *Black Water* di Kawasan Industri Prioritas

No	Kabupaten	Produksi <i>Black Water</i> (Liter/Orang/Detik)		
		2025	2029	2034
1	Subang	9.8	10.2	10.8
2	Cirebon	14.2	14.9	15.9
3	Majalengka	8.1	8.4	8.8
Total		32.1	33.5	35.5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 juga, maka standar timbulan air limbah jenis *grey water* dapat dirumuskan sebagai berikut.

Produksi Grey Water = 80% x Kebutuhan air bersih

Berikut adalah proyeksi timbunan air limbah *grey water* domestik dan *non* domestik untuk KI di Kawasan Rebana

Tabel 7.24 Proyeksi Timbulan *Greywater* di Kawasan Industri Prioritas

No	Kabupaten	Produksi Greywater (liter/orang/detik)					
		2025		2029		2034	
		Domestik	Non-D	Domestik	Non-D	Domestik	Non-D
1	Subang	2.039,3	407,9	2.126,5	425,3	2.240,8	448,2
2	Cirebon	2.953,7	590,7	3.107,5	621,5	3.311,2	662,2
3	Majalengka	1.679,5	335,9	1.742,7	348,5	1.825,3	365,1
Total		6.672,5	1.334,5	6.976,7	1.395,3	7.377,3	1.475,5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selanjutnya dilakukan analisis gap antara *supply* dan *demand* air limbah jenis *grey water* untuk mengidentifikasi selisih antara kapasitas pengelolaan yang tersedia dengan kebutuhan pada tahun tertentu di Kawasan Rehana menggunakan rumus berikut.

$$\text{Gap Grey Water} = \text{Kapasitas IPAL} - \text{Timbunan Grey Water}$$

Tabel 7.25 Total Gap *Supply* dan *Demand* Air Limbah di Kawasan Industri Prioritas

Tahun	Supply (L/hari)	Demand (L/hari)	Gap (L/hari)
2025	0	6.672,5	-6.672,5
2029	0	6.976,7	-6.976,7
2034	0	7.377,3	-7.377,3

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.26 Rincian Gap *Supply* dan *Demand* Air Limbah Kabupaten

Kabupaten	Gap akumulatif grey water (Liter/Detik)		
	2025	2029	2034
Subang	-2.039,3	-2.126,5	-2.240,8
Cirebon	-2.953,7	-3.107,5	-3.311,2
Majalengka	-1.679,5	-1.742,7	-1.825,3

Total	-6.672,5	-6.976,7	-7.3773
-------	----------	----------	---------

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kesenjangan nilai negatif yang signifikan antara suplai dan permintaan air limbah *grey water* di seluruh kabupaten yang dianalisis. Tabel menunjukkan bahwa total kesenjangan pada tahun 2025 mencapai -9.036 liter/detik dan diproyeksikan terus membesar hingga -9.982,2 liter/detik pada tahun 2034. Nilai negatif yang besar dan terus meningkat ini secara jelas menandakan bahwa kapasitas pengolahan air limbah (*supply*) yang ada tidak memadai untuk menangani volume timbulan *greywater (demand)* di Kawasan Rebana, sehingga pembangunan IPAL menjadi sangat dibutuhkan.

Dalam pemilihan jenis SPAL Domestik tiap desa nya, Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 telah mengaturnya dengan ketentuan wilayah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/ha maka sistem pengelolaan air limbah yang sesuai adalah SPAL-D Terpusat, sementara wilayah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha, sistem pengelolaan air limbah yang sesuai adalah SPAL-D Setempat.

Tabel 7.27 Kebutuhan Jenis SPAL-D per Kepadatan Penduduk

Kabupaten	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)			Jenis Kebutuhan SPAL-D
		2025	2029	2034	
Subang	20.5177	9	9	10	SPAL-D Setempat
Cirebon	98.452	25	27	28	SPAL-D Setempat
Majalengka	120.424	12	13	13	SPAL-D Setempat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain itu, Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk > 5.000 jiwa/km² maka teknologi pengelolaan air limbah yang direncanakan adalah SPAL-D Terpusat skala kawasan menggunakan IPAL Komunal, sementara wilayah dengan kepadatan penduduk < 5.000 jiwa/km², teknologi pengelolaan air limbahnya adalah SPAL-D Setempat dengan skala individual maupun komunal.

Tabel 7.28 Kebutuhan Teknologi SPAL-D per Desa Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Kabupaten	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)			Jenis Kebutuhan SPAL-D
		2025	2029	2034	
Subang	2051.77	826	862	908	SPAL-D Setempat
Cirebon	984.52	2493	2623	2795	SPAL-D Setempat
Majalengka	1204.24	1159	1203	1260	SPAL-D Setempat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis diatas, seluruh Kabupaten di Kawasan Rebana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017, wilayah dengan kepadatan penduduk di bawah 5.000 jiwa/km² menggunakan teknologi SPAL-D

Setempat. Data tabel menunjukkan bahwa proyeksi kepadatan penduduk di ketiga kabupaten tersebut hingga tahun 2034 seluruhnya berada di bawah ambang batas tersebut. Oleh karena itu, jenis kebutuhan teknologi yang direkomendasikan untuk keempat kabupaten ini adalah SPAL-D Setempat.

Tabel 7.29 Rekomendasi Kebutuhan Penambahan Jumlah IPAL Skala Permukiman

Kabupaten	2029		2034	
	Gap Akumulatif (L/detik)	Kebutuhan IPAL Akumulatif	Gap Akumulatif (L/detik)	Kebutuhan IPAL Akumulatif
Subang	2,126.5	-92	2,240.8	-97
Cirebon	3,107.5	-135	3,311.2	-144
Majalengka	1,742.7	-76	1,825.3	-79
Total	6,976.70	-303	7,377.30	-320

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada tabel diatas disajikan rekomendasi kebutuhan penambahan jumlah IPAL skala permukiman untuk Kabupaten Subang, Cirebon, dan Majalengka. Pada tahun 2029, total kesenjangan (gap) air limbah akumulatif untuk ketiga kabupaten tersebut mencapai 6.976,7 liter/detik, sehingga diperlukan penambahan IPAL secara total sebanyak 408 unit. Kebutuhan ini diproyeksikan terus meningkat pada tahun 2034, di mana total kesenjangan mencapai 7.377,3 liter/detik.

Dengan asumsi timbulan sampah rumah permanen = 2,5 l/orang/hari (SNI S-04-1993-03), pada tahun 2025 timbulan persampahan seperti tabel di di bawah untuk masing-masing kelurahan berdasarkan kapasitas pelayanan penduduk SNI 3242-2008. Selain itu, asumsi berat jenis sampah yang digunakan adalah 0,4 kg/l (Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2013). Berdasarkan analisis pada tabel dibawah, total timbulan sampah domestik pada tahun 2025 untuk tiga kabupaten adalah sebesar 13.858 m³/hari. Dengan total berat mencapai 2.217,3 ton/hari, data ini mengindikasikan densitas sampah rata-rata sekitar 0,16 kg/liter. Tabel tersebut juga memproyeksikan peningkatan volume sampah secara bertahap, yang diperkirakan akan mencapai 15.322 m³/hari pada tahun 2034. Berdasarkan data ini, laju peningkatan timbulan sampah rata-rata dari tahun 2025 hingga 2034 adalah sekitar 1,12% per tahun.

Tabel 7.30 Analisis Timbulan Sampah Domestik Kawasan Industri Prioritas

Kabupaten	2025		2029		2034	
	Timbulan Sampah (m3)	Berat Sampah (kg/o//h)	Timbulan Sampah (m3)	Berat Sampah (kg/o//h)	Timbulan Sampah (m3)	Berat Sampah (kg/o//h)
Subang	4.235	677,7	4.417	706,6	4.654	744,6
Cirebon	6.135	981,5	6.454	1.032,6	6.877	1.100,3
Majalengka	3.488	558,1	3.619	579,1	3.791	606,6
Total	13,858.0	2,217.3	14,490.0	1,285.7	15,322.0	2,451.5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain itu terdapat timbulan sampah non domestik dengan total per kategori dengan ketentuan berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan sampah non domestik Komersial berkisar 15%, Fasum berkisar 5%, Industri Kecil & Menengah 5%, Konstruksi dan Pembongkaran 1%, dan Institusi/Publik berkisar 3% dari timbulan sampah domestik. Didapatkan timbulan sampah non domestik sebagai berikut:

Tabel 7.31 Analisis Timbulan Sampah Non Domestik Kawasan Industri Prioritas

Kabupaten	2025 (m3/orang/hari)				
	Komersial	Fasum	Industri Kecil & Menengah	Konstruksi	Institusi/ Publik
Subang	635.3	211.8	211.8	42.4	127.1
Cirebon	920.2	306.7	306.7	61.3	184.0
Majalengka	523.2	174.4	174.4	34.9	104.6
Total	4,286.5	1,428.8	1,428.8	285.8	857.3

Kabupaten	2029 (m3/orang/hari)				
	Komersial	Fasum	Industri Kecil & Menengah	Konstruksi	Institusi/ Publik
Subang	662.5	220.8	220.8	44.2	132.5
Cirebon	968.1	322.7	322.7	64.5	193.6
Majalengka	542.9	181.0	181.0	36.2	108.6
Total	4,479.7	1,493.2	1,493.2	298.6	895.9

Kabupaten	2034 (m3/orang/hari)				
	Komersial	Fasum	Industri Kecil & Menengah	Konstruksi	Institusi/ Publik
Subang	698.1	232.7	232.7	46.5	139.6
Cirebon	1,031.6	343.9	343.9	68.8	206.3
Majalengka	568.6	189.5	189.5	37.9	113.7
Total	4,734.1	1,578.0	1,578.0	315.6	946.8

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan mengikuti standar SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di permukiman berdasarkan Spesifikasi Peralatan Pengelolaan Sampah dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk Kawasan Rebana dibagi dengan keterangan jumlah jiwa nya di masing-masing kategori, didapatkan kebutuhan prasarana persampahan sebagai berikut.

Tabel 7.32 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Subang

Analisis	Unit	Tahun			Keterangan
		2025	2029	2035	
Penduduk Kab. Subang	Jiwa	1.694.185	1.766.618	1.861.622	
Wadah Sampah	Unit	8.471	8.833	9.308	per 200 jiwa
Komposter Komunal	Unit	16.942	17.666	18.616	per 100 jiwa
Gerobak Sampah	Unit	2.647	2.760	2.909	per 640 jiwa
Armroll Truck/ mobil bak	Unit	529	552	582	per 3.200 jiwa
TPS 3R/ TPS	Unit	56	59	62	per 30.000 jiwa
Bangunan Pendaaur Ulang	Unit	339	353	372	per 5.000 jiwa

Sumber: SNI 3242-2008; Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.33 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kab. Majalengka

Analisis	Unit	Tahun			Keterangan
		2025	2029	2035	
Penduduk Kab. Majalengka	Jiwa	1.395.289	1.447.757	1.516.379	
Wadah Sampah	Unit	6.976	7.239	7.582	per 200 jiwa
Komposter Komunal	Unit	13.953	14.478	15.164	per 100 jiwa
Gerobak Sampah	Unit	2.180	2.262	2.369	per 640 jiwa
Armroll Truck/ mobil bak	Unit	436	452	474	per 3.200 jiwa
TPS 3R/ TPS	Unit	47	48	51	per 30.000 jiwa
Bangunan Pendaaur Ulang	Unit	279	290	303	per 5.000 jiwa

Sumber: SNI 3242-2008; Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.34 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kab. Cirebon

Analisis	Unit	Tahun			Keterangan
		2025	2029	2035	
Penduduk Kab. Cirebon	Jiwa	2.453.816	2.581.587	2.750.867	
Wadah Sampah	Unit	12.269	12.908	13.754	per 200 jiwa
Komposter Komunal	Unit	24.538	25.816	27.509	per 100 jiwa
Gerobak Sampah	Unit	3.834	4.034	4.298	per 640 jiwa
Armroll Truck/ mobil bak	Unit	767	807	860	per 3.200 jiwa
TPS 3R/ TPS	Unit	82	86	92	per 30.000 jiwa
Bangunan Pendaaur Ulang	Unit	491	516	550	per 5.000 jiwa

Sumber: SNI 3242-2008; Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan ketentuan gerobak, transfer, dan transport mobil yang tertera pada tabel di bawah maka didapatkan kebutuhan sarana pengumpulan sampah Kawasan Rebana sebagai berikut.

Tabel 7.35 Ketentuan Gerobak, Transfer, dan Transport Mobil

Gerobak	2 m^3
----------------	----------------

Transfer	Pengangkutan 1x per 5 hari, Bak Sampah Besar 25 m ³
Transport Mobil	12 m ³ , 1 mobil 2 trip PP

Sumber: JUKNIS RDTR, 2024; Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.36 Kebutuhan Sarana Pengumpulan Sampah

Kabupaten	2025			2029			2034		
	Gerobak	Transfer	Transport Mobil	Gerobak	Transfer	Transport Mobil	Gerobak	Transfer	Transport Mobil
Subang	2.118	847	176	2.209	883	184	2.327	931	194
Cirebon	3.068	1.227	256	3.227	1.291	269	3.439	1.375	287
Majalengka	1.744	698	145	1.810	724	151	1.896	758	158
Total	6.930	2.772	577	5.617	2898	604	7.662	3.064	639

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan ketentuan KK Tong dan Kontainer Komunal yang tertera pada tabel di bawah maka didapatkan kebutuhan sarana pewadahan sampah Kawasan Industri Prioritas sebagai berikut.

Tabel 7.37 Ketentuan KK Tong dan Kontainer Komunal

KK Tong	40 L
Kontainer Komunal	1000 L

Sumber: JUKNIS RDTR, 2024; Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.38 Kebutuhan Sarana Pewadahan Sampah

Kabupaten	2025		2029		2034	
	KK Tong 40L	Kontainer Komunal 1000 L	KK Tong 40L	Kontainer Komunal 1000 L	KK Tong 40L	Kontainer Komunal 1000 L
Subang	105.875	4.235	110.425	4.417	116.350	4.654
Cirebon	153.375	6.135	161.350	6.454	171.925	6.877
Majalengka	87.200	3.488	90.475	3.619	94.775	3.791
Total	346.450	13.858	362.250	14.490	383.050	15.322

Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian

Berdasarkan hasil analisis kawasan prioritas pada Bab 6, kawasan pertanian yang menjadi fokus penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat mencakup Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Bandung, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur.

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung khususnya Rebana merupakan lumbung padi utama Jawa Barat dengan produksi mencapai 8,62

juta ton atau 16,2% dari produksi nasional. Kabupaten Indramayu menjadi penghasil padi terbesar dengan produktivitas 65,74 kuintal/Ha, diikuti Kabupaten Subang sebesar 59,12 kuintal/Ha. Namun, luas lahan pertanian Jawa Barat terus menurun, dari 1,05 juta Ha pada 2019 menjadi 987.648 Ha pada 2024, dan diproyeksikan hanya 863.622 Ha pada 2034. Lahan pertanian di kawasan ini mencapai 499.687 Ha, tetapi rentan alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri (2024).

Di kawasan Citanduy–Ciwulan–Cilaki (Garut dan Tasikmalaya), luas sawah tercatat 97.587 Ha. Meski berkontribusi signifikan terhadap produksi pangan, sebagian besar lahan di wilayah ini masih bergantung pada sawah tadah hujan sehingga rentan terhadap perubahan iklim. Sementara itu, di kawasan Priangan Barat–Cimandiri (Cianjur), luas sawah mencapai 66.934 Ha dengan LP2B seluas 66.300 Ha. Potensi pertaniannya besar, namun keterbatasan layanan irigasi masih menjadi kendala utama (2024).

Secara keseluruhan, ketiga kawasan prioritas ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi meliputi alih fungsi lahan dan keterbatasan jaringan irigasi yang berpengaruh pada keberlanjutan produksi hingga tahun 2034.

2) Layanan Irigasi Teknis

Total luas sawah di kawasan prioritas mencapai ratusan ribu hektar, dengan sebagian besar telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dari total 499.687 Ha LP2B di kawasan Citarum–Cimanuk–Cisanggarung, sekitar 78,51% atau 392.317 Ha telah teraliri irigasi teknis melalui daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sementara itu, 21,49% atau 107.369 Ha masih berupa sawah tadah hujan dan irigasi nonteknis.

Kabupaten Indramayu memiliki LP2B belum teririgasi terbesar yaitu 24.159 Ha, sedangkan Kota Cirebon terkecil dengan 122 Ha. Jika dilihat secara persentase, Kabupaten Sumedang menempati posisi tertinggi dengan 65,16% LP2B belum teririgasi, sedangkan Kabupaten Cirebon terendah dengan 8,27%.

Tabel 7.39 Luas Daerah Irigasi di Kawasan Swasembada Pangan

Kabupaten	Luas Wilayah	Luas Sawah	Luas LP2B (Ha)	Luas Daerah Irigasi	Luas LP2B yang belum teririgasi (Ha)	Luas LP2B yang belum teririgasi (%)
	(Ha)	(Ha)		(Ha)		
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung						
Karawang	191.400	97.442	87.253	97.442	0	0,00%
Subang	216.814	90.531	91.966	70.159	21.807	23,71%
Indramayu	205.768	122.920	118.679	100.004	18.675	15,74%
Cirebon	105.172	53.396	54.467	47.917	6.550	12,03%
Majalengka	131.149	56.161	50.783	31.684	19.099	37,61%
Kuningan	121.477	28.016	29.111	24.817	4.295	14,75%

Bandung	176.259	33.824	31.929	11.484	20.445	64,03%
Total	1.148.039	482.290	464.187	383.506	80.681	17,38%
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki						
Garut	306.519	48.057	45.839	1.289	44.550	97,19%
Tasikmalaya	270.586	49.530	45.252	7.558	37.694	83,30%
Total	577.105	97.587	91.092	8.847	82.244	90,29%
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri						
Cianjur	363.192	66.934	66.300	14.648	51.653	77,91%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

Ketersediaan air untuk irigasi pertanian di Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung dipasok oleh dua wilayah sungai (WS). WS Cimanuk–Cisanggarung melayani Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka, sedangkan WS Citarum melayani Kabupaten Subang serta sebagian wilayah Indramayu. Total kebutuhan air irigasi untuk sektor pertanian di kawasan ini pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 241.710 lt/dtk, dengan pasokan melalui irigasi teknis yang baru mencapai sekitar 79,34%.

Seiring meningkatnya intensifikasi pertanian, kebutuhan air diproyeksikan terus naik hingga 2034, terutama untuk mendukung percepatan masa tanam pada musim kemarau. Standar kebutuhan air irigasi yang pada tahun 2024 ditetapkan 0,5 lt/dtk/Ha, akan naik menjadi 0,83 lt/dtk/Ha pada tahun 2029 dan mencapai 1 lt/dtk/Ha pada tahun 2034. Dengan asumsi ini, total kebutuhan air kawasan meningkat menjadi sekitar 400 ribu lt/dtk pada tahun 2029 dan 492.899 lt/dtk pada tahun 2034.

Kebutuhan terbesar secara konsisten terdapat di Kabupaten Indramayu, yaitu 59.339 lt/dtk (2024), 98.503 lt/dtk (2029), dan 118.679 lt/dtk (2034). Sebaliknya, kebutuhan terkecil ada di wilayah perkotaan, yaitu Kota Cirebon, dengan proyeksi 120 lt/dtk (2024), 200 lt/dtk (2029), dan 241 lt/dtk (2034).

Tabel 7.40 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Swasembada Pangan

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (lt/dtk)		
	2024	2029	2034
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung			
Subang	45.983	76.332	91.966
Indramayu	59.339	98.503	118.679
Cirebon	27.233	45.207	54.467
Majalengka	25.391	42.149	50.783
Kuningan	14.556	24.162	29.111
Bandung	16.023	26.608	31.929
Total	188.525	312.962	376.934
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki			
Garut	22.980	38.206	45.839
Tasikmalaya	22.670	37.690	45.252
Total	45.650	75.896	91.091
Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri			

Cianjur	33.380	55.250	66.300
---------	--------	--------	--------

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4) Risiko Banjir terhadap Pertanian

Pertanian di kawasan prioritas Jawa Barat menghadapi risiko banjir yang cukup tinggi, terutama di wilayah utara (Indramayu, Cirebon, Subang, Bandung, Karawang, dan Bekasi) serta sebagian wilayah selatan (Garut, Ciamis, dan Cianjur). Risiko banjir tertinggi tercatat di Kabupaten Indramayu (108.623 ha, 57,08%), Subang (67.994 ha, 44,82%), dan Cirebon (41.797 ha, 52,28%). Kawasan lain seperti Bandung (16.288 ha) juga menunjukkan tingkat risiko tinggi, sedangkan Majalengka, Kuningan, Garut, dan Ciamis berada pada kategori sedang hingga rendah.

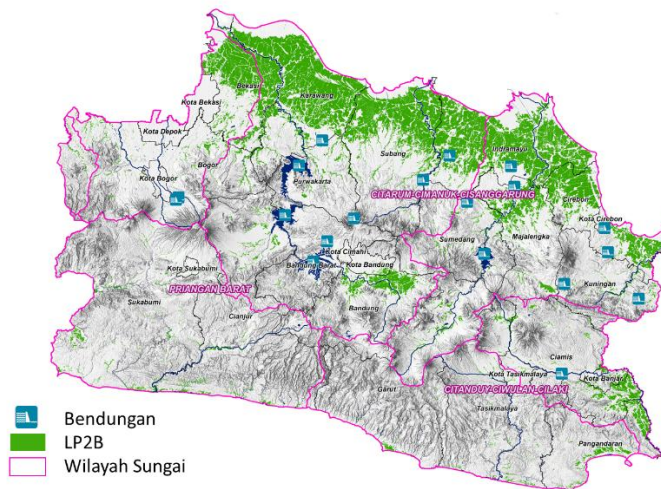
Kondisi banjir ini berdampak langsung pada penurunan intensitas tanam, di mana lahan yang seharusnya dapat menghasilkan dua kali panen per tahun hanya dapat ditanami sekali. Oleh karena itu, pengendalian banjir menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Jawa Barat.

Tabel 7.41 Luasan Kawasan Pertanian Berisiko Banjir di Kawasan Reban

Kabupaten	Kelas Risiko Bencana	Luas LP2B berisiko (ha)	Luas LP2B berisiko (%)
Swasembada Pangan, Air, Energi Citarum–Cimanuk–Cisanggarung			
Subang	Tinggi	67.994	44,82
Indramayu	Sangat Tinggi	108.623	57,08
Cirebon	Tinggi	41.797	52,28
Majalengka	Sedang	22.096	22,83
Kuningan	Sedang–Rendah	1.881	6,87
Bandung	Tinggi	16.288	26,10
Swasembada Pangan, Air, Energi Citanduy–Ciwulan–Cilaki			
Garut	Sedang	4.563	42,00
Ciamis	Sedang	12.597	33,00
Swasembada Pangan, Air, Energi Priangan Barat – Cimandiri			
Cianjur	Sedang–Tinggi	8.376	35,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara spasial, daerah aliran sungai (DAS) yang berkontribusi terhadap risiko banjir di kawasan ini antara lain: DAS Cimanuk dan DAS Cipanas di Kabupaten Indramayu, DAS Cipunagara di Kabupaten Subang, serta DAS Cisanggarung di Kabupaten Cirebon. Sementara di wilayah selatan, risiko banjir pertanian terkonsentrasi di sepanjang DAS Citanduy–Ciwulan–Cilaki dan DAS Cimandiri yang melintasi Kabupaten Garut, Ciamis, dan Cianjur.



Gambar 7.2 Sebaran Kawasan Swasembada Pangan Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

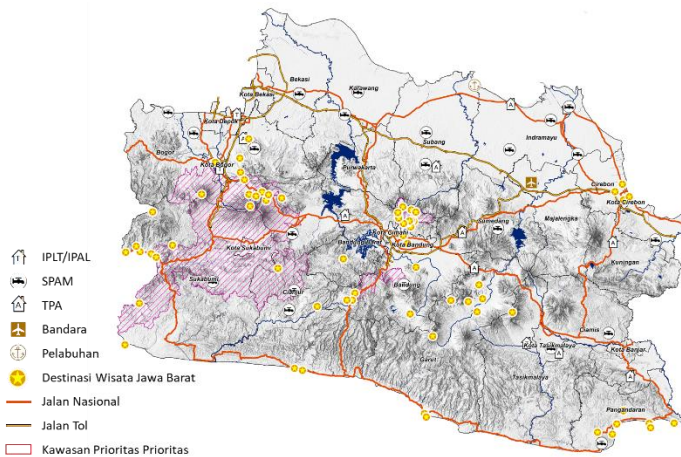
Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pariwisata prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat adalah Geopark Ciletuh dan KSPN Pangandaran.

1) Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata Unggulan di Provinsi Jawa Barat berada pada Kawasan Prioritas DPP Bandung-Halimun-Ciletuh dan Jawa Barat Selatan yang ditandai dengan keberadaan beberapa KSPN dan destinasi wisata internasional seperti Geopark Ciletuh dan KSPN Pangandaran.

A. Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

Terdapat kurang lebih 156 daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, dimana dibagi menjadi 3 (tiga) tema pengembangan yaitu tema Pergeseran Jalur Magnetik, Plato Jampang, dan Fosil Subduksi. Geopark Ciletuh telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi warisan geologi dan *geosite* sebagai bagian dari Geopark Ciletuh. Usulan tersebut diajukan pada 21 Juni 2016 mencakup 8 (delapan) kecamatan yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Waluran, Ciracap, dan Surade, dengan luas wilayah 126 ribu ha atau 30,3% dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi.



Gambar 7.3 Kawasan Pariwisata Prioritas Jawa Barat

Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah BPIW, 2025

Kunjungan wisata ke Geopark Ciletuh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 mencapai angka 3,6 juta jiwa per tahun. Dari total jumlah tersebut, kunjungan dari wisatawan nusantara mendominasi angka kunjungan dengan kontribusi 97% terhadap kunjungan total, sedangkan wisatawan mancanegara berkontribusi 3% terhadap kunjungan total. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan kembali pulih dengan jumlah mencapai 1,3 juta.

Pengembangan jalur geowisata tematik menjadi prioritas pembangunan di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai upaya untuk memadukan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya dalam satu tema terkait sebagai faktor utama dalam pembangunan geopark. Selain itu, diharapkan juga dapat memadukan upaya konservasi serta pendidikan dan penelitian dengan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pariwisata yang lebih berkualitas.

Sementara pada wilayah tengah dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Bogor yang beririsan, di dalamnya memuat banyak objek wisata dengan tingkat kunjungan yang selalu ramai diminati wisatawan seperti Puncak Pass, Jalur Pendakian Gunung Gede-Pangrango, dan berbagai wisata alam yang tersebar di perbatasan 3 kabupaten tersebut. Kota Bogor berperan sebagai pusat penyedia sarana prasarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, kuliner, dan rute transportasi umum yang terkoneksi secara integrasi dengan Jakarta.

Selain pariwisata pada Kabupaten Sukabumi, kunjungan wisatawan juga banyak menuju ke Kawasan Pariwisata Gede-Pangrango, dsk dengan jumlah wisatawan pada tahun 2024, baik dari dalam maupun luar negeri, mencapai 15 juta pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW yang paling banyak adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang mencapai 5 juta pengunjung pada tahun 2024. Sementara Kabupaten

Cianjur juga berkontribusi sebesar 1,7 juta wisatawan yang bertujuan utama menuju Puncak.

B. Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya

Pada Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya terdapat lingkup pariwisata unggulan berupa KSPN Ciwidey, Tangkuban Perahu, dan Bandung Kota yang dindalamnya memuat banyak objek wisata dengan tingkat kunjungan yang selalu ramai diminati wisatawan seperti Tangkuban Perahu di utara Kabupaten Bandung, Ciwidey dengan berbagai wisata alam, dan Bandung Kota dengan berbagai wisata kuliner dan *fashion*.

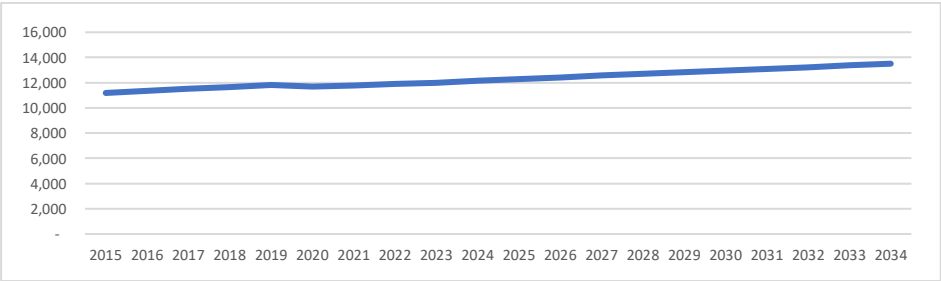
Kunjungan wisatawan ke Kawasan Pariwisata Bandung Raya pada tahun 2024, baik dari dalam maupun luar negeri, mencapai 14,1 juta pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW yang paling banyak adalah Kota Bandung yang mencapai 7 juta pengunjung pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh Kabupaten Bandung dan Bandung Barat yang berperan sebagai pusat destinasi wisata alam sehingga jumlah wisatawan tidak terpusat di Kota Bandung.

2) Proyeksi Penduduk dan Wisatawan

Pariwisata dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang akan memberikan dukungan sektor ekonomi kepada kawasan pariwisata prioritas terutama pada Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya.

1) Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

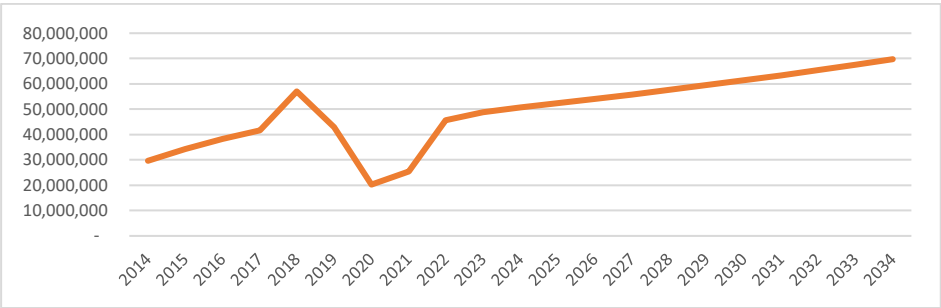
Perkiraan jumlah penduduk alami Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur pada tahun 2034 sebesar 13 juta jiwa dengan kepadatan 12,4 jiwa/ha. Laju pertumbuhan penduduk tahunan di sebesar 0,9%. Dengan rasio tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun 2015 sebesar 2,3 juta jiwa.



Gambar 7.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, diolah BPIW, 2025

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur juga diperkirakan bertambah. Pada tahun 2034, jumlah wisatawan diproyeksikan mencapai 25 juta jiwa.

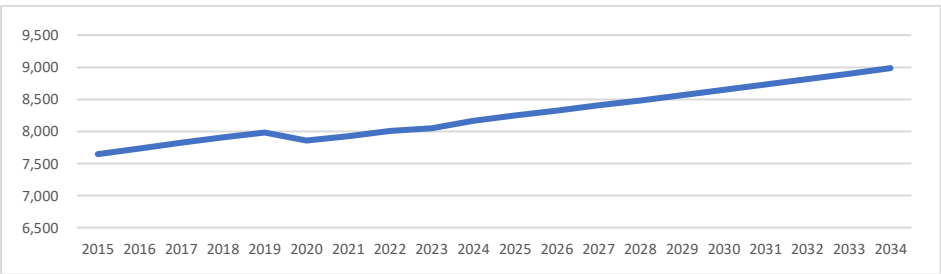


Gambar 7.5 Proyeksi Jumlah Wisatawan

Sumber: Open Data Jabar 2024, diolah BPIW, 2025

2) Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya

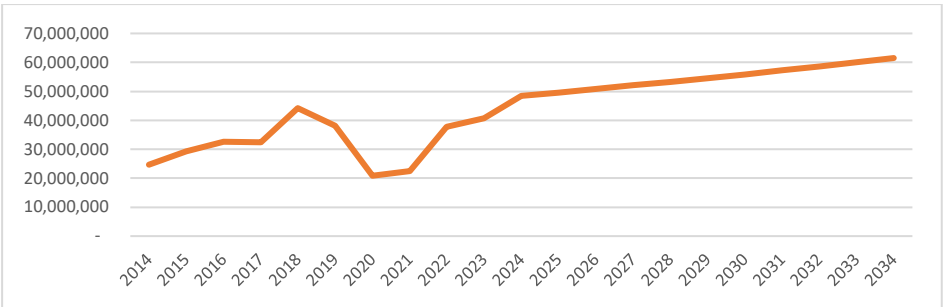
Perkiraan jumlah penduduk alami Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya pada tahun 2034 adalah sebesar 8,9 juta jiwa penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan di Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya sebesar 0,86%, terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun 2015 sebesar 1,3 juta jiwa.



Gambar 7.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, diolah BPIW, 2025

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2029, jumlah wisatawan mencapai 102 juta jiwa yang terdiri dari wisatawan nusantara sebesar 14,2 juta jiwa dan wisatawan asing 1,5 juta jiwa. Sementara hingga tahun 2034 diperkirakan jumlah wisatawan nusantara akan mencapai 15,8 juta jiwa dan wisatawan asing sebesar 1,7 juta jiwa.



Gambar 7.7 Proyeksi Jumlah Wisatawan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya

Sumber: BPS 2024 diolah BPIW, 2024

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Akses menuju Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur dikategorikan cukup jauh, karena tidak adanya *hub* transportasi yang dekat dengan Kabupaten Sukabumi. Akses terdekat dari *hub* transportasi adalah melalui Stasiun Bogor dan Stasiun Sukabumi. Selain itu, terdapat alternatif menuju Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur dari Tol Bogor–Ciawi-Sukabumi. Mayoritas jalan di sekitar kawasan dalam kondisi mantap. Namun, ada beberapa jalan yang memiliki kondisi ketidakmantapan sebesar >50%, yaitu Ruas Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan), Jln. Suryakencana (Cibadak), Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten), Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Cianjur), Jln. A. Rahman Hakim (Cianjur), dan Bts. Prov. Banten (Cibareno) - Cisolok. Seluruh jalan Provinsi di sekitar kawasan dalam kondisi mantap dengan tingkat kemantapan 97–100%.

Tabel 7.42 Proyeksi LHRT dan VCR Geopark Ciletuh

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/hari)			VCR		
			2025	2029	2034	2025	2029	2034
22072	GANDARIA - CILODONG/BTS. DEPOK	26,915	34,254	42,207	45,173	1.3	1.6	1.7
22073	CILODONG/BTS. DEPOK - BTS. KOTA BOGOR	26,407	38,155	46,108	49,074	1.4	1.7	1.9
2207311	JLN. PAJAJARAN (BOGOR)	37,421	50,892	58,845	61,811	1.4	1.6	1.7
2207312	JLN. RAYA KEDUNGHALANG (BOGOR)	8,751	22,752	30,705	33,671	2.6	3.5	3.8
22074	CIAWI - PUNCAK	15,211	7,208	15,161	18,127	0.5	1.0	1.2
2207411	JLN. RAYA CIAWI (BOGOR)	17,607	52,820	60,773	63,739	3.0	3.5	3.6
22075	PUNCAK - BTS. KOTA CIANJUR	6,808	19,380	27,333	30,299	2.8	4.0	4.5
2207512	JLN. IR. H. JUANDA (CIANJUR)	6,518	19,554	27,507	30,473	3.0	4.2	4.7
22076	BTS. KOTA CIBADAK - CIKEMBANG	12,893	5,415	13,368	16,334	0.4	1.0	1.3
2207611	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (CIBADAK)	13,295	8,243	16,196	19,162	0.6	1.2	1.4
22077	CIKEMBANG - BAGBAGAN	14,325	4,891	12,844	15,810	0.3	0.9	1.1
2205211	JLN. RAYA PEL. RATU (PELABUHAN RATU - BAGBAGAN)	6,220	4,292	12,245	15,211	0.7	2.0	2.4
22024	BOGOR - CIAWI (JLN. RAYA TAJUR)	14,385	36,457	44,410	47,376	2.5	3.1	3.3
22026	BENDA - BTS. KOTA CIBADAK	18,857	17,771	25,724	28,690	0.9	1.4	1.5
2202611	JLN. SILIWANGI (CICURUG)	19,523	19,334	27,287	30,253	1.0	1.4	1.5

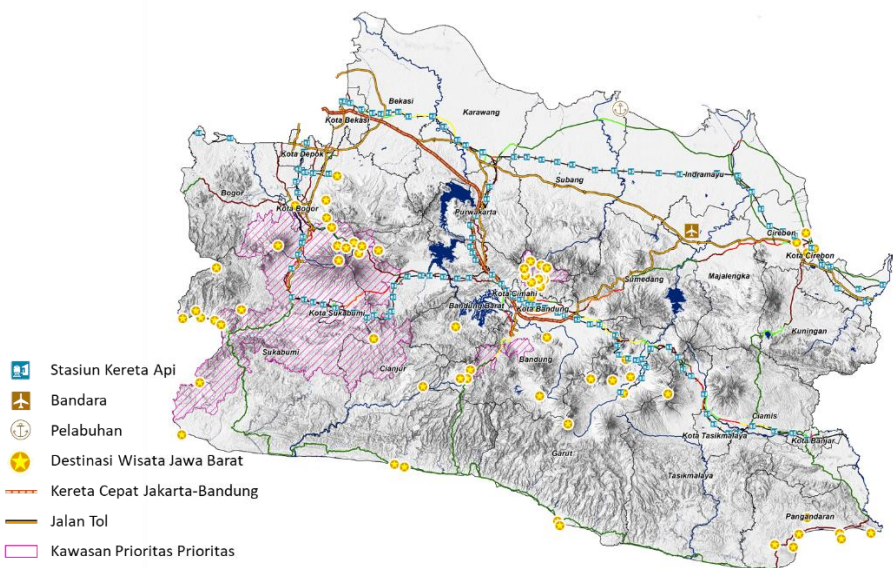
No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/hari)			VCR		
			2025	2029	2034	2025	2029	2034
2202612	JLN. SILIWANGI (PARUNGKUDA)	18,425	19,236	27,189	30,155	1.0	1.5	1.6
2202613	JLN. SURYAKENCANA (CIBADAK)	19,248	19,078	27,031	29,997	1.0	1.4	1.6
22027	BTS. KOTA CIBADAK - BTS. KOTA SUKABUMI	16,529	18,668	26,621	29,587	1.1	1.6	1.8
2202711	JLN. RAYA SILIWANGI (CIBADAK)	16,051	15,890	23,843	26,809	1.0	1.5	1.7
2202712	JLN. RAYA CIBOLANG (CISAAT)	13,147	14,226	22,179	25,145	1.1	1.7	1.9
2202713	JLN. RAYA CISAAT (CISAAT)	14,601	20,862	28,815	31,781	1.4	2.0	2.2
2202714	JLN. K.H. SANUSI (SUKABUMI)	16,793	25,189	33,142	36,108	1.5	2.0	2.2
2202715	JLN. BHAYANGKARA (SUKABUMI)	23,434	14,295	22,248	25,214	0.6	0.9	1.1
2202716	JLN. SURYAKENCANA (SUKABUMI)	23,530	17,177	25,130	28,096	0.7	1.1	1.2
2202718	JLN. SILIWANGI (SUKABUMI)	18,654	13,431	21,384	24,350	0.7	1.1	1.3
2202719	JLN. LETJEN. KOSASIH (SUKABUMI)	18,271	29,965	37,918	40,884	1.6	2.1	2.2
22028	BTS. KOTA SUKABUMI - GEKBRONG (BTS. KABUPATEN)	17,283	15,351	23,304	26,270	0.9	1.3	1.5
22029	GEKBRONG (BTS. KABUPATEN) - BTS. KOTA CIANJUR	14,941	13,786	21,739	24,705	0.9	1.5	1.7
2202911	JLN. PASIR HAYAM - SP.3 PERINT. KEMERDEKAAN (CIANJUR)	12,851	20,047	28,000	30,966	1.6	2.2	2.4
2202912	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (CIANJUR)	6,916	14,938	22,891	25,857	2.2	3.3	3.7
2202913	JLN. PROF. M. YAMIN (CIANJUR)	9,218	12,721	20,674	23,640	1.4	2.2	2.6
2202914	JLN. A. RAHMAN HAKIM (CIANJUR)	8,665	11,611	19,564	22,530	1.3	2.3	2.6
2202915	LINGKAR CIANJUR	15,857	9,162	17,115	20,081	0.6	1.1	1.3
22030	BTS. KOTA CIANJUR - CITARUM	9,070	17,595	25,548	28,514	1.9	2.8	3.1
2203011	JLN. RAYA BANDUNG (CIANJUR)	14,016	28,031	35,984	38,950	2.0	2.6	2.8
22049	BTS. PROV. BANTEN (CIBARENO) - CISOLOK	9,576	966	8,919	11,885	0.1	0.9	1.2
22050	CISOLOK - SP. KR. HAWU	7,158	2,577	10,530	13,496	0.4	1.5	1.9
2205111	JLN. RAYA CISOLOK (SP. KR. HAWU - PELABUHAN RATU)	7,336	4,108	12,061	15,027	0.6	1.6	2.0
2205112	JLN. RAYA CITEPUS (SP. KR. HAWU - PELABUHAN RATU)	7,306	5,260	13,213	16,179	0.7	1.8	2.2
2205113	JLN. KIDANG KENCANA (SP. KR. HAWU - PELABUHAN RATU)	8,545	5,126	13,079	16,045	0.6	1.5	1.9
2205114	JLN. SILIWANGI (SP. KR. HAWU - PELABUHAN RATU)	15,715	7,386	15,339	18,305	0.5	1.0	1.2
22053	BAGBAGAN - JAMPANGKULON	9,393	1,805	9,758	12,724	0.2	1.0	1.4
22054	JAMPANGKULON - SURADE	9,261	3,334	11,287	14,253	0.4	1.2	1.5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Proyeksi penambahan kendaraan = proyeksi penduduk + proyeksi wisatawan

Lebar rata-rata jalan nasional menuju Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur mencapai 6,7 m dengan VCR rata-rata yang hampir mencapai 0,92 atau setara dengan LOS E. Tingkat VCR yang tinggi ditandai dengan adanya beberapa titik kemacetan akibat terdapat pabrik. Oleh karena itu, diperlukan penanganan pada beberapa titik kemacetan pada jalan menuju Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur untuk memperpendek waktu tempuh, seperti pengaturan lalu lintas.

Sementara itu, akses menuju Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya bisa menempuh Jalan Nasional dan Jalan Tol. Penambahan jumlah wisatawan hingga tahun 2029 berdampak terhadap daya tampung Jalan Nasional yang dilalui. Penambahan jumlah kendaraan yang akan melintas sebanyak 5.000 smp/hari terbagi pada beberapa ruas jalan.



Gambar 7.8 Jaringan Transportasi Menuju Kawasan Pariwisata Jawa Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Terdapat 2 ruas jalan yang terdampak pada penurunan tingkat pelayanan jalan (nilai VCR >0,6) diantaranya Ruas Pangandaran–Kali Pucang dan Ruas Batas Kota Banjar–Kali Pucang. Untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kawasan Pantai Selatan Jawa Barat ini telah direncanakan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung/ Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang dapat mempercepat waktu tempuh menuju destinasi wisata alam yang berada di Utara dan Selatan Cekungan Bandung.

Tabel 7.43 Proyeksi LHRT dan VCR KSPN Bandung

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	LHRT 2025	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/hari)		VCR	
				2029	2034	2029	2034
22083	CISOMANG - BTS. KOTA PADALARANG	9,108	4,210	16,692	18,736	4.0	4.5
2208311	JLN. RAYA PURWAKARTA (PADALARANG)	10,985	5,039	18,569	20,613	3.7	4.1
22104	CIMAREME - BATUJAJAR	6,277	9,606	13,861	15,905	1.4	1.7
22105	BATUJAJAR - SOREANG	7,727	7,805	15,311	17,355	2.0	2.2
2210611	JLN. LINGKAR SELATAN SOREANG - CIWIDEY	6,376	8,462	13,960	16,004	1.6	1.9
2210612	JLN. RAYA CIWIDEY	7,475	6,734	15,059	17,103	2.2	2.5
2210613	JLN. BHAYANGKARA	7,151	6,621	14,735	16,779	2.2	2.5
22107	RANCABALI - BTS. BANDUNG/CIANJUR	384	6,400	7,968	10,012	1.2	1.6
2203312	JLN. RAYA CIMAHI (CIMAHI)	19,944	12,703	27,528	29,572	2.2	2.3
2203713	JLN. SURAPATI (BANDUNG)	29,883	31,456	37,467	39,511	1.2	1.3
2210614	CIWIDEY - RANCABALI	3,282	7,062	10,866	12,910	1.5	1.8
22031	CITARUM - RAJAMANDALA - BTS. KOTA PADALARANG	20,875	19,338	28,459	30,503	1.5	1.6
2203111	JLN. RAYA PADALARANG (PADALARANG)	14,262	24,385	21,846	23,890	0.9	1.0
22033	BTS. KOTA PADALARANG - BTS. KOTA BANDUNG	35,953	15,972	43,537	45,581	2.7	2.9
2203311	JLN. RAYA PADALARANG (PADALARANG)	18,287	15,059	25,871	27,915	1.7	1.9

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	LHRT 2025	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/hari)		VCR	
				2029	2034	2029	2034
2203313	JLN. RAYA CIBABAT (CIMAHI)	25,721	16,488	33,305	35,349	2.0	2.1
2203314	JLN. CIBEUREUM (BANDUNG)	27,047	45,842	34,631	36,675	0.8	0.8
2203315	JLN. SUDIRMAN (BANDUNG)	22,646	61,205	30,230	32,274	0.5	0.5
2203316	JLN. RAJAWALI BARAT (BANDUNG)	29,703	38,081	37,287	39,331	1.0	1.0
2203317	JLN. NURTANIO (BANDUNG)	30,780	37,347	38,364	40,408	1.0	1.1
2203318	JLN. ABDUL RAHMAN SALEH (BANDUNG)	28,225	56,450	35,809	37,853	0.6	0.7
2203319	JLN. PAJAJARAN (BANDUNG)	14,882	33,071	22,466	24,510	0.7	0.7
220331A	JLN. PASIR KALIKI (BANDUNG)	23,981	13,249	31,565	33,609	2.4	2.5
2203411	JLN. SUKARNO - HATTA (BANDUNG)	52,233	62,931	59,817	61,861	1.0	1.0
22037	BTS. KOTA BANDUNG - BTS. KOTA CILEUNYI	38,353	16,407	45,937	47,981	2.8	2.9
2203711	JLN. LAYANG PASUPATI (GAJIBU - CIAMPEDES) (BANDUNG)	23,211	21,693	30,795	32,839	1.4	1.5
2203712	JLN. PASTEUR - DR. DJUNDJUNAN (BANDUNG)	44,663	36,019	52,247	54,291	1.5	1.5
2203714	JLN. KHP HASAN MUSTOPA / SUCI (BANDUNG)	19,558	19,957	27,142	29,186	1.4	1.5
2203715	JLN. RAYA SINDANGLAYA (BANDUNG)	25,315	50,727	32,899	34,943	0.6	0.7
2203716	JLN. RAYA UJUNG BERUNG (BANDUNG)	17,392	16,885	24,976	27,020	1.5	1.6
2203717	JLN. RAYA CIPADUNG (BANDUNG)	17,281	31,420	24,865	26,909	0.8	0.9
2203718	JLN. CIBIRU (BANDUNG)	34,303	29,829	41,887	43,931	1.4	1.5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.44 *Relevant Road* Jalan Nasional Geopark Ciletuh

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Total Kemantapan				Lebar (m)
			Mantap		Tidak Mantap		
			km	%	km	%	
22026	Benda - Bts. Kota Cibadak	19,00	17,33	91,19	1,67	8,81	8,2
2202611	Jln. Siliwangi (Cicurug)	1,38	0,99	71,39	0,40	28,61	7,79
2202612	Jln. Siliwangi (Parungkuda)	1,13	0,88	78,56	0,24	21,44	7,79
2207611	Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak)	7,74	5,42	70,09	2,31	29,91	5,75
22076	Bts. Kota Cibadak - Cikembang	1,96	1,96	100,00	0,00	0,00	6,46
22077	Cikembang - Bagbagan	35,20	24,35	69,15	10,86	30,8	5,82
22049	Bts. Prov. Banten (Cibareno) - Cisolok	10,20	1,84	18,08	8,36	81,92	5,95
22050	Cisolok - Sp. Kr. Hawu	5,52	5,52	100,00	0,00	0,00	5,97
2205111	Jln. Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	3,01	2,61	86,50	0,41	13,50	6,46
2205112	Jln. Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	4,17	3,74	89,81	0,42	10,19	6,98
2205113	Jln. Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	1,89	1,68	88,91	0,21	11,09	8,7
2205114	Jln. Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	1,18	0,97	82,50	0,21	17,50	8,76
2205211	Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan)	3,75	1,24	32,94	2,51	67	7,42
22053	Bagbagan - Jampangkulon	51,80	44,22	85,37	7,58	14,63	5,1
22054	Jampangkulon - Surade	6,61	6,41	96,87	0,21	3,13	6,05
22055	Surade - Tegalbuleud (Cibuni)	38,51	25,36	65,86	13,15	34,14	5,5

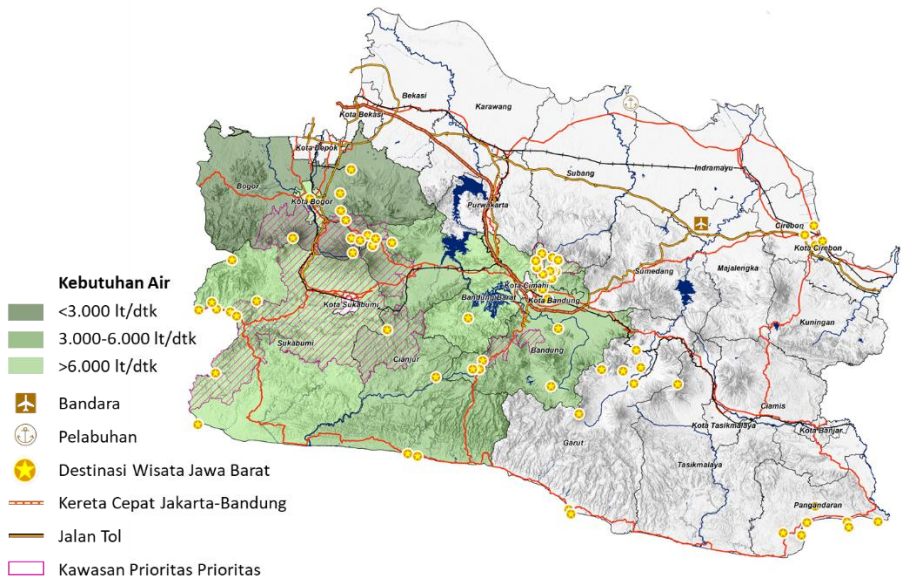
Sumber: Dirjen Bina Marga, diolah BPIW, 2025

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Kebutuhan air baku Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Kota Bogor saat ini dipenuhi dari Sungai Cilandir dengan debit maksimum 14,87 m³/detik pada musim penghujan dan debit minimum 2,15 m³/detik pada musim kemarau, WS Ciliwung Cisadane (186,72 m³/dtk), Sungai Ciletuh (DAS Ciletuh), air tanah (swadaya), dan Pamsimas yang bersumber dari mata air (debit 1-2 liter/detik). Kebutuhan air minum dipenuhi oleh beberapa SPAM IKK dengan kapasitas 20-50 lt/dtk. Persampahan Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur diolah pada 2 TPA, yaitu TPA Cimenteng dengan kapasitas 3.250.000 m³ dan TPA Kadaleman dengan kapasitas 440.000 m³, serta TPA Lulut Nambo yang sudah terbangun namun belum dapat beroperasi yang melayani Kabupaten dan Kota Bogor.

A. Perhitungan Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum Kabupaten Sukabumi bertambah hingga tahun 2029 seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan. Sebesar 78% wilayah Kab. Sukabumi menjadi daerah pelayanan jaringan air minum perpipaan, tetapi penduduk yang terlayani hanya 9,6%. Jika diproyeksikan, terjadi peningkatan pelayanan air minum perpipaan sebesar 22,62% hingga tahun 2034, dengan sisa kapasitas produksi sebesar 5 liter/detik yang dapat dimanfaatkan.



Gambar 7.9 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Pariwisata 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penyediaan air minum diprioritaskan pada kawasan pariwisata terutama sekitar Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, dan Ujung Genteng untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan PDAM, direncanakan adanya optimalisasi jaringan perpipaan SPAM dengan kapasitas sumber 14,87 liter/detik. Kapasitas SPAM ini belum memberikan dampak yang optimal karena cakupan pelayanan yang diberikan hanya sedikit.

Selain itu, penyediaan air minum diprioritaskan pada kawasan pariwisata yang terletak di Kabupaten Bogor sekitar Wisata Puncak dan Sentul untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata. Saat ini pelayanan air di Kabupaten Bogor baru sebesar 24%. Direncanakan adanya optimalisasi jaringan perpipaan SPAM dengan kapasitas idle sebesar 237 lt/dtk. Begitupun dengan Kabupaten Cianjur yang menjadi perbatasan pada Kawasan Wisata Puncak masih memiliki tingkat layanan air minum yang rendah sebesar 10,81% dan bisa dioptimalkan dengan pemanfaatan *idle* sebesar 390 liter/detik. Oleh karena itu, Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur membutuhkan peningkatan kapasitas air minum karena suplai air tidak cukup seiring bertambahnya penduduk dan jumlah wisatawan (2034).

Tabel 7.45 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Sukabumi

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sukabumi			
Capacity Eksisting = 703 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	90	90	90
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	19,825	32,615	38,217
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	21	34	40
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	2505	2555	2620
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	2,526	2,589	2,660
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	21.3%	21.0%	20.7%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	3,063	3,132	3,209
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	11.80%	12.11%	12.42%
GAP (lt/dtk)	-347	-364	-384

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.46 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Bogor

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bogor			
Capacity Eksisting = 237 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	90	90	90
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	19,825	32,615	38,217
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	21	34	40

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bogor			
Capacity Eksisting = 237 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	5,987	6,265	6,631
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	6,007	6,299	6,671
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	22.6%	21.2%	19.9%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	7,366	7,637	7,996
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	24.20%	24.20%	24.20%
GAP (lt/dtk)	-1,510	-1,575	-1,662

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.47 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Cianjur

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Cianjur			
Capacity Eksisting = 390 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	90	90	90
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	19,825	32,615	38,217
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	21	34	40
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	2,721	2,838	2,991
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	2,742	2,872	3,030
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	26.06%	26.01%	25.96%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	3,456	3,619	3,817
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	11.56%	12.31%	13.06%
GAP (lt/dtk)	-10	-55	-109

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.48 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kota Bogor

Pelayanan PDAM Terhadap Kota Bogor			
Capacity Eksisting = 89 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	19,825	32,615	38,217
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	21	34	40
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	1,510	1,561	1,627
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	1,531	1,595	1,666
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	25.35%	24.26%	23.17%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	1,919	1,982	2,052
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	67.26%	69.57%	71.88%
GAP (lt/dtk)	-1,202	-1,290	-1,386

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.49 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Bandung

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung			
Capacity Eksisting = 41 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	100	100	100
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	18,757	20,636	23,251
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	20	21	24
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	4,382	4,536	4,738
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	4,401	4,558	4,762
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	25.91%	24.61%	23.31%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	5,542	5,680	5,872
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**))}	15.70%	19.31%	22.92%
GAP (lt/dtk)	-829	-1,056	-1,305

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.50 Proyeks Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Bandung Barat

Pelayanan Air Minum Kabupaten Bandung Barat			
Capacity Eksisting = 523 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	100	100	100
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	596	596	959
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	0.62	0.69	1.11
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	2,209	2,326	2,481
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	2,210	2,327	2,482
Tingkat Kebocoran (%)	28.42%	25.52%	22.62%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	2,838	2,920	3,043
Peningkatan Pelayanan (%)	3.78%	4.81%	5.84%
GAP (lt/dtk)	-23	-56	-94

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.51 Proyeks Tingkat Pelayanan Air Minum Kota Bandung

Pelayanan Air Minum Kota Bandung			
Capacity Eksisting = 84 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan		
	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	90	90	90
Rata-Rata Menginap (LOS)	0.69	0.69	0.69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	44,238	67,730	106,884
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	46.08	94.07	148.45
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	3,541	3,661	3,818
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	3,587	3,755	3,966
Tingkat Kebocoran (%)	38.50%	35.60%	32.70%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	4,968	5,092	5,263
Peningkatan Pelayanan (%)	41.44%	42.47%	43.50%
GAP (lt/dtk)	-1,536	-1,640	-1,766

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara itu, rata-rata akses air minum layak Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung sebesar 95,2%, dengan jumlah penduduk yang terlayani jaringan air minum perpipaan sebesar 24,5% pada wilayah pelayanan. Ketersediaan jaringan perpipaan terutama berada di Kota Bandung yang memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi tertinggi serta untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan jaringan perpipaan air minum bisa dilakukan dengan pemanfaatan *idle capacity* yang masih tersedia sebesar 564 lt/dtk.

B. Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Potensi produksi timbulan sampah pada Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur mencapai 3.478.142 m³/tahun yang sudah dipengaruhi faktor kompaksi sampah 0,4. Penanganan sampah saat ini sebesar 45% dengan sampah terangkut 1.582.532 m³/tahun dan akan penuh pada tahun 2025 untuk pelayanan sampah pada Kabupaten Sukabumi. Terdapat gap timbulan sampah sebesar 3.569.826 m³/tahun atau 878.726 ton/hari hingga tahun 2029. Timbulan sampah dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor hingga saat ini dibuang ke TPA Galuga yang kapasitasnya sudah penuh.

Tabel 7.52 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

Tahun	2025	2029	2034
Domestik (ton/tahun)	2,137,823	2,193,895	2,266,648
Wisata (ton/tahun)	2,572	2,920	3,421
Timbulan Sampah ton/tahun)	2,140,395	2,196,815	2,270,069
Timbulan Sampah (m ³ /tahun)	8,695,356	8,924,564	9,222,157
Faktor Kompaksi	0.4	0.4	0.4
Timbulan Akhir (m ³ /tahun)	3,478,142	3,569,826	3,688,863

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.53 Proyeksi Persentase Pelayanan TPA di Kabupaten Sukabumi*)

TPA	2025	2029	2034
TPA Cimenteng	31,44%	39,44%	49,44%
TPA Kadaleman	4,35%	6,35%	8,85%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.54 Proyeksi Timbulan Sampah Terlayani TPA di Kabupaten Sukabumi

TPA	Proyeksi Pelayanan TPA (m ³ /tahun)		
	2025	2029	2034
TPA Cimenteng	365.638	467.991	601.627
TPA Kadaleman	50.589	75.348	107.694
GAP Kapasitas TPA (m ³ /tahun)			
TPA Cimenteng	-1.182.202	-2.899.395	-5.637.677
TPA Kadaleman	-82.948	-346.899	-820.045

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.55 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya**)

Tahun	2025	2029	2034
-------	------	------	------

Domestik (ton/tahun)	2.385.468	2.477.055	2.596.684
Wisata (ton/tahun)	3.042	3.347	3.771
Timbulan Sampah (ton/tahun)	2.388.509	2.480.402	2.600.455
Timbulan Sampah (m ³ /tahun)	9.703.322	10.076.635	10.564.352
Faktor Kompaksi	0,4	0,4	0,4
Timbulan Akhir (m ³ /tahun)	3.881.329	4.030.654	4.225.741

Sumber: Hasil Analisis, 2025

- *) usia TPA <1 tahun
- **) masing menggunakan TPST Kabupaten

Penanganan persampahan diprioritaskan pada kawasan pariwisata. Dibutuhkan TPA dengan metode 3R di pusat-pusat kegiatan wisata: Pelabuhanratu, Ciletuh, Ujung Genteng, dan Puncak Pass, dsk. Pelayanan TPA diutamakan pada kawasan prioritas pariwisata karena memiliki timbulan sampah yang bertambah seiring berkembangnya kawasan pariwisata.

Sementara itu, timbulan sampah di Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya 10% dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Perkembangan permukiman menghasilkan timbulan sampah yang lebih tinggi dengan 65% sampah domestik. Kawasan Bandung, dsk dilayani oleh TPA Sarimukti yang saat ini kondisinya sudah overload. Sudah ada calon TPA pengganti yaitu TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung, namun hingga saat ini masih belum bisa beroperasi karena masih terhalang proses VGF. Hingga saat ini, Kawasan Bandung, dsk masih menggunakan TPST kewenangan kabupaten untuk mengolah sampah domestik dan pariwisata.

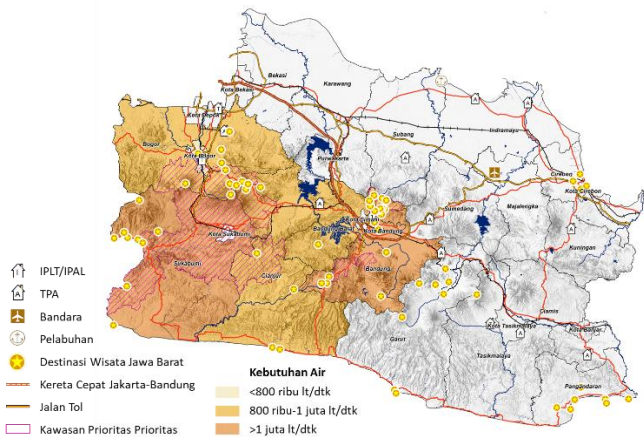
C. **Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Sanitasi**

Saat ini Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur hanya mempunyai 1 IPLT di Kabupaten Bogor yaitu IPLT Cibinong yang hanya melayani Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Citeureup, Gunung Putri, dan Sukaraja, sehingga kawasan ini membutuhkan sistem pengelolaan air limbah. Timbulan limbah yang tertangani hingga saat ini oleh IPLT Cibinong diperkirakan mencapai 886 lt/dtk dengan tingkat pelayanan 26% untuk Kabupaten Bogor. Hingga tahun 2029, timbulan akan mencapai 927 lt/dtk dan akan bertambah hingga 2034 mencapai 981 lt/dtk.

Secara keseluruhan potensi produksi air limbah pada Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur (2029) adalah sebesar 9.348 liter/detik dan mengalami penambahan hingga tahun 2034 menjadi 9.819 liter/detik, sehingga dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan yang masih banyak belum memiliki sistem sanitasi *onsite*.

Sementara itu, penduduk di Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung sebesar 22,01% sudah memiliki fasilitas tempat pembuangan air limbah aman. Pengolahan limbah yang dimanfaatkan saat ini adalah IPAL Bojongsoang dan IPLT Kompak yang melayani sebagian besar Kota dan Kabupaten Bandung. Proyeksi timbulan

limbah KSPN Pangandaran pada tahun 2029 adalah sebesar 5.819 liter/detik (domestik 5.738 liter/detik dan pariwisata 81 liter/detik) dan pada tahun 2034 sebesar 6.109 liter/detik (domestik 5.989 liter/detik dan pariwisata 121 liter/detik). Berkembangnya jumlah wisatawan menyebabkan dibutuhkannya tempat pengolahan limbah yang diprioritaskan pada kawasan pariwisata. Sementara untuk pertumbuhan jumlah rumah tangga, diarahkan untuk memiliki tanki *septictank* masing-masing dengan ketentuan yang aman dan layak.



Gambar 7.10 Proyeksi Penanganan Limbah Kawasan Pariwisata 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

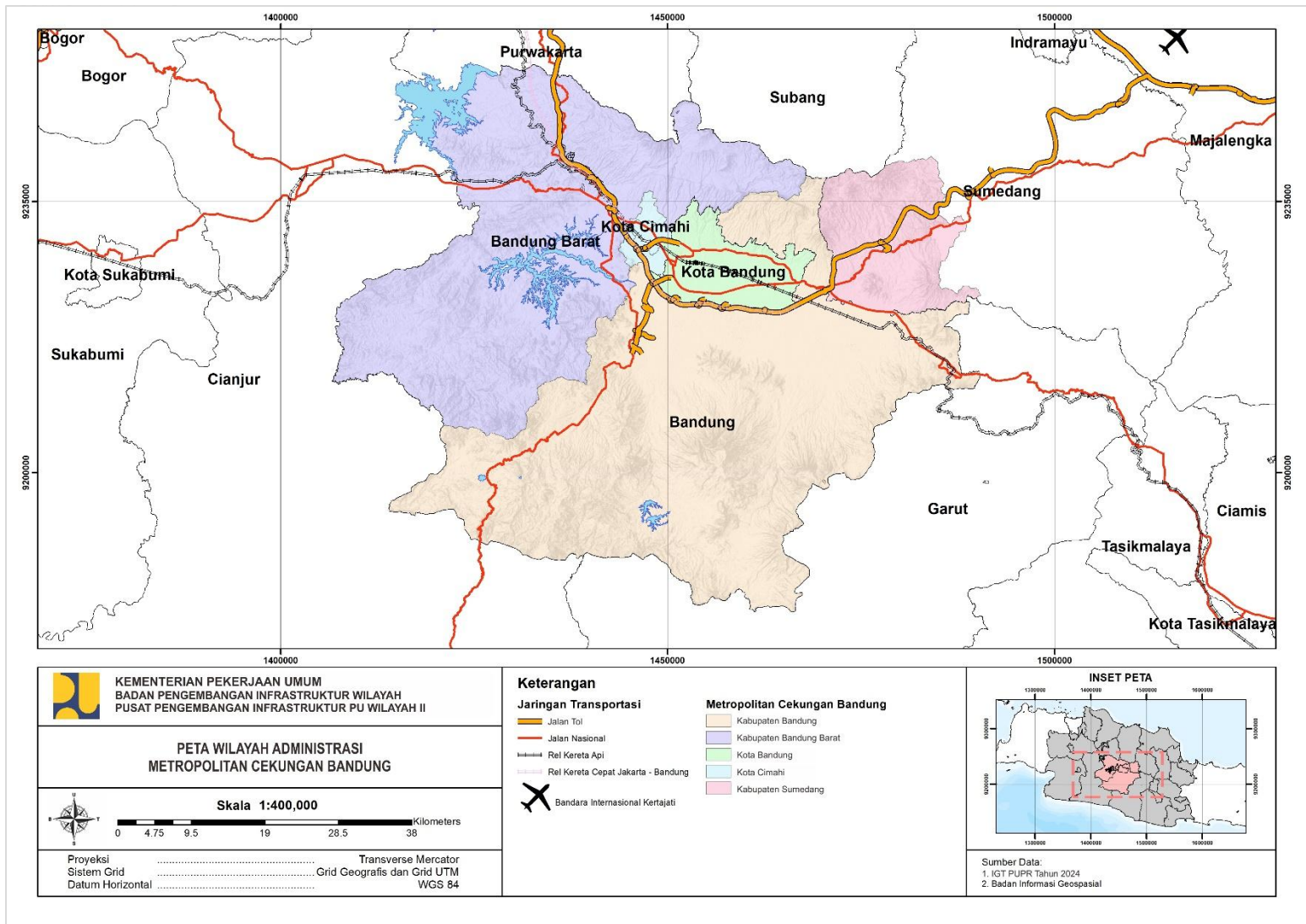
7.1.5. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas pada Bab 6, kawasan perkotaan yang menjadi prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat mencakup Wilayah Metropolitan (WM) Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon–Kertajati, serta Kawasan Perkotaan Tasikmalaya.

1) WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung

WM Bandung terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Kawasan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 sebagai salah satu dari dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Jawa Barat yang berstatus Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi. Kontribusi kawasan ini sangat signifikan, yaitu 3,3% terhadap PDB Nasional dan sekitar 24% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini didorong oleh posisi WM Bandung sebagai pusat pemerintahan provinsi sekaligus pusat kegiatan ekonomi berbasis jasa, pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif yang memiliki pertumbuhan pesat, rata-rata 1,7% per tahun.

Namun demikian, WM Bandung menghadapi tantangan besar berupa kemacetan lalu lintas, banjir, penurunan muka tanah, serta permasalahan limbah yang telah melebihi kapasitas tampung dengan pengolahan yang masih terbatas. Permasalahan ini menjadi faktor penghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan. Secara lebih jelas, administrasi metropolitan Cekungan Bandung dapat dilihat pada Peta 7.1.

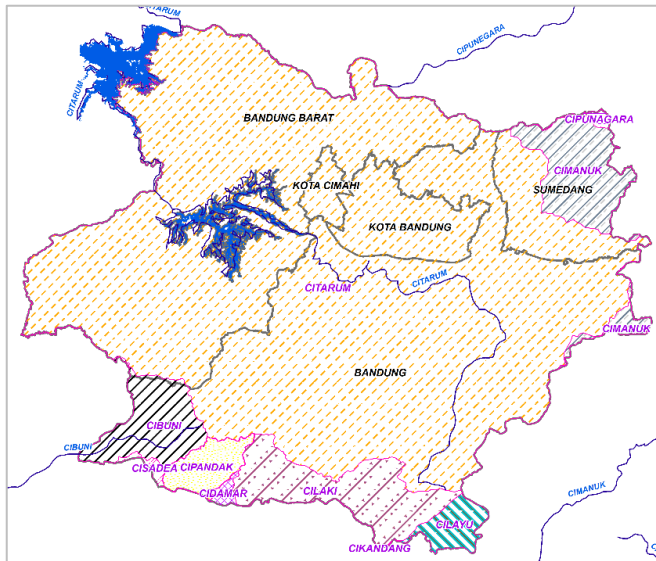


A. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, banjir, perhitungan kebutuhan infrastruktur SDA.

a) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

WM Bandung terbagi dalam dua Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Citarum dan WS Cimanuk–Cisanggarung. Sebagian besar wilayah WM Bandung masuk ke dalam WS Citarum, sedangkan WS Cimanuk–Cisanggarung mencakup sebagian wilayah Kabupaten Sumedang.



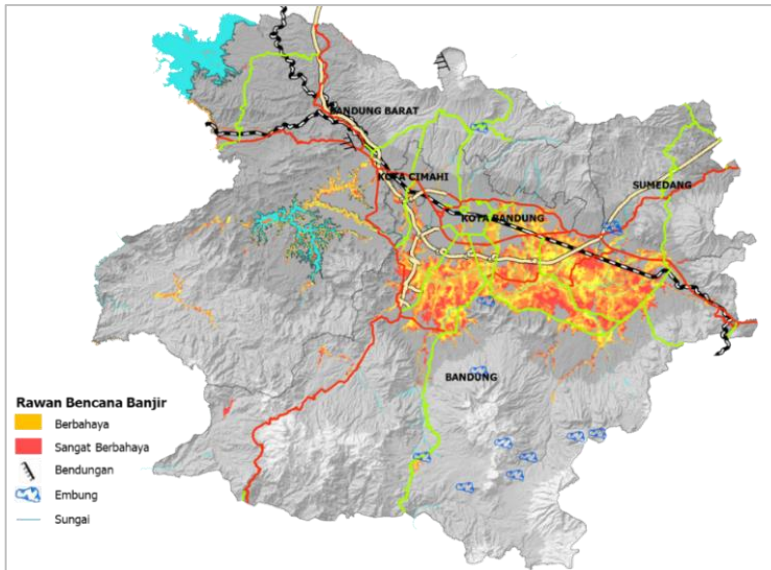
Gambar 7.11 DAS WM Bandung

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sungai Citarum merupakan sungai utama yang melintasi WM Bandung dan bermuara ke kawasan utara. Aliran sungai ini melewati tiga waduk besar yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang menjadi tulang punggung suplai air dan energi. Sungai Citarum berfungsi sebagai sumber air baku utama untuk WM Bandung sekaligus menjadi sumber potensi bencana banjir di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Risiko banjir di wilayah hulu relatif tinggi karena tingginya tingkat sedimentasi sungai dan minimnya kawasan resapan air. Hal ini menjadikan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung memiliki urgensi tinggi dalam penanganan banjir meskipun keduanya berada di kawasan hulu.

Kebutuhan air baku di WM Bandung untuk sektor domestik, industri, dan pariwisata diproyeksikan mencapai 49.983 liter/detik pada tahun 2034, meningkat sekitar 11.735 liter/detik dibandingkan tahun 2021. Dari sisi ketersediaan, WS Citarum memiliki



Gambar 7.13 Kawasan Rawan Banjir WM Bandung

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c) Analisis Kebutuhan Air Baku Perkotaan

Kebutuhan penyediaan air baku di WM Bandung mencakup sektor permukiman, industri, jasa pariwisata, dan pendidikan. Pada tahun 2025 kebutuhan air diproyeksikan sebesar 40.959 liter/detik, menurun sedikit pada 2029 menjadi 40.464 liter/detik, lalu meningkat pada 2034 menjadi 48.606 liter/detik. Kebocoran air diperkirakan sebesar 20% untuk seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Bandung yang mencapai 30%.

Sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan kebutuhan air yang cukup signifikan. Pada 2025 kebutuhan air wisatawan sebesar 375 liter/detik, naik menjadi 472 liter/detik pada 2029, dan mencapai 631 liter/detik pada 2034. Untuk sektor industri, kebutuhan air pada 2025 tercatat 2.123 liter/detik, sedikit menurun menjadi 2.110 liter/detik pada 2029, dan kembali meningkat pada 2034 menjadi 2.463 liter/detik.

Kebutuhan air untuk sektor pendidikan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang sebagai pusat perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa diproyeksikan stabil dengan asumsi masuk dan lulus seimbang, serta 65% berasal dari luar daerah. Kebutuhan air total untuk mahasiswa di WM Bandung diperkirakan sebesar 405 liter/detik, terdiri atas 345 liter/detik di Kota Bandung dan 60 liter/detik di Kabupaten Sumedang.

Tabel 7.56 Kebutuhan Air Domestik WM Bandung

Kab/Kota	Kebutuhan Air (lt/dtk)			Kebocoran Air (%)			Total Kebutuhan Air (lt/dtk)		
	2025	2029	2034	2025	2029	2034	2025	2029	2034
Kota Bandung	5.229	5.799	6.185	45,6	43,8	40,0	13.705	15.009	15.587
Kota Cimahi	920	1.020	1.360	26,6	24,8	20,0	2.096	2.291	2.937
Bandung	6.298	6.983	9.311				14.351	15.687	20.113
Bandung Barat	3.032	3.362	4.483				6.910	7.553	9.684
Sumedang	520	577	770				1.186	1.296	1.662
TOTAL	16.000	17.741	22.110				38.248	41.837	49.983

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Air Minum Kota Inti 150 lt/dt, air minum Kota Sekitar 120 lt/dt

**) Faktor jam Puncak 1,8

Tabel 7.57 Kebutuhan Air Wisatawan WM Bandung

Provinsi Jawa Barat	Proyeksi Wisatawan (ribu orang/tahun)		Kebutuhan Tempat Tidur		Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	
	2029	2034	2029	2034	2029	2034
Kota Bandung	9.449	15.054	54.183	85.505	94,07	148,45
Kota Cimahi	31	51	136	218	0,24	0,38
Bandung	100	161	485	774	21	24
Bandung Barat	86	139	398	639	0,69	1,11
Sumedang	8	13	34	55	0,06	0,09
TOTAL					139,82	174,03

Sumber: Analisis BPIW, 2025

*) Baseline kebutuhan air (liter/bed/hari)

Tabel 7.58 Kebutuhan Air Mahasiswa WM Bandung

Provinsi Jawa Barat	Proyeksi Mahasiswa (orang/tahun)			Kebutuhan Air Mahasiswa (lt/dtk)		
	2025	2034	2029	2025	2029	2034
Kota Bandung	305.412	305.412	305.412	345	345	345
Sumedang	53.415	53.415	53.415	60	60	60
TOTAL	358.827	358.827	358.827	405	405	405

Sumber: Analisis BPIW, 2025

*) Baseline kebutuhan air (liter/bed/hari)

Tabel 7.59 Total Kebutuhan Air WM Bandung

Total Kebutuhan Air WM Bandung															
Kab/Kota	Rumah Tangga			Industri			Pariwisata			Pendidikan			TOTAL		
	2025	2029	2034	2025	2029	2034	2025	2029	2034	2025	2029	2034	2025	2029	2034
Kota Bandung	12.617	12.478	12.841	1.009	998	1.027	46,08	94,07	148,45	345	345	345	14.017	13.915	14.361
Kota Cimahi	219	223	293	18	18	23	0,3	0,4	0,5	-	-	-	237	241	317
Bandung	13.699	13.669	17.652	1.096	1.094	1.412	20	21	24	-	-	-	14.815	14.784	19.088
Bandung Barat	7.093	7.052	9.243	-	-	-	0,9	1,1	1,5	-	-	-	7.094	7.053	9.245
Sumedang	4.682	4.376	5.509	-	-	-	0,1	0,1	0,1	60	60	60	4.742	4.436	5.569
TOTAL	38.310	37.797	45.539	2.123	2.110	2.463	67	117	175	405	405	405	40.905	40.430	48.580

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Jalan

Analisis kebutuhan infrastruktur jalan di WM Bandung meliputi kajian jaringan jalan, pergerakan, jumlah kendaraan, bangkitan lalu lintas, dan kebutuhan infrastruktur jalan.

a) Analisis Jaringan Jalan

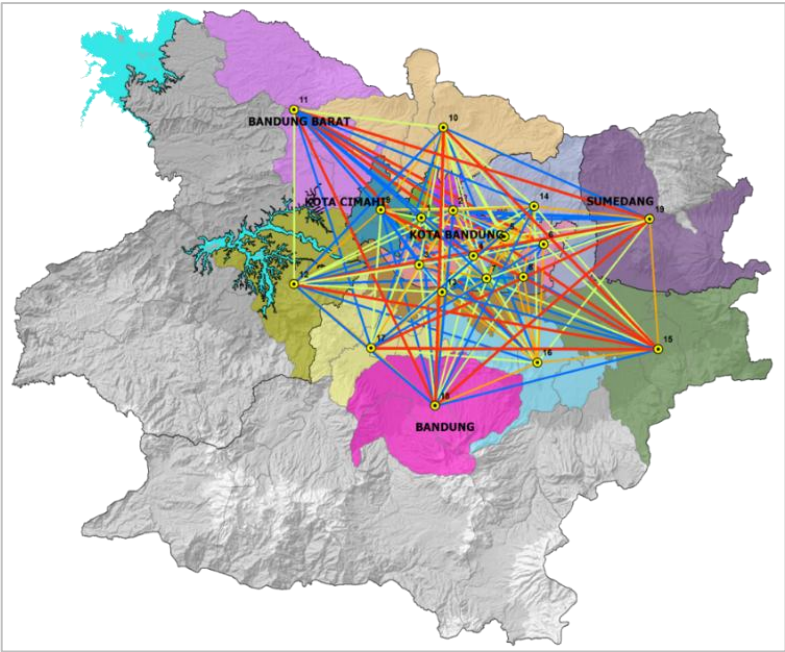
Kecepatan rata-rata jalan nasional di WM Bandung hanya 25 km/jam, jauh di bawah standar layanan jalan perkotaan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 40 km/jam. Terdapat 20 ruas jalan perkotaan utama dengan tingkat kepadatan tinggi, ditandai rata-rata kecepatan kendaraan hanya 15 km/jam. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya simpang sebidang dengan perlintasan kereta api, tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata, serta pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan.

Lalu lintas harian rata-rata (LHRT) di WM Bandung mencapai 162.469 kendaraan/hari, dengan volume tertinggi di Jalan Cibiru, Kota Bandung yang mencapai 9.494 kendaraan/hari. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata diperkirakan akan semakin menambah volume lalu lintas

b) Analisis Pergerakan

Asal dan tujuan pergerakan di dalam WM Bandung tertinggi adalah Kabupaten Bandung-Kota Bandung mencapai 71 juta orang/tahun begitupun sebaliknya mencapai 69 juta orang/tahun. Pergerakan yang tinggi tersebut menyebabkan kemacetan pada beberapa ruas jalan nasional salah satunya ruas Jalan Cibiru yang menghubungkan Kota Bandung (Cileunyi) dengan Kabupaten Bandung. Pergerakan yang tinggi menuju dan keluar Kota/Kabupaten Bandung ini disebabkan oleh kegiatan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi pada hari kerja maupun hari libur.

Pergerakan keluar WM Bandung tertinggi yaitu menuju dan dari Jakarta mencapai 23 juta orang/tahun, selain itu pergerakan menuju dan dari Jawa Tengah tergolong sedikit hanya mencapai 9,5 juta orang/tahun. Pergerakan dari dan keluar WM Bandung sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pelaku perjalanan dapat memilih antara jalan bebas hambatan (jalan tol) maupun jalan nasional.



Gambar 7.14 Origin Destination WM Bandung

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c) Perhitungan Kendaraan

Kendaraan bermotor di WM Bandung pada 2024 mencapai 3,6 juta unit, dengan dominasi sepeda motor (78,9%) dan mobil pribadi (17,27%). Pertumbuhan kendaraan diperkirakan 2%/tahun, dengan mayoritas penggunaan adalah kendaraan pribadi (96,48%) dibandingkan kendaraan umum (3,52%).

Beban kendaraan terbesar berada di Kota Bandung yang menampung hampir setengah total kendaraan (49,02%) meski panjang jalan hanya 49,31 km. Hal ini menyebabkan kemacetan kronis yang diperparah oleh parkir liar, pedagang kaki lima, volume kendaraan tinggi, aktivitas ekonomi, dan perlintasan kereta api.

Tabel 7.60 Proyeksi Jumlah Kendaraan WM Bandung

Kota/ Kabupaten	Jumlah Kendaraan (dalam ribu)		
	2024	2029	2034
Bandung	1.108	1.250	1.410
Sumedang	318	359	405
Bandung Barat	635	771	935
Kota Bandung	1.473	1.494	1.516
Kota Cimahi	288	303	318
TOTAL	3.825	4.179	4.585

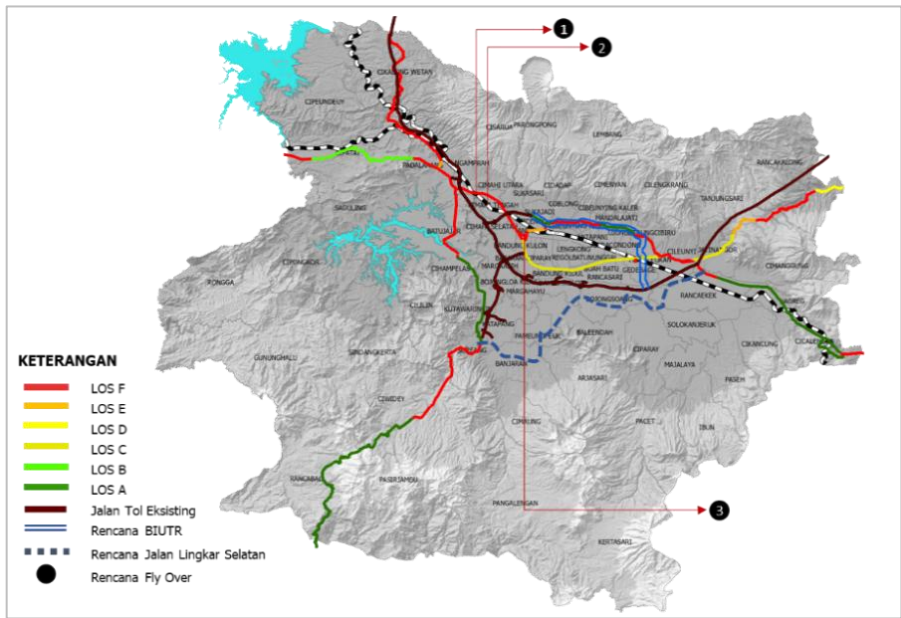
Sumber: Hasil Analisis, 2025

d) Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kawasan Cekungan Bandung sebagai salah satu kawasan Metropolitan tidak lepas dari permasalahan kemacetan. Penyebab kemacetan utama adalah tidak maksimalnya kapasitas jalan perkotaan yang disebabkan karena adanya parkir liar, PKL, tingginya volume kendaraan, tingginya aktivitas ekonomi, dan perlintasan kereta api. Selain itu, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 11%/tahun tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan dengan nilai 1,2%/tahun. Perhitungan kebutuhan infrastruktur jalan dapat digambarkan dalam skenario penanganan, yaitu:

i. Skenario Bangkitan 1

Keterbatasan dalam peningkatan jalan perkotaan Cekungan Bandung mengakibatkan tidak sebandingnya peningkatan lalu lintas harian (LHR) dengan peningkatan panjang jalan. Skenario ini mengusulkan pembangunan jalan lingkar selatan, Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR), jalan tol Sukabumi–Padalarang, dan peningkatan jalan Soreang–Ciwidey.



Gambar 7.15 Skenario 1 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034

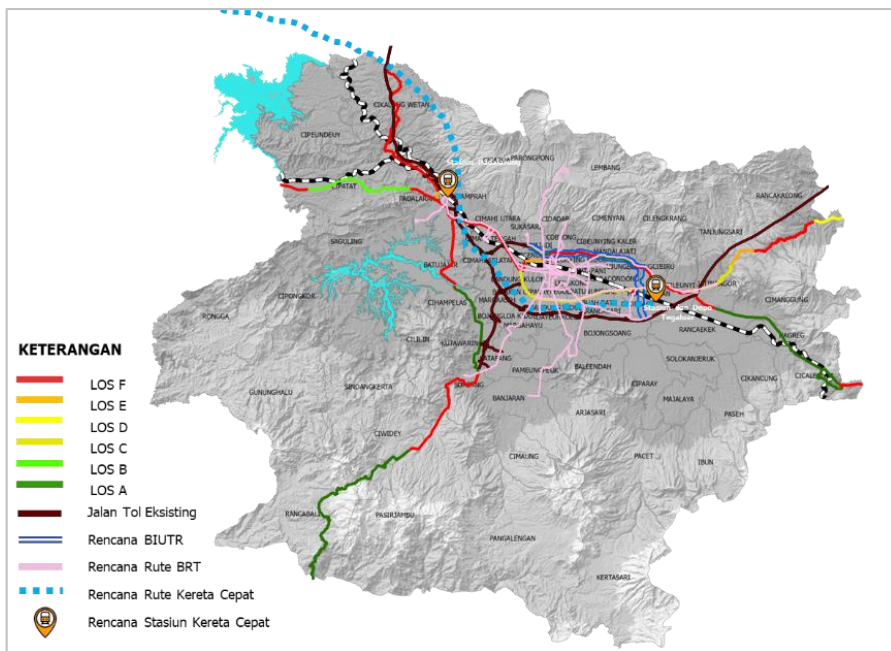
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hingga tahun 2034 mendatang, akan tetap terjadi peningkatan arus lalu lintas yang tidak dapat ditangani dengan total bangkitan 232.253 smp diantaranya pada koridor Cianjur–Padalarang (Jl. Raya Rajamandala), koridor Purwakarta–Padalarang (Cisomang–Batas Kota Padalarang), koridor wisata KSPN Ciwidey (Jl. Lingkar Selatan Soreang–Ciwidey), koridor Padalarang–Cimahi (Jl. Rajawali Barat), koridor Bandung–Cileunyi (Jl. Cibiru dan Cinunuk–Cileunyi Kulon). Secara lebih jelas, skenario bangkitan

kendaraan yang terjadi di Metropolitan Cekungan Bandung apabila tanpa mengembangkan transportasi publik dapat dilihat pada Gambar 7.15.

ii. Skenario Bangkitan 2

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan terdapat bangkitan 232.253 smp/hari yang meskipun terdapat peningkatan jalan, sehingga diperlukan perpindahan moda menggunakan transportasi publik di koridor utama Padalarang–Cimahi–Kota Bandung, Soreang–Luwipanjang, Elang–Gedebage, Jatinangor–Cileunyi–Kota Bandung, Banjaran–Bojongsoang–Kota Bandung. Pengembangan transportasi publik dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan tingkat pergeseran penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum dengan tahapan dari pengembangan BRT, LRT, dan *Commuter Line*.



Gambar 7.16 Skenario 2 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Rencana pengembangan transportasi publik dapat menampung 238.272 orang perhari dengan asumsi jam puncak pukul 06.30–09.00 dan 17.00–20.00. Skenario ini direkomendasikan karena dapat mengurangi beban jalan perkotaan yang sulit ditingkatkan karena keterbatasan lahan. Secara lebih jelas, skenario bangkitan kendaraan yang terjadi di Metropolitan Cekungan Bandung apabila mengembangkan transportasi publik dapat dilihat pada Gambar 7.16

Tabel 7.61 Proyeksi LHRT dan VCR WM Bandung pada Skenario 1

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	LHRT				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
22031	Citarum–Rajamandala–Bts. Kota Padalarang	15,041	7,82	3.266	3.940	4.753	6.008	1,14	1,37	1,66	2,10
2203111	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	3,084	8,337	1.958	2.361	2.848	3.602	0,60	0,72	0,87	1,10
22032	Eks Toll Rajamandala	4,577	7,615	2.699	3.255	3.927	4.965	0,94	1,13	1,37	1,73
2203211	Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala)	0,894	10,82	2.114	2.550	3.076	3.889	0,57	0,69	0,83	1,05
22033	Bts. Kota Padalarang–Bts. Kota Bandung	4,08	9,32	7.957	9.599	11.579	14.637	2,22	2,68	3,23	4,08
2203311	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	1,845	9,424	3.181	3.837	4.628	5.851	0,89	1,07	1,29	1,64
2203312	Jln. Raya Cimahi (Cimahi)	2,488	9,729	10.071	12.148	14.654	18.525	2,81	3,39	4,09	5,17
2203313	Jln. Raya Cibabat (Cimahi)	1,957	13,68	2.730	3.293	3.973	5.022	0,71	0,86	1,03	1,31
2203314	Jln. Cibeureum (Bandung)	2,8	15,28	2.600	3.136	3.783	4.783	0,68	0,82	0,98	1,25
2203315	Jln. Sudirman (Bandung)	1,23	15,18	2.576	3.107	3.748	4.739	0,67	0,81	0,97	1,23
2203316	Jln. Rajawali Barat (Bandung)	0,97	9,624	4.727	5.702	6.878	8.695	1,32	1,59	1,92	2,43
2203317	Jln. Nurtanio (Bandung)	1,2	11,61	6.148	7.416	8.946	11.309	1,60	1,93	2,33	2,94
2203318	Jln. Abdul Rahman Saleh (Bandung)	1,04	15,77	2.548	3.073	3.707	4.687	0,66	0,80	0,96	1,21
2203319	Jln. Pajajaran (Bandung)	1,06	14,79	2.017	2.434	2.936	3.710	0,52	0,63	0,76	0,96
220331A	Jln. Pasir Kaliki (Bandung)	0,71	16,03	1.478	1.783	2.151	2.719	0,38	0,46	0,56	0,70
2203411	Jln. Sukarno–Hatta (Bandung)	18,35	28,2	4.788	5.776	6.967	8.807	1,25	1,50	1,81	2,30
2203511	Jln. Gede Bage (Bandung)	0,458	7,504	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203611	Cinunuk–Cileunyi Kulon (Jalan Laboratorium)	1,211	6,614	1.755	2.117	2.553	3.228	0,46	0,55	0,66	0,85
22037	Bts. Kota Bandung–Bts. Kota Cileunyi	3,636	11,23	10.336	12.468	15.040	19.013	2,69	3,24	3,91	4,95
2203711	Jln. Layang Pasupati (Gajibu–Ciampedes Bandung)	1,8	9,366	3.149	3.799	4.582	5.793	0,82	0,99	1,19	1,51
2203712	Jln. Pasteur–Dr. Djundjuran (Bandung)	2,77	16,76	6.793	8.194	9.884	12.496	1,77	2,13	2,57	3,26
2203713	Jln. Surapati (Bandung)	1,8	14,58	3.777	4.556	5.496	6.948	0,98	1,19	1,43	1,80
2203714	Jln. Khp Hasan Mustopa / Suci (Bandung)	2,372	14,14	2.998	3.617	4.363	5.515	0,78	0,94	1,13	1,43
2203715	Jln. Raya Sindanglaya (Bandung)	4,185	12,92	6.744	8.135	9.813	12.405	1,75	2,12	2,55	3,22
2203716	Jln. Raya Ujung Berung (Bandung)	2,88	13,55	2.011	2.425	2.926	3.699	0,52	0,63	0,76	0,96
2203717	Jln. Raya Cipadung (Bandung)	1,45	12,75	2.027	2.445	2.949	3.729	0,53	0,64	0,77	0,97
2203718	Jln. Cibiru (Bandung)	0,55	15,37	3.547	4.279	5.162	6.525	0,92	1,11	1,34	1,69
2203719	Bts. Kota Cileunyi–Nagreg (Rancaekek–Cileunyi–Cicalengka/Parakan Muncang)	18,14	15,51	4.374	5.277	6.365	8.046	1,14	1,37	1,66	2,10

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	LHRT				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
2203720	Jln. Raya Cipacing (Cileunyi)	1,099	19,92	5.448	6.571	7.927	10.022	1,42	1,71	2,06	2,61
2203721	Jln. Raya Rancaekek (Rancaekek)	1,954	20,22	1.647	1.987	2.396	3.030	0,43	0,52	0,62	0,79
2203722	Nagreg–Bts. Kab. Bandung/Garut	2,335	4,86	1.849	2.230	2.690	3.401	0,48	0,58	0,70	0,88
2203723	Cisomang–Bts. Kota Padalarang	23,279	7,287	882	1.064	1.284	1.622	0,23	0,28	0,33	0,42
2203724	Jln. Raya Purwakarta (Padalarang)	0,94	6,512	788	951	1.147	1.450	0,20	0,25	0,30	0,37
2203725	Jln. Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi–Jatinangor	0,579	14,86	1.349	1.627	1.962	2.481	0,35	0,42	0,51	0,64
2203726	Jatinangor–Bts. Kota Sumedang	9,537	7,201	1.068	1.288	1.554	1.965	0,28	0,34	0,40	0,52
2203727	Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor)	6,469	8,852	2.460	2.968	3.580	4.525	0,64	0,77	0,93	1,18
2203728	Jln. Raya Tanjungsari (Tanjungsari)	3,352	6,175	4.524	5.457	6.583	8.322	1,18	1,42	1,71	2,17
2203729	Jln. Pangeran Kornel (Sumedang)	4,369	7,358	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203730	Jln. Palasari (Sumedang)	1,275	7,366	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203731	Bts. Kota Sumedang–Cijelag	26,716	6,575	2.344	2.827	3.411	4.312	0,61	0,74	0,89	1,12
2203732	Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang)	4,281	7,072	1.906	2.299	2.773	3.506	0,50	0,60	0,72	0,92
2203733	Cijelag–Kadipaten	4,618	6,825	585	706	851	1.076	0,15	0,18	0,22	0,28
2203734	Lingkar Nagreg	4,8	9,049	3.742	4.514	5.445	6.883	0,97	1,17	1,42	1,78
2203735	Cimareme–Batujajar	8,21	5,933	2.962	3.573	4.310	5.449	0,77	0,93	1,12	1,42
2203736	Batujajar–Soreang	13,07	7,4	2.508	3.025	3.649	4.613	0,65	0,79	0,95	1,20
2203737	Jln. Lingkar Selatan Soreang–Ciwidey	11,691	8,662	1.021	1.232	1.486	1.878	0,27	0,32	0,39	0,50
2203738	Jln. Raya Ciwidey	1,94	6,323	1.408	1.698	2.048	2.590	0,37	0,44	0,53	0,68
2203739	Jln. Bhayangkara	0,87	6,614	1.343	1.621	1.955	2.470	0,35	0,42	0,51	0,64
2203740	Ciwidey–Rancabali	14,63	6,173	1.385	1.670	2.015	2.548	0,36	0,43	0,52	0,66
2203741	Rancabali–Bts. Bandung/Cianjur	14,8	5,032	102	123	148	188	0,03	0,03	0,04	0,06

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.62 Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 2

No Ruas	Nama Ruas	VCR	Kapasitas Jalan	GAP LHRT (BIUTR)				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
2203211	Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala)	0,45	3701	756	149	-584	-1.716	1,03	1,24	1,49	1,89
2203311	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	0,58	3587	-802	-1707	-2799	-4.486	1,53	1,85	2,23	2,81
2203313	Jln. Raya Cibabat (Cimahi)	0,84	3845	-3185	-4636	-6385	-9.087	2,45	2,96	3,57	4,51
2203314	Jln. Cibeureum (Bandung)	0,47	3845	783	151	-611	-1.788	1,07	1,29	1,55	1,96
2203315	Jln. Sudirman (Bandung)	0,73	3845	-2228	-3481	-4992	-7.327	2,12	2,55	3,08	3,89
2203316	Jln. Rajawali Barat (Bandung)	0,93	3587	-3479	-4937	-6695	-9.411	2,46	2,97	3,58	4,53
2203317	Jln. Nurtanio (Bandung)	0,57	3845	36	-750	-1698	-3.162	1,33	1,60	1,93	2,44
220331A	Jln. Pasir Kaliki (Bandung)	0,49	3845	321	-406	-1283	-2.638	1,23	1,48	1,79	2,26
2203611	Cinunuk–Cileunyi Kulon (Jln Laboratorium)	0,90	2496	-1078	-1815	-2704	-4.078	1,25	1,50	1,81	2,29
22037	Bts. Kota Bandung–Bts. Kota Cileunyi	0,48	3845	135	-630	-1553	-2.979	1,29	1,56	1,88	2,38
2203711	Jln. Layang Pasupati (Gajibu–Ciampedes Bandung)	0,65	3587	-1150	-2127	-3305	-5.126	1,65	1,99	2,40	3,04
2203713	Jln. Surapati (Bandung)	0,62	3845	-572	-1484	-2583	-4.281	1,54	1,86	2,24	2,83
2203714	Jln. Khp Hasan Mustopa / Suci (Bandung)	0,44	3845	519	-166	-994	-2.272	1,16	1,40	1,69	2,13
2203716	Jln. Raya Ujung Berung (Bandung)	0,55	3845	-705	-1644	-2776	-4.525	1,59	1,91	2,31	2,92
2203717	Jln. Raya Cipadung (Bandung)	0,54	3845	-601	-1518	-2624	-4.333	1,55	1,87	2,25	2,85
2203718	Jln. Cibiru (Bandung)	1,05	3845	-4800	-6583	-8734	-12.057	3,01	3,63	4,38	5,54
2203811	Jln. Raya Cipacing (Cileunyi)	0,79	3845	-910	-1890	-3073	-4.901	1,66	2,00	2,41	3,05
2203812	Jln. Raya Rancaekek (Rancaekek)	0,55	3845	519	-167	-995	-2.273	1,16	1,40	1,69	2,13
22039	Nagreg–Bts. Kab. Bandung/Garut	0,79	1607	-529	-969	-1500	-2.321	0,74	0,90	1,08	1,37
2208511	Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor)	0,79	3271	-1174	-2091	-3197	-4.905	1,55	1,87	2,25	2,85
2208611	Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang)	0,49	2869	134	-430	-1111	-2.162	0,95	1,15	1,39	1,75
22104	Cimareme–Batujajar	0,46	1607	61	-257	-642	-1.236	0,51	0,65	0,78	0,99
2210612	Jln. Raya Ciwidey	0,38	2496	442	18	-493	-1.282	0,72	0,86	1,04	1,32
2210613	Jln. Bhayangkara	0,37	2496	495	82	-416	-1.186	0,70	0,84	1,02	1,28

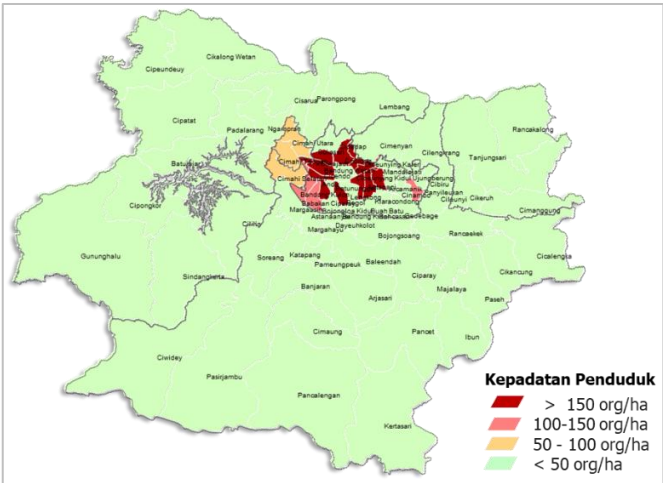
Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis infrastruktur permukiman di WM Bandung meliputi proyeksi pertumbuhan kawasan serta kebutuhan layanan dasar berupa air minum, perpipaan, persampahan, dan air limbah.

a) Proyeksi Pertumbuhan Kawasan

Wilayah perkotaan Bandung dan Cimahi merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yang terus meningkat dalam 10 tahun ke depan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Bojongloa Kaler (385 jiwa/ha), Regol (191 jiwa/ha), Antapani (251 jiwa/ha), Kiaracondong (214 jiwa/ha), Batununggal (226 jiwa/ha), Andir (243 jiwa/ha), Cicendo (150 jiwa/ha), Cibeuying Kidul (192 jiwa/ha), Cibeuying Kaler (149 jiwa/ha), dan Sukajadi (256 jiwa/ha). Kepadatan ini menuntut penyediaan infrastruktur permukiman yang lebih memadai untuk mendukung kualitas hidup perkotaan.



Gambar 7.17 Proyeksi Kepadatan Penduduk WM Bandung 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b) Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air Minum

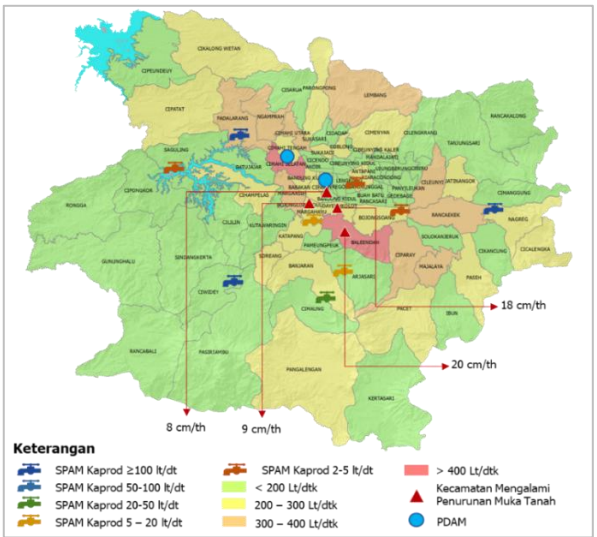
Tingkat pelayanan air minum perpipaan di WM Bandung rata-rata sebesar 11,9%, masih berada di bawah target pelayanan air minum perpipaan sebesar 30%. Peningkatan jaringan air minum perpipaan terutama pada kawasan dengan kepadatan tinggi sangat penting mengingat tingginya penggunaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah, khususnya di Dayeuhkolot (18 cm/tahun), Baleendah (20 cm/tahun), serta Bandung Kidul dan Margahayu (8–9 cm/tahun).

Tingkat pelayanan air perpipaan terendah terdapat di Kabupaten Bandung Barat dengan layanan 2,5%, sedangkan tertinggi berada di Kota Bandung dengan layanan

19,8%. Selain belum maksimalnya tingkat layanan perpipaan, perluasan jaringan perlu difokuskan pada lokasi dengan penurunan muka tanah tertinggi, terutama kawasan industri dan permukiman padat penduduk. Untuk mencapai target pelayanan air minum perkotaan minimal 30%, dibutuhkan tambahan kapasitas instalasi pengolahan air sebesar 4.065 lt/detik.

Namun, rencana peningkatan jaringan perpipaan masih terkendala oleh rendahnya kinerja pelayanan eksisting. Sistem pelayanan air minum saat ini memiliki *idle capacity* yang tinggi, seperti pada PDAM Tirta Wening Kota Bandung (2.789 lt/dt kapasitas, *idle* 2.122 lt/dt) dan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung (1.072 lt/dt kapasitas, *idle* 73 lt/dt). Selain itu, tingkat kebocoran jaringan juga cukup besar, dengan kebocoran tertinggi terjadi di wilayah PDAM Tirta Wening Kota Bandung.

Dengan proyeksi kebutuhan air minum kawasan perkotaan sebesar 150 lt/orang/hari, kebutuhan tertinggi terdapat di kecamatan padat penduduk seperti Bojongloa Kaler, Regol, Antapani, Kiaracondong, Batununggal, Andir, Cicendo, Cibeuying Kidul, Cibeuying Kaler, dan Sukajadi. Prioritas pengembangan jaringan perpipaan juga diarahkan pada kecamatan dengan jumlah penduduk besar sekaligus rawan *land subsidence*, yaitu Baleendah (jaringan 28%), Dayeuhkolot (22%), dan Bandung Kidul (32%).



Gambar 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum WM Bandung 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.63 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Bandung

Pelayanan PDAM Tirta Wening Terhadap Kota Bandung				
Capacity Eksisting = 810 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2024	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	150	150	150	150
Kebutuhan Total (lt/dtk)	3,511	3,541	3,661	3,818
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	37.90%	37.70%	36.90%	35.90%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	4,842	4,876	5,012	5,188
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	19.8%	20.8%	24.8%	29.8%
GAP (lt/dtk)	-149	-204	-433	-736

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.64 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Cimahi

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Kota Cimahi				
Capacity Eksisting = 213 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	150	150	150	150
Kebutuhan Total (lt/dtk)	1,039	1,053	1,108	1,181
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	26.66%	26.16%	24.16%	21.66%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	1,317	1,328	1,376	1,437
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	12.6%	13.6%	17.6%	22.6%
GAP (lt/dtk)	47	32	-29	-112

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun

**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

Tabel 7.65 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Kab. Bandung				
Capacity Eksisting = 160 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2024	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	5,213	5,258	5,444	5,685
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	26.66%	26.16%	24.16%	21.66%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	6,602	6,634	6,759	6,916
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	12.6%	12.8%	13.3%	13.9%
GAP (lt/dtk)	-674	-686	-738	-803

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.66 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung Barat

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Bandung Barat				
Capacity Eksisting = 125 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2024	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	2,617	2,651	2,791	2,977
Tingkat Kebocoran (%) ^{*)}	31.10%	30.90%	30.10%	29.10%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	3,431	3,470	3,631	3,843
Peningkatan Pelayanan (%) ^{**)}	2.5%	3.5%	7.5%	12.5%

GAP (lt/dtk)	38	2	-149	-357
--------------	----	---	------	------

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun
**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

Tabel 7.67 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sumedang

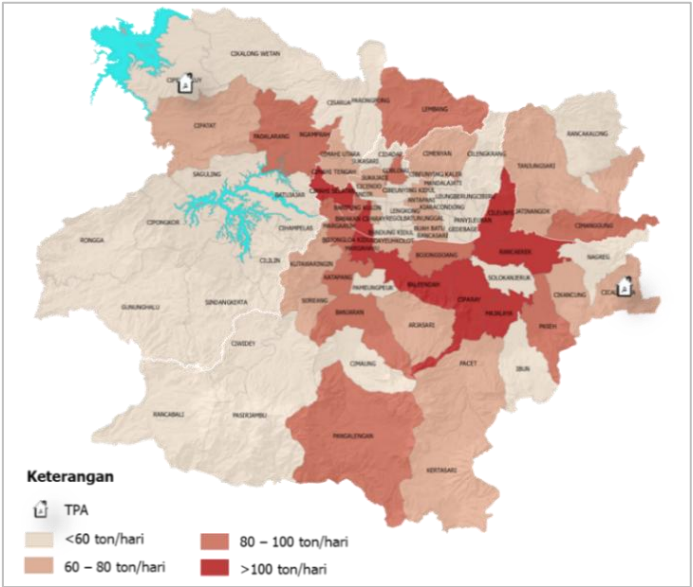
Pelayanan PDAM Terhadap Sumedang				
Capacity Eksisting = 100 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	470	1,649	1,698	1,761
Tingkat Kebocoran (%) *)	39.59%	39.39%	38.59%	37.59%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	657	2,298	2,353	2,423
Peningkatan Pelayanan (%) **)	16.0%	17.0%	21.0%	26.0%
GAP (lt/dtk)	-5	-292	-395	-531

Sumber: Hasil Analisis, 2025

*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun
**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

c) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Tingkat pelayanan persampahan di WM Bandung baru mencapai 50,23% dari total timbulan sampah 1.959 ton/hari. Angka ini tergolong tinggi, namun pengolahan masih terkendala karena TPA Sarimukti sudah *overcapacity*, dengan timbunan mencapai 50 meter dari batas maksimal 15 meter.



Gambar 7.19 Kebutuhan Penanganan Sampah WM Bandung 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pembangunan TPA Legok Nangka dengan kapasitas 2.000 ton/hari diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah dan melayani hingga 100% kebutuhan di kawasan perkotaan. Kuota terbesar dialokasikan untuk Kota Bandung (960 ton/hari), disusul Kabupaten Bandung (450 ton/hari), Kota Cimahi (250 ton/hari), Bandung Barat (160 ton/hari), dan Sumedang (8,86 ton/hari). Namun, karena skema KPBU masih dalam proses, operasional Legok Nangka diperkirakan baru dapat dimulai paling cepat pada 2026.

Untuk sementara, penanganan tetap bergantung pada TPA Sarimukti. Agar dapat memperpanjang umur layanan, direncanakan perluasan lahan seluas 18 Ha (tahap I: 5,8 Ha), sehingga kapasitas meningkat menjadi 3.500 ton/hari dan umur layanan dapat diperpanjang hingga 22 bulan.

Tabel 7.68 Proyeksi Timbulan Sampah WM Bandung

Tahun	2025	2029	2034
Jumlah Penduduk (Jiwa)	9.515.561	10.020.102	10.688.565
Timbulan Sampah (kg/hari)	5.382.900	5.668.317	6.046.462
Timbulan Sampah (ton/hari)	5.382,90	5.668,32	6.046,46
Timbulan Sampah Reduksi (m ³ /hari)	20.086	21.245	22.782
Timbulan Sampah Reduksi (ton/hari)	4.944,23	5.229,64	5.607,79
Timbulan Sampah Setelah Kompaksi (m ³ /hari)	5.164	6.221	7.435
Penduduk Terlayani (jiwa)	3.666.371	3.860.772	4.118.332
Proyeksi Sampah Terangkut (m ³ /hari)	11.476	13.824	16.521
Proyeksi Sampah Terangkut (m ³ /tahun)	4.188.889	5.045.784	6.030.402

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.69 GAP Sampah Terlayani Tanpa Penanganan Pada TPA Sarimukti

Kab/Kota	Timbulan ¹⁾	Kapasitas TPA (2026) ²⁾	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)				Proyeksi Sampah Terangkut (%)				GAP Penanganan (ton/hari)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kota Bandung	0,66	499	1.510	1.569	1.593	1.616	97,95	100	100	100	-979	-1.070	-1.093	-1.117
Kota Cimahi	0,4	66	197	204	212	220	86,46	88,14	90,35	92,56	-104	-113	-125	-137
Bandung	0,55	626	525	594	664	736	25,52	28,23	30,94	33,65	492	459	421	379
Bandung Barat	0,4	219	213	239	266	293	46,82	49,51	52,21	54,91	120	101	81	58
Sumedang	0,69	65	75	83	91	99	36,55	39,40	42,26	45,12	38	32	27	20
TOTAL			2.520	2.689	2.825	2.964								

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.70 GAP Sampah Terlayani Skenario Beroperasinya TPA Legok Nangka

Kab/Kota	Timbulan ¹⁾	Kapasitas TPA ²⁾	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)			Persentase Sampah Masuk Landfill (Metode RDF)	Proyeksi Sampah Terangkut (%)	GAP Penanganan (ton/hari)		
			2026	2029	2034			2026	2029	2034
Kota Bandung	0,66	960	1.616	1.689	1.154	55%	84%	9.362	8.649	2.885
Kota Cimahi	0,4	250	220	248	2.045		79%	2.438	2.252	1.459
Bandung	0,55	450	735	962	272		18%	4.388	4.054	792
Bandung Barat	0,4	160	293	378	449		21%	1.560	1.441	166
Sumedang	0,69	8,86	98	124	146		31%	86	80	-337
TOTAL			2.962	3.401	4.066					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

¹⁾kg/orng/hari

²⁾ton/hari

d) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Limbah

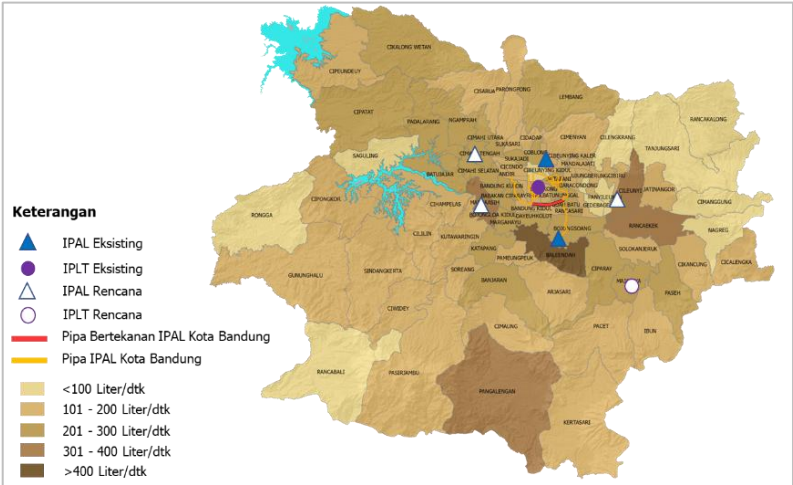
Tingkat sanitasi aman di WM Bandung masih di bawah standar nasional. Kota Bandung memiliki capaian tertinggi dengan 15,8%, disusul Kabupaten Bandung (7,21%), Kota Cimahi (6,72%), dan Kabupaten Bandung Barat (1,78%). Bila ditinjau per kecamatan, peningkatan layanan sanitasi belum signifikan, dengan total penanganan air limbah pada 2024 sekitar ±74 ribu lt/dtk. Kecamatan Baleendah, sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, menghasilkan timbunan air limbah terbesar yakni 304,7 lt/dtk, dan diproyeksikan meningkat sebesar 42 lt/dtk pada 2034.

Tabel 7.71 GAP Proyeksi Penanganan Air Limbah Cekungan Bandung

Kecamatan Prioritas	Air Limbah 2024	Kapasitas 2024	Air Limbah 2029	Kapasitas 2029	Air Limbah 2034
Bojongloa Kaler	175.53	926 lt/dtk	187.25	1.319 lt/dtk	199.74
Kiara Condong	184.81		197.14		210.29
Batununggal	171.29		182.71		194.90
Astana Anyar	102.57		109.42		116.72
Andir	138.21		147.43		157.27
Bandung Kulon	192.61		205.46		219.17
Bandung Wetan	40.85		43.57		46.48
TOTAL	979.37		1.072.98		1.144.57

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penanganan air limbah sebenarnya telah diarahkan melalui program Citarum Harum, namun keterbatasan kesiapan pemerintah daerah menyebabkan pembangunan instalasi pengolahan belum berjalan optimal. Saat ini, satu-satunya instalasi yang beroperasi adalah IPAL Bojongsoang dengan kapasitas 926 lt/dtk, yang diprioritaskan untuk 7 kecamatan mencakup 9 kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi di Kota Bandung.



Gambar 7.20 Kebutuhan Penanganan Limbah WM Bandung 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2) Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati

Kawasan Perkotaan Cirebon (KPC) merupakan salah satu simpul utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian timur. Secara administratif, kawasan ini mencakup Kota Cirebon sebagai inti, dengan wilayah sekitarnya di Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka sebagai hinterland. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dan Kawasan Jawa Barat Selatan, KPC ditetapkan sebagai bagian dari Rebana Metropolitan yang berfungsi sebagai pusat investasi, perdagangan, industri, dan logistik.

Secara peran, KPC menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2022–2042, dengan fungsi penting sebagai simpul transportasi nasional sekaligus penghubung Jawa Barat–Jawa Tengah. Kawasan ini juga mendapat legitimasi dari Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 yang menetapkan Cirebon sebagai salah satu titik pertumbuhan ekonomi strategis berbasis industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Posisi strategis KPC di jalur pantura menjadikannya sebagai pusat distribusi barang regional dan internasional serta pendukung utama Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

Meski demikian, KPC menghadapi tantangan seperti lonjakan arus logistik, alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ancaman banjir rob. Karena itu, arah pengembangan difokuskan pada peningkatan jaringan jalan, transportasi logistik, serta penguatan layanan dasar perkotaan agar Cirebon dapat berfungsi optimal sebagai pintu gerbang timur Jawa Barat.

A. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, banjir, perhitungan kebutuhan infrastruktur SDA.

a) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Kota Cirebon berada dalam wilayah pengelolaan Wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung, dengan sumber utama air baku berasal dari Sungai Cisanggarung, Waduk Kuningan, dan air tanah dangkal. Sumber air baku eksisting masih terbatas, dengan pelayanan air minum perkotaan didominasi oleh PDAM yang kapasitasnya belum sebanding dengan kebutuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dari 347.835 jiwa (2025) menjadi 375.402 jiwa (2034) menuntut ketersediaan pasokan air baku yang lebih andal. Oleh karena itu, integrasi sistem suplai dari jaringan SPAM regional seperti SPAM Jatigede menjadi sangat penting untuk memperkuat pasokan air minum di Kota Cirebon.

b) Analisis Kebutuhan Air Baku Perkotaan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air baku di Kota Cirebon diproyeksikan terus meningkat hingga periode 2025–2034. Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada standar kebutuhan domestik sebesar 120 liter/orang/hari dan kebutuhan non-domestik sebesar 20% dari kebutuhan domestik. Dengan demikian, kebutuhan total setara dengan 144 liter/orang/hari atau sekitar 0,00167 liter/detik per kapita. Berdasarkan proyeksi penduduk, total kebutuhan air baku Kota Cirebon diperkirakan mencapai lebih dari 580 liter/detik pada tahun 2025 dan meningkat hingga sekitar 627 liter/detik tahun 2034.

Tabel 7.72 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Cirebon

Tahun	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air (L/detik)
2025	347.835	580,6
2029	359.828	600,7
2034	375.402	626,9

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Jalan

Kawasan Perkotaan Cirebon (KPC) sebagai bagian dari Kawasan Rebana menghadapi tekanan lalu lintas yang signifikan akibat perkembangan kawasan industri dan orientasi logistik menuju Pelabuhan Patimban. Bangkitan lalu lintas dari KI Cirebon diproyeksikan naik dari 2.744,5 smp/hari (2025) menjadi 3.558,3 smp/hari (2034), diperkuat arus logistik dari Bekasi (± 48 ribu smp/hari) dan Karawang (± 90 ribu smp/hari). Kondisi ini menempatkan KPC sebagai simpul distribusi barang utama di Jawa Barat bagian timur.

Beberapa ruas arteri strategis seperti Jalan Raya Jamblang, Jalan Brigjen Darsono, dan Jalan Jend. A. Yani telah berada pada tingkat pelayanan LOS D–F, dan tanpa peningkatan kapasitas diproyeksikan menurun lebih lanjut hingga 2034. Hal ini menimbulkan risiko kemacetan kronis yang dapat menghambat konektivitas industri dan distribusi logistik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang diperlukan mencakup peningkatan kapasitas jalan arteri, pembangunan jalan lingkar, integrasi akses jalan tol, serta pengembangan transportasi publik. Selain itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang KA Jl. Slamet Riyadi menjadi program prioritas guna mengurangi hambatan lalu lintas akibat perpotongan jalur kereta api dengan jalan raya. Intervensi ini diharapkan meningkatkan kelancaran distribusi logistik, memperbaiki mobilitas perkotaan, serta memperkuat peran KPC sebagai simpul logistik strategis kawasan Rebana.

Tabel 7.73 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Perkotaan Cirebon (2034)

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	AADT	Lebar	LHR 2020	VCR 2020	LOS 2020	Prakiraan Beban	Prakiraan VCR 2034	LOS 2034
015	Bts. Kota Palimanan–Bts Kota Cirebon	8,79	18.754	14,259	781,42	0,89	D	1.927,42	0,98	E
015.11	Jln. Raya Palimanan I (Palimanan)	0.24	18635	14.174	776,46	0,31	A	2.266,46	0,35	A
015.12	Jln. Raya Jamblang (Cirebon)	1.30	18660	14.223	777,50	0,91	E	2.267,50	1,02	F
015.13	Jln. Raya Klangeran (Cirebon)	0.78	18458	14.164	769,08	0,81	D	2.259,08	0,91	E
015.14	Jln. Brigjen. Darsono (Cirebon)	2.65	15928	14.183	663,67	0,9	E	2.153,67	1,02	F
015.15	Jln. Jend. A. Yani (Cirebon)	3.60	17153	14.186	714,71	0,65	B	2.204,71	0,73	C
015.16	Jln. Pilangsari (Cirebon)	2.58	13474	6.991	561,42	0,54	A	2.051,42	0,62	B
015.17	Jln. Slamet Riyadi (Cirebon)	0.44	13785	14.154	574,38	0,34	A	2.064,38	0,39	A
015.18	Jln. Siliwangi (Cirebon)	0.20	13539	14.25	564,13	0,11	A	2.742,13	0,13	A
016	Lohbener–Bts. Kota Indramayu	6.09	10233	6.764	426,38	0,49	A	3.148,07	0,64	B
016.11	Jln. Soekarno-Hatta (Indramayu)	1.66	7660	6.813	319,17	0,48	A	3.040,86	0,67	B
017	Lingkar Indramayu (Indramayu)–Karangam	9.75	7809	13.942	325,38	0,27	A	3.047,07	0,38	A
017.11	Jln. Mulia Asri (Indramayu)	9.83	7156	13.919	298,17	0,3	A	3.019,86	0,43	A
018	Karangampel–Bts. Kab. Cirebon/ Indramayu	9.92	9785	14.265	407,71	0,3	A	3.129,40	0,40	A
019	Bts.Kab.Cirebon/Indramayu (Singakerta)	17.90	11984	14.183	499,33	0,23	A	2.677,33	0,28	A
019.11	Jln. Raya Panyindangan (Cirebon)	0.31	19217	14.165	800,71	0,58	A	2.978,71	0,67	B
019.12	Jln. Diponegoro (Cirebon)	0.56	19166	14.172	798,58	0,13	A	2.976,58	0,15	A
019.13	Jln. Kapten Samadikun (Cirebon)	1.32	19429	14.146	809,54	0,15	A	2.987,54	0,17	A
019.14	Jln. Sisingamangaraja (Cirebon)	0.90	19836	14.144	826,50	0,3	A	3.004,50	0,35	A
019.15	Jln. Benteng (Cirebon)	0.42	20111	13.124	837,96	0,25	A	3.015,96	0,29	A
019.16	Jln. Yos Sudarso (Cirebon)	0.65	20114	14.185	838,08	0,16	A	3.016,08	0,18	A
020	Bts. Kota Cirebon–Losari (Bts. Prov. Jawa Tengah)	27.68	20243	14.253	843,46	0,39	A	3.021,46	0,45	A
020.11	Jln. Kasunean (Cirebon)	0.68	21071	14.174	877,96	0,2	A	3.055,96	0,23	A
020.12	Jln. Kalijaga (Cirebon)	2.39	20360	14.167	848,33	0,3	A	3.026,33	0,34	A

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis infrastruktur permukiman di Kawasan Perkotaan Cirebon meliputi proyeksi pertumbuhan kawasan serta kebutuhan layanan dasar berupa air minum, perpipaan, persampahan, dan air limbah.

a) Proyeksi Pertumbuhan Kawasan

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk Kota Cirebon diproyeksikan terus meningkat dari 347.835 jiwa pada 2025 menjadi 375.402 jiwa pada 2034. Pertumbuhan ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya air bersih dan pengelolaan air limbah.

Tabel 7.74 Proyeksi Proyeksi Penduduk Perkotaan Cirebon

Kota	2025	2029	2034
Kota Cirebon	347.835	359.828	375.402

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b) Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Mengacu pada standar RISPAM, kebutuhan air bersih dihitung dari kebutuhan domestik (Qd), non-domestik (20% dari Qd), ditambah faktor maksimum harian (Fmd) dan kehilangan (k = 20%). Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan air bersih meningkat dari 1.042,0 liter/detik pada 2025 menjadi 1.123,7 liter/detik pada 2034.

Tabel 7.75 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan Cirebon

Kota	Kebutuhan Total Air Bersih (Liter/Detik)		
	2025	2029	2034
Kota Cirebon	1.042,0	1.079,9	1.123,7

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Limbah

Berdasarkan Permen LH No.112/2003 dan Permen PUPR No.4/2017, timbulan air limbah dibagi menjadi *black water* (0,5 liter/orang/detik) dan *grey water* (80% kebutuhan air bersih). Proyeksi menunjukkan *grey water* domestik naik dari 2.953,7 liter/detik pada 2025 menjadi 3.311,2 liter/detik pada 2034, sementara kapasitas IPAL eksisting = 0. Gap signifikan ini hanya dihitung pada *grey water* domestik, karena *grey water* non-domestik biasanya dikelola sektor terkait, dan *black water* sebagian besar melalui *septic tank*.

Tabel 7.76 Proyeksi Timbulan Air Limbah Perkotaan Cirebon

Jenis Air Limbah	Timbulan (Liter/Detik)		
	2025	2029	2034
Black Water	14,2	14,9	15,9
Grey Water			
Domestik	2.953,7	3.107,5	3.311,2
Non-Domestik	590,7	621,5	662,2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 7.77 Total Gap Supply dan Demand Air Limbah Perkotaan Cirebon

Tahun	Supply (L/hari)	Demand (L/hari)	Gap (L/hari)
2025	0	2.953,7	-2.953,7
2029	0	3.107,5	-3.107,5
2034	0	3.311,2	-3.311,2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Mengacu pada Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017, Dengan luas ± 98.452 ha dan kepadatan $2.493\text{--}2.795$ jiwa/km², Kota Cirebon masih di bawah ambang batas 150 jiwa/ha dan 5.000 jiwa/km². Oleh karena itu, sistem yang sesuai adalah SPAL-D Setempat (individual/komunal).

Tabel 7.78 Kebutuhan Teknologi SPAL-D Perkotaan Cirebon

Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	2025	2029	2034	Jenis Kebutuhan
984,52	2.493–2.795	2.493	2.623	2.795	SPAL-D Setempat

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara untuk rekomendasi kebutuhan IPAL, kesenjangan *grey water* domestik yang terus meningkat mengindikasikan kebutuhan pembangunan IPAL skala permukiman di Kota Cirebon. Perhitungan menunjukkan bahwa pada 2029 dibutuhkan sekitar 135 unit IPAL, dan meningkat menjadi 144 unit pada 2034 untuk menutup gap akumulatif.

Tabel 7.79 Kebutuhan Penambahan Jumlah IPAL Perkotaan Cirebon

Tahun	Gap Akumulatif (L/detik)	Kebutuhan IPAL Akumulatif
2029	-3.107,5	135
2034	-3.311,2	144

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sebagai kesimpulan, Kota Cirebon menghadapi kesenjangan serius dalam pengelolaan air limbah. Dengan kapasitas IPAL eksisting = 0, seluruh timbulan *grey water* domestik menjadi beban lingkungan. Kepadatan penduduk mengarahkan pilihan sistem ke SPAL-D Setempat, namun pembangunan IPAL skala permukiman tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup gap yang meningkat tiap tahun.

d) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Cirebon berdampak pada peningkatan timbulan sampah yang signifikan. Proyeksi menunjukkan timbulan sampah domestik mencapai 981,5 ton/hari pada 2025, naik menjadi 1.100,3 ton/hari pada 2034. Sementara itu, sampah non-domestik dari aktivitas komersial, fasilitas umum, industri kecil-menengah, konstruksi, dan institusi publik diperkirakan meningkat dari 1.778,9 ton/hari pada 2025 menjadi 1.994,5 ton/hari pada 2034. Dengan demikian, total timbulan sampah Kota Cirebon diproyeksikan mencapai ± 1.370 ton/hari pada 2034.

Tabel 7.80 Proyeksi Timbulan Sampah Perkotaan Cirebon

Tahun	Sampah Domestik (ton/hari)	Sampah Non-Domestik (ton/hari)	Total (ton/hari)
2025	981,5	1.778,9	±1.280
2029	1.032,6	1.871,6	±1.290
2034	1.100,3	1.994,5	±1.370

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan TPA Kopiluhur dengan luas 14 hektar yang beroperasi sejak 1999 menggunakan sistem *controlled landfill*. Kapasitas efektif hanya 700–800 ton/hari, jauh di bawah kebutuhan aktual. Akibatnya, terjadi gap pelayanan yang cukup besar, yaitu -480 ton/hari pada 2025, membesar menjadi -570 ton/hari pada 2034.

Tabel 7.81 Gap Kapasitas Pengelolaan Sampah Perkotaan Cirebon

Tahun	Timbulan Total (ton/hari)	Kapasitas TPA (ton/hari)	Gap (ton/hari)
2025	±1.280	800	-480
2029	±1.290	800	-490
2034	±1.370	800	-570

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan sistem persampahan Kota Cirebon melalui modernisasi TPA Kopiluhur menjadi *sanitary landfill*, pengembangan TPS 3R dan komposting kawasan, serta penerapan teknologi alternatif seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF). Dengan strategi tersebut, diharapkan gap pengelolaan dapat ditekan, keberlanjutan lingkungan tetap terjaga, dan pelayanan persampahan dapat memenuhi standar nasional.

3) Kawasan Perkotaan Tasikmalaya

Kawasan Perkotaan Tasikmalaya merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, serta industri kreatif di wilayah Priangan Timur. Kota ini berperan strategis sebagai simpul konektivitas antara wilayah selatan Jawa Barat (Garut, Ciamis, dan Pangandaran) dengan jalur lintas tengah Pulau Jawa. Arah pengembangan kota diarahkan untuk memperkuat fungsi pusat pelayanan regional, memperluas basis ekonomi produktif, serta meningkatkan daya dukung lingkungan dan ketahanan infrastruktur perkotaan.

A. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, perhitungan kebutuhan infrastruktur SDA.

a) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Perkotaan Tasikmalaya berada dalam pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Cimanuk–Cisanggarung, yang meliputi sebagian besar kawasan timur dan selatan Jawa Barat. Kebutuhan air baku di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya untuk sektor domestik dan agroindustri diproyeksikan mencapai 1.206 liter/detik pada tahun 2034, meningkat sekitar 11 liter/detik dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh

pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di wilayah Indihiang, Tamansari, dan Cibeureum.

Dari sisi ketersediaan, WS Cimanuk–Cisanggarung memiliki potensi air sebesar 230 m³/detik, dengan sekitar 52,049 m³/detik (22,63%) yang sudah dimanfaatkan pada tahun 2025. Pemanfaatan ini mencakup kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan tenaga listrik. Namun, dengan tren peningkatan kebutuhan lintas sektor, tingkat pemanfaatan terhadap potensi air baku diproyeksikan menurun menjadi 21,75% pada tahun 2029, menandakan potensi tekanan pada sumber daya air akibat distribusi spasial dan keterbatasan infrastruktur pengambilan air.

Tabel 7.82 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Tasikmalaya

Tahun	Kebutuhan Air Baku (L/detik)	Ketersediaan Air (m ³ /detik)	Air Termanfaatkan (m ³ /detik)	Persentase Pemanfaatan (%)
2025	1.195	230	52,049	22,63
2029	1.202	230	50,000	21,75
2034	1.206	230	49,900	21,70

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b) Analisis Kebutuhan Air Baku Perkotaan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air baku di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya diproyeksikan terus meningkat selama periode 2025–2034. Penyediaan air baku mencakup dua sektor utama, yaitu domestik dan agroindustri, dengan perhitungan mengacu pada standar kebutuhan domestik sebesar 100 liter/orang/hari dan agroindustri sebesar 15% dari kebutuhan domestik.

Dengan asumsi tersebut, kebutuhan total air baku setara dengan 1.010,88 liter/detik pada tahun 2025 atau sekitar 0,00133 liter/detik per kapita. Berdasarkan proyeksi penduduk, kebutuhan ini akan terus meningkat menjadi 1.058,99 liter/detik pada tahun 2029 dan mencapai 1.122,37 liter/detik pada tahun 2034.

Tabel 7.83 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Perkotaan Tasikmalaya

Tahun	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air (L/detik)
2025	759.478	1.010,88
2029	795.627	1.058,99
2034	843.242	1.122,37

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Jalan

Proyeksi penambahan kendaraan pada beberapa ruas jalan nasional di wilayah perkotaan Tasikmalaya hingga tahun 2034 mengalami peningkatan. Sejumlah ruas mengalami tekanan lalu lintas yang cukup tinggi, seperti Jln. Raya Ciawi (VCR 1,2), Rajapolah – Bts. Kab. Ciamis (VCR 1,7), dan Jln. Raya Indihiang (VCR 1,3) yang sudah menunjukkan kinerja jalan yang melebihi kapasitas ideal, menandakan potensi kemacetan dan perlunya penanganan prioritas. Sebaliknya, ruas seperti Bts. Kab.

Tasikmalaya/Garut – Rajapolah masih dalam kondisi cukup baik dengan VCR 0,5. Meskipun beberapa ruas mengalami lonjakan signifikan dalam proyeksi volume kendaraan, seperti Jln. Moch. Hatta yang diperkirakan mencapai hampir 30.000 smp/hari pada 2034, VCR-nya tetap stabil di 0,8, menunjukkan kapasitas jalan yang masih memadai. Secara keseluruhan, hal ini menegaskan pentingnya perencanaan peningkatan kapasitas dan pengelolaan lalu lintas secara strategis, terutama pada ruas-ruas dengan nilai VCR tinggi, untuk menjaga kelancaran mobilitas dan efisiensi jaringan transportasi di masa depan.

Tabel 7.84 Proyeksi LHRT dan VCR Perkotaan Tasikmalaya

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	LHRT 2025	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/hari)		VCR	
				2029	2034	2029	2034
22044	Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya	12.530	4.210	16.692	18.736	0,9	0,9
22041	Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Rajapolah	6.855	5.039	18.569	20.613	0,5	0,5
2204111	Jln. Raya Ciawi (Ciawi)	16.837	9.606	13.861	15.905	1,2	1,2
22042	Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis	24.271	7.805	15.311	17.355	1,7	1,7
2204411	Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah)	10.671	8.462	13.960	16.004	0,8	0,8
2204412	Jln. Raya Indihiang (Indihiang)	17.259	6.734	15.059	17.103	1,3	1,3
2204413	Jln. Re. Martadinata (Tasikmalaya)	14.165	6.621	14.735	16.779	1,0	1,0
22045	Bts. Kota Tasikmalaya - Ancol	11.092	6.400	7.968	10.012	0,8	0,8
2204511	Jln. Moch. Hatta (Tasikmalaya)	11.028	12.703	27.528	29.572	0,8	0,8

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis infrastruktur permukiman di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya meliputi proyeksi pertumbuhan kawasan serta kebutuhan layanan dasar berupa air minum, persampahan, dan air limbah.

a) Proyeksi Pertumbuhan Kawasan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Perkotaan Tasikmalaya diperkirakan terus meningkat dari 759.478 jiwa pada tahun 2025 menjadi 843.241 jiwa pada tahun 2034. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan rata-rata sekitar 1,2% per tahun dan menjadi dasar perencanaan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya air minum, air limbah, dan persampahan.

Tabel 7.85 Proyeksi Proyeksi Penduduk Perkotaan Tasikmalaya

Kota	2025	2029	2034
Kota Tasikmalaya	759.478	795.626	843.241

Sumber: Hasil Analisis, 2025

a) Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tingkat pelayanan air minum perpipaan di Perkotaan Tasikmalaya saat ini baru mencapai sekitar 22,63%, masih di bawah target nasional 30% untuk pelayanan air

minum perpipaan di kawasan perkotaan. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas produksi dan distribusi air oleh Perumdam Tirta Sukapura selaku penyedia utama layanan air minum di wilayah ini.

Kapasitas eksisting SPAM Tirta Sukapura tercatat sebesar 230 liter/detik, sedangkan kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi kebutuhan air bersih hingga tahun 2034 menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara kapasitas eksisting dan kebutuhan aktual.

Tabel 7.86 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Perkotaan Tasikmalaya

Pelayanan Perumdam Tirta Sukapura Terhadap Perkotaan Tasikmalaya				
Capacity Eksisting = 230 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2024	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	100	100	100	100
Kebutuhan Total (lt/dtk)	868.87	879.02	920.86	975.97
Tingkat Kebocoran (%) ¹⁾	38.5%	37.57%	33.85%	29.20%
Beban Puncak	1.8	1.8	1.8	1.8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	1383.89	1390.67	1417.46	1450.10
Peningkatan Pelayanan (%) ²⁾	22.63%	23.63%	27.63%	32.63%
GAP (lt/dtk)	-83	-99	-162	-243

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Limbah

Kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Perkotaan Tasikmalaya diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman. Berdasarkan hasil analisis, total timbulan air limbah meningkat dari 1.441,61 liter/detik pada tahun 2025 menjadi 1.920,72 liter/detik pada tahun 2034.

Sementara itu, tingkat pelayanan pengelolaan air limbah juga mengalami peningkatan signifikan, dari 8% pada tahun 2025 menjadi 55% pada tahun 2034, seiring rencana pembangunan IPAL komunal skala kawasan dan pengembangan SPAL-D Setempat di wilayah padat penduduk.

Tabel 7.87 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah Perkotaan Tasikmalaya

Tahun	Kebutuhan Air Limbah (L/detik)	Persentase Pelayanan (%)	Air Limbah Terlayani (L/detik)
2024	1.216,50	8%	97,32
2025	1.441,61	8%	115,33
2029	1.510,21	30%	453,01
2034	1.920,72	55%	1.056,39

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Seiring waktu, volume timbulan sampah dan layanan pengelolaan sampah terus mengalami peningkatan untuk mengimbangi jumlah penduduk yang semakin besar. Pada tahun 2025, volume timbulan sampah mencapai 270,92 ton per hari dan meningkat menjadi 283,81 ton per hari di tahun 2029, kemudian terus meningkat

hingga 300,80 ton per hari di tahun 2034. Volume sampah yang terangkut juga mengalami peningkatan dari 303,76 m³ per hari pada tahun 2025 menjadi 341,28 m³ per hari di tahun 2029, dan selanjutnya meningkat menjadi 391,03 m³ per hari di tahun 2034. Jumlah penduduk yang terlayani oleh sistem pengangkutan sampah turut meningkat dari 524.040 jiwa pada tahun 2025 menjadi 674.593 jiwa pada tahun 2034.

Tabel 7.88 Proyeksi Timbulan Sampah Perkotaan Tasikmalaya

Tahun	2025	2029	2034
Jumlah Penduduk (Jiwa)	759.478	795.626	843.241
Timbulan Sampah (kg/hari)	270.920	283.810	300.800
Timbulan Sampah (ton/hari)	270,92	283,81	300,80
Timbulan Sampah Setelah Kompaksi (m ³ /hari)	440,24	461,19	488,79
Penduduk Terlayani (jiwa)	524.040	588.764	674.593
Proyeksi Sampah Terangkut (m ³ /hari)	303,76	341,28	391,03
Proyeksi Sampah Terangkut (m ³ /tahun)	110.873,92	124.567,92	142.727,36

Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Dalam pengembangan infrastruktur fokus pelayanan dasar perkotaan, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku WM Bandung yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan SPAM Bandung Selatan, SPAM Bandung Timur, dan SPAM Bandung Barat yang ditargetkan pada tahun 2029 keseluruhan SPAM dapat beroperasi. Selain itu, pembangunan polder pengendali banjir oleh SDA pada tahun 2025 perlu diterpadukan dengan peningkatan kapasitas drainase perkotaan oleh Pemerintah Daerah.

Pada fokus pertanian, pembangunan Bendungan Sadawarna yang sudah diresmikan tahun 2022 harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daerah irigasi Kuningan, Seseupan, dan Cikeusik menandakan keterpaduan pembangunan untuk mendukung kawasan lumbung pangan khususnya di bagian utara Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang ditargetkan beroperasi tahun 2024 sebagai akses Bandara Kertajati. Sama halnya dengan pembangunan Akses Tol Cipali-Patimban yang ditargetkan selesai tahun 2024 sebagai akses Pelabuhan Patimban yang saat ini berperan menjadi gerbang ekspor-impor baru di Provinsi Jawa Barat.

Pada fokus pariwisata, penataan kawasan pada DTW Prioritas yang ditargetkan selesai tahun 2029 harus ditindaklanjuti dengan pembangunan TPST, Shelter Tsunami, dan Jalur Evakuasi Bencana untuk menciptakan kawasan kepariwisataan yang terpadu. Selain itu, terdapat juga pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang ditargetkan beroperasi tahun 2025 harus ditindaklanjuti dengan pelebaran jalur vertikal Cibadak-Cikidang-Pelabuhan Ratu dan tol Sukabumi-Padalarang agar pada tahun 2029 seluruh ruas dapat beroperasi untuk mendukung aksesibilitas menuju kawasan pariwisata. Pada Kawasan Pariwisata Jawa Barat Selatan, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang ditargetkan selesai tahun 2029 harus ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur permukiman seperti SPAM Perkotaan Pangandaran, IPLT Purbahayu, dan TPA Sampah Bojongsari. Peningkatan akses jalan yang dilakukan tersebut untuk mendukung perkembangan kawasan pariwisata dan berpotensi menimbulkan pertumbuhan baru.

Tabel 7.89 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PU	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PU	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	Bendungan Jatigede (2006-2013)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2014	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	2023	SPAM Regional Jatigede (Intake Tahap I)	2023 – 2025	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Sumedang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Penyediaan layanan listrik tenaga air (PLTA) sebesar 110 MW oleh PT. PLN Indonesia Power. Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cimanuk dan Cisanggarung oleh KLHK	Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk membentuk lembaga pengelola SPAM Regional yang melibatkan Kota Cirebon, Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu. Kewenangan Pemerintah Kab. Indramayu dan Cirebon untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, Cipanundan	2025 – 2029			SPAM Regional Jatigede (Intake Tahap II)	2028 – 2029					
		Irigasi	Jaringan Irigasi DI Rentang	Saluran tersier (2026)									
2	Bendungan Kuningan (2013-2020)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2020	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan	2029 - 2029	SPAM Kuningan (300 lt/dtk)	2025	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Industri Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Penyediaan layanan listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 0,5 MW oleh Kemen ESDM. Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cisanggarung oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kab. Kuningan membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah. Kewenangan Pemerintah Kab. Kuningan untuk mengendalikan
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, Cipanundan	2025 – 2029									

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PU	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PU	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasio nal	Jenis Penanganan	Waktu Operasi onal	Jenis Penanganan	Waktu Operasi nal	Jenis Penanganan	Waktu Operasi nal			
		Irigasi	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cileuweung	2024 – 2025									alih fungsi lahan pertanian.
			Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Seusepan	2024 - 2025			Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Kuningan	2025 – 2029					
			Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikeusik	2024 - 2025									
3	Bendungan Sadawarna (2018-2022)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2022	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	2022 – 2024	SPAM Subang (Manyingsal)	2025 – 2029	Penyediaan Rumah Susun Pekerja Subang	2025 – 2029	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya, dan Perumahan dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Subang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cipunagara oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kab. Subang membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir Kab. Subang	2025 – 2026	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan– Pangaden– Subang	2029 - 2029	Pembangunan TPST Kabupaten Subang	2025 - 2029					
4	Bendungan Leuwikeris (2016-2023)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2016 (On going)	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah	2024 - 2029	-	-	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA,	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai	Kewenangan PDAM Kota Tasik, Kab. Ciamis, dan

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PU	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PU	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
		Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lakkok Utara	2025 – 2029	Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)						Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata dan Pertanian di Jawa Barat Selatan	Citanduy oleh KLHK.	Kab. Pangandaran membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
5	Bendungan Cipanas (2018-2023)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2018 (On going)	Pembangunan Akses Jalan Tol Pelabuhan Patimban	2022 – 2024	SPAM Cipanas	2029 – 2029	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Subang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cimanuk oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir Kab. Indramayu	2025 – 2026	-								
6	Terowongan Nanjung (2017-2019)	Pengendali Banjir	Pembangunan Kolam Retensi Babakan Jeruk	2024 – 2025	Pembangunan FO Persimpangan dan Perlintasan Kereta Api	2025 – 2029	Rehabilitasi IPLT Cibeet	2024 – 2024	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya	Keterpaduan dengan KLHK dalam melakukan konservasi DAS	Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PU	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PU	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
7	Sudetan (Floodway) Cisangkuy (2015-2020)	Peningkatan Aksesibilitas	Pembangunan Kolam Retensi Citepus	2025 – 2029	Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	2026 – 2029	Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	2025 – 2029			dalam mendukung keberadaan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung yang memiliki kepadatan penduduk tinggi serta rawan terjadi banjir		membangun drainase perkotaan. Kewenangan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan Flood Early Warning System.
			Pembangunan Kolam Retensi Cikutra	2025 – 2029			Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	2026 – 2029					
			Pembangunan Waduk Sukawana	2026 – 2029	Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	2026 – 2029	Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	2027 – 2029					
			Pembangunan Waduk Cipanengah	2025 – 2029			Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Selatan	2028 – 2029					
			Pembangunan Waduk Cikapundung	2026 – 2029	Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan Cekungan Bandung	2025 – 2029	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Timur	2029 – 2029					
			Pembangunan Waduk Rancaekek	2025 – 2029									
			Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	2024 – 2025	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Gedebage	2024 – 2024	Rehabilitasi IPAL Perkotaan	2030 – 2029					
8	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang	Peningkatan Aksesibilitas	Penyediaan Air Baku	2028 – 2029	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak–	2024 – 2025	Peningkatan Kapasitas SPAM Pelabuhan Ratu	2025 – 2026	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga,	Keterpaduan dengan Kemenpar untuk mengembangkan	Pemerintah Kab. Sukabumi untuk peningkatan kapasitas jalan

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PU	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PU	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan					
			Jenis Penanganan	Waktu Operasio nal	Jenis Penanganan	Waktu Operasi onal	Jenis Penanganan	Waktu Operasio nal	Jenis Penanganan	Waktu Operasion al								
	(seksi I&II 2026-2029)				Cikidang–Pelabuhan Ratu						dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	destinasi wisata di DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	pada Perkotaan Sukabumi dan Jalan Surade-Ujunggenteng					
					Peningkatan Jalan Pelabuhan Ratu–Cisolok	2025 – 2027	Pembangunan TPST Pada DTW Prioritas	2025 – 2029										
					Peningkatan Jalan Surade–Ujung Genteng	2025 – 2027												
8	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (seksi I&II 2026-2029)	Peningkatan Aksesibilitas	-	-	Peningkatan Kapasitas Jalan Nagrek–Garut	2026 – 2029	Peningkatan Kapasitas SPAM Pelabuhan Ratu	2025 – 2026	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata di Kawasan Jawa Barat Selatan	Keterpaduan dengan Kemenpar untuk mengembangkan destinasi wisata di KSPN Pangandaran dan KPPN Priangan Timur	Pemerintah Kab. Garut dan Kota. Tasikmalaya untuk peningkatan kapasitas jalan pada Perkotaan					
					Jalan Lingkar Malangbong	2026 – 2029												
					Jalan Lingkar Tasikmalaya	2026 – 2029	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)	2025 – 2029										
						2026 – 2029												

Sumber: Hasil Analisis 2025

BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi (*action plan*) disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada bab ini memuat rencana aksi pembangunan infrastruktur yang diturunkan dari *grand strategy* dan dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2025 hingga tahun 2034 mendatang.

8.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PU

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang keempat sektor yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Yang mana pembangunannya dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab dari semua pihak terkait, tentunya Kementerian PU mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkannya. Selanjutnya pada subbab ini dijelaskan rencana aksi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh keempat Unit Organisasi (UNOR) di lingkup Kementerian PU yaitu: Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), dan Cipta Karya (CK).

Dalam tabel rencana aksi infrastruktur bidang PU ini dijelaskan tentang program-program (kegiatan) dari masing-masing UNOR, dengan cakupan kerja pada kawasan prioritas dan lokasi spesifik di kabupaten/kota yang dimaksud, dilengkapi dengan justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan *Readiness Criteria* (dilihat dari kondisi tahun 2023 ini), asal sumber dana yang dibutuhkan, dan periode rencana tahun pelaksanaan (sejak dimulai sampai dengan selesai) dari masing-masing program di kawasan prioritas.

8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur SDA

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur SDA dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06 - DJSDA	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Cileuweung	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Kuningan	- Sumber air DI Cileuweung berasal dari Bendungan Kuningan dengan debit 3.608 lt/dtk - DI Cileuweng direncanakan akan mengalir dari 1.024 Ha sawah di Kab. Kuningan dan 2.000 Ha di Kab. Brebes - Kontribusi produksi beras Kabupaten Kuningan sebesar 161.790 ton/tahun atau 3,01% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 2,14. - Sudah ada DED tahun 2022, perlu direviu ulang.	Agar diper- siapkan		10 km	140.000.000	APBN	2027	2027
2	06 - DJSDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seusepan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Cirebon	- Bendung Seuseupan memiliki debit air masuk 3.000 lt/dtk dengan debit limpasan 1.000 lt/dtk, sumber air dari Sungai Cijuray yang sering kering di musim kemarau. - Melayani 3.800 Ha sawah pada 7 kecamatan di Kab. Cirebon Saluran Irigasi Seuseupan mengalami sedimentasi dengan ketinggian lebih dari 2 meter. - Kawasan Rebana memiliki kontribusi produksi beras terbesar se Jawa Barat, produksi 2,2 juta ton/tahun (42%). - Kontribusi produksi beras Kabupaten Cirebon sebesar 272.723 ton/tahun atau 5,07% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 1,73 - Pernah dibahas di Konreg 2025 namun ditangguhkan karena masih proses RC(DED)	Agar diper- siapkan		0.7 km	15.000.000	APBN	2025	2025
3	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikeusik	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Cirebon	- Sedang dibangun Bendung Cikeusik yang akan selesai tahun 2023 dengan debit 6.889 lt/dtk dengan sumber air DI Cikeusik berasal dari Sungai Cisanggarung - Bendung akan meningkatkan luasan DI Cikeusik dari 1.400 Ha menjadi 6.000 Ha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 - Kawasan Rebana memiliki kontribusi produksi beras terbesar se Jawa Barat, produksi 2,2 juta ton/tahun (42%).	Agar diper- siapkan		7.94 km	9.967.486	APBN	2025	2025

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Kontribusi produksi beras Kabupaten Cirebon sebesar 272.723 ton/tahun atau 5,07% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 1,73. - Sudah dibahas di Konsultasi Regional 2025 untuk TA 2026							
4	06 - DJSDA	Rehabilitasi jaringan irigasi Lakbok Utara	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciulan-Cilaki	Kab. Ciamis	- Tingkat layanan jaringan irigasi 30,9% dengan total 9.685 Ha - Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 52% dengan total 16.285 Ha terlayani memanfaatkan Bendungan Leuwikeris - Sudah dibahas di Konsultasi Regional 2025 untuk TA 2026	Agar diper- siapkan		20 km	141.000.000	APBN	2026	2026
5	06 - DJSDA	Pembangunan jaringan irigasi Cikalong	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciulan-Cilaki	Kab. Tasikmalaya	- Tingkat layanan jaringan irigasi 20,5% dengan total 9.254 Ha - Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 27,1% dengan total 12.254 Ha terlayani - Cek Inpres	Agar diper- siapkan		20 km	153.000.000	APBN	2027	2027
6	06 - DJSDA	Pembangunan jaringan irigasi Parigi dan Cimerak	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciulan-Cilaki	Kab. Pangandaran	- Tingkat layanan jaringan irigasi 63,3% dengan total 11.185 Ha - Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 80,2% (total 14.185 Ha terlayani). - Cek Inpres	Agar diper- siapkan		20 km	176.000.000	APBN	2027	2027
7	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Sungai Cilember	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Debit banjir Sungai Cilember mencapai 90,7 m3/detik (Q25) - Debit banjir Sungai Cibeureum mencapai 60,2 m3/detik (Q25). - Ketinggian banjir saat ini mencapai 1 meter. - Sudah dibahas di Konsultasi Regional 2024 untuk TA 2025; Diakomodasi untuk Kolam Retensi Cilember saja. Selanjutnya menyiapkan RC Cibeureum	Agar diper- siapkan		1 unit	25.000.000	APBN	2026	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Sungai Cibeureum	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Debit banjir Sungai Cilember mencapai 90,7 m3/detik (Q25). - Debit banjir Sungai Cibeureum mencapai 60,2 m3/detik (Q25). - Ketinggian banjir saat ini mencapai 1 meter. - Sudah dibahas di Konsultasi Regional 2024 untuk TA 2025; Diakomodasi untuk Kolam Retensi Cilember saja. Selanjutnya menyiapkan RC Cibeureum	Agar diper- siapkan		1 unit	25.000.000	APBN	2027	2027
9	06 - DJSDA	Penyediaan Air Baku Kertasari	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Untuk mendukung SPAM Kertasari yang akan melayani kawasan Metropolitan Cekungan Bandung - Sumber air baku utama SPAM ini adalah Sungai Citarum. - Lahan untuk SPAM Kertasari sudah disiapkan PDAM Tirta Raharja - Sudah masuk di FKW Konsultasi Regional 2025 untuk TA 2026	Agar diper- siapkan		1 unit	18.750.000	APBN	2026	2026
10	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Sukawana (dari Sungai Cimahi)	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang	- Sungai inflow untuk waduk Sukawana adalah sungai Cimahi. - Dapat menyediakan air baku 0,43 m3/dt - Aliran air dari sungai Cimahi bermuara di sungai Citarum. - Secara administrasi waduk Sukawana ini terletak di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung - Waduk Sukawana merupakan waduk multiguna yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi, industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Agar diper- siapkan		1 unit	100.000.000	APBN	2029	2034
11	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Cipanengah	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri	Cimenyan	- Dapat menyediakan air baku 1,55 m3/dt - Mendukung pelayanan air minum pada permukiman padat penduduk di Cekungan Bandung. - Mendukung pelayanan air minum pada permukiman padat penduduk di Cekungan Bandung.	Agar diper- siapkan		1 unit	450.000.000	APBN	2029	2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cekungan Bandung		- Kepadatan tinggi (>150 org/ha) yang berada di Kec Bojongloa Kaler, Kec. Regol, Kec. Antapani, Kec. Kiaracondong, Kec. Batununggal, Kec. Andir, Kec. Cicendo, Kec. Cibeuying Kidul, Kec. Cibeuying Kaler, dan Kec. Sukajadi							
12	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Rancaekek	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Dapat menyediakan air baku 0,19 m3/dt untuk Kabupaten Sumedang, 0,42 m3/dt untuk Kota Bandung, dan 3,93 m3/dt untuk Kabupaten Bandung	Agar dipersiapkan		2 unit	1.200.000.000	APBN	2029	2034
13	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi (Cikutra) dalam Mendukung Program Citarum Harum	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Sungai Citarum Hulu memiliki kapasitas terbatas dengan daya tampung rata-rata 550 m3/detik dengan Q20 sebesar 650 m3/detik. - Terdapat target pengurangan genangan sebesar 394,15 ha s.d. 2025, dimana tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar 50% - Daerah selatan yang memiliki topografi cekungan, terutama di wilayah Bandung Selatan genangan air sulit mengalir ke drainase primer. - Berdasarkan Master Plan Citarum Harum, direncanakan polder pengendali banjir dan kolam retensi yang merupakan kewenangan Pemda untuk menuntaskan banjir. - Sudah terdapat penanganan dari Ditjen SDA berupa peningkatan kapasitas sungai dan kolam retensi, sehingga ketinggian banjir berkurang (2 m menjadi 30-50 cm). - Merupakan Program Citarum Harum	Agar dipersiapkan		1 unit	50.000.000	APBN	2029	2034
14	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Babakan Jeruk	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Drainase atau saluran air di Babakan Jeruk, Jalan Djundjungan atau sekitarnya belum memadai, sehingga membuat banjir di sekitar jalan tersebut dan Jalan Pasteur. - Banjir kurang lebih setinggi satu meter disebabkan bukan hanya drainase yang belum memadai namun juga akibat tingkat sedimentasi pada drainase tinggi	Agar dipersiapkan		1 unit	70.000.000	APBN	2029	2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Citepus	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Diperlukan untuk mengatasi permasalahan di Jalan Pagarsih yang mengalami banjir karena meluapnya aliran dari Sungai Citepus yang merupakan anak Sungai Citarum - Hasil pemodelan kolam retensi didapat bahwa Q20 pada sungai Citepus yaitu 19.8 m3/det. Setelah adanya pengaruh kolam retensi Sirnaraga I, routing sungai, dan subbasin Sirnaraga II diperoleh debit Q20 yaitu 18.4 m3/det.	Agar diper- siapkan		1 unit	100.000.000	APBN	2027	2029
16	06 - DJSDA	Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kec. Dayeuhkolot, Kec. Sapan, Kec. Margaasih, Kec. Baleendah	- Telah adanya pembangunan polder yang berada di Bojongsoang, Cienteung, Cipalasari, Cijambe Barat, Cijambe Timur, dan Polder Cisangkuy oleh Kementerian PU. - Masih terjadi genangan karena belum optimalnya penanganan 66 lokasi jaringan drainase perkotaan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. - Kondisi saat ini drainase dalam kondisi tersumbat karena sampah. - Membutuhkan pengerukan dan pemeliharaan drainase rutin oleh Pemda.	Agar diper- siapkan		25 km	300.000.000	APBD	2027	2028
17	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Cipunagara	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Subang	- Penyedia air untuk mendukung Kawasan Industri Subang yang diperkirakan dapat menimbulkan pertumbuhan jumlah pekerja mencapai 2,8 ribu jiwa dengan kebutuhan air mencapai 20,7 ribu liter/detik. - Pembangunan waduk ini menunggu inisiasi dari Kemenperin terhadap perkembangan Kawasan Industri Subang.	Agar diper- siapkan		1 unit	3.700.000.000	APBN	2027	2029
18	06 - DJSDA	Pengendalian Banjir Sungai Cisanggarung	Kawasan Swasembada Pangan, Air,	Kab. Kuningan dan Kab. Cirebon	- Saat ini sudah terdapat Bendungan Kuningan (beroperasi 2021) yang bisa menangani kawasan banjir pada 3 kecamatan di Kabupaten Kuningan	Siap		8.6 km	867.436	APBN	2026	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung		- DAS aliran sungai Cisanggarung memiliki kapasitas terbatas dengan daya tampung rata-rata 734,6 m3/detik dengan Q10 sebesar 1.040,8 m3/detik. - Penyebab banjir adalah pendangkalan karena adanya sedimentasi tinggi dari erosi di hulu sungai mencapai 39.448 ton/tahun. - Luas risiko bencana banjir saat ini di Kabupaten Kuningan mencapai 6.300 Ha, jiwa terpapar sebanyak 114.000 jiwa. - Dibutuhkan normalisasi Sungai Cisanggarung							
19	06 - DJSDA	Pengendalian Banjir Kab. Subang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Subang	- Sedang dibangun Waduk Sadawarna (selesai tahun 2022) yang dapat mengatasi banjir di Sungai Cipunagara dengan kapasitas tampung 71 juta m3. - Sungai Cipunagara memiliki kapasitas terbatas, daya tampung rata-rata 302 m3/detik dengan Q25 sebesar 524 m3/dtk sehingga perlu peningkatan kapasitas Sungai Cipunagara. - Sebagai hilir sungai, Kabupaten Subang menerima aliran sungai dari Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Garut. - Penyebab banjir adalah pendangkalan karena adanya sedimentasi tinggi dari erosi di hulu serta terjadinya penyempitan aliran sungai pada hilir akibat permukiman di sempadan sungai. - Dibutuhkan normalisasi Sungai Cipunagara	Agar diper- siapkan		5 km	778.255.000	APBN	2027	2027
20	06 - DJSDA	Pembangunan Bendungan Kadumanik	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Majalengka	- Bendungan Kadumalik direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi area DI (Daerah Irigasi) Cilutung seluas ± 9.414 ha. - Direncanakan untuk suplai air baku (air konsumsi / domestik) bagi Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon dengan debit sekitar 1,5 m³/s. - Berdasarkan simulasi hidrologi/hidraulik, waduk Kadumalik diharapkan dapat menurunkan muka air maksimum dan meredam puncak debit aliran saat hujan ekstrem.	Agar diper- siapkan		1 unit	1.300.000.000	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Dalam rencana PSDA untuk wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, pembangunan Kadumalik termasuk salah satu program dalam pengelolaan aliran dan pengaturan sumber daya air.							
21	06 - DJSDA	Pembangunan Bendung Cikalong	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy, Ciwulan-Cilaki	Kab. Tasikmalaya	- Penyedia air irigasi untuk jaringan irigasi Cikalong yang melayani Kab. Tasikmalaya dan Pangandaran	Agar diper- siapkan		1 unit	150.000.000	APBN	2027	2029
22	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Cipanundan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	Kec. Waled, Cirebon	- Memiliki luas genangan sebesar 78,98 Ha. - Penyedia air untuk jaringan irigasi teknis dan ½ teknis seluas 1.168,6 Ha - Penyedia air baku sebesar 61 lt/dtk	Agar diper- siapkan		1 unit	300.000.000	APBN	2027	2029
23	06 - DJSDA	Normalisasi Sungai Citarum dan drainase secara berkelanjutan	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Total sedimentasi diperkirakan mencapai 16,9 juta ton/tahun - Sedimentasi terjadi dibeberapa aliran Sungai Citarum seperti pada Citarum-Nanjung (1,38 juta ton/tahun), Citarum-Dayeuhkolot (600 ribu ton/tahun), Citarum-Majalaya (98 ribu ton/tahun), dan Cikapundung-Maribaya (22 ribu ton/tahun) - Sedimentasi terjadi karena sebagian hulu Sungai Citarum memiliki tingkat erosi berat (31,4% dari total DAS).	Agar diper- siapkan		1 km	2.100.000	APBN	2026	2026

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	06 - DJSDA	Normalisasi Sungai Ciliwung	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur	Kota Bogor dan Kota Depok	- Sedimentasi di WS Ciliwung-Cisadane disebabkan tingkat erosi berat dan sangat berat (>18 ton/ha/tahu) mencapai 52.816,15 Ha (15,2% dari total luas WS) - Kapasitas tampung Sungai Ciliwung 500 m3/dtk tidak bisa menampung debit limpasan yang mencapai 600 m3/dtk - Normalisasi juga diperlukan pada kawasan Metropolitan Jakarta (hilir) karena sedimentasi yang terbawa dari hulu sebagai akibat dari degradasi DAS.	Agar diper- siapkan		8.1 km	320.000.000	APBN	2026	2029
25	06 - DJSDA	Pembangunan Bendungan Gunung Karung	Cirebon- Majalengka (Tebu)	Kec. Luragung	- Mereduksi Banjir Kabupaten/Kota Cirebon (Sungai Cisanggarung) - Penyedia air baku untuk kawasan pertanian di Kab. Cirebon dan Majalengka	Agar diper- siapkan		25000000 m3	250.000.000	APBN	2029	2029
26	06 - DJSDA	Pembangunan Pengaman Pantai Eretan, Gebang, Losari	Indramayu- Cirebon (Ekonomi Biru)	Kec. Gebang, Losari, dan Kandanghaur	- Mereduksi abrasi pantai utara Jawa Barat ketahanan wilayah pesisir (<i>coastal resilience</i>) sebagai penyangga kawasan Rebana Metropolitan	Agar diper- siapkan		20 km	500.000.000	APBN	2029	2029
27	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cipamingkis	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat	Kab. Bogor	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		5 km	12.000.000	APBN	2029	2029
28	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Ciletuh	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Kab. Sukabumi	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		10 km	26.000.000	APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Priangan Barat									
29	06 - DJSDA	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke–Pesanggrahan, DAS Cimandiri	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat	Jawa Barat	- Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Prasarana Pengendali Banjir Kali Bekasi / Pengendalian Banjir Kali Bekasi (Kab. Bogor dan Bekasi)	Agar diper- siapkan		2.5 km	958.159.106	APBN	2026	2026
30	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Jatiluhur	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	Kab. Indramayu	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Utara Jawa Barat - Untuk optimalisasi kebermanfaatan Bendungan Jatiluhur - Sumber Konreg 2025	Agar diper- siapkan		1 km	75.532.349	APBN	2026	2026
31	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Rentang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	Kab. Indramayu	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Utara Jawa Barat - Untuk optimalisasi kebermanfaatan Bendungan Jatigede - Sumber Konreg 2025	Agar diper- siapkan		5 km	627.119.191	APBN	2026	2026
32	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan	Kawasan Swasembada Pangan, Air,	Kab. Cianjur	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.5 km	59.000.000	APBN	2027	2027

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		jaringan irigasi D.I. Cihea	dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung									
33	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cipanas II	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Subang	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Utara Jawa Barat - Untuk optimalisasi kebermanfaatan Bendungan Cipanas	Agar diper- siapkan		0.5 km	59.000.000	APBN	2028	2029
34	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cipancuh	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Indramayu	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Utara Jawa Barat - Salah satu kontributor Kabupaten Indramayu sebagai Lumbung Pangan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.3 km	29.500.000	APBN	2028	2028
35	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cileuleuy	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Majalengka	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.3 km	29.500.000	APBN	2027	2027
36	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Leuwinangka	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-	Kab. Garut	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.2 km	29.500.000	APBN	2029	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cimanuk- Cisanggarung									
37	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cikunten	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kab. Tasikmalaya	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.2 km	15.000.000	APBN	2029	2029
38	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Cikunten II	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kab. Tasikmalaya	- Sumber Konreg 2025	Agar diper- siapkan		2.5 km	250.000.000	APBN	2026	2026
39	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Manganti	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kab. Ciamis	- Sumber Konreg 2025	Agar diper- siapkan		3 km	374.978.657	APBN	2026	2026
40	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Bantarheulang	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kab. Garut	- Untuk mendukung ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Pangan Selatan Jawa Barat	Agar diper- siapkan		0.15 km	15.000.000	APBN	2028	2029

Sumber: Rencana Penyusun dan Diskusi antar Unor, 2025

8.1.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	04 - DJBK	Pembangunan Flyover Jl. Soekarno Hatta dengan VCR 1,13	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Rute <i>flyover</i> dari persimpangan Jalan Soekarno Hatta -Jalan Ibrahim Adjie hingga persimpangan Batununggal (Simpang Kiaradondong) - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan ≥ 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.	Agar diper- siapkan		950 meter	600.000.000	APBD	2029	2034
2	04 - DJBK	Pembangunan Flyover Jl. Bts. Kota Bandung-Bts. Kota Cileunyi dengan VCR 2,45	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Penanganan simpang pada jalur utama Kota Bandung menuju Kota Cimahi dan Kota Bandung menuju Kab. Garut - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan ≥ 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.	Agar diper- siapkan		1.5 km	1.000.000.000	APBD	2029	2034
3	04 - DJBK	Pembangunan Flyover Jl. Pasteur-	WM Bandung dan Kawasan Pengembang	Kota Bandung	- <i>Flyover</i> Pasteur-Djunjuran untuk memisahkan arus dari tol langsung menuju Surya Sumantri atau ke arah Utara (Setiabudi-Lembang)	Agar diper- siapkan		1 km	550.000.000	APBD	2029	2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dr. Djunjunan dengan VCR 1,6	an Industri Cekungan Bandung		- Titik ini menjadi jalur utama akses wisata dan logistik ke pusat kota. - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan hingga 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.							
4	04 - DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan Cekungan Bandung	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota/Kab. Bandung	- Jalur utama menuju dan keluar Kota Bandung menuju perkotaan sekitar dan kawasan pariwisata. - Jalan yang membutuhkan penanganan berupa peningkatan kapasitas diantaranya: - Jl. Surapati dengan VCR 1,6 - Jl. Bts. Kota Cileunyi-Nagreg VCR 1,04 - Jl. Raya Cipacing dengan VCR 1,29 - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan >= 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 14 meter akan tetapi terjadi kepadatan pada pertemuan antara ruas Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten/Kota serta kendaraan umum yang berhenti untuk menurunkan penumpang	Siap		21.04 km	231.440.000	APBD	2027	2029
5	04 - DJBM	Pembangunan FO perlintasan KA Gedebage-Sukarno Hatta	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Stasiun Gedebage akan beroperasi dengan selesainya jalur Kereta Api Cepat pada tahun 2024. - Saat ini akses stasiun dilayani oleh Jalan Nasional dengan lebar 7,5 meter. - Diproyeksikan penumpang Kereta Api Cepat mencapai 31.000 orang/hari.	Agar dipersiapkan		915 meter	400.000.000	APBD	2027	2029
6	04 - DJBM	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (KA) Jl. Gedebage (Bandung)	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Terjadi waktu antrean kendaraan yang cukup lama pada persimpangan perlintasan KA. - Tingkat pelayanan Jalan rendah (VCR 1,6). - Diproyeksikan pada ruas ini terjadi bangkitan kendaraan 8.946 smp/jam.	Agar dipersiapkan		270 meter	84.300.000	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan							
7	04 - DJB	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Sunda	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrean kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper- siapkan		800 meter	300.000.000	APBD	2027	2029
8	04 - DJB	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Ahmad Yani	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrean kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper- siapkan		800 meter	300.000.000	APBD	2027	2029
9	04 - DJB	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Laswi	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrean kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper- siapkan		800 meter	300.000.000	APBD	2027	2029
10	04 - DJB	Pembangunan Bandung <i>Intra Urban Toll Road</i> (BIUTR)	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Jalan lingkaran utara Kota Bandung menjadi akses utama dari/menjuju Kota Cimahi dan perkotaan Jatinangor. - Memiliki kepadatan kendaraan yang tinggi karena menjadi akses kegiatan pariwisata dan pendidikan terutama pada akhir pekan. - Tingkat pelayanan jalan rendah VCR > 1,02.	Agar diper- siapkan		26.3 km	5.500.000.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Kemacetan terjadi karena kepadatan kendaraan pada simpang yang bersinggungan dengan jalan perkotaan (status jalan kewenangan Kab/Kota). - Penanganan kemacetan harus didukung pengembangan transportasi massal. - Terdapat pengerjaan beberapa kegiatan untuk mengatasi kemacetan diantaranya pembangunan Fly Over Jl. Soekarno Hatta, penanganan simpang tidak sebidang Jalan Bts. Kota Bandung-Bts. Kota Cileunyi, dan Jln. Pasteur-Dr. Djundjunan.							
11	04 - DJBK	Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Jalan Soekarno–Hatta sebagai jalan lingkar selatan Kota Bandung memiliki tingkat pelayanan rendah VCR 1,13. - Terdapat kota sekitar: Padalarang, Cimahi, Soreang, Tegalluar, Cileunyi yang sudah berkembang sebagai permukiman berskala besar dan kegiatan ekonomi. - Diperlukan jalan lingkar baru untuk mengurangi beban jalan eksisting yang saat ini dilalui arus menerus dari Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Garut	Agar diper- siapkan		51.1 km	20.000.000.000	APBD	2027	2029
12	04 - DJBK	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kab. Kuningan	- Kondisi ruas jalan saat ini memiliki lebar < 7 meter dan sudah menjadi akses utama dari Kota Banjar, Ciamis, dan Pangandaran menuju Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon). - Bangkitan pergerakan saat ini mencapai 32.605 smp/jam terutama pada ruas Batas Kab. Kuningan/Cirebon–Kota Kuningan (Jalan Utama) dengan VCR 1,16. - Tingginya tingkat kepadatan jalan diakibatkan menumpuknya arus menerus (kendaraan > 2 sumbu) dan arus lokal di Kabupaten Kuningan serta tingginya hambatan samping pada kawasan perkotaan Kuningan. - Ruas ini melanjutkan ruas eksisting yang sudah terbangun yaitu Jalan Lingkar Timur-Utara yang sudah bisa mengurangi tingkat kepadatan jalan utama. - Sudah masuk SBSN 2025.	Siap		20 km	310.000.000	APBN	2025	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	04 - DJBK	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan– Pangaden–Subang	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Kab. Subang	- Kondisi ruas jalan saat ini memiliki lebar <6 meter dan sudah menjadi akses utama dari perkotaan Subang menuju Jalan Nasional Pantura terutama bagi kendaraan logistik. - Proyeksi bangkitan kendaraan logistik 3.953 smp/jam yang ditimbulkan dari kawasan industri Subang (perkiraan luas 1.453 Ha). - Pelabuhan Patimban sudah beroperasi dengan luas 60 Ha (Tahap I), melayani kegiatan peti kemas dan terminal kendaraan. - Setelah Pelabuhan Patimban beroperasi penuh menyebabkan rendahnya pelayanan jalan ke Pelabuhan Patimban (VCR 0,71)	Agar diper- siapkan		36 km	396.000.000	APBD	2029	2029
14	04 - DJBK	Pembangunan Jalan Tol Akses Cipali– Patimban	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Kab. Subang	- Mendukung akses menuju Pelabuhan Patimban yang memiliki proyeksi bangkitan kendaraan logistik hingga 11.899 smp/jam dan 7,5 juta TEUs yang ditimbulkan dari kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Rebana. - Pelabuhan Patimban beroperasi dengan luas 60 Ha (Tahap I), melayani kegiatan peti kemas dan terminal kendaraan. - Setelah Pelabuhan Patimban beroperasi penuh menyebabkan rendahnya pelayanan jalan ke Pelabuhan Patimban (VCR 1,6)	Siap		37.05 km	5.88885E+12	APBN	2026	2029
15	04 - DJBK	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak– Cikidang–Pelabuhan Ratu	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan	Kab. Sukabumi	- Kondisi Jalan Nasional Cikembang-Bagbagan sebagai akses menuju Pelabuhan Ratu memiliki tingkat pelayanan tinggi VCR 0,39 - Akses alternatif menuju Kawasan Pelabuhan Ratu menjadi DTW unggulan Kab. Sukabumi. - Proyeksi peningkatan wisatawan mencapai 1,7 juta (2029) akan berpengaruh terhadap bangkitan kendaraan yang menyebabkan Jalan Nasional Cikembang-Bagbagan	Siap		38.8 km	280.000.000	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bogor- Sukabumi- Cianjur		mengalami penurunan tingkat pelayanan jalan VCR 0,78 (2029).							
16	04 - DJBM	Peningkatan Jalan Surade-Ujung Genteng	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur	Kab. Sukabumi	- Berperan tourism relevant road dan akses menuju DTW Ujung Genteng yang termasuk dalam Sub KTA Ciletuh-Ujung Genteng - Pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung 1,7 juta jiwa (2029) yang diantaranya 123.005 jiwa pada tahun 2029 (7% dari total wisatawan di Kabupaten Sukabumi) merupakan wisatawan menuju Ujung Genteng. - Diperkirakan kondisi jalan saat ini (jalan provinsi) akan menampung bangkitan kendaraan hingga 2.152 smp/jam	Agar diper- siapkan		20 km	220.000.000	APBN	2028	2029
17	04 - DJBM	Pembangunan Tol Sukabumi- Padalarang	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur	Sukabumi, Cianjur, Padalarang	- Meningkatkan aksesibilitas Sukabumi-Metropolitan Cekungan Bandung yang 70% ruas Jalan Nasional memiliki tingkat pelayanan jalan rendah mencapai VCR 1,64. - Tingginya hambatan samping pada Jalan Nasional terutama pada ruas Jl. Raya Padalarang (VCR 1,2) akibat adanya kegiatan perdagangan dan jasa (kecepatan kendaraan rata-rata 26 km/jam). - Bertemunya arus menerus dan arus lokal dari adanya kegiatan setempat menyebabkan tingkat kemacetan - Perkiraan terjadi bangkitan kendaraan menuju Padalarang dari arah Sukabumi/Cianjur sebesar 32.210 smp/jam (2029). - Dapat mempercepat waktu tempuh Pelabuhan Ratu-Metropolitan Cekungan Bandung menjadi 2,5 jam - Sudah tercantum dalam Rencana Umum Jalan Bebas Hambatan dengan rencana pengerjaan tahun 2025 - 2029	Agar diper- siapkan		56.6 km	59.000.000.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	04 - DJBM	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Seg. Timur)	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Kab. Bandung Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, dan Kab. Ciamis	- Menghubungkan antara PKL Perdesaan Ciwidey Kabupaten Bandung hingga Kertahayu Kabupaten Ciamis. - Sebagai jalur alternatif untuk pergerakan logistik antar pusat kegiatan local yang dapat mempersingkat waktu perjalanan jadi ± jam	Agar diper- siapkan		240.7 km	2.000.000.000	APBD	2027	2029
19	04 - DJBM	Pembangunan Jalan Tol Gedebage– Tasikmalaya– Cilacap segmen 1 dan 2 (Gedebage– Tasikmalaya)	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Garut, dan Tasikmalaya	- Jalan Nasional memiliki pelayanan rendah VCR 1,09 terutama pada ruas Jalan Malangbong dan Jalan Raya Indihyang (Tasikmalaya). - Kondisi jalan yang berkontur dan bertemunya arus menerus dan arus lokal menyebabkan terhambatnya arus laju kendaraan sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. - Dapat mengurangi waktu tempuh Metropolitan Bandung– KSPN Pangandaran semula 3,5 jam menjadi ±2 jam. - Sudah tercantum dalam Rencana Umum JBH dengan pelaksanaan tahun 2020 – 2029 - Masih dalam proses pembebasan lahan.	Agar diper- siapkan		306.65 km	56.000.000.000	APBD	2027	2029
20	04 - DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur	Kota Sukabumi	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sukabumi dengan Kawasan Pariwisata Ciletuh dan PKW Pelabuhan Ratu (tingkat pelayanan jalan rendah VCR 1,12). - Kepadatan kendaraan terjadi pada titik perbatasan Kota Cibadak – Kota Sukabumi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah (Rajapolah) II	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,76. - Kepadatan kendaraan terjadi pada titik bertemunya 2 jalur utama yaitu Jalan Raya Rajapolah dan Rajapolah-Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
22	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Slamet Riyadi (Cirebon)	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembang an Industri Cirebon- Kertajati	Kota Cirebon	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Cirebon (PKN Cirebon) yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan 0,7. - Kepadatan kendaraan terjadi karena pergerakan kawasan perkotaan yang tinggi serta adanya perlintasan kereta yang menyebabkan kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
23	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Ciawi (Ciawi)	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,91. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
24	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah IV	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,88. - Kepadatan kendaraan terjadi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah III	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,88. - Kepadatan kendaraan terjadi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
26	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Indhiang (Indhiang) I	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 1,03. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung disertai tingginya pergerakan didalam PKW Tasikmalaya. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
27	04 - DJBK	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Moch Hatta (Tasikmalaya)	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi permasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,72. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung disertai tingginya pergerakan didalam PKW Tasikmalaya. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan melamban.	Agar diper- siapkan		600 meter	200.000.000	APBN	2028	2029
28	04 - DJBK	Pembangunan Jalan Tol <i>Bogor Ring Road</i>	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi dan Kawasan Pariwisata		- Masuk dalam Kawasan Jabodetabek - Sebagai alternatif jalan tol menuju Kota Bogor dari Jakarta ataupun sebaliknya	Agar diper- siapkan		15 km	5.000.000.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur									
29	04 - DJBM	Pembangunan Jalan Puncak II	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur		- Masuk dalam Kawasan Jabodetabek - Sebagai alternatif jalan menuju Kab. Cianjur - Untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada Jalan Utama Puncak yang banyak terdapat hambatan samping serta sentra pariwisata	Agar diper- siapkan		50 km	9.000.000.00 0	APBD	2029	2029
30	04 - DJBM	Preservasi Jln. Jln. Raya Jamblang (Cirebon) – Jln. Jend. A. Yani (Cirebon) – Bts. Kota Cirebon – Losari (Bts. Provinsi Jawa Tengah)	Rebana	Kota Cirebon	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Provinsi Jawa Tengah maupun Metropolitan Cekungan Bandung. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Raya Jamblang (Cirebon) 0,101 Km; 2) Jln. Jend. A. Yani (Cirebon) 0,071 Km; 3) Bts. Kota Cirebon – Losari (Bts. Prov. Jateng) 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		0,272 Km	2.170.000.00 0	APBN	2026	2029
31	04 - DJBM	Preservasi Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga – Jln. Raya Jasinga (Jasinga) – Bts. Kota	Ciletuh	Kabupaten Bogor dan Kota Bogor	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Provinsi Banten dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga 0,404 Km; 2) Jln. Raya Jasinga (Jasinga) 0,203 Km;	Agar diper- siapkan		1,9 Km	15.200.000.0 00	APBN	2026	2029

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Leuwiliang – Bts. Kota Bogor dan Bts. Depok/Bogor – Bogor, Ciawi - Puncak			3) Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang 0,484 Km; 4) Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor 0,508 Km; 5) Bts. Depok/Bogor – Bogor 0,201 Km; 6) Ciawi – Puncak 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
32	04 - DJBM	Preservasi Ciawi – Benda - Bts. Kota Cibadak - Jln. Siliwangi (Cicurug) - Jln. Suryakencana (Cibadak) - Jln. Raya Siliwangi (Cibadak) - Bts. Kota Sukabumi - Jln. Raya Cibolang (Cisaat) - Gekbrong (Bts. Kabupaten)	Ciletuh	Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Ciawi - Benda 0,1 Km; 2) Benda - Bts. Kota Cibadak 0,403 Km; 3) Jln. Siliwangi (Cicurug) 0,102 Km; 4) Jln. Suryakencana (Cibadak) 0,201 Km; 5) Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi 0,301 Km; 6) Jln. Raya Siliwangi (Cibadak) 0,304 Km; 7) Jln. Raya Cibolang (Cisaat) 0,201 Km; 8) Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten) 0,603 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		2,12 Km	16.920.000.000	APBN	2026	2029
33	04 - DJBM	Preservasi Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Cianjur) - Bts. Kota Cianjur – Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang- Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala) dan Jln. Dr. Muwardi (Cianjur)	Pansela Jabar	Kabupaten Cianjur	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Metropolitan Cekungan Bandung. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Cianjur) 0,103 Km; 2) Bts. Kota Cianjur – Citarum 0,202 Km; 3) Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang 0,605 Km; 4) Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala) 0,101 Km; 5) Jln. Dr. Muwardi (Cianjur) 0,404 Km - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		2,52 Km	20.200.000.000	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
34	04 - DJBK	Preservasi Jln. Nurtanio (Bandung) - Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek - Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) - Nagreg - Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Jln. Raya Limbangan (Limbangan) dan Lingkar Nagreg	Cekungan Bandung	Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Metropolitan Jakarta dan Kawasan Ciletuh. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Nurtanio (Bandung) 0,099 Km; 2) Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek - Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) 1,203 Km; 3) Nagreg - Bts. Kab. Bandung/Garut 0,2 Km; 4) Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut 0,1 Km; 5) Jln. Raya Limbangan (Limbangan) 0,2 Km; 6) Lingkar Nagreg 0,101 Km - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		1,9 Km	15.200.000.0 00	APBN	2026	2029
35	04 - DJBK	Preservasi Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Rajapolah – Ancol - Bts. Kota Ciamis - Jln. Raya Ciamis (Tasikmalaya)	Pansela Jabar	Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Rajapolah 0,908 Km; 2) Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis - Ancol 0,303 Km; 3) Ancol - Bts. Kota Ciamis 0,201 Km; 4) Jln. Raya Ciamis (Tasikmalaya) 0,101 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		1,51 Km	12.100.000.0 00	APBN	2026	2029
36	04 - DJBK	Preservasi Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok - Sp. Kr. Hawu - Bagbagan – Jampangkulon – Surade - Tegalbuleud	Pansela Jabar	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung, Metropolitan Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok 0,704 Km; 2) Cisolok - Sp. Kr. Hawu 0,707 Km; 3) Bagbagan – Jampangkulon 2,114 Km;	Agar diper- siapkan		11,1 Km	88.700.000.0 00	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang – Cidaun - Cisela – Cilaki - Rancabuaya – Cijayana - Pameungpeuk – Cikaengan – Cipatujah – Kalapagenep – Cimerak - Bts. Kota Pangandaran		Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran	4) Jampangkulon - Surade 0,506 Km; 5) Surade - Tegalbuleud (Cibuni) 3,624 Km; 6) Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang 0,907 Km; 7) Sindangbarang – Cidaun 0,1 Km; 8) Cidaun - Cisela – Cilaki 0,202 Km; 9) Cilaki - Rancabuaya – Cijayana 0,403 Km; 10) Pameungpeuk – Cikaengan 0,201 Km; 11) Cikaengan – Cipatujah 0,1 Km; 12) Cipatujah – Kalapagenep 0,804 Km; 13) Kalapagenep – Cimerak 0,1 Km; 14) Cimerak - Bts. Kota Pangandaran 0,6 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
37	04 - DJBM	Preservasi Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak) - Bts. Kota Cibadak – Cikembang - Bagbagan	Cietuh	Kabupaten Sukabumi	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak) 0,1 Km; 2) Bts. Kota Cibadak – Cikembang 0,202 Km; 3) Cikembang – Bagbagan 2,327 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		2,63 Km	21.030.000.000	APBN	2026	2029
38	04 - DJBM	Preservasi Jln. Jend. A. Yani (Purwakarta) - Jln. Ir.H.Juanda (Cikampek) - Jln. Ibrahim (Purwakarta) - Sadang - Bts. Kota Purwakarta – Cisomang - Bts. Kota Padalarang	-	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Jend. A. Yani (Purwakarta) 0,302 Km; 2) Jln. Ir.H.Juanda (Cikampek) 0,102 Km; 3) Jln. Ibrahim (Purwakarta) 0,283 Km; 4) Sadang - Bts. Kota Purwakarta 0,101 Km; 5) Bts. Kota Purwakarta – Cisomang 1,307 Km; 6) Cisomang - Bts. Kota Padalarang 0,605 Km;	Agar diper- siapkan		2,7 Km	21.600.000.000	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
39	04 - DJBK	Preservasi Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor) - Bts. Kota Sumedang - Jln. Pangeran Kornel (Sumedang) - Jln. Palasari (Sumedang) - Bts. Kota Sumedang - Cijelag - Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang) - Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan	Rebana	Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor) 0,101 Km; 2) Jatinangor - Bts. Kota Sumedang 0,915 Km; 3) - Jln. Pangeran Kornel (Sumedang) 0,50 Km; 4) Jln. Palasari (Sumedang) 0,08 Km; 5) Bts. Kota Sumedang – Cijelag 1,819 Km; 6) Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang) 0,172 Km; 7) Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan 0,501 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		4,1 Km	32.800.000.0 00	APBN	2026	2029
40	04 - DJBK	Preservasi Bts. Kab. Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan - Jln. Pangeran Sang Adipati (Kuningan) - Jln. Raya Sukamulya (Kuningan) - Bts. Kota Kuningan - Bts. Kab. Kuningan/Majalengka (Cipasung)	Rebana	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Kawasan Pansela Jabar dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Kab. Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan 0,471 Km; 2) Jln. Pangeran Sang Adipati (Kuningan) 0,301 Km; 3) Jln. Raya Sukamulya (Kuningan) 0,1 Km; 4) Bts. Kota Kuningan - Bts. Kab. Kuningan/Majalengka (Cipasung) 0,401 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		1,3 Km	10.400.000.0 00	APBN	2026	2029
41	04 - DJBK	Preservasi Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) - Bts. Kota	Pansela Jabar	Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Kawasan Rebana dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari:	Agar diper- siapkan		1,82 Km	14.600.000.0 00	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ciamis - Bts. Kota Banjar - Kali Pucang			1) Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) - Bts. Kota Ciamis 1,715 Km; 2) Bts. Kota Banjar - Kali Pucang 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
42	04 - DJBM	Preservasi Cimoreme – Batujajar – Soreang - Jln. Raya Ciwidey - Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	Cekungan Bandung	Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Kawasan Pansela Jabar. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Cimoreme – Batujajar 0,201 Km; 2) Batujajar – Soreang 0,201 Km; 3) Jln. Raya Ciwidey 0,1 Km; 4) Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur 1,206 Km; 5) Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul – Cidaun 2,006 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		3,7 Km	29.600.000.000	APBN	2026	2029
43	04 - DJBM	Preservasi Lingkar Indramayu (Indramayu) – Karangampel - Jln. Mulia Asri (Indramayu)	Rebana	Kabupaten Indramayu	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana Bandung dari Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Lingkar Indramayu (Indramayu) – Karangampel 1,503 Km; 2) Jln. Mulia Asri (Indramayu) 1,103 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar diper- siapkan		2,6 Km	20.800.000.000	APBN	2026	2029

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi antar Unor, 2025

8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06 - DJCK	Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- SPAM Sinumbra direncanakan melayani 15 Kecamatan di Kab. Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi (kapasitas 1.000 lt/dtk untuk 76.158 penduduk). SPAM Regional Sinumbra ini akan memanfaatkan air baku bersumber dari Mata Air Gambung - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 25,9%. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon dan Babakan Ciparay karena akan memiliki kepadatan lebih 150 jiwa/Ha.	Siap		1000 lt/dtk	883.000.000	APBD	2027	2027
2	06 - DJCK	Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Kota Bandung	- Kapasitas PDAM Bandung sebesar 717 lt/dt dengan idle capacity sebesar 153 lt/dt yang dapat dioptimalkan untuk melayani ±17.000 SL. Kapasitas PDAM Kota Bandung sebesar 2.914 lt/dt dengan idle capacity sebesar 657 lt/dt yang dapat dioptimalkan untuk melayani ±56.000 SL. - Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan di Kabupaten Bandung (kapasitas 150 lt/dtk) dan Kota Bandung (kapasitas 100 lt/dtk) direncanakan melayani 12 Kec. dengan total terlayani 28.000 SL (target awal 10.000 SL). - Tingkat pelayanan air minum penduduk perkotaan ini saat ini 13,2% yang akan meningkat menjadi 19,2% (2029) dengan adanya peningkatan kapasitas.	Siap		100 lt/dtk	17.000.000	APBD	2027	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Peningkatan pelayanan untuk Kabupaten Bandung dilaksanakan tahun 2025 dengan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL). - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Regol yang akan memiliki kepadatan hingga >150 jiwa/Ha serta Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot mengalami land subsidence.							
3	06 - DJCK	Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Kabupaten Bandung	- SPAM Kertasari direncanakan melayani 8 Kecamatan pada Kabupaten dan Kota Bandung dengan kapasitas 700 lt/dtk yang bisa dimanfaatkan untuk 2.500 SL. - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 15,6% yang akan meningkat menjadi 21,6% - Sumber air baku utama SPAM ini adalah Sungai Citarum dan beberapa mata air seperti Ciburial, Ciakar, dan Cibelah - Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL) dimulai antara tahun 2025 atau 2026. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bojongsoang dan Gedebage sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan TOD Kereta Cepat Jakarta Bandung.	Siap		700 lt/dtk	118.000.000	APBD	2028	2028
4	06 - DJCK	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Selatan	Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	Kota Bandung	- Kapasitas Jaringan PDAM Kab Bandung sebesar saat ini melayani 52.397 sambungan langsung (SL). Dengan adanya penggunaan idle capacity sebesar 153 lt/dt. - Kapasitas Jaringan PDAM Kota Bandung sebesar saat ini melayani 176.943 sambungan langsung (SL) Dengan adanya penggunaan idle capacity sebesar 657 lt/dt. - Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan di Kabupaten Bandung (150 lt/dtk) dan Kota Bandung (100 lt/dtk). - Total kapasitas yang bisa dimanfaatkan sebesar 152.640 SL - Peningkatan pelayanan untuk Kab. Bandung dilaksanakan tahun 2025 dengan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL). - Sumber air SPAM Bandung Selatan dari Sungai Cikalong	Agar diper- siapkan		100 lt/dtk	1.200.000.000	APBD	2028	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Regol yang akan memiliki kepadatan hingga >150 jiwa/Ha serta Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot yang mengalami landsubsidence. - Peningkatan jaringan mencapai 150.000 SR							
5	06 - DJCK	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Timur (SPAM Kertasari)	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	Kota Bandung	- SPAM Kertasari direncanakan melayani 8 Kecamatan pada Kabupaten dan Kota Bandung dengan kapasitas 700 lt/dtk yang bisa dimanfaatkan untuk 100.800 SL. Sumber air baku utama SPAM ini adalah Sungai Citarum dan beberapa mata air seperti Ciburial, Ciakar, dan Cibelah - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 15,6% yang akan meningkat menjadi 21,6% - Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL) dimulai antara tahun 2025 atau 2026. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bojongsoang dan Gedebage sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan TOD Kereta Cepat Jakarta Bandung." - Peningkatan jaringan mencapai 100.000 SR	Agar diper- siapkan		700 lt/dtk	800.000.000	APBD	2029	2029
6	06 - DJCK	Pembangunan Jaringan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, dan Kab. Indramayu	- Mendukung pelayanan air minum diprioritas pada permukiman Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting (3 Kabupaten: Majalengka, Indramayu, dan Cirebon) 16,04%. Idle capacity ketiga kabupaten tersebut sebesar 443 lt/dtk yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya hingga tahun 2024 dengan peningkatan pelayanan hingga 17,04%. - Adanya SPAM Jatigede Tahap I akan meningkatkan pelayanan jaringan air perpipaan menjadi total 29,8% (2024). Dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air pada Bandara Kertajati sebesar 18,39 lt/dtk (tahun 2025). - SPAM Jatigede Tahap I diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air 1.000 lt/dtk.	Siap		1500 lt/dtk	2.030.000.000	APBD	2027	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	06 - DJCK	Pembangunan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembang an Industri Cirebon- Kertajati	Kab. Cirebon	- Mendukung pelayanan air minum pada permukiman di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu dengan take off pada masing-masing kabupaten/kota yang melayani kebutuhan air untuk 1.440.000 jiwa. - Lanjutan SPAM Jatigede Tahap I total terbangun 2.500 lt/dtk. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 21,2% yang akan ditingkatkan menjadi 45,9% (2029). - SPAM Jatigede tahap I diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air minum 1.500 lt/dtk	Siap		1500 lt/dtk	2.100.000.00 0	APBD	2028	2028
8	06 - DJCK	Pembangunan SPAM Cipanas	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Kab. Subang	- Bendungan Cipanas sudah dibangun dengan kapasitas 850 lt/dtk. - Mendukung pelayanan air minum pada permukiman Kabupaten Subang. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 12,30% yang dengan idle capacity saat ini sebesar 151 lt/dtk yang dapat dimanfaatkan hingga tahun 2028 dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan secara bertahap menjadi 17,3%. - Kapasitas SPAM 300 lt/detik	Agar diper- siapkan		300 lt/dtk	50.000.000.0 00	APBD	2027	2027
9	06 - DJCK	Pembangunan SPAM Subang (Manyingsal)	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Kawasan	Kec. Cipu- nagara	- Mendukung pelayanan air minum pada Kawasan Industri Subang (15.214 Ha) yang akan menimbulkan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai pekerja (penambahan 1.260.000 pekerja pada tahun 2029) dengan kepadatan 19 jiwa/Ha. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 11,30% akan ada penambahan kebutuhan air minum perpipaan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pekerja (700 ribu pada tahun 2029) dengan peningkatan pelayanan mencapai 18,30%.	Siao		1000 lt/dtk	370.000.000	APBD	2029	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Perkotaan Karawang)		- Pembangunan infrastruktur pendukung menunggu kepastian lahan KIT Subang yang masih dalam sengketa (lahan bebas 50 Ha). - Sumber air berasal dari Sungai Cipunagara Hulu - SPAM KIT Subang diperkirakan dapat melayani hingga 1.000 lt/detik							
10	06 - DJCK	Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Kuningan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	Kuningan	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 9,21% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 45% layanan jaringan perpipaan tahun 2029. - Peningkatan jaringan mencapai 92.000 SR	Agar diper- siapkan		800 lt/dtk	125.000.000	APBD	2027	2027
11	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Pelabuhan Ratu	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	Kabupaten Sukabumi	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 1,2% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 41,5 lt/dtk	Agar diper- siapkan		50 lt/dtk	15.000.000.000	APBD	2027	2027
12	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Cianjur	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi	Kabupaten Cianjur	- SPAM Cianjur melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,73% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,27% pada tahun 2029. - Dibutuhkan peningkatan Kapasitas IPA sebesar 200 lt/dtk	Agar diper- siapkan		200lt/dtk	60.000.000	APBD	2027	2027

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur									
13	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Garut	Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab, Tasikmalaya) (Pemerataan Pembanguna n)	Kabupaten Garut	- SPAM Garut melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 1,5% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 50 lt/dtk	Agar diper- siapkan		50 lt/dtk	15.000.000	APBD	2027	2027
14	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Tasikmalaya	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	- SPAM Regional Tasikmalaya melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 13% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 2,3% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 60 lt/dtk	Agar diper- siapkan		60 lt/dtk	18.000.000	APBD	2027	2027
15	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Sukabumi	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-	Kota Sukabumi	- SPAM Kota Sukabumi melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,6% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,4% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 30 lt/dtk	Agar diper- siapkan		30 lt/dtk	9.000.000	APBD	2027	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sukabumi- Cianjur									
16	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Banjar	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kota Banjar	- SPAM Kota Banjar melayani 44% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14,8% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 0,2% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 5 lt/dtk	Agar diper- siapkan		5 lt/dtk	1.500.000.00 0	APBD	2027	2027
17	06 - DJCK	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kabupaten Pangandaran	- Pelayanan air minum aman perkotaan ini saat ini 18,3%. SPAM Perkotaan Pangandaran direncanakan melayani 10 Kecamatan pada Kabupaten Pangandaran dengan kapasitas 1.000 lt/dtk untuk 76.158 penduduk. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Pangandaran yang memiliki Daya Tarik Wisata utama di Pangandaran. - Bisa mengalami peningkatan pelayanan hingga 24,13%, tetapi mengalami defisit kapasitas air 21 lt/dtk (2029).	Agar diper- siapkan		1000 lt/dtk	883.000.000	APBD	2029	2029
18	06 - DJCK	Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Purwakarta	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Kab. Purwakarta	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 18,45% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 45% layanan jaringan perpipaan tahun 2029. - Air baku berasal dari Sungai Citarum Hilir	Agar diper- siapkan		57000 SR	80.000.000	APBD	2027	2027
19	06 - DJCK	Rehabilitasi IPLT Cibeet	WM Bandung dan Kawasan	Kabupaten Bandung	- Saat ini kondisi IPLT Cibeet rusak karena lama tidak difungsikan. Tidak beroperasi karena terkendala	Siap		4000 KK	7.000.000	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengembang an Industri Cekungan Bandung		operasional, peraturan tarif pembuangan, dan jarak tempuh. - IPLT Cibeet berfungsi untuk melayani pengolahan air limbah Kabupaten Bandung yang saat ini memiliki akses sanitasi layak baru sebesar 63% dan aman 7,21%. - DED Revitalisasi dan penyelidikan tanah sedang dibuat oleh konsultan lingkungan - Sudah ada sertifikat kepemilikan tanah oleh Pemda di lokasi, sedang diproses ke Bidang pertanahan dan aset Kab. Bandung. - Sesuai Rencana Aksi Citarum harum diperlukan penanganan limbah domestik sebesar 14.990 KK untuk memperbaiki kualitas DAS Citarum. - Kapasitas rencana 10 m3/hari							
20	06 - DJCK	Rehabilitasi IPAL Perkotaan	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung	Kec. Bojong- soang, Kec. Cimahi Selatan, Kec. Cileunyi	- Saat ini terdapat IPAL Bojongsoang dengan kapasitas 926 lt/dtk yang baru melayani 7 kecamatan di Kota Bandung. - Pelayanan pengelolaan limbah eksisting 8%. - Penanganan limbah diperlukan agar limbah tidak mencemari Sungai Citarum yang mayoritas dari limbah domestik (50%). - Peningkatan jaringan mencapai 150.000 SR	Agar diper- siapkan		1 unit	15.000.000	APBD	2027	2028
21	06 - DJCK	Pembangunan TPST Kabupaten Subang	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Kabupaten Subang	- Penanganan sampah tahun 2022: 51,54% - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,1%, terdapat peningkatan timbulan sampah 3392.099 ton/tahun (2024) dan 409.854 ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 45,3% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 277.175 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM (3.085 m3/hari)	Agar diper- siapkan		200000 KK	33.000.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	06 - DJCK	Pembangunan TPST Regional Cirebon	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembang- an Industri Cirebon- Kertajati	Kec. Gempol	- Melayani Metropolitan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu) dengan rata-rata tingkat pelayanan eksisting 25%. - Mengurangi beban TPA Gunungsantri (Cirebon) yang memiliki usia TPA 35 tahun dan sudah ditutup pada tahun 2021 dan TPA pada kabupaten/kota lain yang sudah melebihi kapasitas. - Kondisi saat ini, rencana TPPAS Cirebon Raya masih pada tahap penyusunan FS, dan lahan yang digunakan merupakan hutan produksi milik Kementerian LHK (dalam proses pinjam). Akan ada penambahan timbulan sampah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pekerja (436.000 pada tahun 2029) dengan total timbulan sampah mencapai 6 juta m3/tahun. - Dengan adanya TPPAS Cirebon Raya berpotensi meningkatkan pelayanan sampah mencapai 48,30% (kapasitas 1.200 m3/hari). - Direncanakan akan menggunakan metode pengolahan sampah 3R.	Agar diper- siapkan		1400000 KK	3.500.000.00 0	APBD	2027	2029
23	06 - DJCK	Peningkatan jaringan pengolahan limbah Kab. Kuningan	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum- Cimanuk- Cisanggarung	Kuningan	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 1,98% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 35% layanan pengolahan limbah tahun 2029. - Peningkatan jaringan mencapai 70.000 SR	Agar diper- siapkan		1 unit	6.500.000	APBD	2027	2029
24	06 - DJCK	Pembangunan TPST Pada DTW Prioritas	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi	Kec. Pelabuhan Ratu	- TPA Cimenteng (pelayanan 25,44%) sudah mengalami defisit kapasitas (1.182.202 m3/tahun) dan direncanakan ditutup pada tahun 2025 (peningkatan pelayanan 31,44%). TPA Kadaleman (pelayanan 2,85%) mengalami defisit kapasitas sebesar 32.359 m3/tahun (2024) hingga 346.899 m3/tahun (2029) dengan pelayanan menjadi 6,35%.	Agar diper- siapkan		200000 KK	32.500.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur		- Peningkatan timbulan sampah dari kegiatan domestik dan pariwisata hingga 2,9 juta m3/tahun (2029) sehingga perlu Tempat Pengolahan Sampah baru dengan menerapkan metode 3R dengan jumlah diperkirakan 5 buah. - Penanganan sampah tahun 2022: 49,63% - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,4%, terdapat peningkatan timbulan sampah 529.009 ton/tahun (2024) dan 573.526 ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 37% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 277.984 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM							
25	06 - DJCK	Pembangunan Shelter Tsunami dan Jalur Evakuasi di Pelabuhan Ratu	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur	Kec. Pelabuhan Ratu	- Risiko bencana tsunami sedangtinggi pada kawasan pariwisata pesisir pantai karena Kabupaten Sukabumi aktivitas Zona Megathrust Selat Sunda atau MSS. - Bencana Tsunami diperkirakan akan menimbulkan kerugian fisik mencapai 540 miliar. Secara historis bencana tsunami dengan tinggi gelombang hingga 1 meter pada Kecamatan Pelabuhan Ratu	Agar diper- siapkan		3.4 Ha	23.000.000	APBD	2027	2029
26	06 - DJCK	Penataan Pantai Cibangban, Kec. Pelabuhan Ratu	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-	Kec. Pelabuhan Ratu	- Meningkatkan pelayanan dasar (persampahan yang belum terkendali) untuk kegiatan pariwisata yang Cisolak dengan mempertimbangkan keberadaan Pantai Cibangban dalam SubKTA Pelabuhan Ratu. - Menata DTW Cibangban yang saat ini sudah terdapat permukaan di pesisir pantai (melanggar sempadan pantai). - Jalur Wisata Geotrail yang terdapat didalamnya antara lain Lanskap Budaya dan Sesar Cimandiri.	Agar diper- siapkan		2.5 Ha	80.000.000	APBD	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sukabumi- Cianjur									
27	06 - DJCK	Pembangunan TPST Kabupaten Garut	Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) (Pemerataan Pembanguna n)	Kabupaten Garut	- Penanganan sampah tahun 2022 (30%) - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,4%, terdapat peningkatan timbulan sampah 423.803 ton/tahun (2024) dan 448.805 ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 27% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 303.590 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM (3.379 m3/hari)	Agar diper- siapkan		250000 KK	75.000.000	APBD	2027	2029
28	06 - DJCK	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy- Ciwulan-Cilaki	Kec. Padaherang	- Timbulan sampah domestik dan pariwisata mencapai 214.128 m3/tahun (tingkat pelayanan sampah 20%). - Jumlah wisatawan diperkirakan mencapai 1,5 juta pada tahun 2029 menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata. - Peningkatan pelayanan hingga 38% menyebabkan TPA eksisting diperkirakan tutup (2029) karena melebihi kapasitas. Dibutuhkan TPA baru dengan metode 3R (kapasitas 534 m3/hari).	Agar diper- siapkan		600000 KK	30.000.000	APBD	2027	2029
29	06 - DJCK	Peningkatan jaringan pengolahan limbah Kabupaten Purwakarta	Kawasan Pengembang an Industri Bogor-Bekasi- Karawang- Purwakarta- Subang- Patimban (termasuk	Kab. Purwakarta	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 4,84% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 35% layanan pengolahan limbah tahun 2029. - Peningkatan jaringan mencapai 4.000 SR	Agar diper- siapkan		1 unit	5.500.000	APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kawasan Perkotaan Karawang)									
30	06 - DJCK	Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LLJR (TPS3R)	Provinsi Jawa Barat		- Langkah untuk mengurangi dan mengolah sampah dengan adanya pemilahan sebelum masuk ke TPST, salah satu caranya dengan adanya TPS3R di beberapa Kabupaten/Kota	Agar diper- siapkan		1500 unit	3.000.000.00 0	APBD		
31	06 - DJCK	Pembangunan TPST Regional Bogor– Sukabumi	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur		- Masuk dalam Kawasan Jabodetabek - Untuk mengurangi beban TPA Bantar Gebang - Diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lama untuk dilaksanakan karena saat ini ada TPST Nambo yang belum selesai konstruksi karena terkendala VGF TPST Nambo yang masih berjalan proses KPBu saat ini, akan melayani Kab. Bogor, Kota Bogor, dan Depok	Agar diper- siapkan		400000 KK	800.000.000	APBD	2027	2027
32	06 - DJCK	Pengembangan SPAM Bogor Raya	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-		- Masuk dalam Rencana Memorandum Program Wilayah Jabodetabek - Akan difokuskan untuk melayani Kab. Bogor untuk mencapai target layanan air perpipaan tahun 2029 sebesar 50% - Penambahan kapasitas mencapai 2.500 lt/detik	Agar diper- siapkan		80000 KK	1500.000.000	APBD	2027	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sukabumi- Cianjur									
33	06 - DJCK	Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bogor	Kawasan Perkotaan Bogor- Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi- Cianjur		- Masuk dalam Rencana Memorandum Program Wilayah Jabodetabek - Akan difokuskan untuk melayani Kab. Bogor untuk mencapai target layanan pengolahan air limbah tahun 2029 sebesar 30%	Agar diper- siapkan		120000 KK	3.000.000.00 0	APBD	2027	2029
34	06 - DJCK	Pembangunan TPST Regional Bandung Raya	WM Bandung dan Kawasan Pengembang an Industri Cekungan Bandung		- Secara fisik sudah terbangun namun belum ada pengolahannya yaitu TPST Legok Nangka Saat ini masih belum bisa digunakan dan masih belum ada tindak lanjut karena masih terkendala di tahap persetujuan VGF (item yang disediakan masih belum sesuai dengan item yang diminta/ditentukan)	Agar diper- siapkan		KK	3.500.000.00 0	APBD	2028	2029
35	06 - DJCK	Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya–Ciamis	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya		- Sudah masuk dalam konreg 2025 untuk program 2026 salah satunya adalah Rencana TPST Karyamulya yang akan menggantikan peran TPA Cimerak yang harus ditutup karena terdampak dari pembangunan Bendungan Leuwikeris dan overload.	Agar diper- siapkan		45000 KK	80.000.000	APBN	2026	2028
36	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Cianjur	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Cianjur	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,73% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,27% pada tahun 2029. - Dibutuhkan peningkatan Kapasitas IPA sebesar 168 lt/dtk	Agar diper- siapkan		200 lt/dtk	60.000.000.0 00	APBD	2026	2029

RPIW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2034

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Garut	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Garut	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 1,5% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 7 lt/dtk	Agar diper- siapkan		50 lt/dtk	15.000.000.0 00	APBD	2026	2029
38	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Tasikmalaya	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 13% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 2,3% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 53 lt/dtk	Agar diper- siapkan		60 lt/dtk	18.000.000.0 00	APBD	2026	2029
39	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Sukabumi	Jawa Barat Selatan	Kota Sukabumi	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,6% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,4% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 30 lt/dtk	Agar diper- siapkan		30 lt/dtk	9.000.000.00 0	APBD	2026	2029
40	06 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Banjar	Jawa Barat Selatan	Kota Banjar	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 44% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14,8% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 0,2% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 1 lt/dtk	Agar diper- siapkan		5 lt/dtk	1.500.000.00 0	APBD	2026	2029

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi antar Unor, 2025

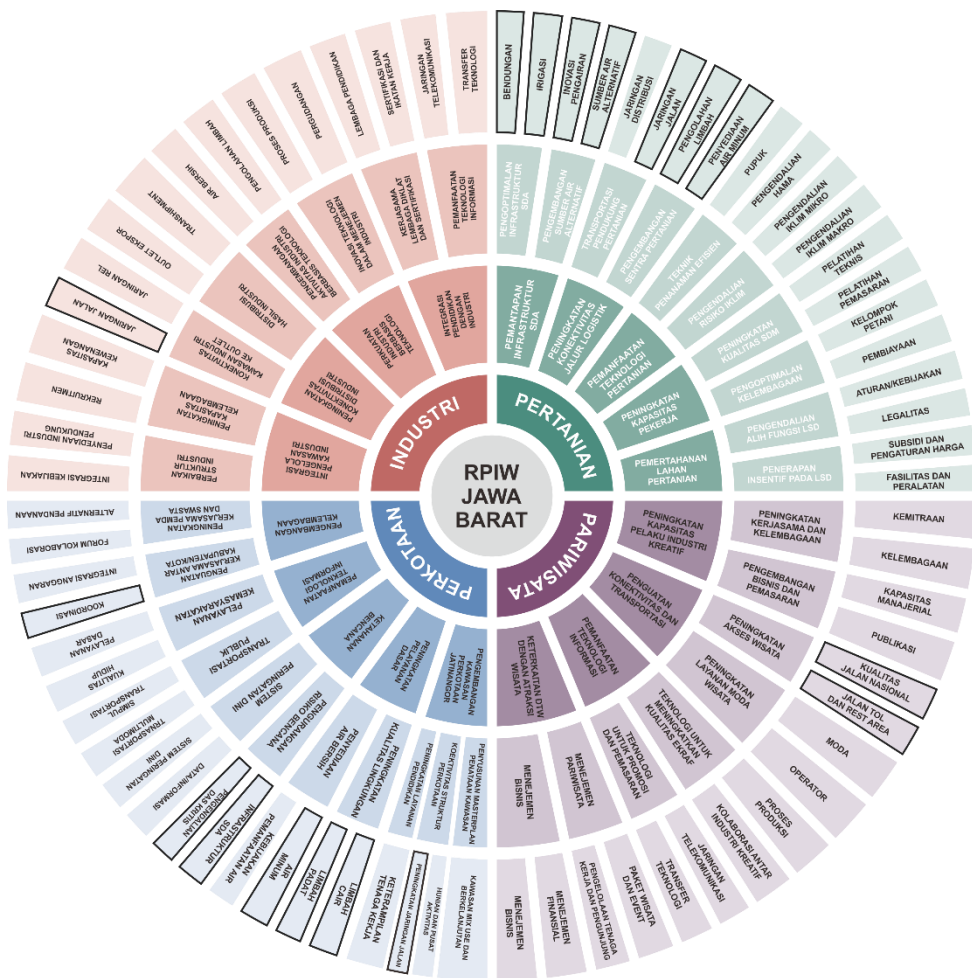
8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 4 fokus pengembangan yaitu industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan, yang dijabarkan dalam 18 *grand strategy* (fokus industri 4 *grand strategy*, fokus pertanian 5 *grand strategy*, fokus pariwisata 4 *grand strategy*, dan fokus pelayanan dasar 5 *grand strategy*). Dari 18 *grand strategy* tersebut dirinci menjadi 37 program dan 241 rencana aksi (45 sektor PU dan 196 non-PU). Ringkasan mengenai strategi, program, dan rencana aksi masing-masing fokus adalah sebagai berikut:

1. Fokus Industri, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program dan 60 rencana aksi (2 kegiatan sektor PU dan 58 non-PU);
2. Fokus pertanian, terdiri dari 5 *grand strategy*, 10 program, dan 60 rencana aksi (16 kegiatan sektor PU dan 75 non-PU);
3. Fokus pariwisata, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program, dan 50 rencana aksi (7 kegiatan sektor PU dan 43 non-PU); dan
4. Fokus pelayanan dasar, terdiri dari 5 *grand strategy*, 11 program, dan 68 rencana aksi (19 kegiatan sektor PU dan 49 non-PU)

Rencana aksi pembangunan infrastruktur terpadu lintas sektor akan diuraikan pada subbab 8.2. Berdasarkan subbab 8.2 tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi dan pendetailan secara khusus untuk infrastruktur PU. Rekapitulasi infrastruktur PU tersebut diuraikan berdasarkan kawasan prioritas pada subbab 8.2 untuk mempermudah integrasi penanganan kawasan prioritas dan rekapitulasi berdasarkan sub sektor di Kementerian PU pada subbab 8.3 dalam rangka mempermudah koordinasi internal.

Secara lengkap ringkasan rencana aksi kebutuhan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

Industrialisasi (usaha menggalakkan industri) di Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan sinergi dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, terutama dengan kementerian/lembaga non-PU. Keterpaduan dalam mengembangkan fokus industri dilakukan dengan: (1) Integrasi pengelolaan kawasan industri melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri, (2) Peningkatan konektivitas dan distribusi logistik untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran, (3) Peningkatan kualitas tenaga kerja industri melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi informasi (4) Perkuatan struktur industri berbasis teknologi dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S3-O4 Integrasi pengelolaan kawasan industri melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri	Perbaikan Struktur Industri	Kolaborasi	Integrasi Kebijakan	Penetapan Regulasi Terkait Kemudahan Perizinan, Larangan Eksport Bahan Mentah, serta Insentif Pengembangan Industri Turunan	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Pembentukan forum komunikasi lintas sektor	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD					X
			Penyediaan Industri Pendukung	Kepastian Pasar bagi Penyerapan Hasil Industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Kerjasama Pendanaan oleh Industri Utama kepada Industri Pendukung	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X				
				Meningkatkan Keterkaitan Antar Industri Utama dan Turunannya	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
	Peningkatan kapasitas kelembagaan	SDM	Rekrutmen	Peningkatan mekanisme rekrutmen pegawai badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pelatihan dan sertifikasi pegawai badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Kapasitas kewenangan	Peningkatan Keterlibatan Profesional dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Penyempurnaan aturan terkait peran badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pembagian kewenangan dalam pengembangan kawasan industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
S1-S4-O2-O3 Peningkatan konektivitas dan distribusi logistik untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran	Konektivitas kawasan industri menuju outlet	Transportasi Multimoda	Jaringan Jalan	Pembangunan Akses Tol Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	PU	BINA MARGA					
				Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan - Pangaden - Subang	Kawasan Prioritas Rebana	PU	BINA MARGA					X
				Optimalisasi Rute Kendaraan Pengiriman	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD					X
			Jaringan Rel	Pembangunan Rel KA Pelabuhan Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan Modashare Angkutan Barang Melalui Jaringan Kereta Api	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Kerjasama Pengelola Kawasan dengan Penyedia Layanan KA untuk Pengembangan <i>Dry Port</i>	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
	Distribusi hasil industri	Distribusi	Outlet Ekspor	Peningkatan Kapasitas Tampung Pelabuhan Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Optimalisasi Bandara Kertajati Sebagai Outlet Ekspor Industri Dirgantara, Pertahanan, dan Manufaktur	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Sistem Kepabeanan Berbasis Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Transshipment	Standardisasi Tingkat <i>Dwelling Time Optimal</i>	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK		K/L	SEKTOR	TAHAP I				
									2025	2026	2027	2028	2029
S2-S3-O1 Peningkatan kualitas tenaga kerja industri melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi teknologi informasi				Optimalisasi Kerjasama Antara Pelabuhan dan Bandara dengan Kawasan Industri	Kawasan Prioritas Rebana		KEMENHUB/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengadaan <i>automatic sorting machine</i>	Kawasan Prioritas Rebana		PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
	Kerjasama Lembaga Diklat dan Sertifikasi	Fasilitas Pendidikan & Sertifikasi	Lembaga Pendidikan	Pengembangan Politeknik sesuai Kebutuhan Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Lembaga Diklat Bidang Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Lembaga Keahlian Berbasis Teknologi	Kawasan Rebana	Prioritas	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi & Ikatan Kerja	Sertifikasi Keahlian Sesuai dengan Kebutuhan Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	PEMDA/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		
				Penyediaan Ikatan Kerja Lulusan Sekolah Kejuruan	Kawasan Rebana	Prioritas	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Penyediaan Pusat Penelitian Industri Bekerjasama dengan Universitas	Kawasan Rebana	Prioritas	KEMEN DIKBUD- RISTEK	TBD			X	X	X
			Jaringan Telekomuni-kasi	Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet untuk Mempermudah Pertukaran Informasi	Kawasan Rebana	Prioritas	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan Sistem Database Industri untuk Meningkatkan Kerjasama antar Unit Usaha	Kawasan Rebana	Prioritas	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Pusat Informasi Berbasis Online	Kawasan Rebana	Prioritas	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tele-komunikasi	Transfer Teknologi	Peningkatan Transfer Teknologi antara Industri Utama dengan Industri Turunannya	Kawasan Rebana	Prioritas	KEMENPERIN	TBD	X	X			
				Peningkatan Sirkulasi Tenaga Kerja antar Pelaku Usaha untuk Mengurangi Gap Informasi	Kawasan Rebana	Prioritas	PEMDA	TBD	X	X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK		K/L	SEKTOR	TAHAP I				
									2025	2026	2027	2028	2029
				Insentif bagi Perusahaan yang Melakukan Alih Teknologi kepada Industri Domestik	Kawasan Rebana	Prioritas	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
S1-03-05 Perkuatan struktur industri berbasis teknologi dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri	Pengembangan Aktivitas Industri Berbasis Teknologi	Infrastruktur Dasar	Air Bersih	Penyediaan Air Bersih melalui Sistem <i>Water Recycling System</i>	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Jaringan Distribusi yang Mengantisipasi Permukiman di Sekitar Kawasan Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Pelarangan Penggunaan Air Tanah untuk Kegiatan Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X	X		
			Pengolahan Limbah	Penyediaan Sistem Pengolahan Limbah berbasis MBRR	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Penyediaan Sistem Pengolahan Sampah berbasis RDF	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Penegakan Standar Emisi secara Ketat dalam Aktivitas Industri	Kawasan Rebana	Prioritas	KLHK	TBD	X	X	X		
	Inovasi Teknologi dalam Manajemen Industri	Manajemen Industri	Proses Produksi	Pemberian Insentif Penyediaan Barang Modal Berbasis Teknologi untuk Industri dalam Negeri	Kawasan Rebana	Prioritas	KEMEN PERIN	TBD	X	X	X		
				Otomasi Sistem <i>Fullfilment and Warehouse</i>	Kawasan Rebana	Prioritas	KOMINFO/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Mendukung Proses Transaksi	Kawasan Rebana	Prioritas	KOMINFO	TBD	X	X	X		
			Pergudangan	Pengembangan <i>Dry Port</i> pada masing-masing Kawasan untuk Meningkatkan Skala Distribusi	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X				
				Penerapan <i>Warehouse Management System</i>	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X			
				Integrasi Sistem Distribusi Berbasis <i>Vessel Traffic Management System</i>	Kawasan Rebana	Prioritas	SWASTA	TBD	X	X			

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian

Integrasi dari seluruh bidang yang terkait (kementerian/lembaga) terutama dengan pihak non-PU sangat dibutuhkan kerja sama yang harmonis dalam pengembangan sektor pertanian, karena menyangkut roda kehidupan masyarakat. Pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan: (1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian untuk mendorong efektifitas pengelolaan sektor pertanian, (2) Pemertahanan lahan pertanian melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD, (3) Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Air alternatif, (4) Pemanfaatan teknologi melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhdap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan pertanian (5) Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian.

Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S4-O4 Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian untuk mendorong efektifitas pengelolaan sektor pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan	Pelatihan Teknis	Pelatihan Aplikasi Teknologi Digital Kepada Petani Lokal	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD		X	X	X	
				Alih Pengetahuan Penggunaan Teknologi <i>Harvester</i>	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN/ KOMINFO	TBD			X	X	X
				Penambahan Tenaga Ahli Muda Lokal	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD		X	X	X	X
			Pelatihan Pemasaran	Sosialisasi Penggunaan Teknologi Informasi kepada Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD			X	X	X
				Fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Pendirian pusat-pusat pembelajaran jarak jauh	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN DIKBUD- RISTEK	TBD	X	X	X	X	X
	Pengoptimalan Kelembagaan	Kelembagaan	Kelompok Petani	Pembentukan/Pengoptimalan Kelompok Usaha Tani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I					
								2025	2026	2027	2028	2029	
S5-O3 Pemertahanan lahan pertanian melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD	Pengendalian Alih Fungsi LSD	Pengendalian		Pengembangan Sistem Informasi Data Realtime Harga dan Produksi Hasil Pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD		X	X	X	X	
				Pengembangan Program Transfer Teknologi kepada Kelompok Usaha Tani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD			X	X	X	
			Pembiayaan	Peningkatan kerjasama Kelompok Usaha dengan Lembaga Pembiayaan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD		X	X	X	X	
				Peningkatan akses perlindungan usaha pertanian melalui asuransi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X	
				Pemberian kredit mikro	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BADAN USAHA (PERBANKAN)	TBD	X	X	X	X	X	
			Aturan/ Kebijakan	Penetapan aturan lahan sawah dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X	
				Sosialisasi peraturan penetapan lahan sawah dilindungi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X	
				Penegakan aturan terkait lahan sawah yang dilindungi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD				X	X	
				Legalitas	Percepatan Penerbitan Sertifikat Lahan Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	
					Registrasi Penambahan Areal Lahan Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X
					Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I							
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Penerapan Insentif pada LSD	Penerapan Insentif	Subsidi dan Pengaturan Harga	Peningkatan Skema Kredit bagi Petani di LSD	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENKEU	TBD	X	X	X	X	X			
				Pengadaan, distribusi serta pengawasan pupuk bersubsidi di Lahan LSD	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X			
				Pemberian Sertifikasi Hijau bagi Petani yang Menerapkan Sistem Produksi Berkelanjutan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X			
			Fasilitas dan Peralatan	Penyediaan bangunan pengolahan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD				X	X			
				Pengembangan peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X						
				Pengembangan teknologi mesin pengolah hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD		X	X	X	X			
			S1-O1-O3 Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan	Pengoptimalan Infrastruktur SDA	Infrastruktur SDA	Bendungan	Pengoptimalan Bendungan untuk Irigasi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	SDA			X	X	X
							Pengendalian Banjir Kabupaten Subang	Kawasan Prioritas Rebana	PU	SDA	X	X			
							Pembangunan Bendungan Kadumanik	Kawasan Prioritas Rebana	PU	SDA			X	X	X
			Irigasi	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cileuweung	Kawasan Prioritas Rebana	PU	SDA	X							

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
Sumber Daya Air alternatif	Pengembangan Sumber Air Alternatif	Sistem Pengelolaan SDA	Inovasi Pengairan	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Seusepan	Kawasan Prioritas Rebana	PU	SDA	X				
				Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cikeusik	Kawasan Prioritas Rebana	PU	SDA	X				
				<i>Rain harvesting</i> pada wilayah yang rawan kekeringan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU/ PEMDA	SDA		X	X	X	
				Penerapan sistem tata air mikro untuk efisiensi penggunaan air pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD			X	X	X
				Penerapan sistem irigasi <i>intermittent</i> dan <i>alternate wetting and drying</i> (AWD).	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD			X	X	X
			Sumber Air Baku Alternatif	Pengembangan Situ pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	SDA	X	X	X	X	
				Pengembangan Embung pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	SDA	X	X			
				Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	SDA					
S3-S5-O1 Pemanfaatan teknologi melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan pertanian	Pengembangan Teknik Penanaman yang Efisien	Inovasi Teknik Penanaman	Pupuk	Penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Larangan penggunaan pupuk dari bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Penggunaan pupuk disesuaikan dengan karakter tanah sawah	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Pengendalian Risiko Perubahan Iklim		Pengendalian Hama	Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara inovatif	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Bibit Unggul Tahan Hama	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Penerapan Pola Diversifikasi Tanam untuk Mengurangi Risiko Hama	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD					X
		Sistem Ketahanan	Pengendalian Iklim Mikro	Penanaman Tanaman Keras untuk Meningkatkan Keragaman Ekosistem	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X
				Teknologi modifikasi cuaca pada kondisi ekstrim	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD	X	X	X	X	X
				Penggunaan Sistem Green House pada Komunitas Rentan Perubahan Iklim	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD	X	X	X	X	X
			Pengendalian Iklim Makro	Penggunaan sistem informasi perubahan iklim dan peringatan dini bencana (SIG)	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD			X	X	X
				Peningkatan Luas Kawasan Berfungsi Lindung Kabupaten Minimal 30%	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan <i>Buffer Zone</i> sebagai Pemisah antara Kawasan Pertanian dengan Kawasan Perkotaan/Industri	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X		
S2-S5-O2-O5	Infrastruktur Transportasi Pendukung Pertanian	Transportasi	Jaringan Distribusi	Pembangunan Area Kumpul Angkutan Barang	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X			
Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian				Pembangunan Pergudangan Hasil Pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD				X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Penyediaan angkutan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X
			Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kuningan	Kawasan Prioritas Rebana	PU	BINA MARGA					X
			Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS)	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
			Peningkatan jalur distribusi hasil pertanian dari tempat pengumpulan menuju pasar	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
	Pengembangan Sentra Pertanian	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	Pengolahan Limbah	Penyediaan TPS3R	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU		X	X	X	X
			Pengolahan Limbah	Penyediaan SPALD-T	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	X	X			
			Pengolahan Limbah	Penyediaan Bank Sampah	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	X	X	X	X	X
		Penyediaan Air Minum	Penyediaan Air Minum	Penyediaan SPAM IKK	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	X	X			
			Penyediaan Air Minum	Penyediaan PAMSIMAS	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	X				
			Penyediaan Air Minum	Penyediaan Jaringan Distribusi Air Minum Perpipaan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu andalan perkembangan ekonomi berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga saling terkait dengan berbagai kementerian/lembaga lain yang menanganinya (non-PU). Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan: (1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kreatif melalui peningkatan kerjasama dan kelembagaan serta pengembangan bisnis dan pemasaran, (2) Penguatan konektivitas dan transportasi untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata, (3) Peningkatan keterkaikan destinasi pariwisata melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan, dan (4) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperkuat kualitas industri dan pangsa pasar pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S1-S3-O4-O5	Peningkatan Kerjasama dan Kelembagaan	Kelompok Wisata	Kemitraan	Penetapan Regulasi untuk Pengamanan Aset Masyarakat di Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	
				Pembentukan Jaringan Kerjasama antara pelaku usaha dengan brand internasional	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan <i>Tourism Development Center</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X				
			Kelembagaan	Pembentukan Kelompok usaha kreatif untuk Pendukung Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD		X	X	X	X
				Peningkatan Keterlibatan Kelompok Wisata dalam Kalender Event Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD					X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan Bisnis dan Pemasaran	Business Plan & Pemasaran	Kapasitas Menejerial	Pembentukan Kelompok Wisata sebagai Lembaga Hukum untuk Meningkatkan Akses terhadap Program Pemerintah dan Investasi Swasta	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD		X	X	X	X
				Sertifikasi Keahlian untuk Menciptakan Standar Produk Wisata yang Berkualitas	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Kemudahan Akses Finansial bagi Pelaku Usaha	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMEN PAREKRAF	TBD	X				
				Program Magang berbayar untuk jalur menuju pekerjaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	X
			Publikasi	Penciptaan Branding Wisata dan Produk Ekonomi Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				<i>Sharing</i> konten media sosial yang relevan dengan <i>Brand</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				<i>Build Up Brand Filter</i> Pemasaran Atraksi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD			X	X	X
S2-O1-O2	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Aksesibilitas	Kualitas Jalan Nasional	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak-Cikidang – Pelabuhan ratu	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan konektivitas dan transportasi untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata			Jalan Tol dan Rest Area	Peningkatan Jalan Pelabuhan Ratu-Cisolok	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X		
				Peningkatan Jalan Surade-Ujung Genteng	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X		
				Pembangunan Jalan Tol yang didukung pintu gerbang menuju kawasan wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X		
				Pembangunan Rest Area Jalan Tol sebagai tempat promosi produk dan destinasi wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	
				Peningkatan Akses dari pintu gerbang menuju destinasi wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	
	Peningkatan Layanan Moda Transportasi Wisata	Kinerja Angkutan Massal	Moda	Pembangunan Jalan Tol Sukabumi - Padalarang	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Ciletuh	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Jawa Barat Selatan	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Peningkatan Layanan Transportasi Publik hingga ke Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
			Operator	Pengembangan pusat transit antarmoda yang mengakomodasi transportasi wisatawan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Penentuan Rute dan Simulasi Layanan <i>Direct Service/ Zona</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung,	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S1-S4-O2-O3 Peningkatan keterkaitan destinasi pariwisata melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan	Manajemen Pariwisata	Destinasi			Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan							
				Penentuan Klaster Destinasi Wisata Yang Dilayani Angkutan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Paket Wisata dan Event	Pengembangan Paket Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Sinkronisasi Informasi Agenda Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Sinkronisasi Pelaksanaan antar Event (Skala Lokal hingga Nasional)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
			Pengelolaan Tenaga Kerja dan Pengunjung	Legislasi Agen Tenaga Kerja Untuk Aktivitas Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan <i>Analog Visitor Management System</i> Wisman	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Sistem <i>Single Sign On</i> Berbasis Nomor NIK	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	X
		Manajemen Bisnis	Finansial dan Bisnis	Manajemen Finansial	Pengaturan Harga Tiket Masuk DTW	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I					
								2025	2026	2027	2028	2029	
				Pengaturan Harga Tiket Transportasi Antar DTW	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X					
				Pengaturan Kompensasi SDM Pariwisata	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X	
				Manajemen Bisnis	Menjalin Kerjasama Pengelola Kawasan dengan Swasta untuk Pengembangan Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X			
					Menjalin Kerjasama antara Pengelola Kawasan/Akomodasi dengan Agen Perjalanan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
					Mengembangkan Strategi Multiproduk untuk Meningkatkan Ketahanan terhadap Krisis Global	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				S5-O2-O3	Pengembangan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Ekonomi Kreatif	Teknologi Produksi Industri Kreatif	Proses Produksi	Pemberian Insentif Penyediaan Barang Modal Berbasis Teknologi untuk Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X
Otomasi Sistem <i>Fullfilment</i> dan <i>Warehouse</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD					X					
Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Mendukung Proses Transaksi Pemesanan Produk Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD					X	X				
Kolaborasi Antar Industri Kreatif	Kepastian Pasar untuk Penyerapan Hasil Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PEMDA			TBD	X	X	X				
	Penegakan Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Insentif Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung,	PEMDA			TBD	X	X	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Pemanfaatan Teknologi untuk Promosi dan Kegiatan Pasar	Tele-komunikasi	Jaringan Tele-komunikasi		Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan							
				Pengembangan Jaringan Kerjasama dengan Industri Kreatif Global	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	
				Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet untuk Mempermudah Promosi Hasil Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Sistem Database Industri untuk Meningkatkan Kerjasama antar Unit Usaha	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Pusat Informasi Berbasis Online	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Transfer Teknologi	Peningkatan Transfer Teknologi antara Industri Kreatif dengan Perusahaan Kreatif Global	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X				
				Peningkatan Sirkulasi Tenaga Kerja antar Pelaku Usaha untuk Mengurangi Gap Informasi	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Insentif bagi Perusahaan yang Melakukan Alih Teknologi kepada Industri Domestik	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2025

8.2.4. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar

Infrastruktur dan fasilitas kota merupakan aspek yang mendasar dalam pembentukan suatu perkotaan terutama dari segi pelayan dasar, maka dibutuhkan program-program keterpaduan infrastruktur antara PU dengan kementerian/lembaga non-PU. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar dapat dilakukan dengan: (1) Pengembangan permukiman secara polisentris melalui revitalisasi kawasan dan ekonomi bernilai tambah, (2) Peningkatan layanan dasar melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat

dan teknologi ramah lingkungan, (3) Peningkatan ketahanan terhadap bencana melalui sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana, (4) Pemanfaatan Layanan Transportasi Publik dan Kemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta (5) Pengembangan Integrasi Pengelolaan melalui penguatan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S4-S5-T1-T3 Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Bandung	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang terpadu	Pengaturan Zonasi	Kawasan Mix Use dan berkelanjutan	Penetapan pusat kegiatan sebagai pusat ekonomi, hunian dan hub transport untuk kawasan pendidikan Bandung dan Jatinangor	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Penetapan radius pengembangan yang dapat diakses pejalan kaki	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan Jalur hijau dan jalur biru untuk mendukung sirkulasi pejalan kaki	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
	Perancangan Struktur Perkotaan yang terakomodir jaringan transportasi	Penataan Kawasan Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Perkotaan	Hunian dan Pusat Aktivitas	Pengembangan Hunian Vertikal dengan Prinsip <i>Mix Used Building</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	SWASTA/PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kawasan Padat Penduduk	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Penerapan Konsolidasi Lahan sesuai dengan Rencana Pengembangan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X			
			Pengembangan Jaringan Jalan di sekitar hub-transportasi dan kawasan pendidikan	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Gedebage	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	BINA MARGA	X	X			
				Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S2-S3-T2-T3	Peningkatan layanan dasar melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pengolahan Limbah	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	BINA MARGA	X	X	X		
				Pembangunan Fo Perlintasan Kereta Api di Jl. Cimindi, Jl. Sunda, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. Laswi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Pengembangan pusat pelatihan berbasis teknologi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENPERIN	TBD		X	X	X	X
				Peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pelaku usaha	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Pelatihan berbasis online sesuai kebutuhan industri	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	
				Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Cair	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PU	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Pengembangan <i>Command Centre</i> untuk pemantauan kualitas sungai dan drainase	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
S2-S3-T2-T3	Peningkatan layanan dasar melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pengolahan Limbah	Pembentukan Satgas Pengendalian Kualitas Sungai	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X			
				Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah <i>Waste to Energy</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PU	CIPTA KARYA	X	X	X		
				Peningkatan Sistem 3R dengan melibatkan penduduk perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Peningkatan Kerjasama dengan industri terkait pemanfaatan limbah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
				Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PU	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
			Pembangunan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kawasan Prioritas Rebana	PU	CIPTA KARYA	X	X			
			Pembangunan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kawasan Prioritas Rebana	PU	CIPTA KARYA			X	X	X
			Pembangunan SPAM KIT Subang (Manyingsal)	Kawasan Prioritas Rebana	PU	CIPTA KARYA					X
			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PU	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
			Pembangunan Jaringan Perpipaan terutama pada kawasan kritis air	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PU	CIPTA KARYA	X	X	X		
			Pengembangan kolam retensi dan embung sebagai sumber air alternatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PU	SDA	X	X			
		Kebijakan Pemanfaatan Air	Regulasi Pembatasan Penggunaan Air Tanah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
			Regulasi Pengeboran Sumur	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
			Pemanfaatan idle capacity SPAM regional di kawasan perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
S2-T5	Pengurangan Risiko Bencana	Infrastruktur Pengendali Banjir	Infrastruktur SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai di wilayah DAS Citarum	PU	SDA	X	X	X	X	X
				Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan luasan RTH untuk mengurangi <i>run-off</i>	ATR/BPN/PEMDA	TBD	X	X			

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Pengendalian DAS Kritis	Pengendalian tutupan lahan pada bagian hulu sungai	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	ATR/BPN/PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Kapasitas Sungai di wilayah DAS Cimanuk	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PU/PEMDA	SDA		X	X	X	X
				Penanganan Banjir Rob pada Kawasan Perkotaan di Pesisir	Kawasan Prioritas Rebana	PU/PEMDA	SDA				X	X
	Sistem Peringatan Dini	Teknologi Informasi	Data/ Informasi	Pengembangan Pusat Informasi Kebencanaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Teknologi Untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi Bencana	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO/BNPB	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Integrasi Data Iklim <i>Real Time</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	BMKG	TBD	X	X			
		Sistem Peringatan Dini		Pengembangan Riset dan Penelitian Terkait Kebencanaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD/BNPB	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	BNPB	TBD		X	X	X	X
				Edukasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Bencana	Kawasan Prioritas Rebana	BNPB/PEMDA	TBD				X	X
S1-T5 Pemanfaatan Layanan Transportasi Publik dan Kemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Transportasi Publik	Sistem Transportasi Massal	Transportasi Multimoda	Pengembangan Rute dan Trayek Transportasi Massal Berbasis Rel	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD				X	X
				Pengembangan <i>Traffic Management System</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD		X	X	X	
				Pengembangan Transportasi berbasis listrik dan nonmotoris sebagai moda utama	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD			X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Simpul Transportasi Antarmoda	Pembangunan Fasilitas <i>Transit</i> Antar Moda Transportasi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD		X	X		
				Pembangunan pusat aktivitas ekonomi terintegrasi dengan <i>Transit Hub</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD			X	X	X
				Penerapan Sistem Elektronik dalam Pemanfaatan Transportasi Publik	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
	Pelayanan Kemasyarakatan	Sosial dan Ekonomi	Kualitas Hidup	Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis <i>online</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD				X	X
				Peningkatan Jaringan digital untuk meningkatkan akses telekomunikasi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD			X	X	X
				Integrasi Pelayanan Ketenagakerjaan melalui Sistem <i>Online</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	
			Pelayanan Dasar	Pemasangan fasilitas keamanan (CCTV; Tombol Darurat)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis <i>online</i>	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Pengembangan sistem pengaduan berbasis elektronik	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
S4-T4	Pengembangan Integrasi Pengelolaan melalui penguatan Kerjasama dan	Koordinasi dan Pendanaan	Koordinasi	Pembentukan Forum Komunikasi Perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Pembentukan Skema sharing pembangunan antarkawasan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
koordinasi antar pemangku kepentingan			Integrasi Anggaran	Pembangunan Infrastruktur Regional secara kolektif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Skema Pendanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pemberian Insentif dan Disentif dalam mendukung pembangunan antarkawasan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
				Mendorong Pengembangan Infrastruktur Melalui Pendanaan KPBU	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
	Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Pemda dan Badan Usaha	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Forum Kolaborasi	Pengembangan Forum Masyarakat	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Pengembangan Sistem Komunikasi online antara masyarkat dan pemerintah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				
				Pengembangan Kerjasama lembaga pendidikan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD-RISTEK	TBD					X
			Alternatif Pendanaan	Bantuan CSR Untuk Pengembangan Infrastruktur	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Insentif Pengelolaan CBD kepada pengembang swasta	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan Fasilitas Umum sebagai Syarat Perizinan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam menyiapkan dokumen RPIW, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan untuk:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit*

(manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasinya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW:

- a. Pemantauan tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per tahun).
- b. Pemantauan lima (5) tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per 5 tahun).

2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW:

- a. Evaluasi tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
- b. Evaluasi lima (5) tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id